



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

"Mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045"



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2025



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **19 Agustus** 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal **19 Agustus** 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN,



SUPRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR **47**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 03/1613/LS/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, telah terdapat suatu pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan mengenai sasaran, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga perencanaan pembangunan baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah berada dalam suatu kesatuan/sinergis.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, sedangkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan ini, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana

pembangunan Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 5 tahun ke depan dari tahun 2025 – 2029.

Tujuan pembentukan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- b. untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- c. untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, berakhlak mulia, mandiri, bebas maju dan sejahtera yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan; dan
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan perencanaan lainnya di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan.

RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Selain Renstra, RPJMD juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. Namun demikian, Kepala Daerah tetap memiliki ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme

perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 18



BUPATI LAMPUNG SELATAN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

NARASI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-10
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dengan RPJMN.....	I-10
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dan RPJMD Provinsi Lampung	I-11
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, Renstra-PD, RKPD, dan Renja-PD	I-12
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dengan SDGs, dan KLHS.....	I-13
1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dengan RTRW Kabupaten Lampung Selatan	I-18
1.4 Maksud dan Tujuan	I-21
1.5 Sistematika Penulisan	I-22
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-77
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-104
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-108
2.1.5 Sustainable Development Goals (SDGs)	II-141
2.1.6 Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD 2021-2026.....	II-149
2.1.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-162
2.1.8 Kerjasama Daerah	II-170
2.1.9 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota	II-171
2.1.10 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda	II-175
2.2 Gambaran Keuangan Daerah.....	II-176
2.2.1 Realisasi APBD 2020-2024	II-176
2.2.2 Proyeksi APBD Tahun 2025-2029	II-180

2.3	Permasalahan Dan Isu Strategis	II-189
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-189
2.3.2	Isu Strategis Daerah	II-203
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-1
3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
3.1.1	Visi dan Misi.....	III-1
3.1.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029	III-3
3.2	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-11
3.2.1	Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-11
3.2.2	Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-27
3.2.3	Program-Program Unggulan Nasional dan Daerah Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-93
3.3	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan lainnya	III-115
3.3.1	Keselarasan dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045	III-115
3.3.2	Keselarasan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029	III-116
3.3.3	Keselarasan dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029	III-120
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1	Program Perangkat Daerah	IV-1
4.1.1	Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan.....	IV-1
4.1.2	Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional	IV-7
4.1.3	Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	IV-16
4.1.4	Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Tematik Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029	IV-37
4.1.5	Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	IV-41
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-77

4.2.1	Target Keberhasilan Pencapaian Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 (Periode I)	IV-77
4.2.2	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV-77
4.2.3	Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)	IV-79
BAB V	PENUTUP	V-1
5.1	Pedoman Transisi	V-1
5.2	Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3	Manajemen Risiko	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Indikator yang Diselesaikan dalam Setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	I-15
Tabel I.2	Isu Strategis KLHS RPJMD	I-16
Tabel I.3	Strategi Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031	I-19
Tabel II.1	Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan	II-1
Tabel II.2	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Kabupaten Lampung Selatan	II-5
Tabel II.3	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung	II-11
Tabel II.4	Luas Eksisting Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Selatan	II-15
Tabel II.5	Kegiatan Tambang Kabupaten Lampung Selatan.....	II-18
Tabel II.6	Persentase Penutupan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan	II-20
Tabel II.7	Luasan Daya Tampung Lahan Perkecamatan	II-22
Tabel II.8	Rekapitulasi Luas Penggunaan Lahan Terhadap Daya Dukung Air.....	II-23
Tabel II.9	Daya Dukung Air Permukaan Kabupaten Lampung Selatan	II-23
Tabel II.10	Produktivitas Tanaman Padi.....	II-24
Tabel II.11	Luas Klasifikasi Fungsi Penyediaan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan.....	II-25
Tabel II.12	Data Indeks Ketahanan Pangan dan Komponen Utama	II-26
Tabel II.13	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.....	II-28
Tabel II.14	Luas Klasifikasi Penyediaan Serat/fiber di Kabupaten Lampung Selatan.....	II-28
Tabel II.15	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh).....	II-29
Tabel II.16	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Yang Digunakan Tahun 2024	II-30
Tabel II.17	Luas Klasifikasi Fungsi Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Lampung Selatan.....	II-31
Tabel II.18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lampung Selatan 2019-2024.....	II-32
Tabel II.19	Neraca Harian Pengelolaan Sampah 2023-2024 (Ton/Tahun)	II-34
Tabel II.20	Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023-2024.....	II-36
Tabel II.21	Emisi GRK dan Target Mitigasi Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung.....	II-37

Tabel II.22	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan.....	II-38
Tabel II.23	Kawasan Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana di Kabupaten Lampung Selatan.....	II-40
Tabel II.24	Data Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024.....	II-41
Tabel II.25	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2023-2024	II-42
Tabel II.26	Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lampung Selatan	II-45
Tabel II.27	Risiko Banjir di Kabupaten Lampung Selatan	II-48
Tabel II.28	Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan	II-53
Tabel II.29	Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan	II-56
Tabel II.30	Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.....	II-59
Tabel II.31	Kelas Risiko Bencana Tanah di Kabupaten Lampung Selatan	II-62
Tabel II.32	Kelas Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan.....	II-65
Tabel II.33	Kelas Risiko Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Lampung Selatan.....	II-68
Tabel II.34	Potensi Luas Risiko Multibencana per Kecamatan	II-69
Tabel II.35	Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan	II-72
Tabel II.36	Kepadatan Penduduk Lampung Selatan	II-73
Tabel II.37	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan	II-74
Tabel II.38	Proyeksi Jumlah Penduduk Lampung Selatan 2025-2045 per Kecamatan.....	II-76
Tabel II.39	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	II-76
Tabel II.40	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	II-76
Tabel II.41	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024.....	II-77
Tabel II.42	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2024	II-78
Tabel II.43	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	II-79
Tabel II.44	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	II-80
Tabel II.45	Kontribusi Sektor PDRB berdasarkan Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024	II-81
Tabel II.46	Sektor Basis berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2024.....	II-82

Tabel II.47	PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024 (Rp/Jiwa).....	II-83
Tabel II.48	Gini Rasio Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	II-84
Tabel II.49	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2024	II-86
Tabel II.50	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024.....	II-86
Tabel II.51	Rata-rata pengeluaran per Kapita Kabupaten Lampung Selatan (Ribu Rupiah/Tahun) 2019-2024	II-91
Tabel II.52	Angka Harapan Hidup di Lampung Selatan (SP 2020), 2020-2024.....	II-91
Tabel II.53	Jumlah Balita Gizi Buruk	II-92
Tabel II.54	<i>Universal Health Coverage</i> (UHC), 2019-2024.....	II-93
Tabel II.55	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025	II-94
Tabel II.56	Balita Gizi Kurang Tahun 2019-2024.....	II-94
Tabel II.57	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 2019-2024.....	II-96
Tabel II.58.	Prevalensi Stunting di Kabupaten Lampung Selatan	II-96
Tabel II.59.	Insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Selatan	II-97
Tabel II.60	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Lampung Selatan	II-98
Tabel II.61	Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun 2020-2024	II-99
Tabel II.62	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2019-2024	II-100
Tabel II.63	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020-2024	II-101
Tabel II.64	Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024.....	II-103
Tabel II.65	Angka Ketergantungan Tahun 2020-2024.....	II-105
Tabel II.66	Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan 2020-2024	II-106
Tabel II.67	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024	II-106
Tabel II.68	Indeks Reformasi Hukum	II-109
Tabel II.69	Indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik.....	II-110
Tabel II.70	Indeks Pelayanan Publik.....	II-111
Tabel II.71	Nilai Survei Penilaian Integritas	II-111
Tabel II.72	Predikat SAKIP dan RB Lampung Selatan	II-112
Tabel II.73	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	II-113

Tabel II.74	Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Tingkat Kepolisian di Kabupaten Lampung Selatan, 2021-2023	II-114
Tabel II.75	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2020-2024.....	II-118
Tabel II.76	Persentase Jumlah Masyarakat yang Minat Membaca di Perpustakaan Tahun 2020-2024	II-119
Tabel II.77	Angka Putus Sekolah dari per10.000 murid Tahun 2020-2024.....	II-119
Tabel II.78	Angka Kelulusan (AL) Tahun 2020-2024.....	II-120
Tabel II.79	Angka Kelulusan (AL) Tahun 2020-2024.....	II-121
Tabel II.80	Rasio Posyandu Per 100 Balita Tahun 2019-2023.....	II-123
Tabel II.81	Rasio Pelayanan Unit Kesehatan Per 1.000 Penduduk Tahun 2020-2024.....	II-124
Tabel II.82	Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk, 2020-2024 ...	II-124
Tabel II.83	Panjang Jalan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024 (km)	II-125
Tabel II.84	Persentase Panjang Jalan Kabupaten per Kecamatan Tahun 2024.....	II-129
Tabel II.85	Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.....	II-132
Tabel II.86	Jumlah Nilai Investasi Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) .	II-134
Tabel II.87	Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Lampung Selatan.....	II-135
Tabel II.88	Daftar Objek Wisata di Kabupaten Lampung Selatan.....	II-135
Tabel II.89	Produksi Sektor Perikanan	II-138
Tabel II.90	Produksi Sektor Pertanian Tahun 2019-2024	II-139
Tabel II.91	Produksi Sektor Peternakan	II-140
Tabel II.92	Potensi Panas Bumi di Kabupaten Lampung Selatan	II-140
Tabel II.93	Data Produksi/Ketersediaan Bahan Galian C Tahun 2020-2024.....	II-140
Tabel II.94	Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023-2024	II-142
Tabel II.95	Capaian Indikator Tujuan dari Misi 1	II-150
Tabel II.96	Capaian Indikator Sasaran dari Misi 1	II-151
Tabel II.97	Capaian Indikator Misi 2	II-152
Tabel II.98	Capaian Indikator Sasaran Misi 2.....	II-153
Tabel II.99	Capaian Indikator Tujuan Misi 3	II-155
Tabel II.100	Capaian Indikator Sasaran Misi 3.....	II-156
Tabel II.101	Capaian Indikator Tujuan dari Misi 4	II-158
Tabel II.102	Capaian Indikator Sasaran dari Misi 4.....	II-159
Tabel II.103	Capaian Indikator Tujuan dari Misi 5	II-160
Tabel II.104	Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5.....	II-161

Tabel II.105	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Tahun 2020-2024.....	II-163
Tabel II.106	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024.....	II-164
Tabel II.107	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024	II-165
Tabel II.108	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.....	II-166
Tabel II.109	Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024.....	II-168
Tabel II.110	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2020-2024.....	II-169
Tabel II.111	Indikasi Intervensi Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan.....	II-172
Tabel II.112	Proyeksi Penambahan Jumlah Sambungan Perumda Tirta Jasa	II-176
Tabel II.113	Realisasi APBD Tahun 2020-2024	II-177
Tabel II.114	Neraca Keuangan Tahun 2020-2024.....	II-179
Tabel II.115	Indikator Neraca Keuangan Lampung Selatan Tahun 2020-2024.....	II-180
Tabel II.116	Proyeksi APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026-2030.....	II-182
Tabel II.117	Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Pembiayaannya	II-189
Tabel II.118	Skor Pola Pangan Harapan dan Angka Kecukupan Gizi ..	II-235
Tabel II.119	Jumlah Lumbung dan Kapasitasnya menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.....	II-236
Tabel II.120	Isu Strategis Daerah	II-239
Tabel III.1	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2030.....	III-5
Tabel III.2	Keselarasan Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Lampung dan Program Prioritas Kabupaten Lampung Selatan.....	III-7
Tabel III.3	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.....	III-11
Tabel III.4	Penahapan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.....	III-13
Tabel III.5	Penahapan Pembangunan RPJMD	III-18
Tabel III.6	Arah Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029.....	III-18
Tabel III.7	Penyelarasan Kebijakan Nasional, Provinsi Lampung dan Daerah	III-23
Tabel III.8	Program Prioritas RPJMD	III-31
Tabel III.9	Aktivitas Belanja Daerah Berdasarkan Outcome	III-59

Tabel III.10	Kerangka Kerja Logis Makan Bergizi Gratis.....	III-94
Tabel III.11	Kerangka Kerja Logis Koperasi Merah Putih.....	III-98
Tabel III.12	Kerangka Kerja Logis Sekolah Garuda	III-100
Tabel III.13	Kerangka Kerja Logis Sekolah Rakyat	III-103
Tabel III.14	Kerangka Kerja Logis <i>Triangle Diamond</i>	III-106
Tabel III.15	Kerangka Kerja Logis Pertanian Anak Nusantara	III-113
Tabel III.16	Keselaranan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029.....	III-116
Tabel III.17	Keselaranan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung, dan RPJMD Lampung Selatan	III-117
Tabel III.18	Keselaranan Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung dan Lampung Selatan	III-117
Tabel III.19	Dukungan Terhadap Tujuh Program Unggulan Provinsi Lampung.....	III-119
Tabel III.20	Keselaranan Visi dan Misi RPJMN dan RPJMD Lampung Selatan.....	III-120
Tabel III.21	Keselaranan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Program Strategis Nasional.....	III-120
Tabel IV.1	Daftar Program Perangkat Daerah	IV-1
Tabel IV.2	Keselaranan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional	IV-7
Tabel IV.3	Keselaranan Program Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029	IV-16
Tabel IV.4	Keselaranan Program Pembangunan Daerah dengan Tematik Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029	IV-37
Tabel IV.5	Program Perangkat Daerah.....	IV-42
Tabel IV.6	Penetapan Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2030	IV-77
Tabel IV.7	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030	IV-78
Tabel IV.8	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2025-2030.....	IV-79
Tabel IV.9	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2025-2030.....	IV-84

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-10
Gambar II.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Selatan	II-3
Gambar II.2	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Selatan.....	II-4
Gambar II.3	Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Selatan	II-4
Gambar II.4	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lampung Selatan	II-6
Gambar II.5	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan.....	II-6
Gambar II.6	Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Kabupaten Lampung Selatan.....	II-7
Gambar II.7	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan	II-8
Gambar II.8	Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten.....	II-9
Gambar II.9	Peta Topografi Kabupaten Lampung Selatan	II-9
Gambar II.10	Peta Geologi Kabupaten Lampung Selatan	II-11
Gambar II.11	Peta Iklim Kabupaten Lampung Selatan.....	II-12
Gambar II.12	Peta Daya Dukung Lahan	II-21
Gambar II.13	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	II-27
Gambar II.14	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar (Fuel) Kayu dan Fosil.....	II-29
Gambar II.15	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Pelanggan PDAM Tirta Jasa Tahun 2020-2024	II-30
Gambar II.16	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020-2024	II-31
Gambar II.17	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air	II-32
Gambar II.18	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2020-2024	II-34
Gambar II.19	Peta Potensi Rawan Bencana Kabupaten Lampung Selatan	II-40
Gambar II.20	Peta Kerawanan Bencana BNPB Kabupaten Lampung Selatan	II-41
Gambar II.21	Peta Risiko Gempa Bumi.....	II-44
Gambar II.22	Potensi Luas Risiko Gempa Bumi.....	II-46
Gambar II.23	Peta Kawasan Rawan Banjir.....	II-47
Gambar II.24	Peta Risiko Banjir	II-48
Gambar II.25	Potensi Luas Risiko Banjir	II-49
Gambar II.26	Peta Potensi Tsunami Kabupaten Lampung Selatan	II-51

Gambar II.27	Peta Risiko Tsunami	II-52
Gambar II.28	Potensi Luas Risiko Bencana Tsunami per Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	II-54
Gambar II.29	Peta Risiko Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan	II-55
Gambar II.30	Potensi Luas Risiko Cuaca Ekstrem	II-57
Gambar II.31	Peta Risiko Kekeringan di Kabupaten Lampung Selatan	II-59
Gambar II.32	Risiko Kekeringan Per Kecamatan.....	II-60
Gambar II.33	Risiko Tanah Longsor.....	II-61
Gambar II.34	Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan	II-64
Gambar II.35	Potensi Luas Risiko Karhutla	II-66
Gambar II.36	Peta Risiko Gunung Api di Kabupaten Lampung Selatan	II-67
Gambar II.37	Potensi Luas Bencana Risiko Letusan Gunung Anak Krakatau	II-69
Gambar II.38	Peta Risiko Multibahaya di Kabupaten Lampung Selatan	II-71
Gambar II.39	Distribusi Penduduk Lampung Selatan.....	II-73
Gambar II.40	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	II-75
Gambar II.41	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024.....	II-88
Gambar II.42	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung dan Lampung Selatan Tahun 2020-2024.....	II-88
Gambar II.43	Indeks Modal Manusia (IMM) Provinsi Lampung Tahun 2021-2023	II-90
Gambar II.44	Persentase Capaian UHC Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.....	II-93
Gambar II.45	Jumlah Pemuda (15-29 Tahun) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024	II-102
Gambar II.46	Laju Inflasi Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional 2020-2024.....	II-107
Gambar II.47	<i>Trend</i> Capaian SAKIP dan RB Lampung Selatan.....	II-113
Gambar II.48	Capaian Skor IDSD Kabupaten Lampung Selatan, 2024	II-115
Gambar II.49	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2020-2024	II-116
Gambar II.50	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2020-2024	II-117
Gambar II.51	Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan	II-125
Gambar II.52	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024	II-127
Gambar II.53	Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat Tahun 2020-2024	II-128

Gambar II.54	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (> 40 KM/Jam) Tahun 2020-2023.....	II-128
Gambar II.55	Persentase Bahu Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Tahun 2020-2024 ..	II-129
Gambar II.56	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2020-2024	II-130
Gambar II.57	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2020-2024	II-130
Gambar II.58	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024	II-131
Gambar II.59	Peta Kewenangan Daerah Irigasi	II-133
Gambar II.60	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024	II-133
Gambar II.61	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017-2024	II-167
Gambar II.62	Gambaran Rencana Infrastruktur Strategis.....	II-175
Gambar II.63	Peta FSVA Kabupaten Lampung Selatan	II-236

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan bentuk kegiatan yang terintegrasi baik secara vertikal dan horizontal. Perencanaan pembangunan nasional menjadi acuan utama bagi pembangunan wilayah baik provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Hirarki penyelenggara negara menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden, dan dilaksanakan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian pula halnya di tingkat pemerintah daerah, menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, dan dilaksanakan secara tahunan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029, yaitu pasangan Radityo Egi Pratama-Syaiful Anwar. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029 tersebut akan segera dilantik oleh Gubernur Lampung setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)

paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah. Proses penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Proses dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan (e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD disusun sebelum penetapan kepala dan wakil kepala daerah terpilih.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD ini merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program pembangunan daerah. Rancangan Awal RPJMD kemudian dibahas dalam Forum Konsultasi Publik yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota, seluruh Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan. Rancangan yang sudah direvisi berdasarkan masukan Forum Konsultasi Publik selanjutnya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan.

Rancangan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan yang telah disetujui DPRD dikonsultasikan kepada Gubernur Lampung untuk memperoleh masukan. Rancangan RPJMD juga disampaikan kepada semua Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) PD sekaligus untuk mendapatkan *feedback* atau masukan dari PD. Seluruh masukan serta Rancangan Renstra seluruh PD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD dan menjadi Rancangan RPJMD, selanjutnya dibahas dalam

Musrenbang RPJMD. Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir RPJMD, yaitu proses penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Rancangan Perda ini kemudian dikonsultasikan kembali ke Provinsi Lampung. Hasil akhir dari seluruh proses penyusunan RPJMD ini adalah ditetapkan Perda Kabupaten Lampung Selatan tentang RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

Meninjau tahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045, menjelaskan tahapan pembangunan 2025-2029 merupakan awal dari proses upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang dengan visi “Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan dengan *tagline* “Lampung Selatan Unggul 2045”. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045 mengharapkan capaian pada akhir RPJPD terkait kemajuan Sumber Daya Manusia, kemandirian secara ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai harapan tersebut, tentu diperlukan sebuah keadaan dengan kemajuan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan pelayanan publik, serta terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan harapan capaian tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029 merupakan tahap ke-1 (awal) dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029, menjadi sebuah penentu pencapaian RPJPD Kabupaten Lampung Selatan. Pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya tentu perlu penyempurnaan agar harapan-harapan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dapat terwujud dengan baik. Untuk itu, perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan perlu dijaga kesinambungannya. Sehingga, dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 perlu memperhatikan capaian-capaian pada periode sebelumnya.

Lebih jauh, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, maka RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 diarahkan pada terwujudnya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, termasuk di dalamnya adalah perwujudan janji politik yang pernah diisyaratkan oleh Bupati dan Wakil

Bupati Lampung Selatan selama masa kampanye, yang diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029 maupun prioritas nasional dan program strategis pembangunan pemerintah pusat, serta RPJMD Provinsi Lampung 2025 - 2029 dengan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; maka substansi penyusunan materi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 diintegrasikan pula dengan tinjauan tentang RTRW Provinsi Lampung 2023-2043 dan RTRW Kabupaten Lampung Selatan 2011-2031, penyelenggaraan layanan dasar yang diamanatkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup pemerintah kabupaten, yang diselaraskan dengan Rencana Aksi Daerah yang terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta berbagai tinjauan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6537);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

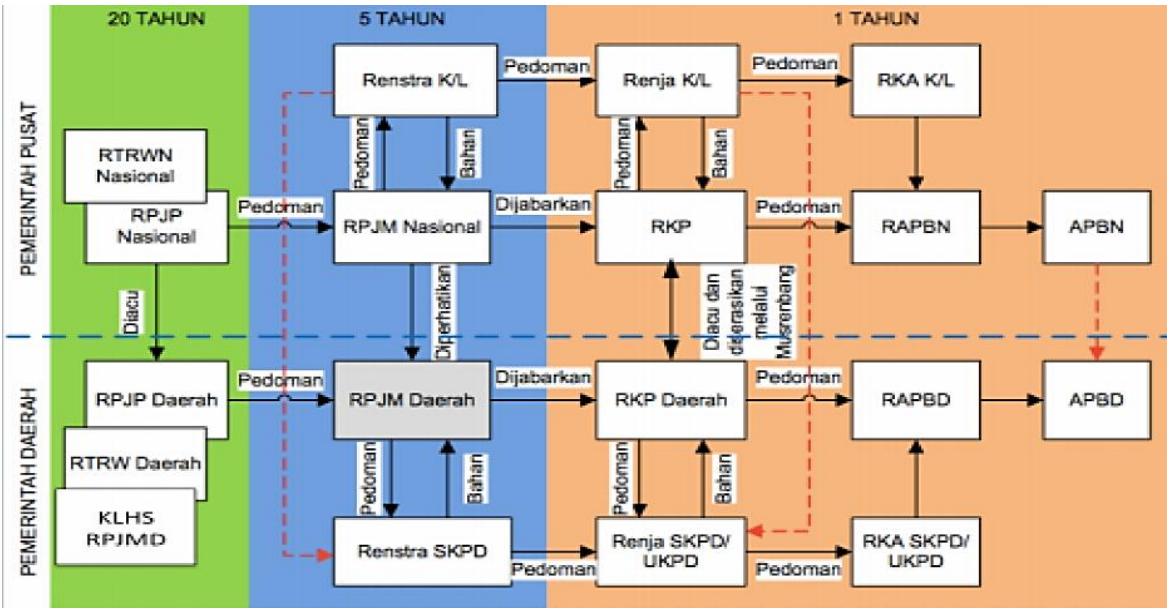
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
41. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 56 Tahun 2023 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2035 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2023 Nomor 56);
42. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2030 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025 Nomor 326);
43. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025 Nomor 327);
44. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025 Nomor 328);
45. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025 Nomor 329);
46. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025 Nomor 330);
47. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Kepemudaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025 Nomor 332).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar I.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (data diolah)

RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya diantaranya adalah RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, RTRW Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, KLHS Kabupaten Lampung Selatan, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD Kabupaten Lampung Selatan.

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Sehingga, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029 dilakukan penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan umum, prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan regional sesuai dengan karakter, kondisi serta kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Visi Misi Presiden 2025-2029 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2025-2045. RPJMN 2025-2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan visi

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi.

Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta pengembangan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil makmur.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dan RPJMD Provinsi Lampung

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, khususnya dalam mendukung visi pembangunan Provinsi Lampung. Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2025-2029 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas” dengan harapan masyarakat Lampung menjadi subyek utama dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung dengan

adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor serta sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut diharapkan Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Dalam rangka mewujudkan Visi "Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas", maka ditetapkan Misi pembangunan daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a) Misi-1 : pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif;
- b) Misi-2 : sumber daya manusia yang unggul dan produktif; dan
- c) Misi-3 : meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, Renstra-PD, RKPD, dan Renja-PD

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045 yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap awal dari RPJPD dengan sasaran pokok yang akan dicapai meliputi:

- 1. Transformasional Sosial;
- 2. Transformasional Ekonomi;
- 3. Transformasi Tata Kelola;
- 4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah; dan
- 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

B. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD dan Renja PD.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dengan SDGs, dan KLHS

A. Sustainable Development Goals (SDGs) Meta data 2

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 319 indikator sasaran dan sesuai dengan Kewenangan Kabupaten Lampung Selatan terdapat 212 indikator sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dari TPB/SDGs dengan rincian sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun
- Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- Tujuan 5 : Mencapai Kesenjangan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan

- Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua
- Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua
- Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua
- Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara
- Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan
- Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
- Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan
- Tujuan 15 : Melindungi, Memulihkan dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan Terhadap Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi (Penggurunan), Menghambat Degradasi Tanah dan Menghambat Hilangnya Keanekaragaman Hayati
- Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif Di Semua Tingkatan
- Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan analisis capaian TPB/SDGs yang telah dilakukan terhadap pencapaian target TPB/SDGs nasional oleh Kabupaten Lampung Selatan, dari 72 indikator yang ada, baru 29 indikator yang telah tercapai.

Tabel I.1 Jumlah Indikator yang Diselesaikan dalam Setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indeks	Indikator	Jumlah Indikator	Tercapai	Belum Tercapai	Belum Diketahui
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL					
	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	5	2	3	0
	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	3	2	0	1
	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	20	14	6	0
	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	5	1	0	4
	Tujuan 5 Kesenjaraan Gender	5	2	3	0
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI					
	Tujuan 9 Industri, Industri dan Infrastruktur	2	0	1	1
	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	1	1	0	0
	Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	3	3	0	0
PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN					
	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	1	0	2
	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Layak	5	3	2	0
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA					
	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat	8	5	1	2

Sumber : Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2024 (Data diolah)

Keberhasilan Capaian SDG’s Kabupaten Lampung Selatan sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Selatan, oleh karena itu partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan.

Intervensi tinggi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya pada tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, serta air bersih dan sanitasi layak.

D. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan RPJMD menjelaskan bahwa KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Sehingga, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung

Selatan Tahun 2025-2029 perlu mempertimbangkan rumusan skenario pembangunan daerah yang berasas berkelanjutan yang sebelumnya telah disusun dalam KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Selatan. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD dapat dilihat dari persandingan isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel I.2 Isu Strategis KLHS RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No Indikator	Uraian Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran
Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak belum mengalami peningkatan	Peningkatan akses layanan air bersih dan sanitasi layak untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan Perempuan, khususnya Masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
	1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak masih rendah		
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk semua	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak masih rendah	Peningkatan akses layanan air bersih dan sanitasi layak untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri	Pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua
	6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau pulau	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau pulau belum terlaksananya kapasitas prasarana yang ada dan diharapkan dapat meningkat		
	6.1.1 (c)	Proporsi Populasi yang memiliki Akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak belum mengalami peningkatan		
	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan		Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum Perempuan, serta kelompok Masyarakat rentan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No Indikator	Uraian Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran
	6.3.2 (a)	Kualitas air danau/sungai	Kualitas air Sungai belum meningkat dan belum membaik masih mengalami penurunan	Kelembagaan pengelolaan DAS dan Sumber daya air belum tertata	Pada tahun 2030, maningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan Kembali barang daur ulang yang aman secara global.
	6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum terinternalisasikan	Peningkatan tata kelola layanan sektor lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pada Tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui Kerjasama lintas batas yang tepat.
	6.5.1 (b)	Jumlah Stasiun Hidrologi dan kilmatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi	Stasiun Hidrologi dan Klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi belum mempunyai jumlah yang banyak	Peningkatan Pengendalian kualitas lingkungan untuk antisipasi perubahan iklim	
	6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tapakan Sungai dan danau	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan Sungai dan danau belum mencapai target	Kelembagaan Pengelolaan DAS dan Sumber daya air belum tertata	
	6.6.1 (c)	Jumlah Danau yang menurun Tingkat erosinya	Beberapa danau belum dikelola dan Tingkat erosinya masih tinggi	Peningkatan tata kelola sektor lingkungan	
	6.6.1 (e)	Jumlah DAS Prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS Prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya belum meningkat masih dibawah target	Kelembagaan Pengelolaan DAS dan Sumber daya air belum tertata	Pada Tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, Sungai, air tanah dan danau
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.2.1 (a)	Persentase Pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan belum tercapai untuk meningkat masih di bawah target	Peningkatan infrastruktur transportasi dan penataan ruang	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata Kawasan kumuh.
	11.5.1 (a)	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) belum mencapai target menurun	Mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana masih rendah	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana , dengan fokus melindungi orang miskin dan orang orang dalam situasi rentan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No Indikator	Uraian Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran
	11.6.1 (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani belum meningkat secara optimal	Penataan pengelolaan sampah, limbah B3, dan pencemaran lingkungan (air, udara, dan daratan)	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4.2 (a)	Jumlah yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) mengalami penurunan		Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap Kesehatan manusia dan lingkungan.
Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil belum ada dan belum terlaksana	Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintah daerah	Menyediakan akses untuk nelayan tradisional skala kecil (<i>small scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar
Mengambil Tindakan Cepat untuk mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	15.2.1 (a)	Luas Kawasan Konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas Kawasan Konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya belum tercapai untuk menjadi seluas 100.000 ha	Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan untuk antisipasi perubahan iklim	Pada Tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global

Sumber : Analisis KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Lampung Selatan, 2024

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dengan RTRW Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi penataan ruang kabupaten.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan ruang Kabupaten sebagai pintu gerbang investasi Provinsi yang berbasis pada kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, serta industri yang terintegrasi

dan bersinergi dengan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penataan ruang tersebut diwujudkan melalui strategi dan kebijakan yang dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel I.3 Strategi Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031

No	Strategi	Uraian
1	Strategi pengembangan kawasan budidaya berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan dengan tetap mempertimbangkan dan mengindahkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	a. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi lahan; b. mengintegrasikan pengembangan kawasan-kawasan pertanian dengan mengoptimalkan fungsi kawasan agropolitan; c. mendorong tumbuhnya sektor-sektor sekunder dan tersier yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan minapolitan; d. meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri;dan e. menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan sistem prasarana yang handal mendukung kegiatan pertanian, dan perikanan.
2	Strategi penciptaan peluang investasi pada kegiatan industri	a. meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri; b. mendorong pertumbuhan industri pada koridor jalan lintas pantai timur; c. mendorong pertumbuhan klaster industri yang berbasis pada sumber daya lokal; d. menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan sistem prasarana yang handal;
3	Strategi penguatan fungsi lindung kawasan lindung secara berkesinambungan dan terintegrasi	a. mengupayakan tercapainya kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan; b. memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya untuk melindungi kawasan dibawahannya, kawasan perlindungan setempat serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam; c. melindungi daerah resapan air yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; d. mengendalikan dan memantau kegiatan budidaya pada kawasan lindung dan kawasan hutan agar tetap terjaga kelestariannya; dan e. merehabilitasi kawasan hutan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan mengoptimalkan perlindungan pada kawasan bantaran sungai dan pantai.

No	Strategi	Uraian
4	Strategi pengembangan kegiatan pariwisata yang berbasis pada potensi wisata alam	a. mengembangkan aktivitas wisata pada kawasan wisata alam dengan mengoptimalkan pemanfaatan pantai dan laut; b. memanfaatkan kawasan suaka alam sebagai obyek wisata minat khusus; c. menciptakan pusat pertumbuhan jasa sebagai pusat pendukung kegiatan wisata; d. memfungsikan secara optimal dermaga dan pelabuhan yang ada sebagai komponen pendukung aktivitas wisata; e. mendorong kegiatan industri cinderamata dengan basis industri kerajinan dan rumah tangga; dan f. menjamin kelancaran akses yang mampu mendukung terbentuknya pergerakan jalur - jalur wisata.
5	Strategi penataan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah	a. mengembangkan Kota Kalianda sebagai Kota Modern untuk memicu pertumbuhan beberapa kawasan perkotaan lainnya; b. menjamin kawasan-kawasan fungsional kota yang akan dikembangkan dengan sarana dan prasarana yang handal; c. menyiapkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan; dan d. mempersiapkan sistem penyediaan perumahan dan pemukiman yang handal guna mengantisipasi pertumbuhan kawasan perkotaan.
6	Strategi penguatan pelayanan prasarana dan sarana wilayah yang mampu meningkatkan kondisi investasi dan perekonomian wilayah	a. mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang mampu menghubungkan sistem transportasi darat, laut, dan udara; b. mendorong kelancaran lalu lintas pada simpang susun (<i>interchange</i>) jalan tol pada kawasan dan pusat -pusat produksi; c. menjamin terciptanya pengelolaan persampahan yang terpadu dan terintegrasi dengan kawasan Metropolitan Bandar Lampung; d. menjamin kelancaran akses antar pulau untuk mengurangi disparitas dan mendukung kegiatan wisata; e. menjamin ketersediaan sumber daya air yang dapat mendukung kegiatan pertanian dengan mengoptimalkan jaringan irigasi, waduk dan bendungan yang handal; f. menjamin ketersediaan sumber daya energi untuk memacu tumbuhnya industri dan kawasan industri; dan g. menciptakan sistem pengelolaan limbah terpadu.

No	Strategi	Uraian
7	Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	a. mendukung penetapan kawasan pertanahan dan keamanan di Kabupaten; b. mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertanahan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan Tentara Nasional Indonesia.

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025-2029;
2. Sebagai landasan penyusunan RKPD setiap Tahun pada periode RPJMD;
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan selama periode Tahun 2025-2029;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan periode Tahun 2025-2029;
5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan periode Tahun 2025-2029; dan
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 adalah agar RPJMD:

1. Menjadi landasan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Menjadi sumber instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
4. Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
5. Menjadi dasar dalam upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
6. Memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola hukum dalam pembangunan yang berkelanjutan;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan pemerintah daerah sekitar dan pemerintah pusat;
8. Memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional; dan
9. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH
	Bab ini menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Lampung Selatan secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah, (v) gambaran keuangan daerah, (vi) permasalahan dan isu strategis.

BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
	Bab ini menguraikan program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan perangkat daerah.
BAB V	PENUTUP
	Bagian ini memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibu kota di Kecamatan Kalianda. Secara Astronomis Kabupaten Lampung Selatan terletak pada 105°14' hingga 105°45' Bujur Timur dan 5°15' hingga 6°00' Lintang Selatan, di ujung Pulau Sumatera. Mengingat letak yang demikian ini, Kabupaten Lampung Selatan terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Selat Sunda, yang menjadi pintu gerbang utama menuju Jawa via Pelabuhan Bakauheni selain itu, Kabupaten Lampung Selatan dilintasi oleh Jalan Tol Trans-Sumatera dan Jalan Lintas Selatan (JLS), yang menghubungkan wilayah Sumatera bagian selatan dengan pusat ekonomi di Jawa. Meski bukan ibukota provinsi, Lampung Selatan berdekatan dengan Bandar Lampung, sehingga sehingga Kabupaten Lampung Selatan memiliki peran strategis dalam menyangga aktivitas ekonomi dan logistik di Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 2.227,38 Km², yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.1 Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan

No	KECAMATAN	LUAS Km ²	Persentase
1	Kecamatan Bakauheni	60,15	2,70%
2	Kecamatan Candipuro	122,62	5,51%
3	Kecamatan Jati Agung	250,18	11,23%
4	Kecamatan Kalianda	176,00	7,90%
5	Kecamatan Katibung	161,97	7,27%
6	Kecamatan Ketapang	143,46	6,44%
7	Kecamatan Merbau Mataram	130,09	5,84%
8	Kecamatan Natar	261,08	11,72%
9	Kecamatan Palas	128,26	5,76%
10	Kecamatan Penengahan	106,30	4,77%
11	Kecamatan Rajabasa	120,96	5,43%

No	KECAMATAN	LUAS Km ²	Persentase
12	Kecamatan Sidomulyo	132,74	5,96%
13	Kecamatan Sragi	87,82	3,94%
14	Kecamatan Tanjung Bintang	165,94	7,45%
15	Kecamatan Tanjung Sari	96,29	4,32%
16	Kecamatan Way Panji	36,75	1,65%
17	Kecamatan Way Sulan	46,77	2,10%
	Kabupaten Lampung Selatan	2.227,38	100,00%

Sumber: Kepmendagri 100.1.1-6117 tahun 2022, diolah

Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas 50 pulau. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain pulau: Krakatau, Sebesi, Sebuku, Sertung, Panjang, Rimau Balak, Kandang Balak dan Anak Krakatau. Bila ditinjau dari segi luas keadaan alamnya, maka Kabupaten Lampung Selatan mempunyai masa depan cerah untuk lebih berkembang lagi. Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami pemekaran dua kali. Pertama berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1997 tentang pembentukan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang ke dua berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran tanggal 10 Agustus 2007, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan, maka wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung serta Teluk Lampung;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa

Terdapat sebuah pelabuhan penyeberangan Bakauheni dan Bandara Radin Inten II yang merupakan tempat transit penduduk dari Pulau Jawa dan wilayah lainnya ke Sumatera dan sebaliknya, atau dengan kata lain Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera bagian selatan. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran tropis yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Untuk mengetahui wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran tropis yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Untuk lebih mengetahui kondisi penggunaan lahan dapat di lihat pada peta tutupan lahan yang merupakan hasil interpretasi liputan lahan citra lansat. Hasil peta tutupan lahan menunjukkan sebagian besar wilayah berwarna hijau yang menunjukkan bahwa tutupan lahan masih tinggi walaupun lebih banyak pada tutupan lahan pertanian.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Secara pemetaan, peta kawasan pertanian menyebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Luasan lahan pertanian khususnya lahan pertanian sawah berada hanya pada beberapa kawasan

tertentu saja, terlihat pada warna hijau yang lebih terang. Lahan pertanian lainnya didominasi oleh lahan ladang atau perkebunan.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten Lampung Selatan dilihat dari total luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan luas lahan pertambangan yang ada. Berikut adalah gambaran mengenai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Lampung Selatan.

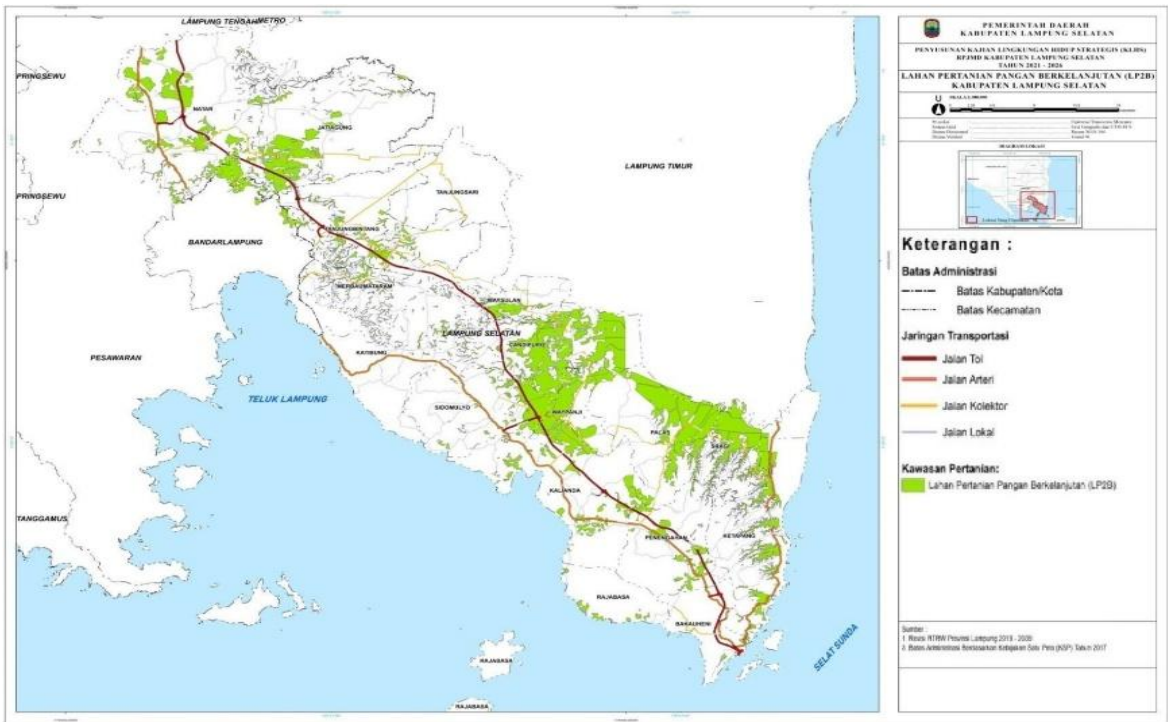
Tabel II.2 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	LP2B		Lahan Cadangan	
			Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
1	Natar	25.088	3.207	12,78	491	1,96
2	Jati Agung	16.447	3.364	20,45	515	3,13
3	Tanjung Bintang	12.972	1.638	12,63	251	1,93
4	Tanjung Sari	10.322	593	5,74	91	0,88
5	Katibung	18.862	819	4,34	125	0,66
6	Merbau Mataram	11.394	1.183	10,38	181	1,59
7	Way Sulan	4.654	1.596	34,29	245	5,26
8	Sidomulyo	15.899	2.286	14,38	350	2,20
9	Candipuro	8.490	4.470	52,66	685	8,07
10	Way Panji	3.845	1.923	50,01	295	7,67
11	Kalianda	17.982	2.483	13,81	380	2,11
12	Rajabasa	10.039	404	4,02	62	0,62
13	Palas	16.557	4.818	29,10	738	4,46
14	Sragi	9.344	2.356	25,21	361	3,86
15	Penengahan	12.496	1.855	14,84	284	2,27
16	Ketapang	10.860	2.642	24,33	405	3,73
17	Bakauheni	5.713	415	7,26	64	1,12
	Total	210.974	36.052	17,09	5.523	2,62

Sumber: Dokumen LP2B Kabupaten Lampung Selatan, 2024

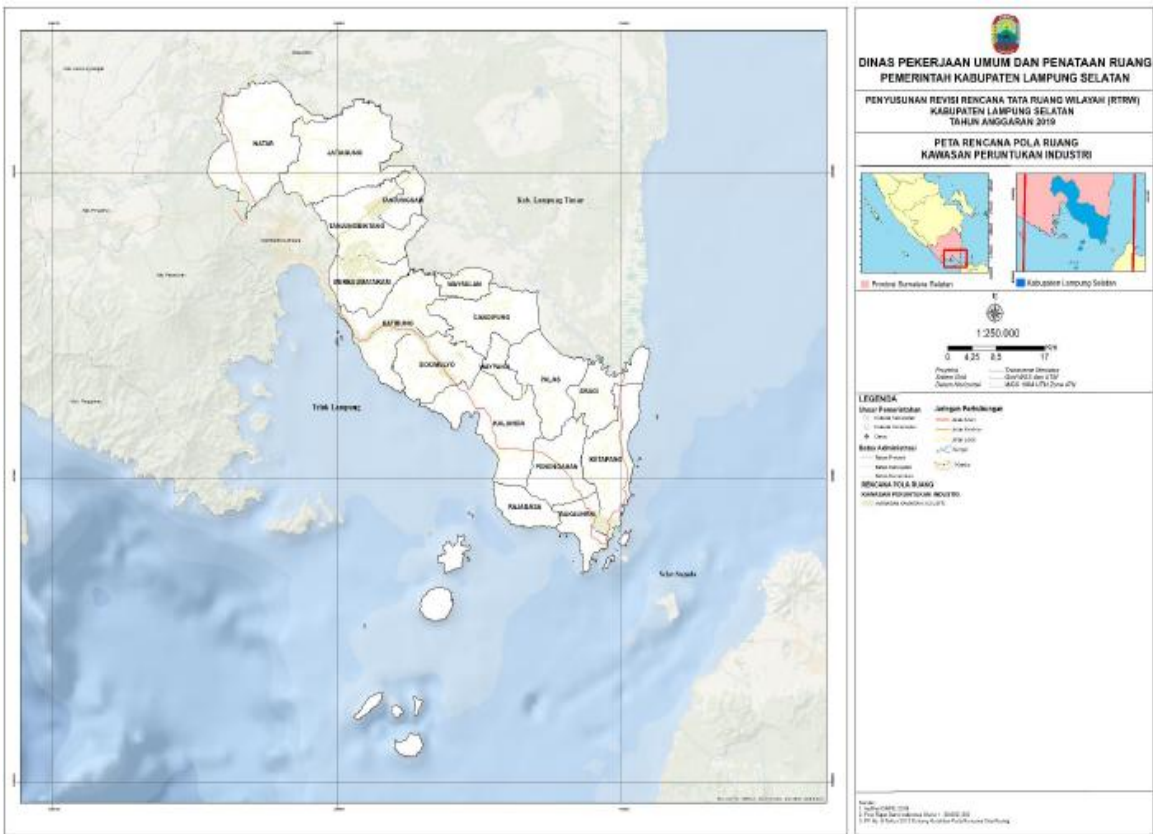
Dari Tabel di atas diketahui bahwa luasan wilayah LP2B terluas berada di Kecamatan Palas (4.818 Ha), Candipuro (4.470 Ha) dan Jati Agung (3.364 Ha). Jika berdasarkan persentase luas LP2B terhadap luas wilayah kecamatan maka persentase LP2B terbesar berada di Kecamatan Candipuro (52,66%), Way Panji (50,01%) dan Way Sulan (34,29%).

Gambar II.4 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Gambar II.5 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki posisi strategi sebagai pintu masuk dan keluar ke daerah lainnya. Kabupaten Lampung Selatan juga dilewati oleh jalan tol, hal ini berpotensi sebagai tempat

pengembangan industri. Beberapa Kawasan industri sudah banyak berkembang di Kabupaten Lampung Selatan. Pada peta Kawasan peruntukan industri, terdapat pada Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Bakauheni.

Gambar II.6 Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Kabupaten Lampung Selatan

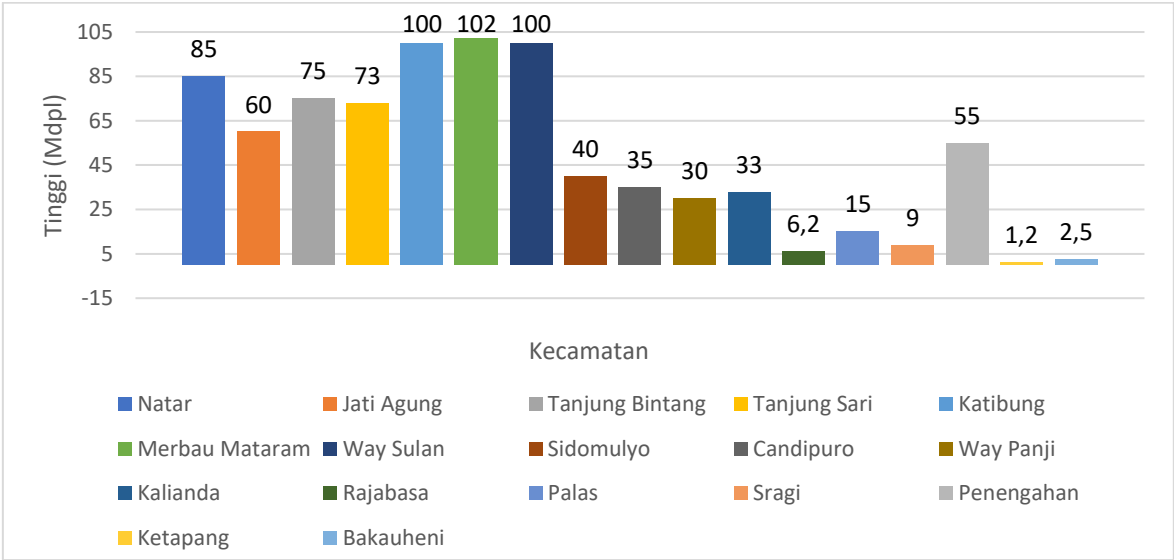


Sumber : Dokumen RTRW Provinsi Lampung 2023-2043

2.1.1.1.1 Topografi

Secara umum, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dataran dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa daerah dataran tertinggi berada di Kecamatan Merbau Mataram dengan ketinggian 102 meter dari permukaan laut (mdpl). Kecamatan Natar dan Kecamatan Katibung sebagai wilayah terbesar berada pada ketinggian masing-masing 85 mdpl dan 100 mdpl. Sedangkan kecamatan dengan dataran terendah yaitu Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni yang berada di bawah 3 mdpl. Sementara, Kecamatan Kalianda sebagai ibukota pemerintahan berada pada 33 mdpl. Berdasarkan ketinggian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan beriklim panas. Berikut disajikan secara lengkap tinggi wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

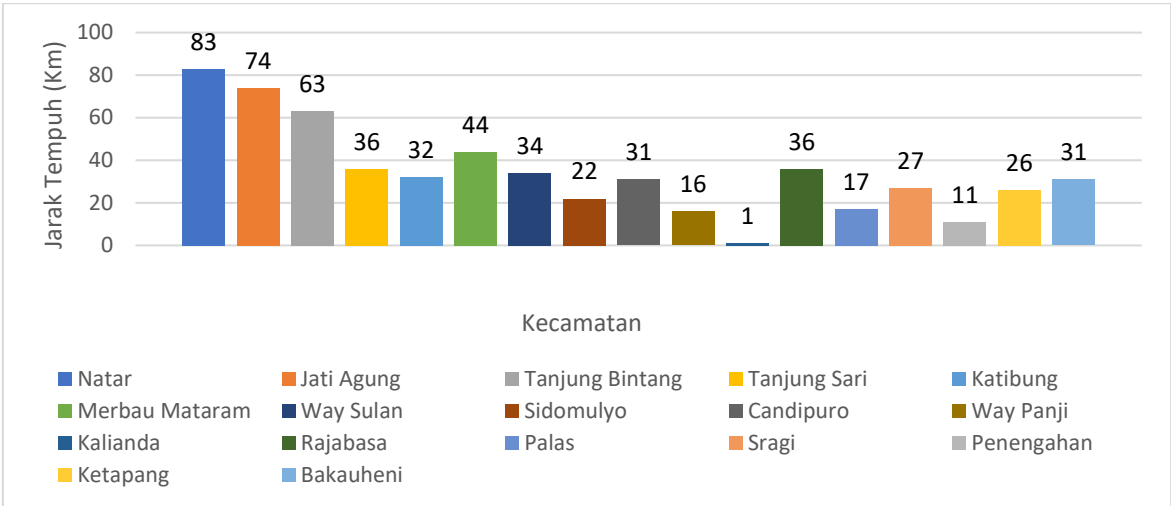
Gambar II.7 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

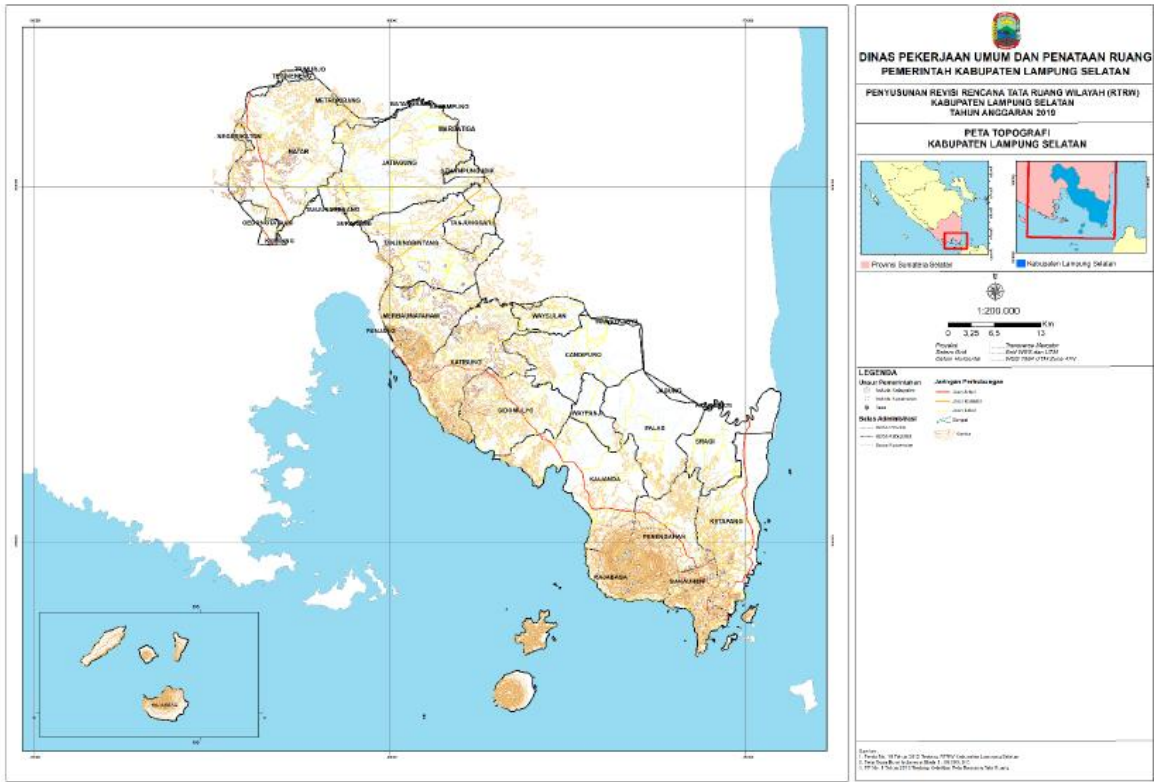
Sementara itu, jika dilihat dari jarak yang ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan ke Ibukota Kabupaten, masyarakat yang berada di Kecamatan Natar, Kecamatan Jati Agung, dan Kecamatan Tanjung Bintang harus menempuh jarak yang relatif jauh menuju ibukota kabupaten dengan jarak tempuh antara 60 - 85Km. Hal ini membuat masyarakat di kecamatan-kecamatan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama jika ingin mengurus sesuatu hal di ibukota pemerintahan kabupaten yaitu Kecamatan Kalianda. Namun, saat ini telah beroperasi jalan tol lintas sumatera yang melalui perlintasan beberapa wilayah di Lampung Selatan dari Kecamatan Bakauheni sampai Kecamatan Natar sehingga dapat memangkas waktu tempuh menuju Ibukota Kabupaten di Kecamatan Kalianda. Sedangkan jarak tempuh untuk masyarakat Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Katibung, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Bakauheni ke Kalianda relatif lebih dekat, yaitu antara 30 – 60 Km. Sementara itu, Kecamatan Penengahan merupakan kecamatan terdekat dari ibukota pemerintahan hanya menempuh jarak 11 Km untuk mencapai ibukota pemerintahan.

Gambar II.8 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Gambar II.9 Peta Topografi Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.1.1.2 Geohidrologi

Kondisi Hidrogeologi Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dari kondisi Cekungan Air Tanah (CAT). Kondisi CAT Kabupaten Lampung Selatan, termasuk ke dalam dua cekungan yaitu CAT Metro – Kotabumi dan CAT Kalianda. CAT Metro – Kotabumi memiliki rata – rata imbuhan air tanah bebas mencapai ± 11.807.000.000 m3 per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya mencapai ± 524.000.000 m3 per tahunnya. CAT Metro – Kotabumi merupakan CAT yang dominan

di Provinsi Lampung. Sedangkan CAT Kalianda memiliki rata – rata imbuhan air tanah bebas mencapai $\pm 128.000.000 \text{ m}^3$ per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya hanya $\pm 11.000.000 \text{ m}^3$ per tahunnya. CAT Kalianda hanya merupakan CAT yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan CAT Metro – Kotabumi.

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, antara lain:

- Tanah Latosol

Jenis tanah ini paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, hampir menutupi seluruh wilayah barat dan sebagian besar dari bagian tengah. Tanah latosol berwarna coklat tua sampai kemerah-merahan adalah hasil pelapukan bahan induk kompleks turfinmedier. Penyebaran pada daerah bertopografi bergelombang sampai bergunung.

- Tanah Podsolik

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk turfazam sedimen batuan plotonik yang bersifat asam, tersebar pada wilayah yang bertopografis berbukit sampai bergunung. Tanah podsolid berwarna merah kuning, juga terdapat di daerah yang luas, tersebar pada wilayah bagian utara Kabupaten Lampung Selatan.

- Tanah Andosol

Jenis tanah ini adalah pelapukan dari bahan induk kompleks turfinmedier dan basah, berwarna coklat sampai coklat kuning. Penyebarannya terdapat pada daerah bertopografis bergelombang sampai bergunung. Jenis tanah ini tidak begitu banyak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

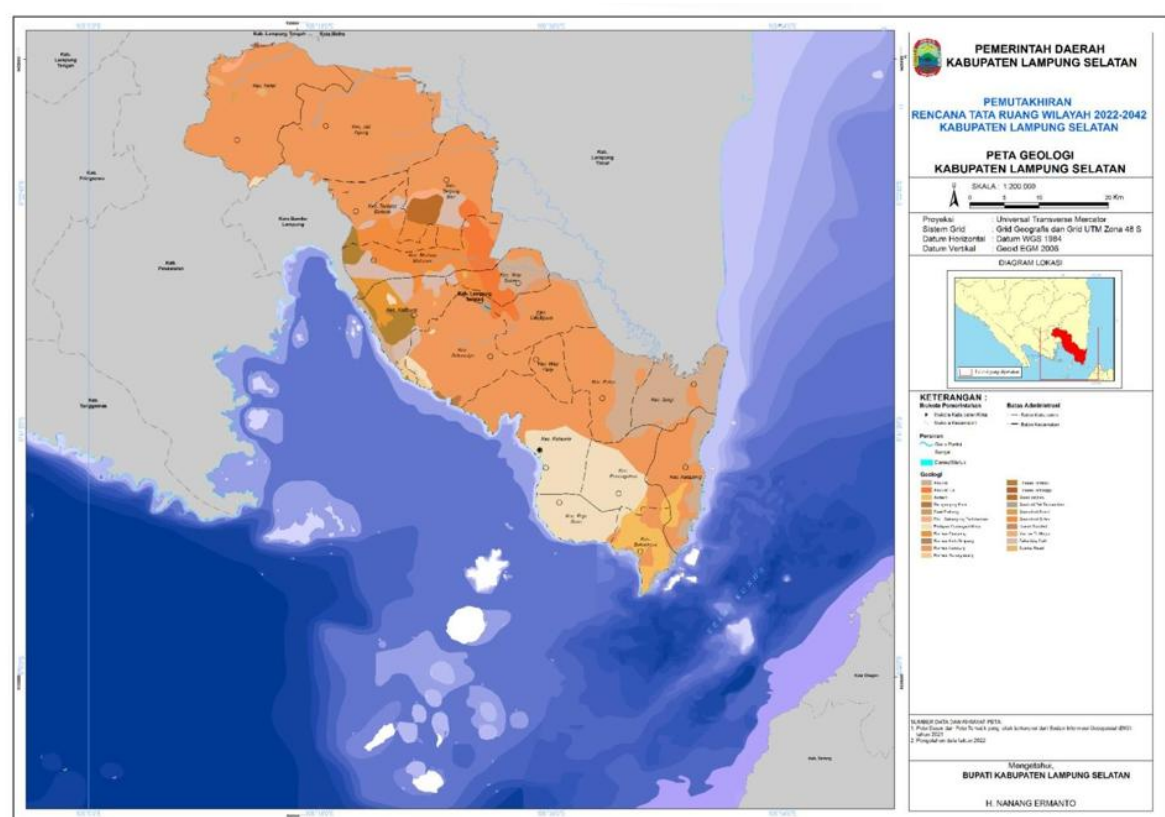
- Tanah Hidromorf

Tanah hidromorf adalah hasil pelapukan dari bahan induk sedimen turfazam sampai entermedier, berwarna kelabu, terdapat pada daerah datar sampai berombak. Tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan bagian timur.

- Tanah Alluvial

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai, terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah datar. Tersebar di daerah pantai bagian timur.

Gambar II.10 Peta Geologi Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.1.1.3 Klimatologi

Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan. Secara rinci, pengamatan unsur iklim di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.3 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung

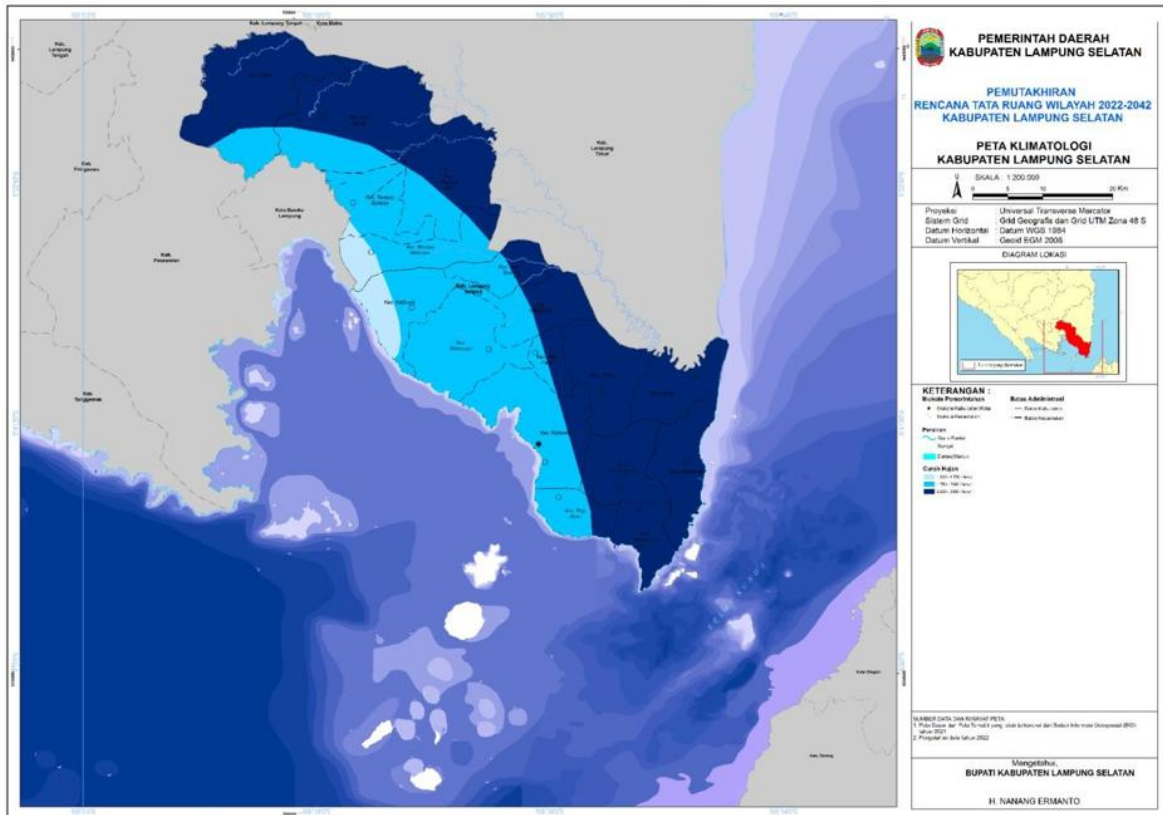
Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	26,5	82,6	2,4	999,7	343,2	22	2,9
Februari	26,5	82,3	2,8	999,8	193,3	21	3,0
Maret	26,7	83,6	2,7	1000,5	292,4	21	5,4
April	27,8	77,3	2,9	999,3	70,9	8	6,3
Mei	28,1	79,8	2,9	1000,5	185,4	12	6,0
Juni	27,4	81,7	2,9	1000,4	123,2	11	5,4
Juli	27,1	79,7	3,0	1001,3	195,4	9	5,0
Agustus	27,2	76,3	3,8	1001,9	47,5	4	7,1
September	28,0	65,4	4,1	1001,2	2,0	2	8,3

Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Oktober	29,4	65,0	4,4	1001,4	2,4	2	8,8
November	28,5	75,6	2,8	1000,0	88,0	10	5,2
Desember	28,3	76,7	2,4	1000,3	101,5	13	0,6

Sumber: Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung, 2024

Tabel di atas memberikan gambaran iklim di wilayah Lampung Selatan sepanjang tahun 2024 berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Radin Inten II. Rata-rata suhu di tahun 2024 berkisar antara 26 0C – 28 0C, dengan rata-rata kelembaban 77% - 83%. Sedangkan kecepatan angin berkisar 1,8 meter/detik – 2,6 meter/detik dengan tekanan udara rata-rata 1.000 mb. Curah hujan di wilayah Lampung Selatan sepanjang tahun 2024 sangat berfluktuatif, dimana di awal tahun pada bulan Januari curah hujan mencapai 343,2 mm dengan total mencapai 22 hari hujan turun, yang merupakan curah hujan dan jumlah hari terbesar di tahun 2024. Sementara pada bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan Agustus, curah hujan masih berkisar di atas 47,5 mm, yang menandakan akan terjadi musim kemarau. Namun mendekati akhir tahun, curah hujan kembali meningkat hingga mencapai 101,5 mm, yang merupakan bulan musim penghujan.

Gambar II.11 Peta Iklim Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.1.2.1 Keanekaragaman Hayati

A. Cagar Alam Kepulauan Krakatau

Kabupaten Lampung Selatan memiliki Cagar Alam (CA) Kepulauan Krakatau terletak pada 6°03'15" LS - 6°10'30" LS dan 105°21'15" BT - 105°27'45" BT, terletak di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kawasan ini hanya memiliki 1 (satu) desa penyangga yang merupakan pulau terdekat dari kawasan yang berpenghuni yaitu Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Kepulauan Krakatau terletak di Selat Sunda, yaitu antara ujung barat Pulau Jawa dan ujung selatan Pulau Sumatera, berupa gugus 4 Pulau yang terdiri dari Pulau Sertung, Pulau Panjang, Pulau Rakata dan Pulau Anak Krakatau, serta perairan berupa lautan di sekitarnya yang keseluruhan memiliki luasan 11.630 Ha. Secara umum vegetasi di Kepulauan Krakatau masih dalam tingkat perkembangan dan pengkayaan jenis. Pola perkembangan antara satu pulau dengan pulau lainnya sangat berbeda. Dari keempat pulau tersebut, Pulau Rakata adalah pulau yang memiliki perkembangan vegetasi yang mapan dengan tipe komunitas yang lebih lengkap.

1. Potensi Flora

Pada vegetasi pantai (*coastal vegetation*) dengan formasi *pes-caprae* (*Ipomoea pes-caprae*) tersebar mulai dari lingkungan pantai sampai ke daratan sebelum masuk ke daerah formasi hutan pantai. Jenis-jenis tumbuhan yang banyak ditemukan antara lain: *Ipomoea pes-caprae*, *Canavalia maritima*, *Vigna marina*, *Spinifex littoralis*, dan *Wedelia biflora*.

Formasi *barringtonia* ditemukan di bagian belakang formasi *pescaprae* atau terkadang sampai ke daerah pantai. Jenis yang mendominasi formasi ini adalah keben (*Barringtonia asiatica*) dan ketapang (*Terminalia catappa*). Jenis tumbuhan lain yang juga ditemukan dalam formasi ini adalah Waru (*Hibiscus tiliaceus*), Pandan (*Pandanus tectoris*), Mengkudu (*Morinda citrifolia*), *Erythrina orientalis*, *Ficus fulva*, *Ficus septica*, *Macaranga tanarius*, *Hernandia peltata*, *Calophyllum inophyllum*, *Desmodium umbellatum*, dan *Melastoma affine*.

Formasi cemara merupakan formasi peralihan antara formasi hutan pantai dengan daerah pedalaman. Jenis tumbuhan yang mendominasi

adalah Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*). Lebih dalam lagi memasuki pedalaman (*Inland vegetation*) dengan formasi hutan *neonauclea*. Untuk di Pulau Rakata sebagai Pulau tertinggi dan terluas dari keempat pulau lainnya didominasi oleh jenis *Neonauclea calycina* yang merupakan spesies dengan kanopi yang dominan di antara pohon-pohon yang ada di hutan pedalaman terutama dari elevasi antara 45 – 550 m dpl. Pada selang elevasi tersebut dijumpai adanya asosiasi dengan jenis lain seperti *Vernonia arborea*, *Macaranga tanarius*, dan *Pipturus argenteus*. Dan untuk formasi hutan pedalaman Pulau Sertung didominasi oleh 2 tipe *inland forest* yaitu didominasi *Dysoxylum densiflorum* dan *Timonius compressicaulis*. Begitu juga di Pulau Panjang didominasi oleh *Dysoxylum gaudichaudianum* dan lapisan strata ke dua banyak diisi oleh *Timonius compressicaulis*, *Ficus montana*, dan *Ficus tinctoria*. Tumbuhan bawah dan semak pada formasi hutan ini banyak diisi oleh jenis *Ficus fulva*, *Ficus septica*, *Ficus fistulosa*, *Macaranga tanarius*, *Buchanania arborescens*, *Euphorbia odoratum*, *Lantana camara*, *Saccharum spontaneum*, *Cyrtandra sulcata*, dan *Schefflera polybotrya*.

Sedangkan untuk di Pulau Anak Krakatau setelah erupsi pada tahun 2018 mengakibatkan Pulau ini menjadi tidak bervegetasi lagi yang artinya proses suksesi alami di pulau ini akan kembali dimulai.

2. Potensi Fauna

Kelompok fauna yang terdapat di Kepulauan Krakatau terdiri dari mamalia, reptil dan aves. Kelompok mamalia umumnya jenis tikus dan kalong. Kelompok reptil selain biawak, penyu hijau, penyu sisik, juga ditemukan jenis Ular sanca. Kelompok lain yang memiliki peranan cukup penting dalam kelangsungan ekosistem di Kepulauan Krakatau adalah berbagai serangga. Kupu-kupu jenis *Troides helena* yang merupakan jenis dilindungi cukup mudah ditemukan di kawasan ini. Kelompok fauna yang memiliki peranan paling penting dalam proses penyerbukan dan distribusi vegetasi yaitu kelompok aves. Keberadaan burung-burung tersebut dapat menjadi agen dalam penyebaran bagi tumbuhan. Dari berbagai penelitian tentang burung yang dilakukan di kepulauan Krakatau, setidaknya ada 63 jenis yang ditemukan. Keberadaan burung-burung tersebut dalam setiap periode pengamatannya selalu mengalami peningkatan jumlah jenis dan kelimpahannya.

Pada tahun 2013 sampai 2017, ditemukan 41 jenis burung dan 27 jenis diantaranya telah berhasil didokumentasikan. Cekakak sungai

(*Todirhampus chloris*), kekep babi (*Artamus leucorynchus*) dan merbah cerukcuk (*Pycnonotus goiavier*) menjadi jenis yang paling umum dijumpai di Kepulauan Krakatau. Populasi ketiga jenis tersebut merupakan yang terbanyak dan memiliki angka peningkatan yang signifikan setiap periode pengamatan.

3. Terumbu Karang

Secara umum ekosistem terumbu karang ditemukan di setiap perairan dari pulau. Ekosistem terumbu karang yang ditemukan di kisaran kedalaman 1 – 25 meter dan termasuk ekosistem terumbu karang laut dangkal (walau ada beberapa bagian dari perairan Kawasan mencapai kedalaman lebih dari 250 meter). Namun demikian, masing-masing ekosistem terumbu karang pada pulau-pulau tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing.

4. Permasalahan

Masalah pengawetan sangat terkait dengan masalah perlindungan dan pengamanan. Beberapa diantaranya yang menjadi penyebab antara lain adanya berbagai kegiatan manusia di dalam kawasan diantaranya nelayan yang mengambil ikan dengan menggunakan bahan peledak. Permasalahan lain yang perlu juga ditindaklanjuti adalah pengambilan ikan dan satwa jenis burung oleh masyarakat yang apabila tidak secara ketat diawasi akan menyebabkan kepunahan sumber daya di dalamnya. Selain itu adanya animo masyarakat untuk berkunjung dengan tujuan wisata ke kawasan ini yang bukan hanya dari dalam negeri melainkan juga wisatawan dari mancanegara.

B. Kawasan Hutan

Kabupaten Lampung Selatan secara umum memiliki beberapa potensi keanekaragaman hayati, diantaranya Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi. Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi tersebut tersebar di beberapa kecamatan yakni Jati Agung, Tanjung Bintang, Katibung, Merbau Mataram, Candipuro, Tanjung Sari, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, Penengahan, Srage, Kalianda dan Palas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.4 Luas Eksisting Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan	Kawasan	Luas (Ha)
Kec. Candipuro	HP Way Katibung I REG 5	15,97
Kec. Jati Agung	HP Way Gedong Wani REG 40	10613,78
Kec. Katibung	HP Way Katibung I REG 5	1007,01

Kecamatan	Kawasan	Luas (Ha)
	HP Way Katibung II REG 5	
Kec. Merbau Mataram	HP Way Gedong Wani REG 40 HP Way Katibung II REG 5	1545,66
Kec. Tanjung Bintang	HP Way Gedong Wani REG 40	1033,19
Kec. Tanjung Sari	HP Way Gedong Wani REG 40	9089,73
Kec. Katibung	HL Batu Serampok REG 17	3562,10
Kec. Merbau Mataram	HL Batu Serampok REG 17	3030,53
Kec. Way Sulan	HL Batu Serampok REG 17	81,62
Kec. Kalianda	HL Gunung Rajabasa REG 3	908,08
Kec. Penengahan	HL Gunung Rajabasa REG 3	1226,72
Kec. Rajabasa	HL Gunung Rajabasa REG 3	2996,86
Kec. Ketapang	HL Pantai Timur	184,39
Kec. Sragi	HL Pantai Timur	710,19
Kec. Katibung	HL Way Buatan REG 6	246,85
Kec. Sidomulyo	HL Way Buatan REG 6	737,69
Kec. Bakauheni	HP Pematang Taman REG 2	282,80
Kec. Ketapang	HP Pematang Taman REG 2	465,12
Kec. Penengahan	HP Pematang Taman REG 2	495,40
Kec. Ketapang	HP Way Pisang REG 1	2368,20
Kec. Palas	HP Way Pisang REG 1	1445,62
Kec. Penengahan	HP Way Pisang REG 1	2710,51
Kec. Sragi	HP Way Pisang REG 1	2113,60

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Dasar hukum Perhutanan Sosial antara lain :

- PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (BAB VI)
- Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Permen LHK No 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- Perpres 28/2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diharapkan jika diimplementasikan dengan baik, maka akan berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan (utamanya masyarakat sekitar dan dalam hutan) hingga pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan juga

perbaikan kualitas lingkungan. Konsep ini juga akan mendukung upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim yang menjadi isu global dan dampaknya sudah terpampang jelas di depan kita. Dalam tinjauan sosial, jika Perhutanan Sosial diterapkan dengan baik, maka akan berdampak pada 2 pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kelembagaan serta unit-unit usaha berbasis kelestarian lingkungan yang terbentuk. Berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, alokasi areal Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung yang sudah diterbitkan izin seluas 200.118 ha untuk 349 (Kelompok Perhutanan Sosial) KPS dengan 91.156 KK.

Kabupaten Lampung Selatan telah mendapatkan izin seluas 15.122 ha untuk 61 (Kelompok Perhutanan Sosial) KPS dengan 18.753 KK. Potensi dari setiap kelompok usaha perhutanan dapat dikelola dan dikembangkan dengan optimal dengan daya dukung yang tepat guna agar hasil dan manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan fisik dan manusia perlu didukung guna mendukung stabilitas dan mendorong percepatan peningkatan berbagai aspek kehidupan. Potensi Perhutanan Sosial di Lampung Selatan cukup tinggi untuk menopang perekonomian daerah melalui pengembangan wisata dan pertanian - pangan. Karena itu Kabupaten Lampung Selatan layak dipilih sebagai lokasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial. Program dan kegiatan ini akan diintegrasikan melalui pengembangan kawasan terpadu *Integrated Area Development* (IAD) dibangun selama 6 (enam) tahun mulai 2024 sampai dengan 2029. Tema utama pengembangan IAD Kabupaten Lampung Selatan adalah ekowisata dan agro-industri.

Konsep pembangunan dengan menggunakan pendekatan IAD melalui kluster-kluster ekowisata, *agroforestry*, pengembangan dan pengelolaan HHBK dan silvopastura ini bertujuan:

- Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam;
- Pendekatan dan pendampingan secara terpadu oleh para pihak;
- Memperkuat ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Empat (4) Kluster -kluster dalam IAD diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh OPD pengampu yang sudah dituangkan dalam Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/516.1/V.01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan

Pengembangan Wilayah Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial/*Integrated Area Development* (IAD) Kabupaten Lampung Selatan

Ruang lingkup IAD Kabupaten Lampung Selatan berupa 4 (empat) kegiatan terpadu sebagai berikut:

1. Kolaborasi pentahelix
2. Kesadaran masyarakat untuk hutan lestari dan lingkungan sehat
3. Komitmen para pihak dan
4. Inovasi pengembangan potensi usaha dan akses market player, yang meliputi:
 - Pengembangan destinasi ekowisata
 - *Agroforestry*
 - Silvopastura dan
 - Pengolahan HHBK (Kopi, Aren dan Madu).

Masterplan Integrated Area Development Lampung Selatan berdasarkan lanskap Rajabasa yang terintegrasi, interkoneksi, dan berkelanjutan atau disebut IAD Radin Intan dirancang untuk jangka waktu enam tahun (2024-2029), serta dalam implementasinya melibatkan para pihak yang terdiri dari pemerintah, LSM, kelompok masyarakat, praktisi bisnis, media dan akademisi

Dokumen Masterplan IAD Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 23 Tahun 2024 dan telah dibentuk Tim Percepatan Pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial

2.1.1.2.2 Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan meliputi logam mineral, bukan logam mineral dan batu. Jenis bahan tambang yang banyak terdapat di Kabupaten Lampung Selatan adalah jenis batuan. Adapun rincian izin kegiatan tambang yang tercatat di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Kegiatan Tambang Kabupaten Lampung Selatan

Nama Perusahaan	Lokasi Tambang	Komoditas	Luas (Ha)
CV. Batu Serasi Alam Raya	Katibung	Andesit	4,96
CV. Minatama	Sidomulyo	Zeolit	14,87
CV. Sumber Batu Niaga	Katibung	Andesit	5,00
CV. Way Lunik	Desa Pardasuka Kec. Katibung	Andesit	5,03

Nama Perusahaan	Lokasi Tambang	Komoditas	Luas (Ha)
PT. Agung Jaya Abadi	Katibung	Andesit	2,03
Pt. Asia Sumber Daya Teknologi	Tanjung Bintang	Bijih Besi	201,16
PT. Bangun Lampung Jaya	Sidomulyo	Andesit	59,55
PT. Batu Dewata Alam Persada	Ketapang	Andesit	5,00
PT. Batu Makmur	Katibung	Andesit	4,99
PT. Batu Makmur	Tanjung Bintang	Andesit	19,80
PT. Cahaya Batu Mulia	Sidomulyo	Andesit	4,26
PT. Cemerlang Bumi Makmur	Dsa Talang Baru Kec.Sidomulyo	Zeolit	5,99
PT. Gunung Patsean Sumber Rejeki	Ketapang	Andesit	14,91
PT. Hong Tai Mining	Tanjung Bintang	Bijih Besi	189,89
PT. Ilham Fajar Pratama	Desa Sabah Balau, Kec. Tanjung Bintang	Bijih Besi	8,33
PT. Sinar Batu Sakti Lestari	Katibung	Andesit	4,28
PT. Sumber Batu Berkah	Katibung	Andesit	4,96
PT. Sumber Batu Berkah	Katibung	Andesit	5,12
PT. Sumber Jaya Prima Kencana	Katibung	Andesit	19,88
PT. Wahana Bumi Selatan	Rajabasa	Andesit	4,02
PT. Wahana Bumi Selatan	Rajabasa	Pasir Besi	237,28
PT. Wastika Guna Corp	Desa Lematang Kec.Tanjung Bintang	Bijih Besi	81,69
Sdr. Basais Sutami	Katibung	Andesit	4,93
Sdr. Samsul	Katibung	Andesit	5,03
Sdr. Sdr. Sutopo	Natar	Gamping (Batu Kapur)	2,09
Total			1.062,17

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

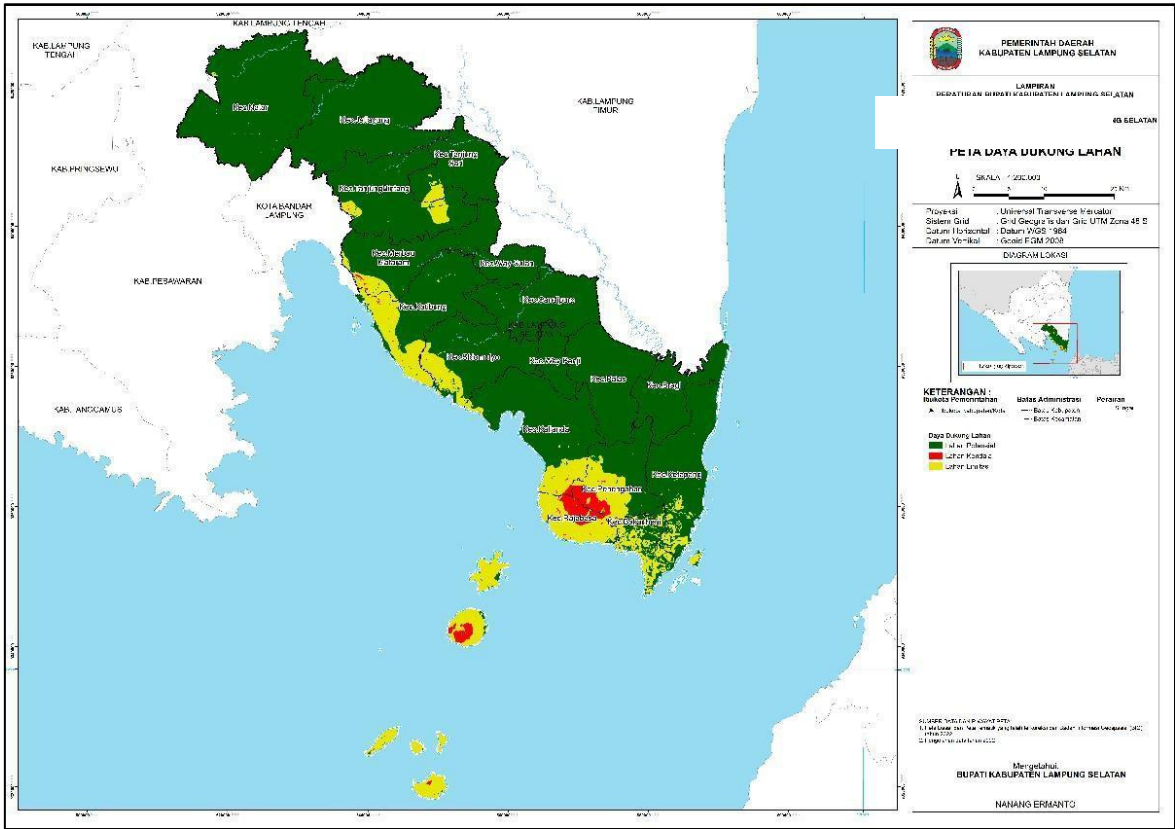
Berdasarkan pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014, daya dukung fungsi lindung mempunyai nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilainya maka fungsi lindung semakin baik, begitu pula sebaliknya, yakni semakin rendah nilainya maka fungsi lindung semakin buruk. Berikut tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung berdasarkan pedoman tersebut. Berikut adalah tabel yang digunakan untuk menghitung daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel II.6 Persentase Penutupan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan			
No	JENIS TUTUPAN LAHAN	Luas (Km ²)	Persen
1	Bandara	1,33	0,06%
2	Hutan dataran rendah	25,81	1,16%
3	Hutan mangrove sekunder	4,12	0,19%
4	Hutan sekunder	39,22	1,76%
5	Lahan kering tidak produktif	3,02	0,14%
6	Pemukiman	303,97	13,65%
7	Perkebunan	206,52	9,27%
8	Pertambangan	2,62	0,12%
9	Pertanian lahan kering	108,63	4,88%
10	Pertanian lahan kering campur	1.228,06	55,13%
11	Sawah	237,35	10,66%
12	Tambak	46,09	2,07%
13	Tanah terbuka	9,65	0,43%
14	Tubuh air	0,87	0,04%
15	Lainnya	10,12	0,45%
LUAS TOTAL		2.227,38	100,00%

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2024 (data diolah)

Secara umum daya dukung lahan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kawasan potensial, kawasan kendala, dan kawasan limitasi. Kawasan potensial adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun. Sedangkan kawasan kendala adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun, tetapi memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam proses pembangunannya yang dapat diminimalisasi dengan adanya teknologi-teknologi yang digunakan dalam proses pembangunan. Sedangkan kawasan limitasi adalah kawasan yang tidak dimungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya perkotaan yang dikarenakan keterbatasan yang ada tidak memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya perkotaan, dimana walaupun dapat dilakukan pembangunan pada beberapa kawasan akan membawa konsekuensi bagi pembangunan secara keseluruhan.

Gambar II.12 Peta Daya Dukung Lahan



Sumber : Hasil Olahan ArcGIS menyesuaikan permen PU no 20 tahun 2007, 2024

2.1.1.3.1 Daya Tampung

Analisis Daya Tampung Lahan bertujuan untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk yang dapat ditampung di suatu wilayah. Analisis ini dilakukan dengan melihat luasan dari suatu yang digunakan untuk kawasan budidaya sehingga diketahui seberapa besar kemampuan kawasan budidaya dalam menampung penduduk.

Dalam menghitung daya tampung lahan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Daya Tampung Lahan (n)} = \frac{50\% (\text{Luas Lahan Total} - 30\% \text{ Luas Lahan Budidaya})}{0,01} \times 5$$

Sumber : Permen PU No. 20 Tahun 2007

Dengan rincian yaitu:

n% = Rasio Tutupan Lahan (Asumsi 50%)

Luas Lahan = Luas Total Wilayah;

50 % = (30% Sarana dan 20% Prasarana/utilitas)

Berdasarkan rumus tersebut didapatkan daya tampung lahan tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel II.7 Luasan Daya Tampung Lahan Perkecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Proyeksi Penduduk tahun 2045	Daya Tampung
1	Natar	27.108,43	194.226	3.157.212
2	Jati Agung	23.411,77	304.349	3.533.996
3	Tanjung Bintang	17.147,87	126.304	1.245.826
4	Tanjung Sari	9.621,69	49.875	2.106.063
5	Katibung	16.201,94	106.761	1.424.612
6	Merbau Mataram	12.982,52	108.552	1.445.327
7	Way Sulan	4.566,27	35.810	839.584
8	Sidomulyo	13.249,29	118.152	2.104.621
9	Candipuro	12.359,77	76.161	1.247.997
10	Way Panji	3.672,04	25.391	491.252
11	Kalianda	17.441,02	132.780	2.144.434
12	Rajabasa	12.064,41	42.017	783.726
13	Palas	12.819,84	87.981	1.629.421
14	Sragi	8.777,20	51.853	1.254.456
15	Penengahan	10.807,50	76.830	1.378.208
16	Ketapang	14.336,68	74.288	1.340.067
17	Bakauheni	6.010,82	29.268	822.821
Total		222.579	1.640.598	26.949.623

Sumber: Keptendagri 100.1.1-6117 tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa daya tampung lahan di Kabupaten tiap Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dapat menampung jumlah penduduk sampai tahun 2045 yang akan datang.

2.1.1.3.2 Daya Dukung Air Permukaan

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan.

Menggunakan rumus :

SA = 10 x C x R x A

dengan :

- SA = Ketersediaan air permukaan
- C = Koefisien limpasan
- R = Curah hujan/tahun
- A = Luas wilayah
- 10 = Faktor konversi dari mm.ha menjadi m³

Nilai koefisien limpasan untuk permukaan didapatkan dari Tabel berikut di bawah ini :

Tabel II.8 Rekapitulasi Luas Penggunaan Lahan Terhadap Daya Dukung Air

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien	Luas x Koefisien (Ha)
1	Empang	80	0,58	46
2	Gedung/Bangunan	128	0,21	27
3	Hutan Bakau/Mangrove	37	1,00	37
4	Hutan Rimba	11.857	1,00	11.857
5	Pelabuhan Udara Domestik	79	0,18	14
6	Perkebunan/Kebun	79.747	0,46	36.684
7	Permukiman dan Tempat Kegiatan	15.753	0,18	2.836
8	Rawa	38	0,21	8
9	Sawah	34.292	0,46	15.774
10	Sawah Tadah Hujan	267	0,46	123
11	Semak Belukar	11.133	0,21	2.338
12	Tambak	4.034	0,46	1.856
13	Tanah Kosong/Gundul	1.660	0,21	349
14	Tegalan/Ladang	62.849	0,21	13.198
	LUAS TOTAL	221.953		85.146

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Koefisien Total Daya Dukung Air Permukaan = $85.146/221.953 = 0,38$
Dengan asumsi kebutuhan air kriteria WHO sebesar 1000 m³/orang/ tahun
maka ketersediaan air Kabupaten Lampung Selatan adalah:

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

dengan nilai

$$C = 0,38$$

$$R = 2024 \text{ mm/tahun (dari Tabel 3-3)}$$

$$A = 221.953 \text{ Ha}$$

Sehingga :

$$SA = 10 \times 0,38 \times 2024 \times 221.953 = 1.707.082.376 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

Untuk total kebutuhan air di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020 adalah jumlah penduduk x kebutuhan air menurut WHO sehingga : Kebutuhan air = $1.064.200 \times 1000 = 1.064.200.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$.
Hasil perhitungan daya dukung air Kabupaten Lampung Selatan per kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II.9 Daya Dukung Air Permukaan Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /thn)	Kebutuhan Air (m ³ /thn)	Selisih	Status
1	Natar	202.805.253	191.800.000	11.005.253	Belum Terlampaui
2	Jati Agung	182.846.974	128.600.000	54.246.974	Belum Terlampaui
3	Tanjung Bintang	130.705.483	82.200.000	48.505.483	Belum Terlampaui
4	Tanjung Sari	73.236.837	31.800.000	41.436.837	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/thn)	Kebutuhan Air (m3/thn)	Selisih	Status
5	Katibung	122.121.566	72.600.000	49.521.566	Belum Terlampaui
6	Merbau Mataram	101.086.749	56.500.000	44.586.749	Belum Terlampaui
7	Way Sulan	32.630.301	24.300.000	8.330.301	Belum Terlampaui
8	Sidomulyo	94.232.198	65.300.000	28.932.198	Belum Terlampaui
9	Candipuro	100.559.056	57.600.000	42.959.056	Belum Terlampaui
10	Way Panji	27.797.535	18.100.000	9.697.535	Belum Terlampaui
11	Kalianda	135.965.957	94.100.000	41.865.957	Belum Terlampaui
12	Rajabasa	95.659.761	24.800.000	70.859.761	Belum Terlampaui
13	Palas	98.631.949	60.900.000	37.731.949	Belum Terlampaui
14	Sragi	67.714.325	35.700.000	32.014.325	Belum Terlampaui
15	Penengahan	83.737.325	42.300.000	41.437.325	Belum Terlampaui
16	Ketapang	110.625.683	53.100.000	57.525.683	Belum Terlampaui
17	Bakauheni	46.725.424	24.500.000	22.225.424	Belum Terlampaui
TOTAL		1.707.082.376	1.064.200.000	642.882.376	Belum Terlampaui

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan Tabel tersebut diatas diketahui bahwa daya dukung air kabupaten Lampung Selatan belum terlampaui karena jumlah ketersediaan air > kebutuhan air dan mengalami surplus kebutuhan air sebesar yaitu selisih dari ketersediaan air dan kebutuhan air sebesar 642.882.376 m3/tahun.

2.1.1.3.3 Daya Dukung Penyediaan Pangan

Daya dukung pangan Kabupaten Lampung Selatan dilihat dari neraca beras sampai tahun 2024 mengalami surplus dengan nilai mencapai sebesar 4,09, meskipun adanya ancaman berkurangnya lahan pertanian akibat dari meningkatnya akan kebutuhan untuk lahan terbangun. Dari daya dukung pangan berdasarkan hitungan dengan menggunakan pendekatan neraca beras ternyata ketersediaan pangan beras Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 masih cukup melimpah dengan surplus 260.577 ton/tahun.

Tabel II.10 Produktivitas Tanaman Padi

Tahun	Luas Panen Tanaman Padi (Ha)	Produksi Padi (Ton)	Produktivitas Tanaman Padi (Ku/ha)
2020	54.761,95	311.668,77	56,91
2021	51.178,22	330.325,73	64,54
2022	56.393,41	339.941,87	60,28
2023	52.334,35	294.548,78	56,28
2024	57.884,73	317.834,20	54,91

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.1.3.4 Risiko dan Dampak Kerusakan Akibat Bencana

Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten yang menduduki urutan ke-53 dari kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana cukup tinggi. Berdasarkan BMKG bahwa tipologi struktur tanah dibawah wilayah Provinsi Lampung yaitu sepanjang pantai barat dan pesisir Lampung Selatan merupakan lapisan lempengan patahan yang rawan terjadi bencana gempa bumi bahkan berpotensi tsunami. Patahan atau yang biasa disebut sesar tarahan berada di Lampung Selatan sepanjang kurang lebih 40 km dari Tarahan sampai dengan Natar saat ini dalam kondisi aktif. Patahan (sesar tarahan) yang berada di Tarahan tersebut memicu gempa magnitudo (M) 3,8 pada koordinat 5.72 LS dan 105.36 BT tepatnya berada di laut pada jarak 25 km Barat Daya Lampung Selatan dengan kedalaman hiposenter 4 km (dangkal). Sampai dengan saat ini potensi akan terjadinya bencana alam akan terus mengancam keselamatan masyarakat, untuk itu diperlukannya upaya mitigasi bencana.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Fungsi penyediaan pangan di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 5 kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan tiap kelas penyediaan pangan pada tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.11 Luas Klasifikasi Fungsi Penyediaan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan

KECAMATAN	Luas (Ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
BAKAUHENI	23,19	72,00	484,70	58,37	8.780,12	9.418,37
CANDIPURO	-	-	767,37	925,58	-	1.692,95
JATI AGUNG	-	28,95	-	408,78	1.652,88	2.090,61
KALIANDA	5.423,90	584,96	3.778,44	2.146,81	7.304,31	19.238,41
KATIBUNG	24,92	88,70	218,20	5.097,49	1.373,67	6.802,97
KETAPANG	14,11	5.648,92	3.675,18	2.056,45	10.102,91	21.497,57
MERBAU MATARAM		2.696,00	-	2.166,00	-	4.862,01
NATAR	104,37	2.223,24		-	9.734,42	12.062,03
PALAS					52.791,96	52.791,96
PENENGAHAN	-	-	25.352,89	159,98	14.107,84	39.620,72
RAJABASA	-	-	-	15.268,74	-	15.268,74
SIDOMULYO	90,49	1.714,72	-	7.497,78	978,41	10.281,40
SRAGI	-	-	7.120,26	195,71	482,37	7.798,34
TANJUNG BINTANG	-	-	-	15.212,79	-	15.212,79
TANJUNG SARI	-	29,68	92,27	194,38	2.025,52	2.341,85
WAY PANJI	-	-	-	262,08	-	262,08

KECAMATAN	Luas (Ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
WAY SULAN	-	-	-	709,88	-	709,88
Grand Total	5.680,98	13.087,16	41.489,31	52.360,82	109.334,42	221.952,68
Persentase (%)	2,56	5,90	18,69	23,59	49,26	100,00

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan, 2024

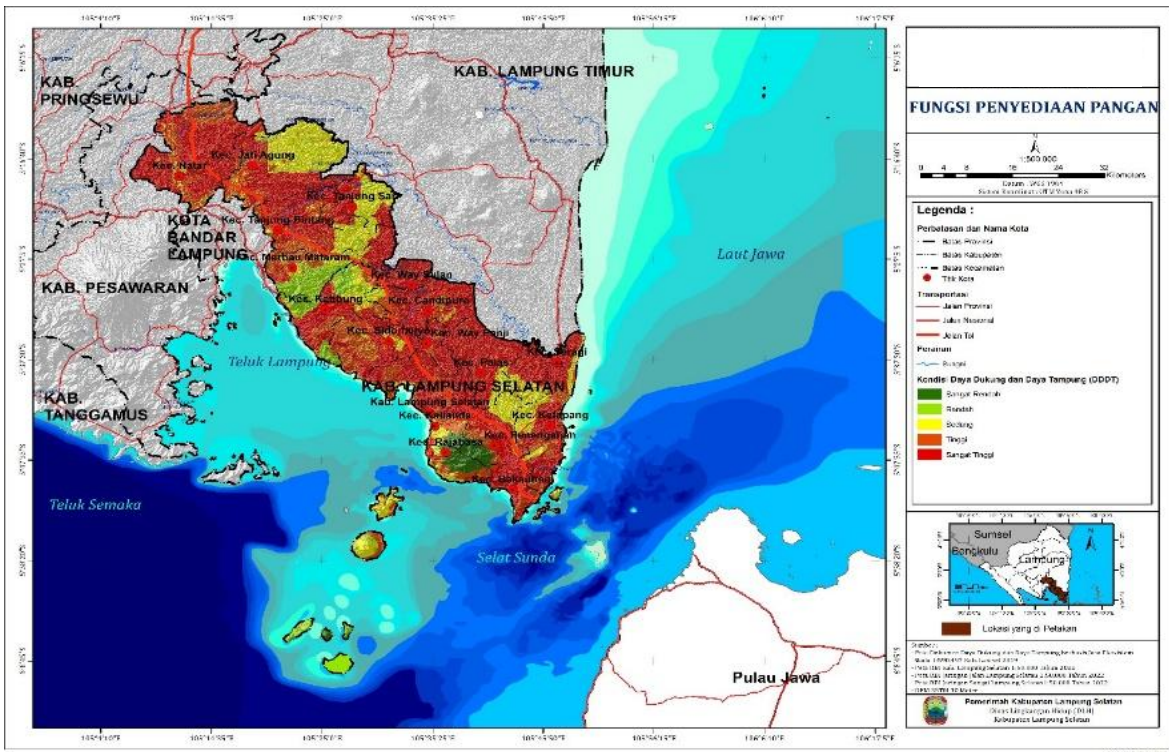
Klasifikasi Fungsi Penyediaan paling besar pada kelas sangat tinggi, hingga 49,26% atau sebesar 109.334,42 Ha. Kelas sangat tinggi dapat dilihat pada warna merah pada Gambar dibawah ini. Akan tetapi Kecamatan Palas merupakan kecamatan yang paling besar luas wilayahnya untuk jasa penyediaan pangan, luas wilayah Kecamatan Palas memiliki luas untuk kelas sangat tinggi sebesar 52.791,96 ha.

Tabel II.12 Data Indeks Ketahanan Pangan dan Komponen Utama

Tahun	IKP	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan
2020	79,23	95,33	76,30	69,34
2021	79,66	96,67	76,48	69,29
2022	81,81	95,70	77,92	74,30
2023	85,46	95,66	82,16	80,28
2024	84,46	95,97	82,56	80,64

Berdasarkan tabel indeks ketahanan pangan Lampung Selatan terkategori sangat tahan pangan dengan indeks 84,46 nomor 5 se-Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung membaik dalam hal ketahanan pangan selama periode 2020–2024. Berdasarkan data yang tersedia, berikut analisis mendalam mengenai tren Indeks Ketahanan Pangan.

Gambar II.13 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.1.4.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Kabupaten Lampung Selatan mengalami dinamika yang cukup kompleks dalam hal ketahanan pangan selama lima tahun terakhir. Data menunjukkan fluktuasi prevalensi ketidakcukupan pangan yang signifikan, dimulai dari 12,33% pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 8,79% di tahun 2021 sebagai dampak parah dari pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasokan dan menurunkan daya beli masyarakat. Situasi kembali naik di tahun 2022 dengan menjadi 13,06%, berkat kombinasi program bantuan sosial yang intensif, hasil panen yang membaik, serta revitalisasi pasar tradisional. Namun, kemajuan ini tidak bertahan lama. Tahun 2023 dan 2024 mencatat penurunan hingga 9,91%, level tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang disebabkan oleh faktor global seperti dampak perang Ukraina terhadap harga pupuk dan pangan, serta faktor lokal seperti anomali iklim El Niño yang mengganggu produksi pertanian.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa sekitar 13% populasi di Lampung Selatan saat ini menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan harian, dengan konsekuensi serius terhadap akses pangan bergizi dan potensi peningkatan kasus stunting pada balita. Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah strategis yang terbagi dalam intervensi jangka pendek

dan panjang. Untuk jangka pendek, diperlukan perluasan bantuan pangan nontunai dan operasi pasar khusus di daerah rawan pangan. Sementara untuk jangka panjang, pengembangan lumbung pangan digital, intensifikasi pertanian berbasis iklim, serta program diversifikasi pangan lokal menjadi solusi berkelanjutan. Dengan langkah-langkah terpadu ini, diharapkan prevalensi ketidakcukupan pangan dapat dikembalikan ke level di bawah 11% pada tahun 2025, sekaligus membangun sistem ketahanan pangan yang lebih resilien di masa depan.

Tabel II.13 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	12,33	8,79	13,06	7,61	9,91

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

2.1.1.4.3 Konsumsi Listrik Per Kapita

Fungsi penyediaan serat atau fiber di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 5 kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan tiap kelas penyediaan pangan pada tiap Kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.14 Luas Klasifikasi Penyediaan Serat/fiber di Kabupaten Lampung Selatan

KECAMATAN	LUAS (Ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
BAKAUHENI	-	98,25	8.478,80	839,81	1,52	9.418,37
CANDIPURO	-	605,71	85,31	95,56	139,35	1.692,95
JATI AGUNG	-	241,62	1.412,03	436,96	-	2.090,61
KALIANDA	277,00	2.770,28	6.714,06	9.190,80	286,27	19.238,41
KATIBUNG	76,55	1.775,77	1.088,33	3.862,32	-	6.802,97
KETAPANG	1.154,73	1.329,01	6.902,08	8.850,62	3.259,79	21.496,23
MERBAU MATARAM	-	1,09	1.069,75	1.135,34	2.655,82	4.862,01
NATAR	-	-	9.734,92	2.327,11	-	12.062,03
PALAS	-	-	32.920,36	-	19.871,60	52.791,96
PENENGAHAN	-	107,95	4.590,37	15.272,05	19.650,34	39.620,72
RAJABASA	-	-	15.268,74	-	-	15.268,74
SIDOMULYO	-	-	2.269,48	7.136,92	875,00	10.281,40
SRAGI	-	198,90	1.591,58	3.580,55	2.427,31	7.798,34
TANJUNG BINTANG	-	-	3.404,67	11.808,11	-	15.212,79
TANJUNG SARI	27,74	60,79	1.742,18	511,14	-	2.341,85
WAY PANJI	-	262,08	-	-	-	262,08
WAY SULAN	-	-	270,49	282,14	157,25	709,88
Grand Total	1.536,03	7.451,45	98.310,16	65.329,45	49.324,25	221.951,34
%	0,69	3,36	44,29	29,43	22,22	100,00

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Tabel II.15 Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)

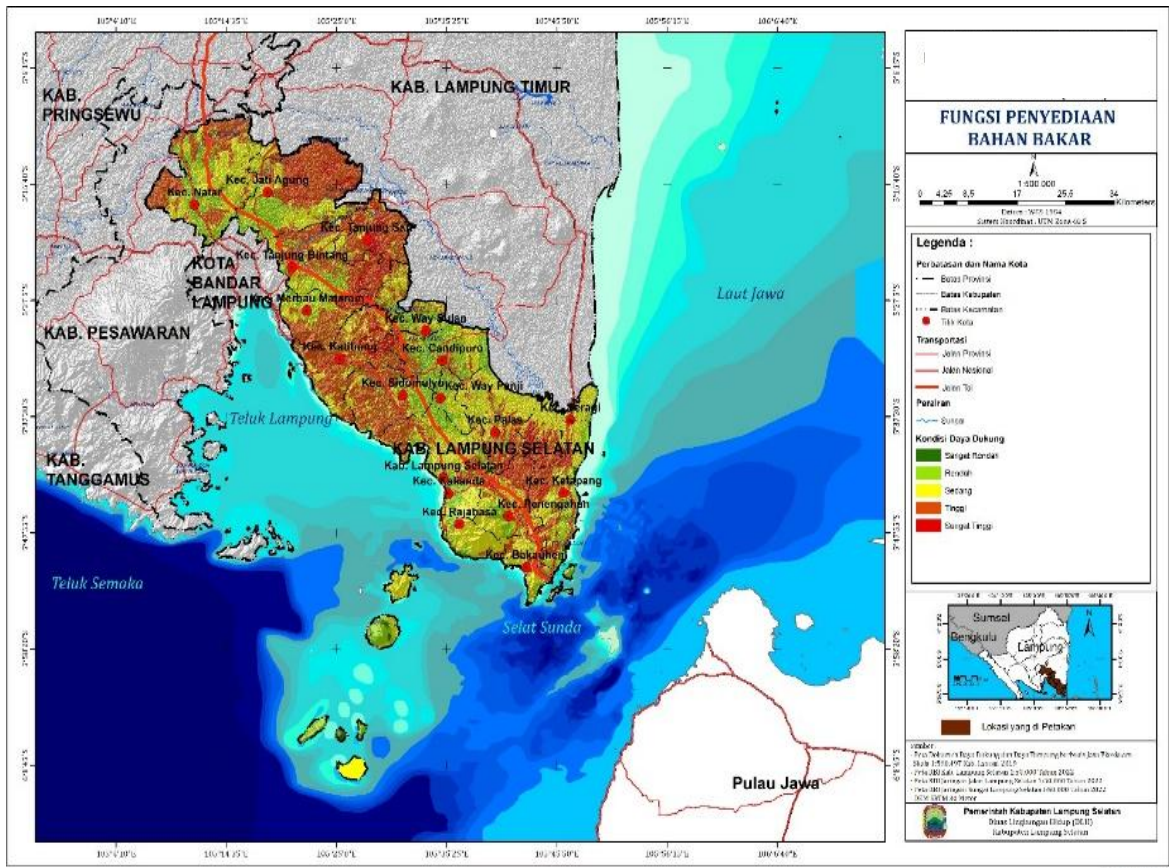
No	Indikator	Tahun				
		2020	2021*	2022	2023	2024
1	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)	*	*	81,09	82,95	83,45

*data pada tahun tersebut tidak tersedia

Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat terjadi kenaikan konsumsi listrik per kapita di Lampung Selatan sebesar 2,24 %, yakni dari 81,09 Kwh di tahun 2022 menjadi 83,45 Kwh di tahun 2024.

Gambar II.14 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar (Fuel) Kayu dan Fosil



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.1.4.4 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dalam mengakses sumber air minum utama adalah melalui sumur (mata air terlindungi) yaitu sebesar 37,36% dan air kemasan (isi ulang) sebesar 29,67%. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

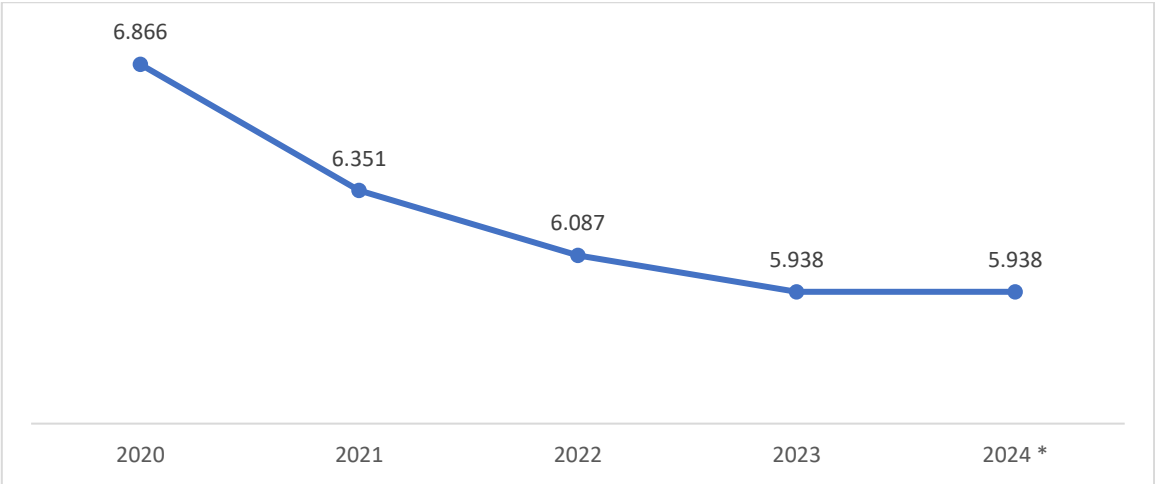
Tabel II.16 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Yang Digunakan Tahun 2024

Sumber Air Minum Utama	%
Air Kemasan/Isi Ulang	29,67
PDAM/leding	1,64
Sumur Bor/Pompa	12,87
Sumur / Mata Air Terlindungi	37,36
Sumur / Mata Air Tidak Terlindungi	19,00
Lainnya	0,18

Sumber: Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi, 2024

Dari tabel di atas, dapat juga dilihat bahwa hanya sebesar 1,64% masyarakat Lampung Selatan yang menggunakan jasa PDAM Tirta Jasa dalam memenuhi kebutuhan air minumnya. Hal ini juga didukung oleh semakin turunnya jumlah rumah tangga pelanggan PDAM Tirta Jasa selama lima tahun terakhir yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

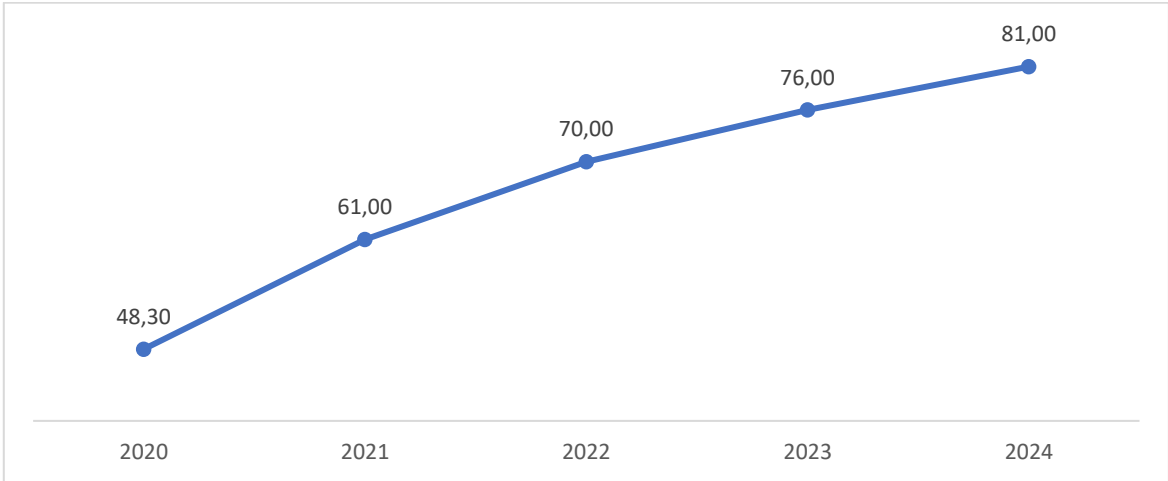
Gambar II.15 Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Pelanggan PDAM Tirta Jasa Tahun 2020-2024



Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang cukup tajam selama lima tahun terakhir, yakni pada tahun 2020 proporsinya hanya mencapai 48,3 persen, dan meningkat dengan tajam hingga tahun 2024 yang telah mencapai 81 persen.

Gambar II.16 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.1.4.5 Penyediaan Air Bersih

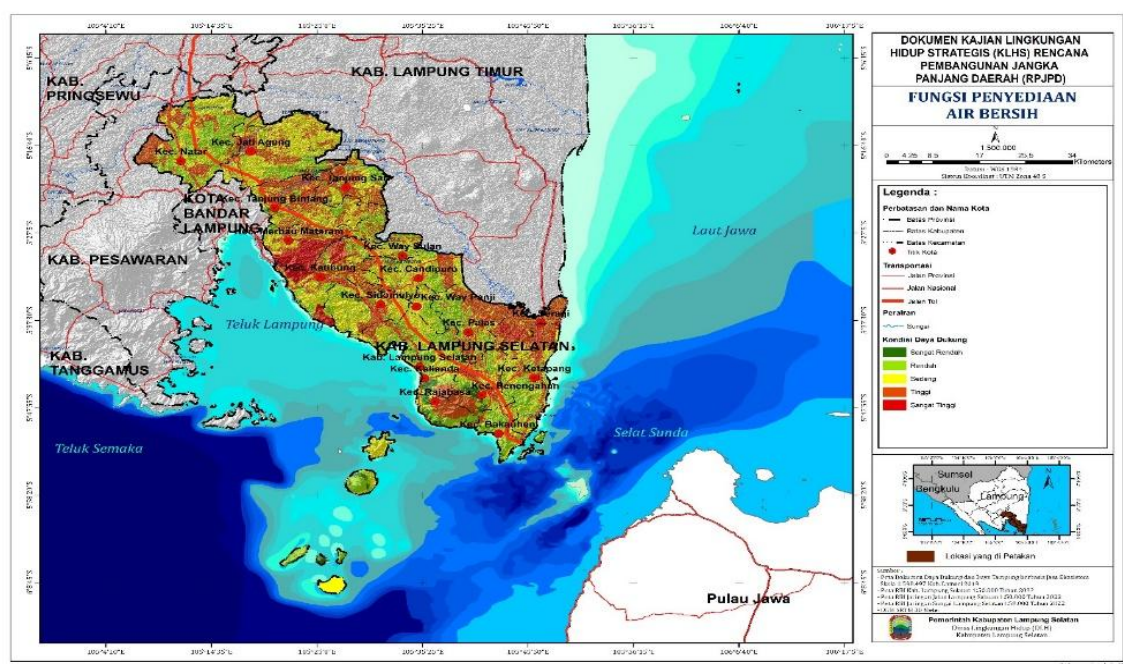
Fungsi penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 5 kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan tiap kelas penyediaan pangan pada tiap Kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.17 Luas Klasifikasi Fungsi Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Lampung Selatan

KECAMATAN	Luas (Ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
BAKAUHENI	1.335,37	124,49	6.955,88	235,99	766,65	9.418,37
CANDIPURO	88,74	821,87	713,35	2,09	66,90	1.692,95
JATI AGUNG	-	1.653,65	436,96	-	-	2.090,61
KALIANDA	2.206,82	3.207,93	5.014,36	8.036,59	-	18.465,71
KATIBUNG	1.096,99	3.805,12	1.817,08	27,54	56,25	6.802,97
KETAPANG	56,29	8.799,97	8.985,46	668,35	2.987,51	21.497,57
MERBAU MATARAM	119,22	971,32	1.115,65	-	2.655,82	4.862,01
NATAR	-	9.734,42	1.447,40	879,94	0,28	12.062,03
PALAS	-	16.739,55	16.629,14	18.589,85	833,43	52.791,96
PENENGAHAN	56,39	267,77	18.160,57	20.927,61	208,38	39.620,72
RAJABASA	-	2.585,46	12.683,28	-	-	15.268,74
SIDOMULYO	3,44	990,94	1.082,78	7.329,24	875,00	10.281,40
SRAGI	330,12	4.178,61	738,60	2.551,02	-	7.798,34
TANJUNG BINTANG	-	3.372,93	11.839,86	-	-	15.212,79
TANJUNG SARI	-	21,24	264,05	1.810,10	246,47	2.341,85
WAY PANJI	-	0,25	261,83	-	-	262,08
WAY SULAN	-	-	98,25	611,64	-	709,88
Grand Total	5.293,36	57.275,52	88.244,47	61.669,94	8.696,68	221.179,98
%	2,39	25,90	39,90	27,88	3,93	100,00

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Gambar II.17 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan gambaran persebaran kelas penyediaan air bersih dapat bahwa fungsi penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh kelas sedang sebesar 39,90% atau sebesar 88.244,47 Ha. Sedangkan untuk kelas sangat rendah hanya sebesar 2,39%, untuk kelas rendah dan kelas tinggi nilainya hampir sama yaitu 25,90% dan 27,88%.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dihitung berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan masuk ke dalam kategori cukup baik dengan nilai 69,69. Meskipun begitu, capaian IKLH dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan sehingga perlu upaya keras untuk kembali meningkatkan IKLH dalam mendukung ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Tabel II.18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lampung Selatan 2019-2024

Tahun	Nilai IKLH	Kategori
2019	62,71	Cukup Baik
2020	63,17	Cukup Baik
2021	63,67	Cukup Baik

Tahun	Nilai IKLH	Kategori
2022	61,99	Cukup Baik
2023	60,55	Cukup Baik
2024	69,69	Cukup Baik

Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Lampung Selatan, 2025

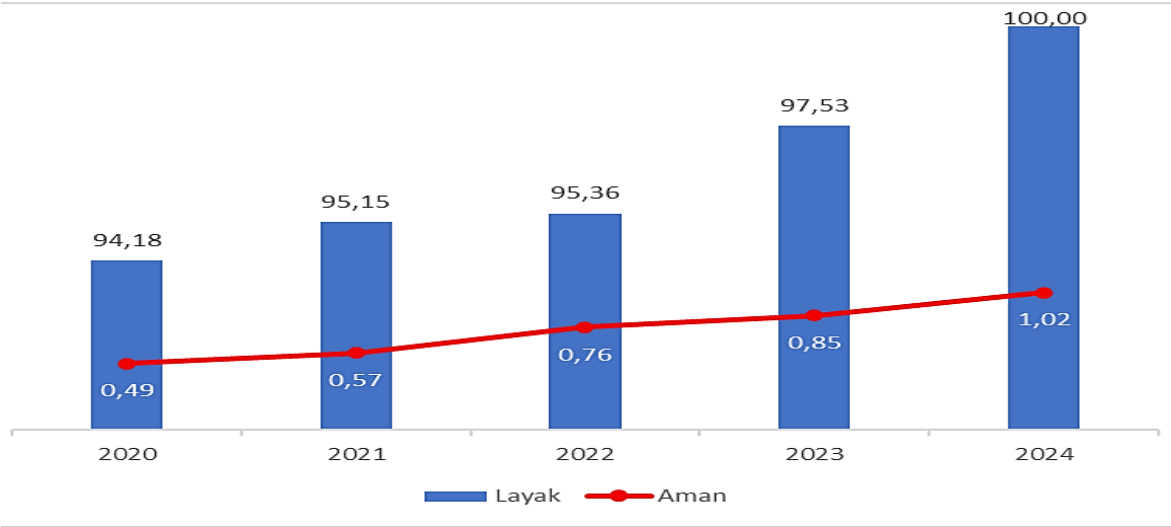
Berdasarkan data capaian IKLH Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 diatas maka dapat dilihat pencapaian untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2024 sebesar 67.04;
2. Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2024 sebesar 91.71 yang dihitung berdasarkan data pemantauan kualitas udara ambien menggunakan metode *passive sampler* yang berasal dari 4 (empat) titik lokasi pemantauan dan hanya tersebar di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kalianda dan Katibung; dan
3. Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2024 sebesar 33.52.

2.1.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Persentase rumah tangga di Kabupaten Lampung Selatan yang telah memiliki akses sanitasi selama Tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan. Akses sanitasi layak di Lampung Selatan dihitung berdasarkan kepemilikan jamban dan sudah mencapai 100,00 persen pada Tahun 2024. Sedangkan untuk akses sanitasi aman baru mencapai 1,02 persen, hal ini dihitung dari banyaknya Sambungan Rumah (SR) yang terkoneksi ke IPAL/IPLT serta menghitung Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang diakses masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menuju sanitasi aman antara lain penyediaan IPLT dan kendaraan operasional, dan sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 610 sambungan rumah (setara 2,400 jiwa) telah terlayani sambungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Gambar II.18 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.1.5.3 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Neraca harian sampah digunakan untuk mengetahui jumlah sampah yang terkelola dan jumlah sampah yang tidak terkelola. Sampah yang terkelola dihitung dari jumlah pengurangan sampah ditambah jumlah penanganan sampah, sedangkan sampah yang tidak terkelola dihitung dari potensi timbulan sampah dikurangi jumlah sampah yang dikelola. Berikut ini disajikan hasil analisis neraca harian pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel II.19 Neraca Harian Pengelolaan Sampah 2023-2024 (Ton/Tahun)

No	KETERANGAN	Volume	
		2023	2024
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	279.799,58	287.356,51
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	58,22	128,90
	Persentase pengurangan sampah	0,02	0,04
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	34,68	112,42
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0,14	0,16
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	23,40	16,32
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	135.286,08	218.954,38
	Persentase penanganan sampah	48,35	76,20
d	Pemilahan/Pengumpulan		
e	Pengangkutan *)	0,00	0,00
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)		
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)		

No	KETERANGAN	Volume	
		2023	2024
f	Pengolahan	0,00	0,00
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan <i>upcycle</i>)	0,00	0,00
	Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00	0,00
g	Pemrosesan akhir	135.286,08	218.954,38
	Jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	135.286,08	218.954,38
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	135.344,30	219.083,28
	Persentase sampah terkelola	48,37	76,24
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I – IV)	144.455,28	68.273,23
	Persentase sampah tidak terkelola	51,63	23,76

Sumber : SIPSN MenLHK, 2024

Berdasarkan data yang tersaji, Kabupaten Lampung Selatan menghasilkan timbulan sampah dengan volume yang cukup signifikan pada tahun 2024. Secara harian, potensi timbulan sampah mencapai 770,90 ton per hari, sementara akumulasi tahunannya menyentuh angka 287.356,51 ton per tahun. Data ini mengindikasikan besarnya beban pengelolaan persampahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Volume sampah sebesar ini menuntut sistem pengelolaan yang komprehensif, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir, untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Perlunya strategi pengurangan sampah di sumber (*reduce at source*) dan peningkatan daur ulang menjadi hal yang krusial untuk menangani tantangan persampahan di wilayah ini. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pengelolaan sampah terpadu dengan fokus pada: (1) peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengurangan sampah, (2) pengembangan infrastruktur daur ulang, dan (3) optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai bahan baku industri.

2.1.1.5.4 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pemerintah Lampung Selatan memberikan pelayanan sampah kepada masyarakat dengan mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA. Jenis sampah yang dilayani berupa sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah pasar maupun industri. Dalam alur proses pengelolaan sampah, sampah dikumpulkan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) lalu kemudian diangkut dan dibawa ke Tempat Pemrosesan

Akhir (TPA) yang berlokasi di Desa Lubuk Kamal Kecamatan Kalianda yang berjarak +14 km dari Pusat kota Kalianda.

Tabel II.20 Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023-2024

Tahun	TPA Tanjung Sari Natar (Ton)	TPA Lubuk Kamal Kalianda (Ton)	Jumlah (Ton)
2023	105.174,00	30.112,40	135.286,40
2024	150.573,37	68.381,09	218.954,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.6.1 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Lampung Selatan bersumber dari kegiatan Transportasi, Energi, Industri, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Pertanian. Belum ada studi terkait gas rumah kaca yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

GRK merupakan salah satu penyebab terjadinya kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi. Pada dasarnya gas rumah kaca, seperti CO₂ dan CH₄ adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi GRK ialah hasil dari lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area dan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan data KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 bahwa pertumbuhan emisi BAU baseline gas rumah kaca Provinsi Lampung dari tahun 2010 hingga tahun 2020 secara umum mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan penambahan jumlah emisi GRK hingga menjadi sebesar 27.940.994,05 ton CO₂eq di tahun 2020 atau sebesar 311% dari emisi tahun 2010 atau setara dengan emisi GRK sebanyak 21.153.489,37 ton CO₂ eq. Akan tetapi berdasarkan data hasil input pemantauan evaluasi dan pelaporan RAD GRK secara keseluruhan, aksi-aksi mitigasi yang telah dilaksanakan di berbagai sektor terkait di Provinsi Lampung pada tahun 2017 dapat mencapai rencana target mitigasi yaitu sebesar 7.180.869 ton CO₂ equivalen, sehingga total penurunan emisi yang dicapai adalah sebesar 14.590.292,79 ton CO₂ equivalen yang disumbang paling besar oleh sektor energi. Berikut ialah detail emisi GRK BAU tahun 2010 dan 2020 serta jumlah penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Lampung dari tahun 2019.

Tabel II.21 Emisi GRK dan Target Mitigasi Penurunan Emisi GRK
Provinsi Lampung

SEKTOR	BAU 2010	PEP 2012 (ton CO2e)	PEP 2013 (ton CO2e)	PEP 2014 (ton CO2e)	PEP 2015 (ton CO2e)	PEP 2016 (ton CO2e)
1. LANDBASE	4.614.965,92	439.682,00	483.897,00	207.584,00	614.925,06	307.416,07
Pertanian	4.034.415,23	0	0*	0*	0*	0*
*Kehutanan &Lahan	580.550,69	439,682	483,897	207,584	614,925	307,416
2. ENERGI	2.228.266,30	1.643.554,80	10.251,27	21.158,05	1.909.911,8 2	20.177.806,4 3
*Energi	597.798,30	1.628.592,70	82,85	82,85	1.885.422,41	20.161.588,15
*Transport	1.630.465	14.662,10	10.168,42	21,075,20	23.499,41	16.248,28
3. PENGOLAHAN LIMBAH	781.931,17	65.880	75.230	43,76	27,92	17,40

SEKTOR	PEP 2017 (ton CO2e)	PEP 2018(ton CO2e)	TARGET MITIGASI2019	PEP 2019(ton CO2e)	KET
1. LANDBASE	4.289.248,75	4.146.535,76	3.832.642,91	410.443,24	Tidak Mencapai Target
*Pertanian	2.241,27	382,87	2.047.439	1.008,59	
*Kehutanan &Lahan	4.287,007	4.146.152,89	1.785.204	409.434,65	
2. ENERGI	10.299.568,48	717,98	5.792.901,00	18.814,92	Tidak Mencapai Target
*Energi	10.299.324,88	717,98	3.819,495	102,92	
*Transport	243,60	0,00	1.973.406	18.712,00	
3. PENGOLAHAN LIMBAH	1.475,564	326.350	310,80	66,56	Tidak Mencapai Target

Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

2.1.1.6.2 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Penetapan tingkat risiko bencana dalam Kajian Risiko Bencana (KRB) dilakukan dengan menganalisis tiga aspek, yaitu potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Potensi bahaya mengindikasikan jenis-jenis ancaman yang mungkin terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, baik yang sudah pernah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Kerentanan wilayah mencerminkan potensi kerugian dan/atau kehilangan yang mungkin terjadi jika terjadi bencana, seperti jumlah penduduk yang terpapar, kerugian harta, dan dampak pada lingkungan. Komponen ketiga, yaitu kapasitas daerah, menunjukkan sejauh mana lembaga pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan siap untuk mengurangi

dan menanggulangi risiko bencana. Mengacu pada hasil analisis, diketahui 8 (delapan) jenis potensi bahaya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan meliputi banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami dan gunung api. Delapan bahaya tersebut dihitung nilai kerentanan dan kapasitasnya sehingga menghasilkan risiko.

Tabel II.22 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	187,20	187,20	176,14	167,23	151,15

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Tabel diatas menunjukkan data capaian Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2024 IRB Lampung Selatan mencapai 151,15 lebih rendah daripada tahun sebelumnya 167,23. Sesuai dengan pembagian kelas Tingkat Indeks Risiko Bencana, Kabupaten Lampung Selatan masih dalam taraf berisiko Tinggi.

Berdasarkan data BMKG, bahwa tipologi struktur tanah dibawah wilayah Provinsi Lampung yaitu sepanjang pantai barat dan pesisir Lampung Selatan merupakan lapisan lempengan patahan yang rawan terjadi bencana gempa bumi bahkan berpotensi tsunami. Patahan atau yang biasa disebut sesar tarahan berada di Lampung Selatan sepanjang kurang lebih 40 km dari Tarahan sampai dengan Natar saat ini dalam kondisi aktif. Patahan (sesar tarahan) yang berada di Tarahan tersebut memicu gempa magnitudo (M) 3,8 pada koordinat 5.72 LS dan 105.36 BT tepatnya berada di laut pada jarak 25 km Barat Daya Lampung Selatan dengan kedalaman hiposenter 4 km (dangkal) pada Senin, 27 Januari 2020 (BMKG). Sampai dengan saat ini potensi akan terjadinya bencana alam akan terus mengancam keselamatan masyarakat, untuk itu diperlukannya upaya mitigasi.

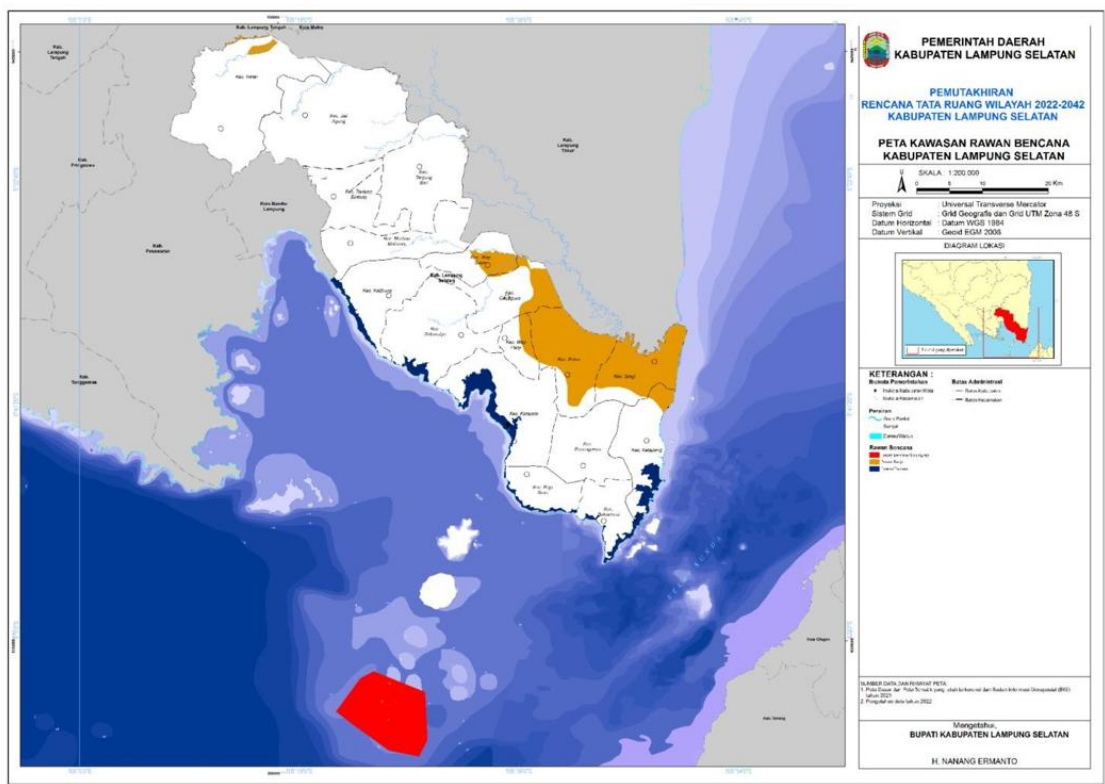
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Lampung Selatan termasuk kategori wilayah yang memiliki indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) tinggi. Data BNPB tahun 2015 - 2022 menunjukkan indeks risiko bencana Kabupaten Lampung Selatan yang cenderung tidak berubah karena disebabkan kecenderungan nilai kapasitas konstan yaitu 187,20 (kelas risiko tinggi) pada tahun 2015 hingga tahun 2021, sedangkan tahun 2023 yaitu 167,23 (kelas risiko tinggi)

dan Tahun 2024 sebesar 151,15 (kelas risiko tinggi). Potensi jenis bencana dilihat dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Lampung Selatan adalah bencana banjir skor 28.16 (kelas risiko tinggi), gempa bumi skor 16.90 (kelas risiko tinggi), tsunami skor 12.52 (kelas risiko tinggi), letusan gunung api skor 3.13 (kelas risiko rendah), kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrim/abrasi, cuaca ekstrim dengan skor 10.64 (kelas risiko sedang).

Memperhatikan potensi risiko yang sebagian besar tinggi dan kompleksitas dalam penanganan bencana memerlukan suatu manajemen atau perencanaan yang matang, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Berbagai upaya yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga sering terjadi tumpang tindih bahkan terdapat beberapa prioritas penting yang belum tertangani.

Lampung Selatan merupakan kabupaten yang menduduki urutan ke-53 dari kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana cukup tinggi (Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2018). Berdasarkan BMKG bahwa tipologi struktur tanah dibawah wilayah Provinsi Lampung yaitu sepanjang pantai barat dan pesisir Lampung Selatan merupakan lapisan lempengan patahan yang rawan terjadi bencana gempa bumi bahkan berpotensi tsunami. Patahan atau yang biasa disebut sesar tarahan berada di Lampung Selatan sepanjang kurang lebih 40 km dari Tarahan sampai dengan Natar saat ini dalam kondisi aktif (Suharno, 2018). Patahan (sesar tarahan) yang berada di Tarahan tersebut memicu gempa magnitudo (M) 3,8 pada koordinat 5.72 LS dan 105.36 BT tepatnya berada di laut pada jarak 25 km Barat Daya Lampung Selatan dengan kedalaman hiposenter 4 km (dangkal) pada Senin, 27 Januari 2020 (BMKG). Sampai dengan saat ini potensi akan terjadinya bencana alam akan terus mengancam keselamatan masyarakat, untuk itu diperlukannya upaya mitigasi bencana.

Gambar II.19 Peta Potensi Rawan Bencana Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Tabel II.23 Kawasan Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Bencana	Jalur Evakuasi Bencana
	(1)	(2)	(3)
1	Natar	Banjir	Tidak memerlukan jalur evakuasi mengingat banjir yang terjadi tidak berada di daerah permukiman
2	Katibung	Tsunami	Dievakuasi menuju Bukit Tarahan
3	Way Sulan	Banjir	Menuju Kecamatan Candipuro dievakuasi ke sekitar kantor Kecamatan Candipuro
4	Sidomulyo	Tsunami	Dievakuasi menuju sekitar jalan lintas Sumatera
5	Candipuro	Banjir	Dievakuasi ke sekitar kantor Kecamatan Candipuro
6	Way Panji	Banjir	Dievakuasi di Sukoharjo disekitar kantor Kecamatan Way Panji
7	Kalianda	Tsunami	Dievakuasi menuju kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten
8	Rajabasa	Tsunami	Dievakuasi menuju Gunung Rajabasa
		Gunung Api Krakatau	Dievakuasi menuju kantor Kecamatan Rajabasa
9	Palas	Banjir	Dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Palas
10	Sragi	Banjir	Dievakuasi mengarah ke Bangunrejo di sekitar kantor Kecamatan Ketapang

No	Kecamatan	Bencana	Jalur Evakuasi Bencana
	(1)	(2)	(3)
11	Ketapang	Tsunami	Dievakuasi di sekitar Menara Siger di Kecamatan Bakauheni
		Gunung Api Krakatau	Dievakuasi menuju kantor Kecamatan Ketapang
12	Bakauheni	Tsunami	Dievakuasi di sekitar Menara Siger di Kecamatan Bakauheni
		Gunung Api Krakatau	Dievakuasi menuju Kecamatan Penengahan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2024

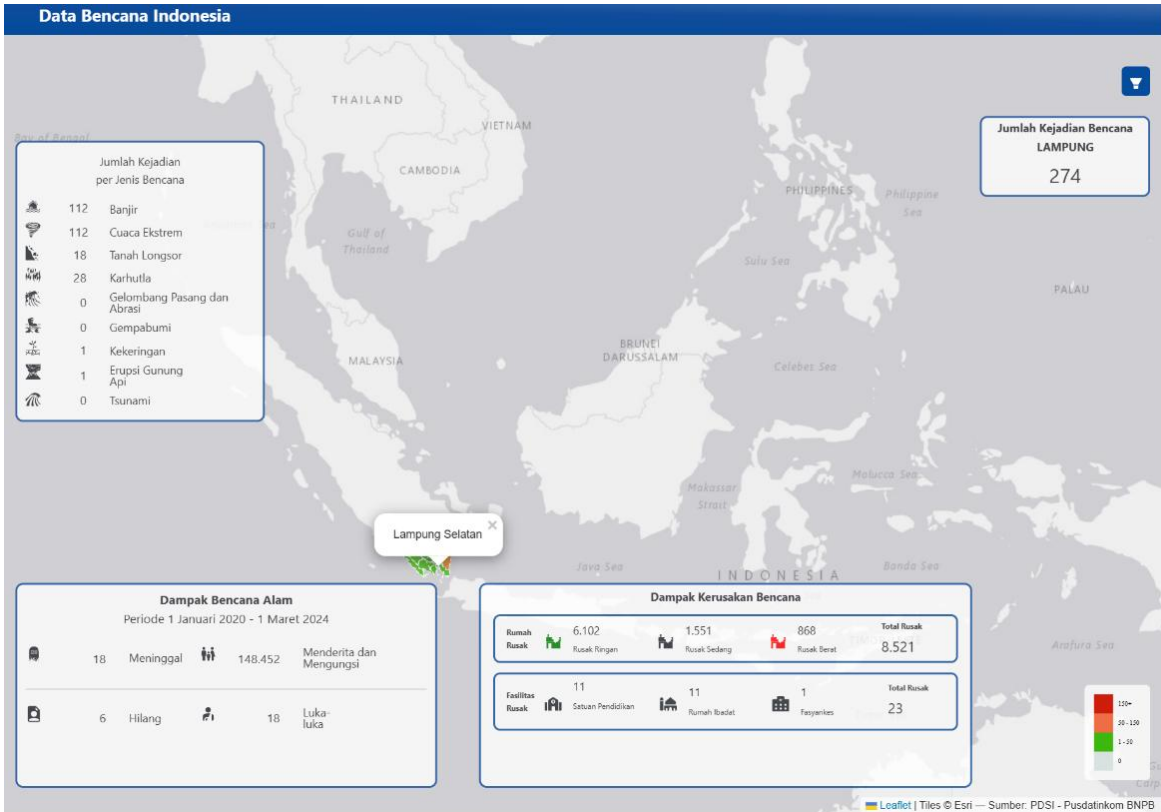
Tabel II.24 Data Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024

No	Bencana	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banjir	38	43	46	30	35	51
2	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0
3	Tanah Longsor	2	0	1	2	1	2

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Menanggapi dampak bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama TNI/POLRI, BASARNAS, dan para relawan melakukan penanganan pasca bencana salah satunya dengan membuat juga merevitalisasi saluran air dan gorong-gorong untuk mengantisipasi dampak banjir yang berulang.

Gambar II.20 Peta Kerawanan Bencana BNPB Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Geoportal Bencana Indonesia BNPB, 2024

Berdasarkan data diatas memperlihatkan bahwa sepanjang periode 1 Januari 2020- 1 Maret 2024 terjadi 112 kejadian banjir 112 cuaca ekstrem, 18 tanah longsor dan 28 Karhutla di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu terdapat 148.452 orang yang menderita dan mengungsi yang terdampak atas kejadian bencana alam di Kabupaten Lampung Selatan.

2.1.1.6.3 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran kapasitas suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. IKD digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, baik dari aspek fisik, sosial, maupun ekonomi. IKD menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rekomendasi kebijakan di daerah. IKD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 berada pada kelas Sedang dengan nilai 0,53 mengalami peningkatan sebesar 0,12 dari nilai 0,41 di Tahun 2023.

Tabel II.25 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2023-2024

No	Keterangan	2023		2024	
		Nilai	Kelas	Nilai	Kelas
1	Lampung Selatan	0,41	Sedang	0,53	Sedang
2	Provinsi Lampung	0,43	Sedang	0,42	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

2.1.1.6.4 Potensi Bencana Lainnya

A. Gempa Bumi

Gempa bumi ialah suatu fenomena tektonik atau vulkanik yang mencerminkan pergerakan batuan dan menghasilkan getaran atau gemetar pada Bumi. Gempa bumi terkait dengan pecahnya tiba-tiba batuan di sepanjang retakan, patahan, atau sesar yang terkena medan tegangan dalam kerak Bumi dan litosfer. Indonesia memiliki potensi gempa bumi yang tinggi karena terletak di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak ke utara dan berselisih dengan Lempeng Eurasia, sementara Lempeng Pasifik bergerak ke arah barat.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki sesar penyeimbang dari sesar utama, yaitu sesar Semangko. Beberapa kecamatan dilalui oleh sesar tersebut. Bakauheni memiliki dua sesar atau patahan, yaitu sesar Peterjajar yang masih aktif dan sesar Way Baka yang berpotensi aktif. Kecamatan Kalianda tidak

terletak di wilayah yang dilintasi oleh sesar atau patahan, dan memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Sesar Peterjajar telah menyebabkan gempa bumi di Kecamatan Penengahan dan sekitarnya. Kecamatan Katibung, termasuk Desa Tarahan di Katibung, dilewati oleh sesar Tarahan yang seringkali menyebabkan gempa bumi dengan magnitudo relatif kecil. Sesar Tarahan, yang membentang sepanjang 40 km dari Desa Tarahan hingga Kecamatan Natar, seringkali memicu gempa bumi di wilayah ini. Gempa-gempa tersebut memiliki magnitudo (M) 3,4 dengan intensitas I-II di Kecamatan Natar. Meskipun begitu, berdasarkan analisis kecamatan-kecamatan tersebut memiliki bahaya rendah terhadap gempa bumi.

Gempa bumi menjadi salah satu bencana yang mengancam Kabupaten Lampung Selatan. Meskipun jarang terjadi dan zona utama gempa bumi cenderung jauh dari wilayah, tetap bahaya gempa bumi tetap diperhitungkan dan dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda pada beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Selatan.

- ***Zonasi wilayah ancaman gempa bumi kelas tinggi***

Sesar yang berada di Kabupaten Lampung Selatan merupakan sesar penyeimbang dari sesar utama yaitu sesar Semangko dan menurut data kejadian bencana 10 tahun terakhir, wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak pernah mengalami kejadian bencana gempa bumi yang menimbulkan korban jiwa atau kerusakan.

- ***Zonasi wilayah ancaman gempa bumi kelas sedang***

- a. Bakauheni, terdapat dua sesar atau patahan yang melintas di Kecamatan Bakauheni, yaitu sesar Peterjajar yang saat ini dalam kondisi aktif dan sesar Way Baka dengan status *capable fault* atau berpotensi aktif.
- b. Kalianda, berdasarkan hasil analisis, Kecamatan Kalianda bukan termasuk wilayah yang dilintasi oleh sesar atau patahan dan jumlah kepadatan penduduk Kecamatan Kalianda tergolong kedalam kelas ancaman rendah terhadap bencana gempa bumi.
- c. Penengahan, menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung, aktivitas Sesar Peterjajar telah menyebabkan gempa bumi di Kecamatan Penengahan dan sekitarnya.
- d. Katibung, Kecamatan Katibung atau desa Tarahan merupakan wilayah yang dilintasi oleh sesar Tarahan. Aktivitas sesar ini sering menyebabkan kejadian bencana gempa bumi dengan magnitudo yang relatif kecil, tercatat pada tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 08.27

- WIB aktivitas sesar Tarahan telah menyebabkan gempa berkekuatan magnitudo (M) 3,8 dengan episentrum berada dilaut pada jarak 25 km Barat Daya Lampung Selatan dan kedalaman 4 km.
- e. Natar, aktivitas sesar Tarahan yang membentang sepanjang 40 km dari desa Tarahan sampai dengan Kecamatan Natar sering kali menyebabkan gempa bumi di wilayah ini yang berkekuatan magnitudo (M) 3,4 dengan skala intensitas I-II di Kecamatan Natar.
- **Zonasi wilayah ancaman gempa bumi kelas rendah**

Beberapa wilayah kecamatan yang masuk kedalam zonasi kelas rendah terhadap ancaman bencana gempa bumi merupakan wilayah yang tidak dilintasi oleh sesar dan berdasarkan data kejadian bencana Kecamatan seperti Kecamatan Ketapang, Kecamatan Sragi, Kecamatan Palas, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Way Panji, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Tanjung Sari dan Kecamatan Jati Agung tidak pernah mengalami dampak bencana gempa bumi (Sari dkk, 2021).

Gambar II.21 Peta Risiko Gempa Bumi



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Analisis risiko terkait gempa bumi merupakan hasil dari evaluasi bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Selatan. Identifikasi bahaya didasarkan pada kondisi fisik wilayah yang memiliki potensi untuk mengancam penduduk di daerah tersebut. Evaluasi kerentanan terhadap gempa bumi mencakup potensi kerugian yang mungkin terjadi jika bencana tersebut melanda wilayah dengan risiko gempa bumi. Penilaian kapasitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana, terutama gempa bumi. Ketiganya saling berinteraksi dalam konteks pemerintahan kabupaten, yang pada akhirnya menghasilkan risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel II.26 Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lampung Selatan

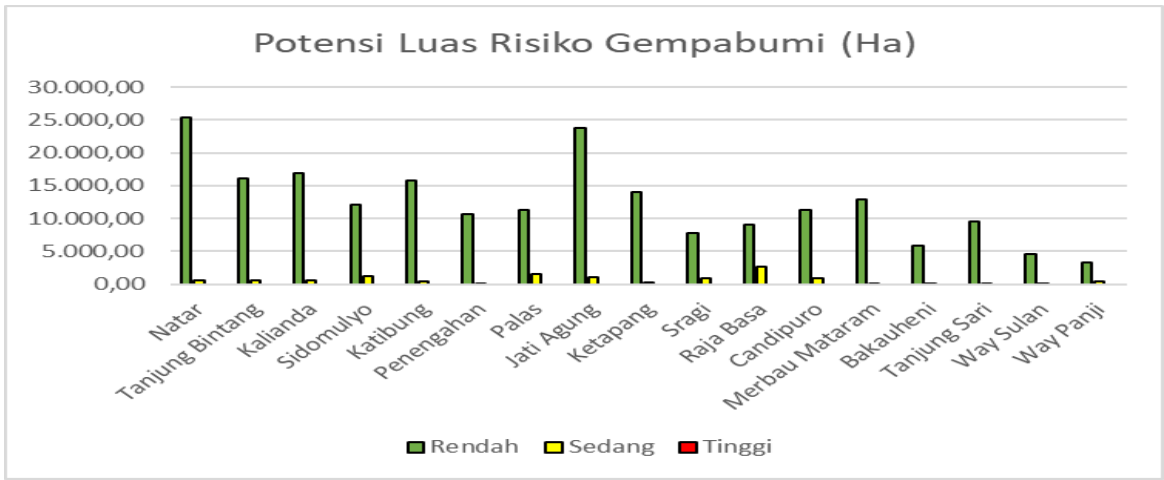
No	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko Gempa bumi (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Natar	25.357,77	576,36	-	25.934,13	Rendah
2	Tanjung Bintang	16.088,13	550,44	-	16.638,57	Rendah
3	Kalianda	16.981,83	611,28	-	17.593,11	Rendah
4	Sidomulyo	12.102,57	1.237,50	-	13.340,07	Sedang
5	Katibung	15.828,93	363,33	-	16.192,26	Rendah
6	Penengahan	10.659,24	63,99	-	10.723,23	Rendah
7	Palas	11.318,76	1.572,75	-	12.891,51	Sedang
8	Jati Agung	23.783,94	1.142,37	-	24.926,31	Rendah
9	Ketapang	14.040,18	280,26	-	14.320,44	Rendah
10	Sragi	7.827,21	957,96	-	8.785,17	Sedang
11	Rajabasa	9.115,02	2.736,99	-	11.852,01	Rendah
12	Candipuro	11.358,81	963,45	-	12.322,26	Rendah
13	Merbau Mataram	12.982,59	62,73	-	13.045,32	Rendah
14	Bakauheni	5.933,61	54,09	-	5.987,70	Rendah
15	Tanjung Sari	9.552,69	120,96	-	9.673,65	Rendah
16	Way Sulan	4.663,62	75,60	-	4.739,22	Rendah
17	Way Panji	3.315,15	457,83	-	3.772,98	Rendah
Kab. Lampung Selatan		210.910,04	11.827,88	-	222.737,92	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Tabel risiko bencana gempa bumi per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan menggambarkan luas risiko dalam Ha untuk tiga kelas, tiga kecamatan yaitu Sidomulyo (13.340,07 Ha), Palas (12.891,51 Ha), dan Sragi (8.785,17 Ha) memiliki wilayah risiko sedang terhadap gempa bumi. Sementara, kecamatan sisanya tergolong berisiko rendah. Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan memiliki luas risiko gempa bumi rendah sebesar 210.910,04 Ha, dan kelas risiko sedang mencapai 11.827,88

Ha. Analisis ini memberikan gambaran tentang sebaran risiko bencana gempa bumi di setiap kecamatan, memungkinkan perencanaan dan mitigasi yang lebih tepat di tingkat lokal. Gambar di bawah ini merupakan grafik potensi luas risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar II.22 Potensi Luas Risiko Gempa Bumi



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2024

B. Banjir

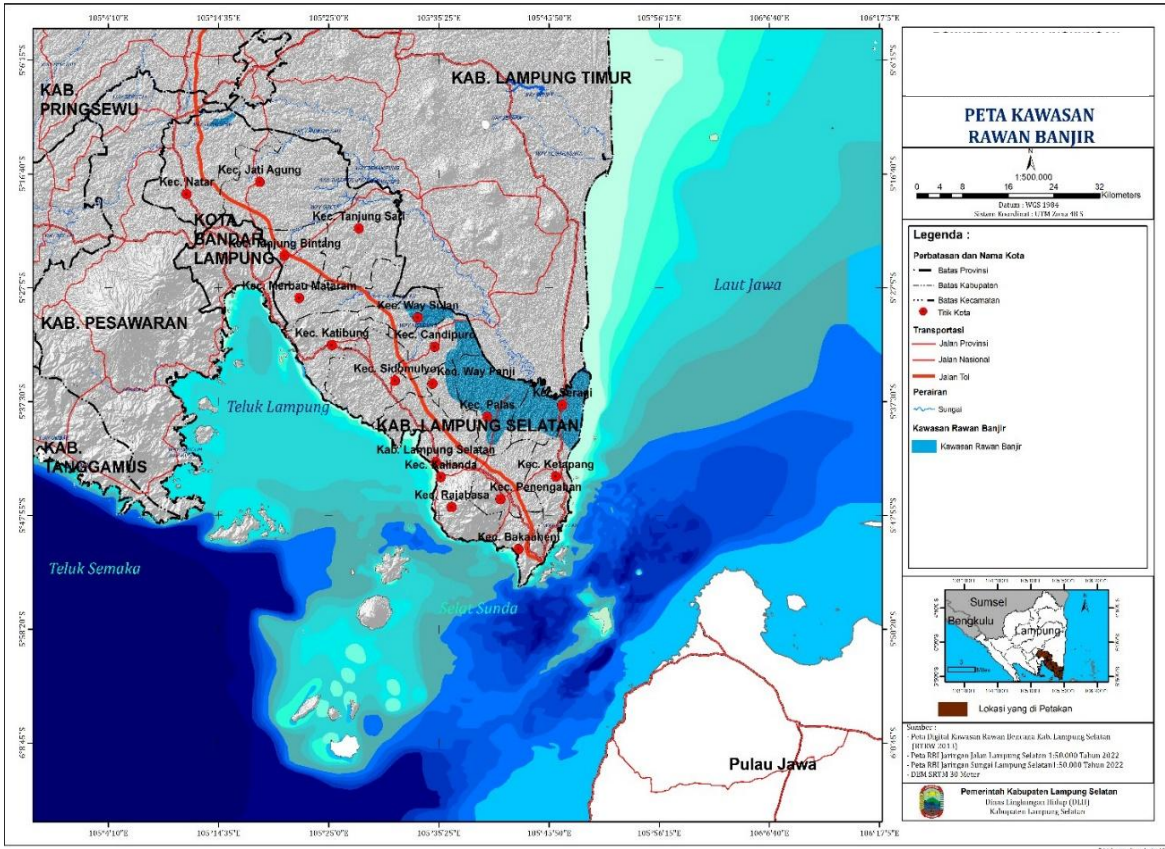
Banjir menjadi salah satu permasalahan bencana di Kabupaten Lampung Selatan. Sungai-sungai di Kabupaten Lampung Selatan, seperti Way Katibung, Way Sekampung, dan Way Pisang, seringkali menjadi pemicu terjadinya banjir. Way Katibung melewati empat Kecamatan, yakni Katibung, Candipuro, Way Sulan, dan Sidomulyo. Berdasarkan kajian bahaya banjir, keempat kecamatan ini tergolong bahaya tinggi. Kenaikan yang signifikan dalam jumlah air sungai kerap kali menjadi penyebab banjir di kecamatan-kecamatan yang dilalui oleh sungai tersebut. Faktor ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi dalam periode yang lama dan pasang air laut. Akibatnya, sungai meluap dan membanjiri wilayah sekitarnya. Saat debit air sungai meningkat, aliran sungai melambat bahkan dapat terhenti, menyebabkan penumpukan air yang akhirnya juga meluap dan membanjiri area sekitarnya.

Banjir menjadi bencana kedua yang paling sering terjadi di Kabupaten Lampung Selatan setelah cuaca ekstrim. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 66 kejadian banjir dalam rentang waktu 2020-2024. Bencana tersebut menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 60 jiwa terpaksa mengungsi. Tak hanya itu, rumah penduduk juga terendam akibat banjir. Risiko banjir merupakan hasil penilaian dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Terdapat beberapa sungai di Kabupaten Lampung Selatan yang sering menjadi penyebab banjir yaitu Sungai Way Katibung, sungai Way Sekampung dan sungai Way Pisang. Sungai Way Katibung membentang diantara empat Kecamatan yaitu Kecamatan Katibung, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo. Sungai Way Sekampung dan Sungai Way Pisang.

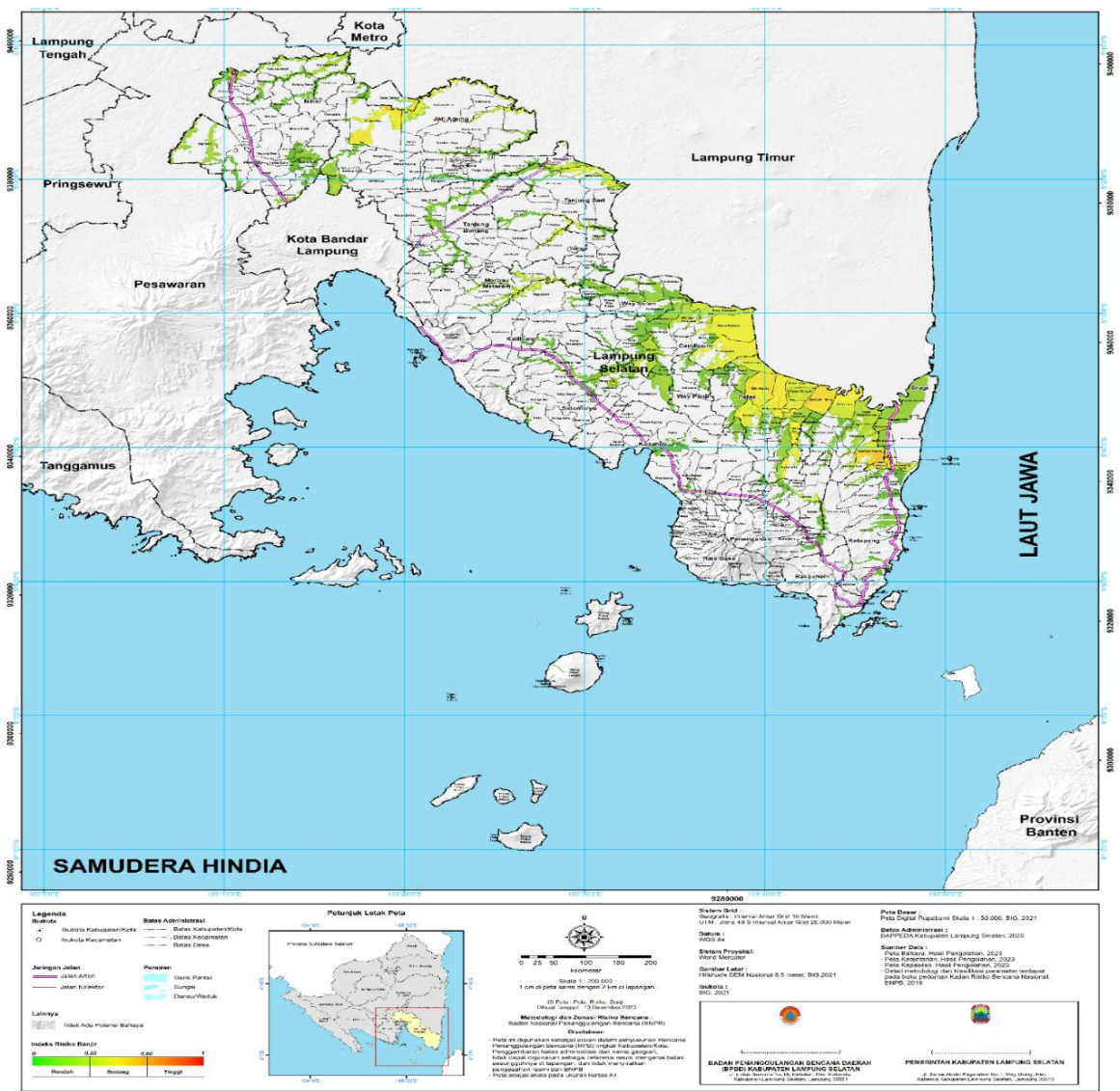
Peningkatan debit air yang sangat drastis yang terjadi di Sungai Way Sekampung seringkali menyebabkan bencana banjir di Kecamatan Sragi. Peningkatan debit air Sungai Way Sekampung dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, Intensitas curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu yang lama dan pasang air laut. Hal ini yang menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi wilayah Kecamatan Sragi. Ketika Sungai Way Sekampung mengalami peningkatan debit, hal ini akan berpengaruh terhadap Sungai Way Pisang, aliran Sungai yang seharusnya bergerak menuju Sungai Way Sekampung akan terhenti dan akan membuat debit air di Sungai Way Pisang mengalami penumpukan, kemudian meluap dan menggenangi wilayah Kecamatan Palas (Sari dkk, 2021). Daerah Kabupaten yang termasuk kedalam wilayah rawan bencana banjir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.23 Peta Kawasan Rawan Banjir



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Gambar II.24 Peta Risiko Banjir



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Penentuan bahaya adalah luas wilayah per kecamatan yang berpotensi mengancam penduduk terhadap banjir. Sementara kerentanan adalah kerentanan sosial serta potensi kerugian ekonomi, kerugian fisik, dan kerentanan lingkungan. Sebaliknya, kapasitas ialah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi dan mengantisipasi bencana banjir. Risiko bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.27 Risiko Banjir di Kabupaten Lampung Selatan

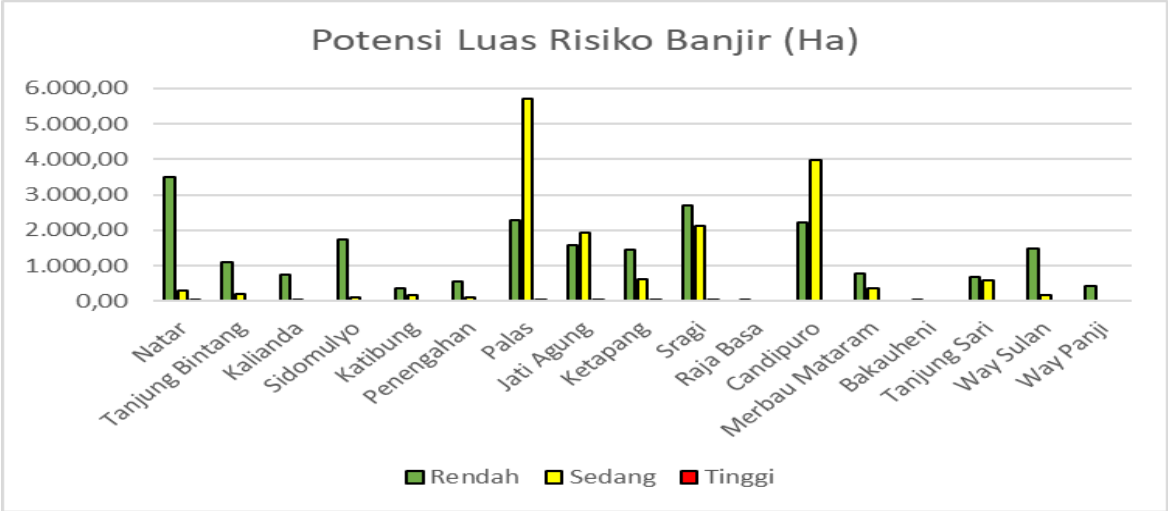
No	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko Banjir (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Natar	3.508,20	305,19	0,18	3.813,57	Tinggi
2	Tanjung Bintang	1.101,24	196,65	0,00	1.297,89	Tinggi
3	Kalianda	760,41	9,45	0,00	769,86	Tinggi
4	Sidomulyo	1.730,79	103,50	0,00	1.834,29	Tinggi

No	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko Banjir (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
5	Katibung	372,06	178,38	0,00	550,44	Tinggi
6	Penengahan	568,98	101,88	0,00	670,86	Tinggi
7	Palas	2.287,44	5.698,98	3,42	7.989,84	Sedang
8	Jati Agung	1.569,24	1.944,18	6,48	3.519,90	Tinggi
9	Ketapang	1.446,21	609,75	15,75	2.071,71	Sedang
10	Sragi	2.714,49	2.119,05	44,10	4.877,64	Sedang
11	Rajabasa	5,22	0,00	0,00	5,22	Rendah
12	Candipuro	2.221,38	3.974,67	0,00	6.196,05	Tinggi
13	Merbau Mataram	770,40	350,91	0,00	1.121,31	Tinggi
14	Bakauheni	27,63	0,00	0,00	27,63	Tinggi
15	Tanjung Sari	688,86	575,55	0,00	1.264,41	Sedang
16	Way Sulan	1.474,47	171,90	0,00	1.646,37	Sedang
17	Way Panji	438,66	0,00	0,00	438,66	Tinggi
Kab. Lampung Selatan		21.685,68	16.340,04	69,93	38.095,65	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lamsel 2023-2027

Tabel risiko bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan luas risiko banjir yang dapat dijumpai di setiap kecamatan. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kecamatan dengan risiko banjir tertinggi adalah Natar, Tanjung Bintang, dan Sidomulyo, masing-masing dengan total luas risiko banjir 3.813,57 Ha, 1.297,89 Ha, dan 1.834,29 Ha. Kecamatan-kecamatan ini menghadapi risiko banjir tinggi, yang dapat menyebabkan dampak serius terhadap infrastruktur dan masyarakat setempat. Sementara itu, kelas risiko sedang terdapat di Kecamatan Palas (7.989,84 Ha), Sragi (4.887,64 Ha), Ketapang (2.071,71 Ha), Way Sulan (1.646,37 Ha), dan Tanjung Sari (1.264,41 Ha). Grafik potensi luas risiko bencana banjir per kecamatan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar II.25 Potensi Luas Risiko Banjir



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lamsel 2023 – 2027

C. Tsunami

Berdasarkan data historis yang dikumpulkan oleh Hakim (2019), letusan besar dari Gunung Krakatau yang diikuti tsunami terjadi pada 27 Agustus 1883. Setelah itu terjadi kembali tsunami di Lampung Selatan pada tanggal 22 Desember 2018 yang berdampak parah pada 4 Kecamatan: Rajabasa, Kalianda, Sidomulyo, dan Katibung. Bencana ini menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, rusaknya permukiman warga, rusaknya fasilitas umum serta banyaknya jalan-jalan yang putus. Data yang dihimpun dari BMKG, BIG, BPPT, LIPI, dan Badan Geologi ESDM, bahwa tsunami tersebut disebabkan dari longsor di lereng Gunung Anak Krakatau akibat dari erupsi dari Gunung Anak Krakatau. BNPB (2019) merilis setidaknya 437 jiwa kehilangan nyawa, 31.943 korban luka-luka dan 16.198 terpaksa mengungsi. Akar masalah dari peristiwa tersebut ialah tidak adanya EWS tsunami yang khusus untuk medeteksi tsunami disebabkan oleh letusan gunung api. Masyarakat di Kecamatan Rajabasa, yang menjadi wilayah paling terdampak, juga hanya mengetahui bahwa tsunami disebabkan oleh gempa bumi, sehingga para korban tidak sempat menyelamatkan diri. Tsunami merupakan salah satu bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik dangkal yang mengakibatkan gempa bumi besar serta memicu terjadinya tsunami. Namun, berkaca pada kejadian tsunami di Kabupaten Lampung Selatan, bencana tsunami diakibatkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan Gunung Anak Krakatau pada Desember 2018. Kecamatan di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah pesisir perlu mewaspadai gelombang tsunami.

Jarak dari pusat gempa, jarak wilayah daratan Kabupaten Lampung Selatan dengan asumsi episentrum gempa bumi berada di lokasi Gunung Krakatau, menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan terletak pada jarak kurang dari 150 km. Kelerengan topografi, Kabupaten Lampung Selatan merupakan dataran dengan kemiringan lereng kurang dari 10 %. Namun pada sebagian kecil wilayah (Kecamatan Sidomulyo), kelerengan cukup bervariasi, yaitu antara 20% - 30%. Kelerengan yang cukup curam terdapat Kecamatan Rajabasa di mana terdapat Gunung Rajabasa yang memiliki ketinggian mencapai 1.280 m dari permukaan laut. Jarak dari sungai, wilayah daratan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan jaraknya dari sungai yang berada di Kabupaten Lampung Selatan kurang

[illegible]

Analisis risiko tsunami merupakan output dari penilaian bahaya, kerentanan, dan kapasitas terhadap bencana tsunami di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pengidentifikasian bahaya dilakukan dengan merinci kondisi fisik wilayah yang berpotensi mengancam penduduk di daerah tersebut. Evaluasi terhadap kerentanan tsunami mencakup estimasi potensi kerugian yang mungkin terjadi jika bencana melanda wilayah. Penilaian kapasitas dilakukan untuk mengukur kemampuan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana, khususnya tsunami. Ketiga faktor ini berinteraksi secara saling memengaruhi, yang pada akhirnya menciptakan risiko bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan.

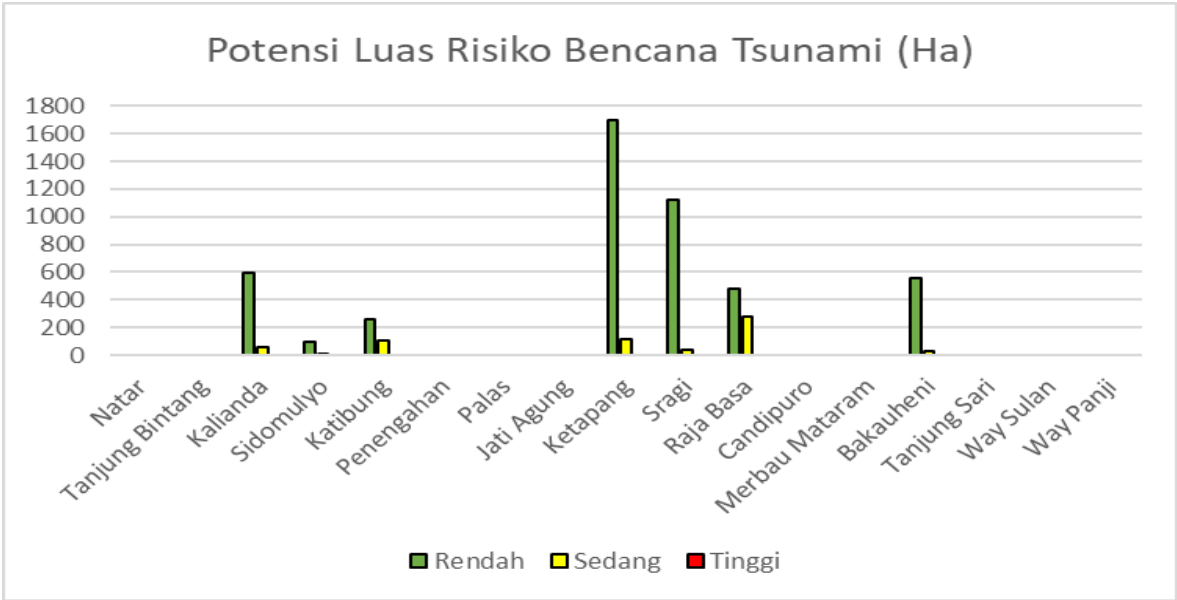
Tabel II.28 Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko Tsunami (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Natar	-	-	-	-	-
2	Tanjung Bintang	-	-	-	-	-
3	Kalianda	596,76	58,77	-	655,47	Sedang
4	Sidomulyo	95,49	9,63	-	105,12	Rendah
5	Katibung	255,96	102,87	-	358,83	Sedang
6	Penengahan	-	-	-	-	-
7	Palas	-	-	-	-	-
8	Jati Agung	-	-	-	-	-
9	Ketapang	1.698,03	118,98	-	1.817,01	Rendah
10	Sragi	1124,10	41,58	-	1.165,68	Rendah
11	Rajabasa	479,43	279,81	-	758,24	Sedang
12	Candipuro	-	-	-	-	-
13	Merbau Mataram	-	-	-	-	-
14	Bakauheni	469,88	25,11	-	585,99	Rendah
15	Tanjung Sari	-	-	-	-	-
16	Way Sulan	-	-	-	-	-
17	Way Panji	-	-	-	-	-
Kab. Lampung Selatan		3.977,01	724,32	-	4.701,33	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Analisis risiko tsunami di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa terdapat variasi tingkat risiko di berbagai kecamatan. Dari total luas risiko tsunami sebesar 4.701,33 Ha, sebagian besar terdistribusi pada Kecamatan Ketapang (1.817,01 Ha), Sragi (1.165,68 Ha), dan Rajabasa (759,24 Ha), dengan tingkat risiko yang cenderung rendah hingga sedang. Kecamatan Kalianda juga memiliki luas risiko yang signifikan sebesar 655,47 Ha, menempatkannya dalam kategori risiko sedang. Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Natar, Tanjung Bintang, Penengahan, Palas, Jati Agung, Candipuro, Merbau Mataram, Tanjung Sari, Way Sulan, dan Way Panji tidak memiliki risiko tsunami yang terdeteksi. Gambar berikut memperlihatkan grafik risiko tsunami per kecamatan.

Gambar II.28 Potensi Luas Risiko Bencana Tsunami per Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

D. Cuaca Ekstrem

Bencana hidrometeorologi, seperti cuaca ekstrim dan kekeringan, dapat dipicu oleh anomali cuaca dan perubahan iklim. Menurut NASA (2023), perubahan iklim global telah berdampak pada berbagai cuaca ekstrim di seluruh dunia. Gelombang panas rekor di daratan dan lautan, hujan lebat, banjir parah, kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan yang ekstrim, serta banjir saat badai semakin sering dan intens. Tindakan manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, secara signifikan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Tiga faktor yang digunakan untuk mengenali daerah yang berpotensi mengalami bahaya cuaca ekstrim, khususnya angin puting beliung, adalah tingkat keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan. Kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim, seperti angin puting beliung, cenderung lebih tinggi di wilayah dengan tingkat keterbukaan lahan yang signifikan, seperti daerah pemukiman dan pertanian.

Berdasarkan sejarah kejadian bencana di Kabupaten Lampung Selatan, bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrim menjadi bencana yang paling sering terjadi. BPBD Lampung Selatan mencatat terdapat 98 bencana cuaca ekstrim dalam rentang tahun 2020-2023. Bencana ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia, 4 orang luka - luka, 74 unit rumah rusak berat, 181 rusak sedang, dan 312 rusak ringan.

Gambar II.29 Peta Risiko Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Tabel di bawah ini menunjukkan luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan kajian. Analisis risiko cuaca ekstrim merupakan hasil dari evaluasi bahaya, kerentanan, dan kapasitas terhadap potensi bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan. Pengenalan bahaya dilakukan dengan memperinci kondisi fisik wilayah yang memiliki potensi untuk mengancam penduduk di daerah tersebut.

Evaluasi terhadap kerentanan terhadap cuaca ekstrim mencakup perkiraan potensi kerugian yang dapat terjadi apabila bencana melanda wilayah tersebut. Penilaian kapasitas bertujuan untuk mengukur kemampuan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana cuaca ekstrim. Ketiga faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi, yang pada akhirnya menciptakan risiko bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Lampung Selatan.

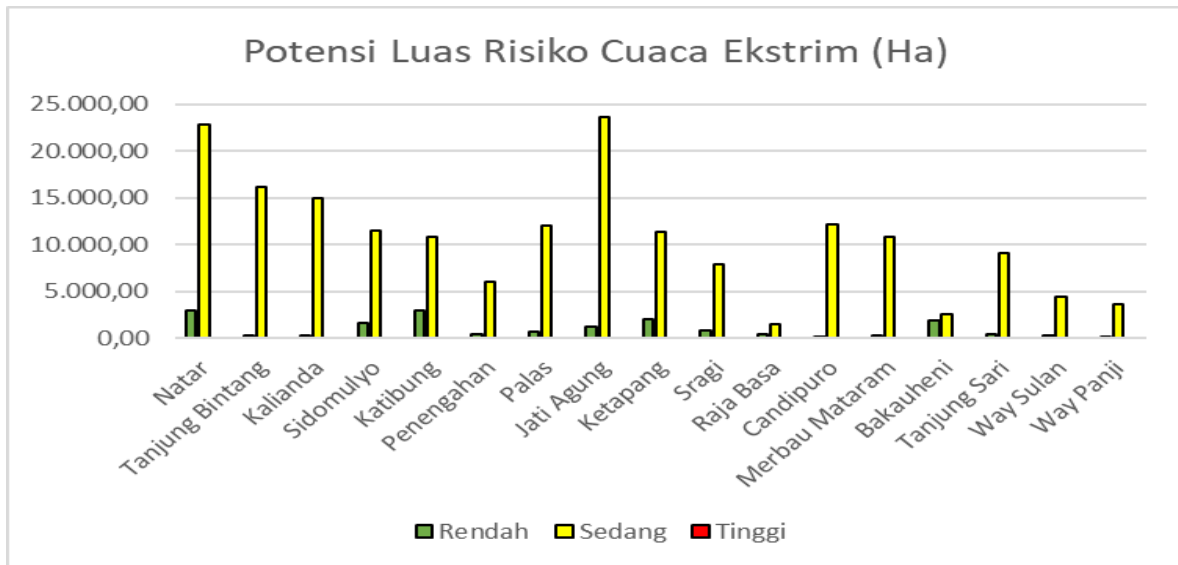
Tabel II.29 Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko Cuaca Ekstrim (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Natar	2.960,01	22.823,46	-	25.783,47	Sedang
2	Tanjung Bintang	305,37	16.145,37	-	16.450,74	Sedang
3	Kalianda	293,22	14.906,43	-	15.199,65	Sedang
4	Sidomulyo	1.584,81	11.545,38	-	13.130,19	Sedang
5	Katibung	2.945,25	10.808,10	-	13.753,35	Sedang
6	Penengahan	433,44	6.085,71	-	6.519,15	Sedang
7	Palas	690,21	12.090,15	-	12.780,36	Sedang
8	Jati Agung	1.214,37	23.584,86	-	24.799,23	Sedang
9	Ketapang	2.050,20	11.419,83	-	13.470,03	Sedang
10	Sragi	784,80	7.868,61	-	8.653,41	Sedang
11	Rajabasa	462,78	1.548,27	-	2.011,05	Sedang
12	Candipuro	101,07	12.100,77	-	12.201,84	Sedang
13	Merbau Mataram	338,04	10.808,28	-	11.146,32	Sedang
14	Bakauheni	1.933,74	2.554,20	-	4.487,94	Sedang
15	Tanjung Sari	413,10	9.133,11	-	9.546,21	Sedang
16	Way Sulan	257,13	4.372,29	-	4.629,42	Sedang
17	Way Panji	78,93	3.594,69	-	3.673,62	Sedang
Kab. Lampung Selatan		16.846,47	181.389,51	-	198.235,98	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Tabel risiko bencana cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan luas risiko dalam Ha dan dikelompokkan ke dalam kelas risiko, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kecamatan Natar memiliki luas risiko sedang terbesar dengan 25.783,47 Ha, diikuti oleh Jati Agung dengan 24.799,23 Ha. Meskipun seluruh kecamatan menunjukkan risiko sedang, terdapat variasi dalam luas risiko antar kecamatan. Penilaian risiko ini mencakup faktor-faktor seperti curah hujan, penggunaan lahan, kapasitas masyarakat dan daerah, serta kerentanan sosial, ekonomi, dan fisik terhadap cuaca ekstrim.

Gambar II.30 Potensi Luas Risiko Cuaca Ekstrem



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

E. Kekeringan

Menurut BNPB (2012), kekeringan terbagi menjadi dua, yaitu kekeringan alamiah dan kekeringan antropogenik. Kekeringan alamiah disebabkan karena curah hujan yang kurang (kekeringan meteorologis), kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah (kekeringan hidrologis), kekurangan kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas (kekeringan pertanian), dan kekeringan sosial ekonomi. Sementara itu, kekeringan antropogenik disebabkan oleh ketidakpatuhan pada aturan, misalnya kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan, dan kerusakan Kawasan tangkapan air, sumber air, akibat perbuatan manusia.

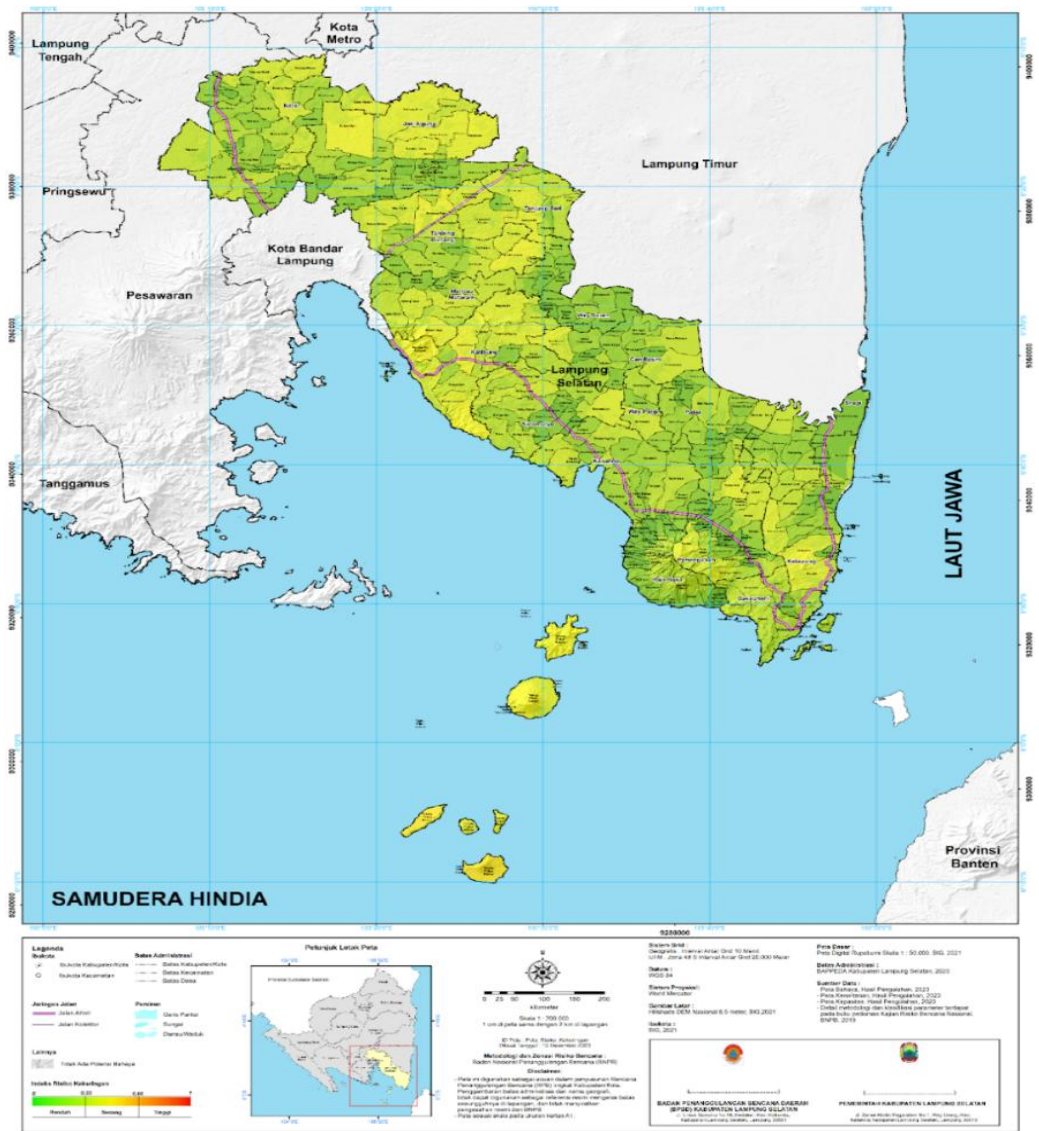
Kekeringan turut menjadi perhatian potensi bencana di Kabupaten Lampung Selatan, mengingat sebagian besar masyarakat memiliki ketergantungan pada sektor pertanian dan perkebunan. Ini juga dibuktikan bahwa analisis BNPB (2022) menyatakan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki risiko tinggi terhadap kekeringan. Wilayah memiliki luas pertanian dan perkebunan seluas 175.95 Hektar, dengan 20% untuk persawahan, 45% untuk perkebunan, dan 30% untuk ladang. Selain menjadi sentra pertanian padi yang luas, Kabupaten Lampung Selatan juga terkenal sebagai pusat produksi jagung dengan produksi mencapai 529.028 ton setiap tahun. Apabila kekeringan tidak dapat

diatasi, maka akan menimbulkan kerugian yang signifikan dan terganggunya distribusi kebutuhan pangan. Selain itu, dampak kekeringan dapat memunculkan banjir bandang, pepohonan mati, tanah menjadi gundul yang pada musim hujan akan menjadi mudah tererosi dan banjir, lalu ada dampak urbanisasi dikarenakan hilangnya bahan pangan tanaman sehingga para petani kehilangan mata pencaharian, dan dampak kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan yang akan menjadi rentan terhadap penyakit.

Penyebab utama kekeringan di Kabupaten Lampung Selatan dapat diidentifikasi dari gabungan faktor alam, seperti rendahnya curah hujan dan periode kemarau yang berkepanjangan. Perubahan iklim menjadi faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan intensitas dan durasi kekeringan yang ekstrim. Kendala-kendala seperti kurangnya infrastruktur penyimpanan air bersih, kurangnya keragaman sumber air untuk keperluan pertanian, dan kesulitan dalam memperoleh pasokan air bersih dari sumber yang memadai, turut menjadi pemicu kekeringan.

Kekeringan patut menjadi perhatian sebagai potensi bencana di Kabupaten Lampung Selatan, mengingat sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Wilayah ini memiliki luas pertanian dan perkebunan mencapai 175.956 Ha, dengan persawahan mencakup 20%, perkebunan 45%, dan ladang 30%. Kabupaten ini dikenal sebagai sentra pertanian padi dan produsen jagung dengan produksi mencapai 529.028 ton setiap tahun. Analisis KRB menunjukkan bahaya kekeringan termasuk dalam kategori sedang di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan sejarah kejadian bencana di Kabupaten Lampung Selatan, bencana kekeringan pernah terjadi di Kecamatan Sidomulyo, Palas, dan Sragi pada tahun 2015 dan pada bulan September tahun 2023 kekeringan terjadi di Kecamatan Natar.

Gambar II.31 Peta Risiko Kekeringan di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Tabel II.30 Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan

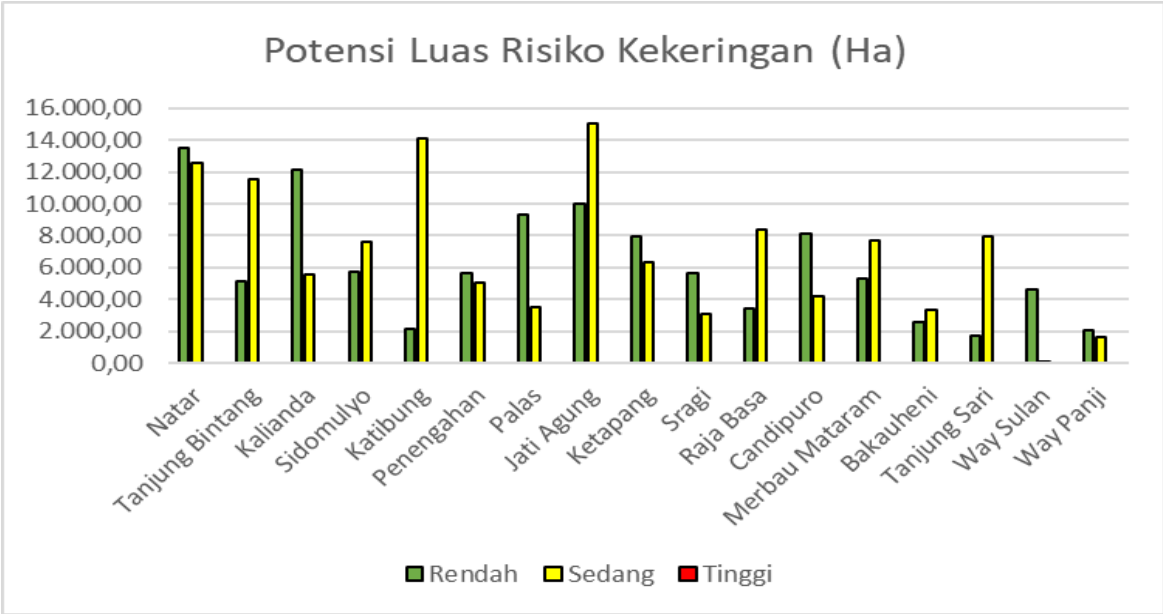
No	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko Kekeringan (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Natar	13.526,66	12.547,19	-	26.073,86	Sedang
2	Tanjung Bintang	5.112,74	11.570,60	-	16.683,35	Sedang
3	Kalianda	12.098,63	5.561,57	-	17.660,21	Sedang
4	Sidomulyo	5.758,94	7.588,01	-	13.346,96	Sedang
5	Katibung	2.131,13	14.106,44	-	16.237,58	Sedang
6	Penengahan	5.632,76	5.076,47	-	10.709,24	Sedang
7	Palas	9.353,90	3.535,67	-	12.889,58	Sedang
8	Jati Agung	10.026,11	15.028,04	-	25.054,16	Sedang
9	Ketapang	7.914,35	6.341,60	-	14.255,96	Sedang
10	Sragi	5.683,52	3.074,69	-	8.758,22	Sedang
11	Rajabasa	3.428,30	8.411,60	-	11.839,91	Sedang
12	Candipuro	8.100,83	4.195,91	-	12.296,75	Sedang
13	Merbau Mataram	5.344,76	7.705,19	-	13.049,96	Sedang
14	Bakauheni	2.600,21	3.314,72	-	5.914,94	Sedang

No	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko Kekeringan (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
15	Tanjung Sari	1.681,04	7.930,37	-	9.611,42	Sedang
16	Way Sulan	4.664,54	11,61	-	4.676,15	Rendah
17	Way Panji	2.050,49	1.629,20	-	3.679,70	Sedang
Kab. Lampung Selatan		105.108,98	117.628,95	-	222.737,92	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki risiko bencana kekeringan kelas sedang. Total 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan mengalami risiko sebesar 222.737,92 Ha, dengan risiko tertinggi di Kecamatan Natar, sebesar 26.073,86 Ha, risiko terbesar kedua pada Kecamatan Jati Agung, sebesar 25.054,16 Ha, dan risiko terbesar ketiga pada Kecamatan Kalianda sebesar 17.660,21 Ha.

Gambar II.32 Risiko Kekeringan Per Kecamatan



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

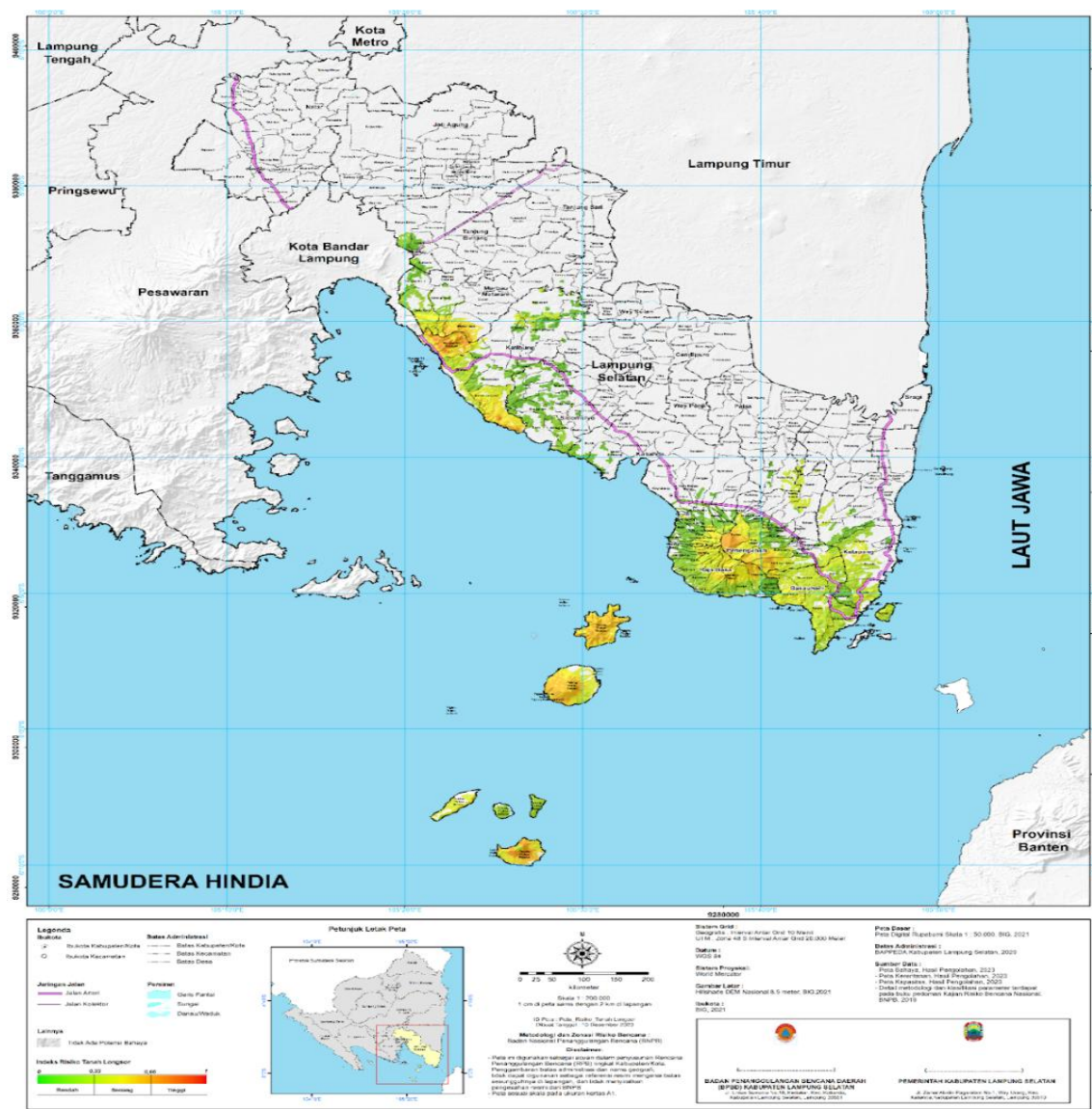
F. Tanah Longsor

Potensi terjadinya longsor di Kabupaten Lampung Selatan memiliki karakteristik khusus yang perlu diambil perhatian. Wilayah yang berdekatan dengan Gunung Rajabasa cenderung memiliki kemiringan lereng lebih dari 15%. Fenomena ini dapat menyebabkan ketidakstabilan lereng. Keberadaan ini menjadi perhatian khusus terutama selama musim hujan, di mana air yang meresap ke dalam tanah dapat meningkatkan beban pada lereng dan mengakibatkan ketidakstabilan yang berpotensi memicu longsor. Risiko ini semakin tinggi karena adanya perkebunan dengan akar dangkal dan area pemukiman.

Berdasarkan hasil kajian, Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi bahaya tinggi terhadap bencana tanah longsor. Kecamatan Rajabasa merupakan wilayah dengan luas bahaya tertinggi (10.573,82 hektar) dibandingkan kecamatan lainnya. Hal demikian disebabkan karena Kecamatan Rajabasa terletak di kaki Gunung Rajabasa, sehingga terdapat topografi tinggi dan perbukitan. Permasalahan utama yang muncul dari bencana longsor ialah permukiman penduduk yang berada di kawasan lereng rawan longsor. Selain itu, pembukaan lahan menyebabkan daerah resapan air tak berfungsi secara maksimal, sehingga menyebabkan tanah longsor.

Tanah longsor merupakan bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Lampung Selatan dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Penentuan bahaya tanah longsor dilakukan dengan cara identifikasi daerah yang berpotensi longsor dan daerah yang berpotensi terdampak longsor.

Gambar II.33 Risiko Tanah Longsor



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Analisis risiko bencana tanah longsor merupakan hasil dari penilaian bahaya, kerentanan dan kapasitas bencana tanah longsor di Kabupaten Lampung Selatan. Penentuan bahaya berdasarkan pada kondisi fisik wilayah yang memiliki potensi untuk mengancam penduduk di wilayah tersebut. Kajian kerentanan terhadap bencana tanah longsor merupakan potensi kerugian maupun kerusakan yang dapat terjadi bila bencana melanda wilayah dengan bahaya tanah longsor. Penilaian kapasitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana tanah longsor.

Tabel II.31 Kelas Risiko Bencana Tanah di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko Tanah Longsor (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Natar	-	-	-	-	-
2	Tanjung Bintang	543,60	48,51	0,00	592,11	Tinggi
3	Kalianda	1.913,22	722,97	0,09	2.636,28	Tinggi
4	Sidomulyo	2.261,70	18,99	0,00	2.280,69	Tinggi
5	Katibung	1.749,06	3.516,30	566,91	5.832,27	Tinggi
6	Penengahan	1.388,34	3.273,03	868,77	5.530,14	Tinggi
7	Palas	70,74	269,91	0,00	340,65	Tinggi
8	Jati Agung	-	-	-	-	-
9	Ketapang	1.786,86	1.252,35	0,00	3.039,21	Tinggi
10	Sragi	364,14	0,54	0,00	364,68	Tinggi
11	Rajabasa	2.746,98	6.901,11	380,61	10.028,70	Sedang
12	Candipuro	132,48	203,94	0,00	336,42	Tinggi
13	Merbau Mataram	705,51	1.232,19	0,54	1.938,24	Tinggi
14	Bakauheni	1.600,83	2.424,78	0,27	4.025,88	Sedang
15	Tanjung Sari	-	-	-	-	-
16	Way Sulan	332,10	905,22	0,00	1.237,32	Tinggi
17	Way Panji	-	-	-	-	-
Kab. Lampung Selatan		15.595,56	20.769,84	1.817,19	38.182,59	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

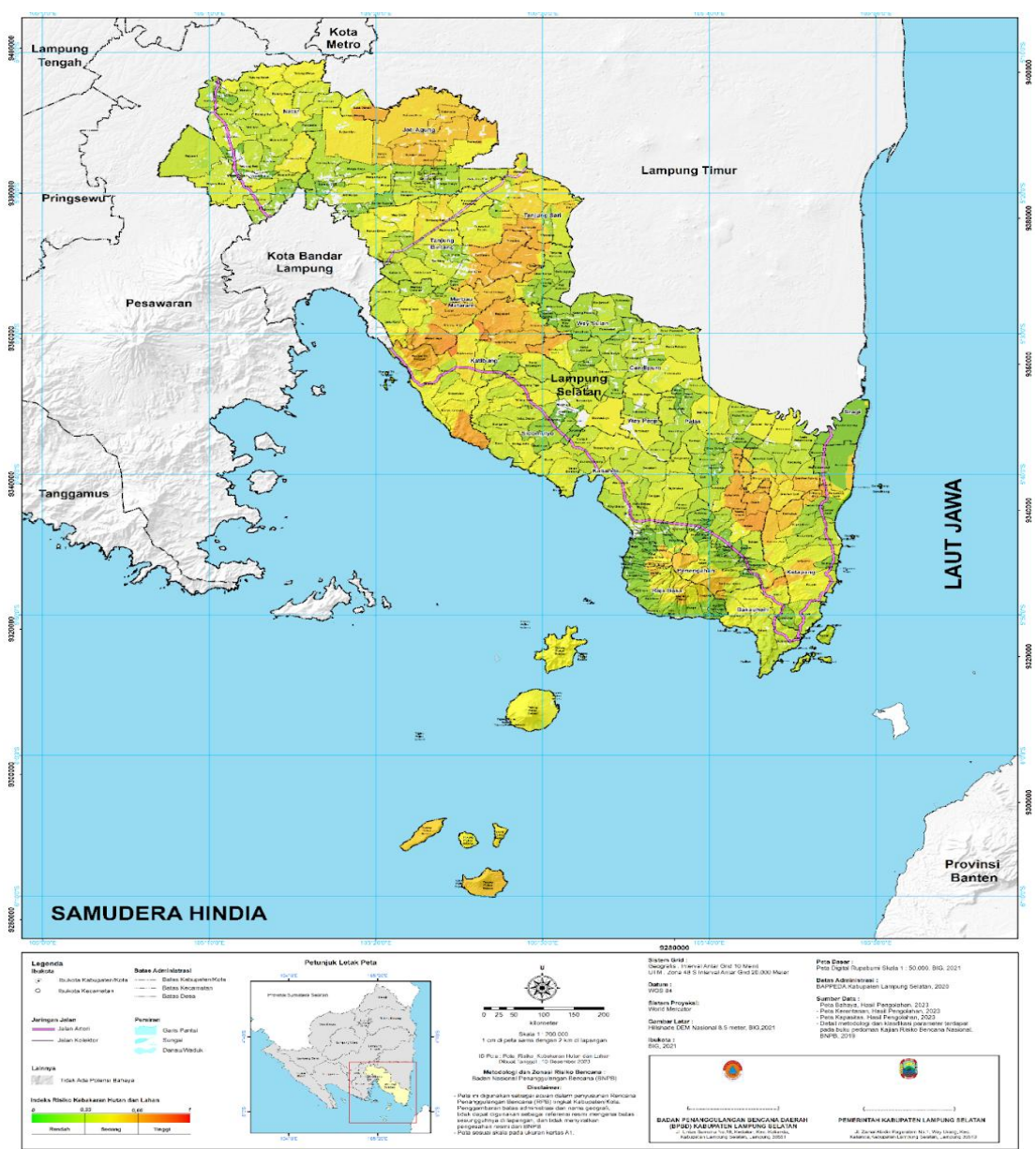
Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki risiko bencana tanah longsor kelas tinggi. Total 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan mengalami risiko sebesar 38.182,59 Ha, dengan risiko tertinggi di Kecamatan Rajabasa, sebesar 10.028,70 Ha (namun masuk kategori kelas sedang), risiko terbesar kedua pada Kecamatan Katibung, sebesar 5.832,27 Ha (kelas tinggi), dan risiko terbesar ketiga pada Kecamatan Penengahan sebesar 5.530,14 Ha (kelas tinggi).

G. Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana karhutla merupakan peristiwa yang secara rutin terjadi di Indonesia, dan dampak kebakaran hutan mencakup kehilangan berbagai manfaat yang dihasilkan oleh ekosistem hutan, termasuk potensi keragaman hayati (Rasyid, 2014). Kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami melibatkan musim kering yang sangat ekstrim akibat pengaruh fenomena El-Nino. Di sisi lain, faktor manusia mencakup penggunaan api dalam persiapan lahan, ketidakpuasan terhadap pengelolaan hutan, dan praktik ilegal seperti penebangan liar. Potensi bencana karhutla melibatkan seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil kajian, seluruh kabupaten tergolong bahaya tinggi terhadap karhutla, dengan luas wilayah tertinggi ialah Kecamatan Natar (25.056,73 Ha) dan Kecamatan Jati Agung (24.134,30 Ha). Pemadaman terhadap titik api karhutla harus dilakukan secara maksimal dan cepat. Kurangnya infrastruktur dan transportasi penunjang untuk memadamkan hutan yang terbakar bisa menjadi pemicu karhutla semakin meluas.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan fenomena yang sering terjadi, khususnya apabila musim kemarau yang berkepanjangan. Data BPBD Lampung Selatan Tahun 2023 menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tersebar di beberapa Kecamatan, seperti Kecamatan Natar, Kalianda, Way Panji, Jati Agung, Tanjung Bintang, Bakauheni, dan Penengahan. Kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebut mengakibatkan kerusakan dan kerugian.

Gambar II.34 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Analisis risiko bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan hasil dari penilaian bahaya, kerentanan dan kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Selatan. Penentuan bahaya berdasarkan pada kondisi fisik wilayah yang memiliki potensi untuk mengancam penduduk di wilayah tersebut. Kajian kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan potensi kerugian maupun kerusakan yang dapat terjadi bila bencana melanda wilayah dengan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan. Penilaian kapasitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan.

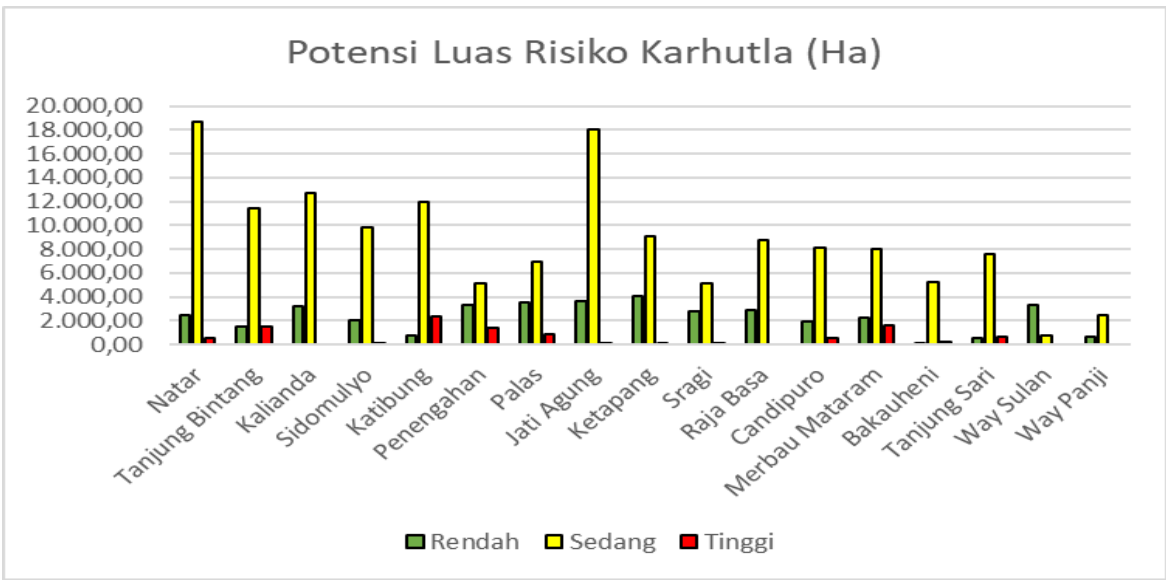
Tabel II.32 Kelas Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko Karhutla (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Natar	2.470,95	18.651,24	502,83	21.625,02	Sedang
2	Tanjung Bintang	1.548,18	11.466,00	1.525,77	14.539,95	Tinggi
3	Kalianda	3.267,45	12.689,19	0,00	15.956,64	Sedang
4	Sidomulyo	2.031,66	9.805,59	0,99	11.838,24	Sedang
5	Katibung	806,76	12.010,95	2.340,63	15.158,34	Tinggi
6	Penengahan	3.339,81	5.135,04	1.449,27	9.924,12	Tinggi
7	Palas	3.583,17	6.943,68	824,67	11.351,52	Tinggi
8	Jati Agung	3.684,51	18.040,68	90,54	21.815,73	Sedang
9	Ketapang	4.024,53	9.073,98	75,33	13.173,84	Sedang
10	Sragi	2.788,11	5.170,32	2,97	7.961,40	Sedang
11	Rajabasa	2.904,30	8.779,14	0,00	11.683,44	Sedang
12	Candipuro	1.890,90	8.090,19	539,01	10.520,10	Sedang
13	Merbau Mataram	2.252,70	7.989,21	1.648,80	11.890,71	Tinggi
14	Bakauheni	181,08	5.243,85	198,54	5.623,47	Sedang
15	Tanjung Sari	530,46	7.568,91	699,48	8.798,85	Tinggi
16	Way Sulan	3.378,42	719,91	0,00	4.098,33	Sedang
17	Way Panji	617,76	2.500,47	0,00	3.118,23	Sedang
Kab. Lampung Selatan		39.300,75	149.878,35	9.898,83	199.077,93	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki risiko bencana kebakaran hutan dan lahan kelas tinggi. Hasil analisis tersebut harus menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah untuk lebih meminimalisir bencana kebakaran hutan dan lahan untuk diwaktu yang akan datang. Total 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan mengalami risiko sebesar 199.077,93 Ha, dengan risiko tertinggi di Kecamatan Jati Agung, sebesar 21.815,73 Ha, risiko terbesar kedua pada Kecamatan Natar, sebesar 21.625,02 Ha, dan risiko terbesar ketiga pada Kecamatan Kalianda sebesar 15.956,64 Ha.

Gambar II.35 Potensi Luas Risiko Karhutla



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

H. Risiko Letusan Gunung Api

Ancaman letusan gunung api teridentifikasi di Kabupaten Lampung Selatan, sebab wilayah memiliki Gunung Anak Karakatau yang terletak di Selat Sunda. Gunung api di tengah laut tersebut terus bererupsi dengan skala kecil. Meskipun tak mengganggu aktivitas masyarakat, namun peristiwa eruptif lebih besar bisa menimbulkan bencana ikutan, seperti tsunami pada tahun 2018. Apabila aktivitas terus meningkat, maka masyarakat dilarang untuk mendekati Gunung Anak Krakatau pada radius tertentu.

Selain Gunung Anak Krakatau, Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki Gunung Rajabasa yang berdiri dengan ketinggian 1.281 mdpl. Gunung berjenis kerucut vulkanik itu hanya berjarak 5 km dari Kalianda, ibukota Kabupaten Lampung Selatan. Hingga saat ini, aktivitas fumarol masih terjadi di kaki gunung, meskipun belum ada studi lebih lanjut yang mengidentifikasi letusan Gunung Rajabasa.

Berdasarkan kajian, Kabupaten Lampung Selatan termasuk dalam bahaya tinggi terhadap letusan gunung api. Kecamatan-kecamatan yang berpotensi terpapar berada di sebelah selatan, atau sekitar Gunung Anak Krakatau dan Gunung Rajabasa. Kecamatan-kecamatan tersebut ialah Kalianda, Penengahan, Palas, Ketapang, Rajabasa, dan Bakauheni. Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi bahaya Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda. Dampak letusan biasanya hanya berupa gas, abu, dan material vulkanik. Meskipun begitu, letusan-letusan kecil tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal di Pulau Sebuku

risiko bencana juga akan meningkat. Tabel di bawah menampilkan hasil kajian risiko bencana Gunung Anak Krakatau.

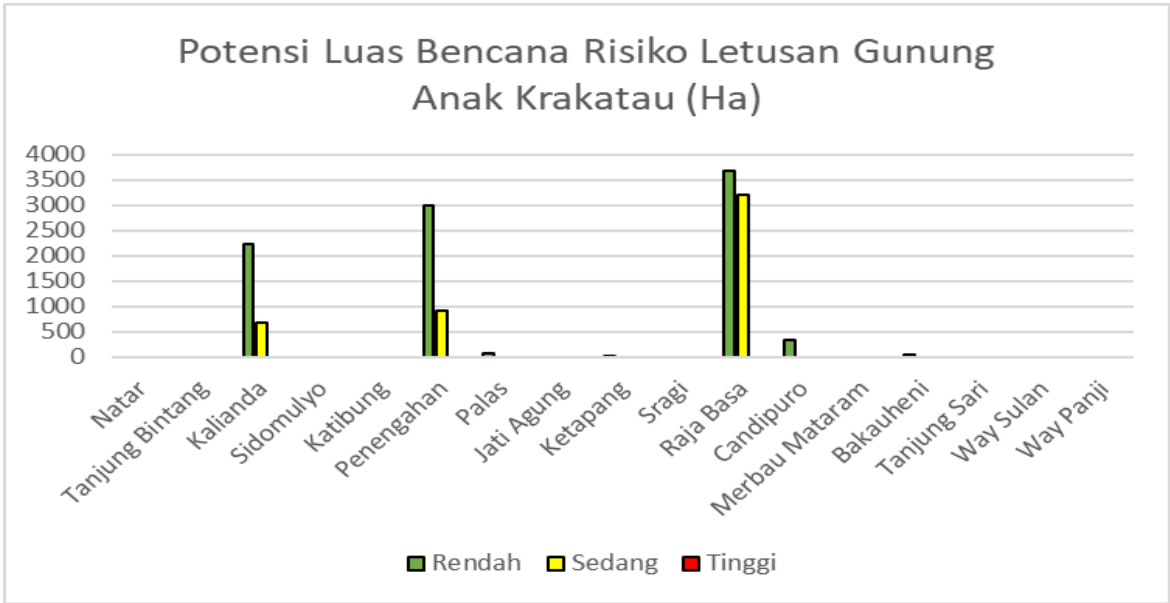
Tabel II.33 Kelas Risiko Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko Letusan Gunung api (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Natar	-	-	-	-	-
2	Tanjung Bintang	-	-	-	-	-
3	Kalianda	2.222,82	669,96		2.892,78	Sedang
4	Sidomulyo	-	-	-	-	-
5	Katibung	-	-	-	-	-
6	Penengahan	2.984,58	920,43		3.905,01	Sedang
7	Palas	74,34	0,00		74,34	Rendah
8	Jati Agung	-	-	-	-	-
9	Ketapang	23,67	0,00		23,67	Rendah
10	Sragi	-	-	-	-	-
11	Rajabasa	3.677,31	3.203,19		6.880,50	Sedang
12	Candipuro	330,21	0,00		330,21	Rendah
13	Merbau Mataram	-	-	-	-	-
14	Bakauheni	40,23	0,00		40,23	Rendah
15	Tanjung Sari	-	-	-	-	-
16	Way Sulan	-	-	-	-	-
17	Way Panji	-	-	-	-	-
Kab. Lampung Selatan		9.353,16	4.793,58		14.146,74	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Analisis risiko bencana letusan Gunung Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan mengindikasikan variasi tingkat risiko di berbagai kecamatan. Kecamatan Kalianda dan Rajabasa menunjukkan risiko tertinggi dengan luas risiko masing-masing sebesar 2.892,78 hektar dan 6.880,50 hektar, menempatkannya dalam kategori risiko sedang. Kecamatan Penengahan juga memiliki risiko yang signifikan sebesar 3.905,01 hektar, juga masuk dalam kategori risiko sedang. Di sisi lain, kecamatan Palas, Ketapang, Candipuro, dan Bakauheni menunjukkan risiko yang relatif lebih rendah, dengan luas risiko di bawah 100 hektar, dan masuk dalam kategori risiko rendah. Total luas risiko bencana letusan gunung api di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 14.146,74 hektar, dengan kategori risiko sedang. Grafik berikut menggambarkan perbandingan luas risiko bencana letusan Gunung Anak Krakatau.

Gambar II.37 Potensi Luas Bencana Risiko Letusan Gunung Anak Krakatau



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

I. Risiko Multibahaya

Analisis multibahaya meliputi gabungan dari delapan jenis bahaya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu bahaya banjir, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstim, kekeringan, tanah longsor, karhutla, dan letusan gunung api. Suatu wilayah dapat memiliki risiko multibahaya, sehingga diperlukan perhatian lebih oleh pemerintah daerah, pusat, dan pihak terkait dalam penanggulangan bencana. Analisis multibahaya meliputi potensi luas multibahaya, kerentanan multibahaya, kapasitas multibahaya, dan risiko multibahaya. Risiko multibahaya ialah perhitungan dari hasil kajian potensi multibahaya, kerentanan multibahaya, dan kapasitas multibahaya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel II.34 Potensi Luas Risiko Multibencana per Kecamatan

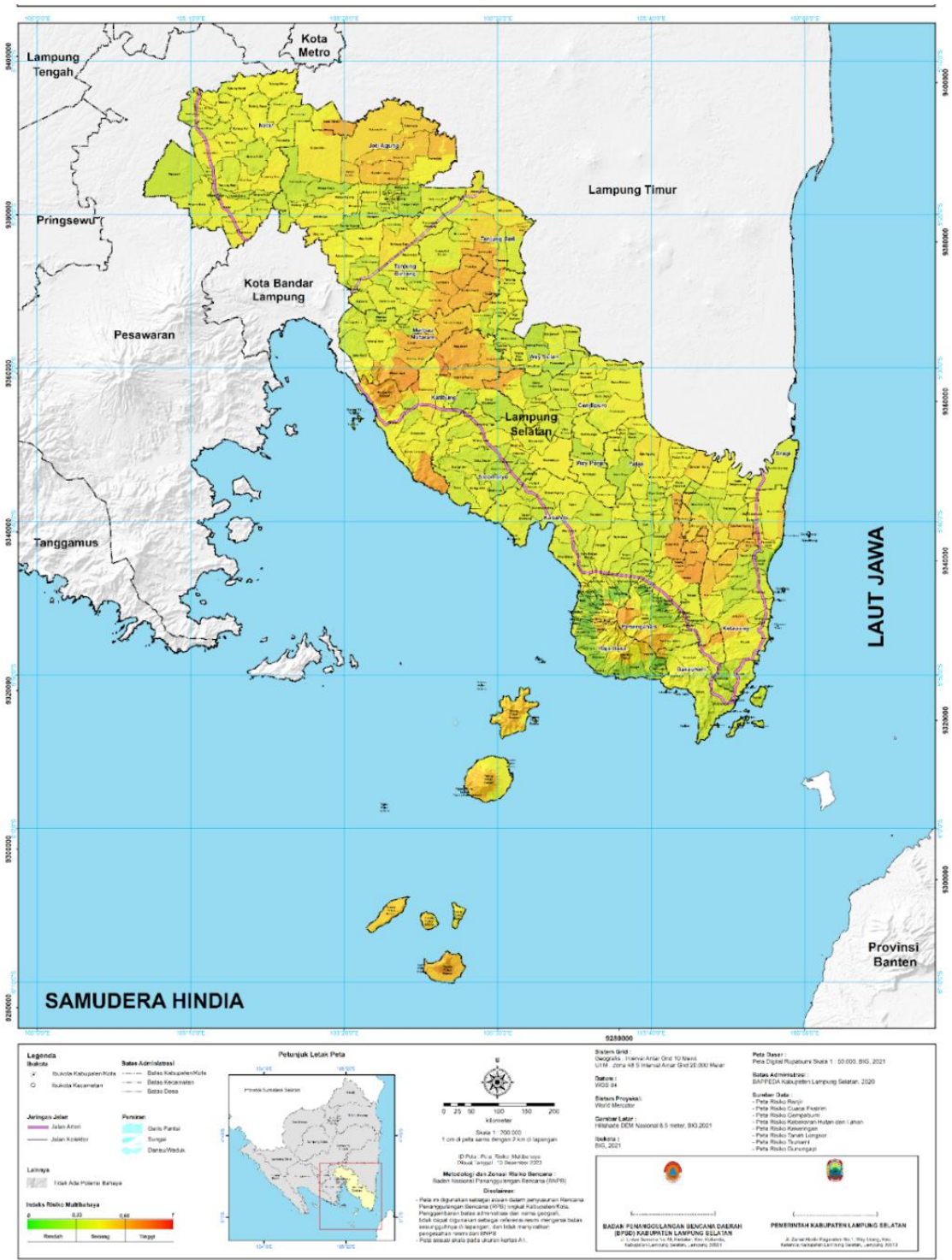
No.	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko Multibencana (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Natar	641,34	20.380,15	531,9	21.553,39	Sedang
2	Tanjung Bintang	1.161,45	11.405,80	48,33	12.615,58	Sedang
3	Kalianda	1.413,00	23.274,73	1.809,54	26.497,27	Tinggi
4	Sidomulyo	764,28	10.565,11	1,44	11.330,83	Sedang
5	Katibung	415,53	6.374,80	1.855,80	8.646,13	Tinggi
6	Penengahan	532,35	9.948,97	662,76	11.144,08	Tinggi
7	Palas	118,89	24.799,33	811,08	25.729,30	Sedang
8	Jati Agung	339,39	21.495,79	1.071,09	22.906,27	Tinggi
9	Ketapang	538,2	10.218,07	1.831,86	12.588,13	Tinggi

No.	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko Multibencana (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
10	Sragi	6,93	7.253,02	1.085,22	8.345,17	Tinggi
11	Rajabasa	274,95	13.220,38	9,54	13.504,87	Sedang
12	Candipuro	887,67	10.541,71	1,62	11.431,00	Sedang
13	Merbau Mataram	369,99	18.257,14	380,79	19.007,92	Sedang
14	Bakauheni	29,97	4.010,41	664,47	4.704,85	Tinggi
15	Tanjung Sari	236,79	5.613,85	6,57	5.857,21	Sedang
16	Way Sulan	108,27	5.517,64	5,94	5.631,85	Sedang
17	Way Panji	368,82	875,17	0	1.243,99	Sedang
Kab. Lampung Selatan		8.207,82	203.752,15	10.777,95	222.737,92	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

Tabel luas risiko multibahaya di Kabupaten Lampung Selatan memberikan gambaran luas area yang terpapar risiko bencana dengan memperhitungkan tingkat risiko yang terbagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Kecamatan tertinggi ditempati oleh Kalianda (26.497,27 hektar) dengan kelas risiko tinggi, diikuti oleh Palas (25.729,30 hektar) dengan kelas sedang, dan Jati Agung (22.906,27 hektar) dengan kelas tinggi. Hal ini menandakan bahwa sejumlah wilayah di Kabupaten Lampung Selatan memiliki tingkat risiko yang perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Pentingnya peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah-wilayah dengan risiko tinggi juga dapat menjadi fokus untuk meminimalkan dampak risiko bencana. Grafik berikut menggambarkan perbandingan luas risiko multibahaya per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar II.38 Peta Risiko Multibahaya di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Lampung Selatan 2023 – 2027

2.1.1.7 Demografi

Penduduk Lampung Selatan menurut data tahun 2024 berjumlah 1.124.683 jiwa yang meningkat sebesar 1,27% dari tahun 2023. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk Lampung Selatan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar 1,65 % per tahun (BPS Provinsi Lampung, 2024). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Tanjung Bintang

merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar yaitu sebesar 2,11 persen per tahun dan 2,09 persen per tahun dan merupakan dua kecamatan dengan persentase laju pertumbuhan penduduk di atas 2%. Sementara itu terdapat empat kecamatan lainnya yang memiliki persentase laju pertumbuhan penduduk di atas rata-rata Kabupaten Lampung Selatan (1,39%) yaitu Kecamatan Ketapang (1,67%), Kecamatan Sidomulyo (1,62%), Natar (1,53%) dan Kecamatan Merbau Mataram (1,51%). Sedangkan Kecamatan Rajabasa merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan terkecil yaitu sebesar 0,67% per tahun.

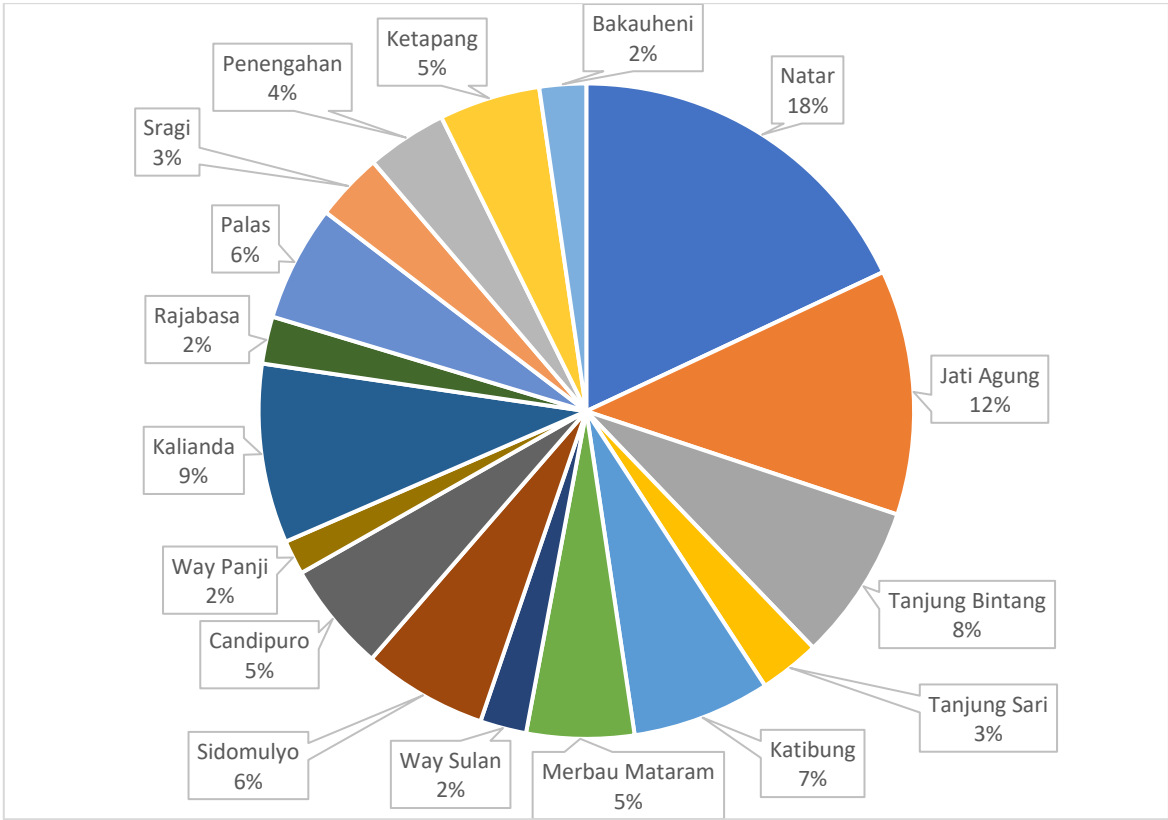
Tabel II.35 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Natar	203.709
Jati Agung	129.171
Tanjung Bintang	89.312
Tanjung Sari	34.659
Katibung	76.403
Merbau Mataram	60.233
Way Sulan	26.110
Sidomulyo	69.592
Candipuro	61.096
Way Panji	19.100
Kalianda	100.311
Rajabasa	26.077
Palas	64.616
Sragi	37.351
Penengahan	45.049
Ketapang	56.358
Bakauheni	25.536
Lampung Selatan	1.124.683

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Tabel di atas juga menunjukkan Kecamatan Natar merupakan kecamatan dengan populasi penduduk terbesar, yang dipengaruhi karena lokasi Kecamatan Natar yang berdekatan dengan ibukota Provinsi Lampung, Bandar Lampung, dan juga karena keberadaan bandara terbesar di Provinsi Lampung, Bandara Internasional Radin Inten II. Ditambah, dengan semakin padatnya penduduk Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mencari alternatif hunian ke daerah pinggiran Kota Bandar Lampung, seperti Kecamatan Natar. Begitu juga dengan Kecamatan Jati Agung, dengan populasi penduduk lebih dari seratus ribu jiwa, merupakan daerah tetangga Kota Bandar Lampung yang juga merupakan daerah alternatif investasi bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Gambar II.39 Distribusi Penduduk Lampung Selatan



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Sementara Gambar di atas menunjukkan data sebaran penduduk di Lampung Selatan tahun 2024. Terlihat bahwa Kecamatan Natar memiliki porsi terbesar dibandingkan kecamatan lainnya, diikuti oleh Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Kalianda. Sementara itu, proporsi jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Rajabasa, Bakauheni, Way Panji dan Way Sulan dengan rata-rata distribusi luas berada pada kisaran 2 persen.

Tabel II.36 Kepadatan Penduduk Lampung Selatan

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
Natar	953
Jati Agung	785
Tanjung Bintang	688
Tanjung Sari	335
Katibung	435
Merbau Mataram	529
Way Sulan	561
Sidomulyo	568
Candipuro	721
Way Panji	497
Kalianda	622
Rajabasa	260
Palas	377

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
Sragi	456
Penengahan	339
Ketapang	519
Bakauheni	447
Lampung Selatan	535

Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung Selatan, 2024 (data diolah)

Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan penduduk di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Salah satu bagian dari kepadatan penduduk di suatu wilayah berdasarkan Kajian Kependudukan, 2024, adalah kepadatan penduduk aritmatika, yang menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilyah.

Berdasarkan Tabel di atas rata-rata kepadatan penduduk aritmatika di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 535 jiwa/km², yang artinya setiap 1 kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan dihuni oleh 535 jiwa. Kecamatan Natar dan Kecamatan Jati Agung memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu lebih dari 10% dan kepadatan penduduk aritmatika juga yang terbesar yaitu 953 jiwa/km² dan 785 jiwa/km².

Sementara Kecamatan Kalianda yang merupakan ibukota Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan memiliki kepadatan penduduk sebesar 8,83% dan kepadatan aritmatika sebesar 622 jiwa/km². Sedangkan presentase kepadatan penduduk terkecil dengan tingkat kepadatan aritmatika terkecil adalah Kecamatan Rajabasa, dengan kepadatan penduduk aritmatika sebesar 260 jiwa/km².

Tabel II.37 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan

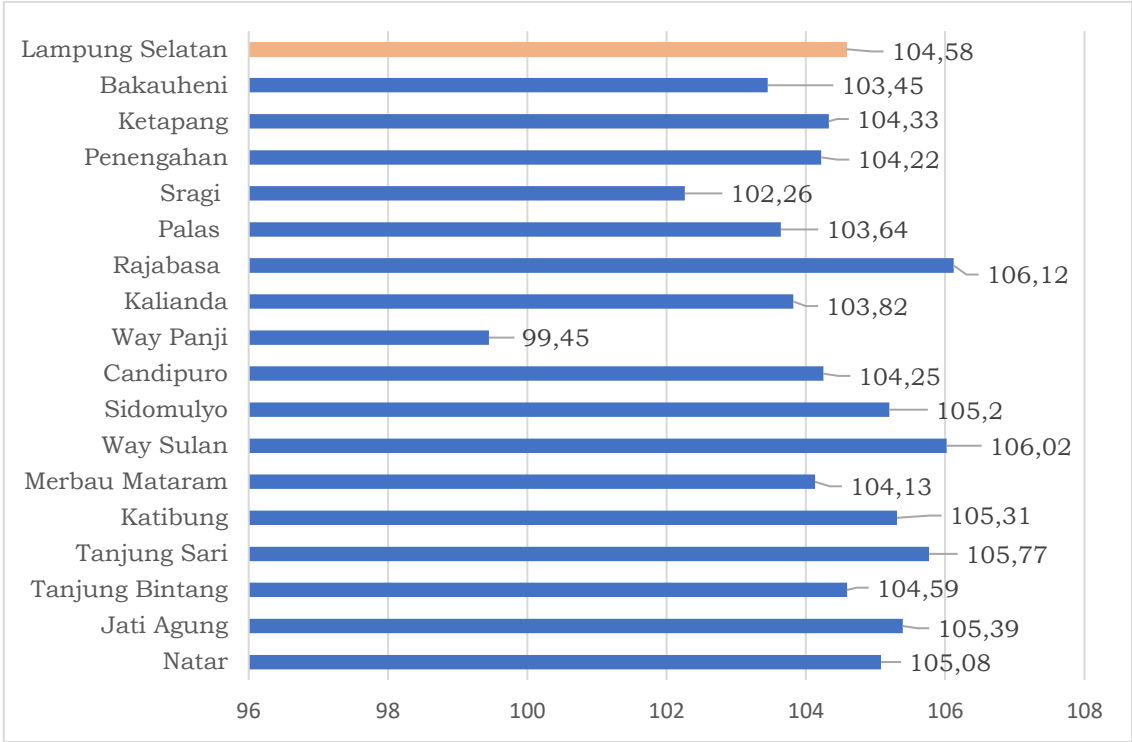
Kelompok Umur (baru)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	41.309	39.031	80.340
5-9	51.805	48.629	100.434
10-14	53.726	50.601	104.327
15-19	41.254	39.809	81.063
20-24	46.173	44.163	90.336
25-29	44.987	42.331	87.318
30-34	42.717	40.923	83.640
35-39	42.591	42.232	84.823
40-44	44.976	44.689	89.665

Kelompok Umur (baru)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
45-49	41.350	40.533	81.883
50-54	33.459	32.584	66.043
55-59	27.249	27.409	54.658
60-64	21.236	22.132	43.368
65-69	15.715	14.722	30.437
70-74	10.974	10.091	21.065
75+	12.353	12.930	25.283
Jumlah	571.874	552.809	1.124.683

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum di Kabupaten Lampung Selatan, jumlah anak-anak dengan rentang usia sampai dengan 10 tahun relatif lebih banyak dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Pada kelompok umur usia produktif, 20 sampai dengan 45 tahun, jumlahnya cukup mendominasi dengan jumlah berkisar 80 ribuan jiwa di setiap kelompok umurnya. Untuk kelompok lanjut usia, relatif lebih sedikit dengan kelompok umur di atas 70 tahunan menjadi kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil, yaitu hanya berkisar 19 ribuan jiwa.

Gambar II.40 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara umum rasio jenis kelamin penduduk laki-laki di Kabupaten Lampung Selatan lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, kecuali Kecamatan Way Panji. Pada

gambar di atas juga diketahui bahwa sebagian besar kecamatan memiliki *sex ratio* atau rasio jenis kelamin lebih dari 100 persen, kecuali Kecamatan Way Panji. Beberapa kecamatan memiliki *sex ratio* di atas rata-rata *sex ratio* Kabupaten Lampung Selatan, di antaranya Kecamatan Rajabasa yang memiliki *sex ratio* tertinggi di antara kecamatan lainnya.

Tabel II.38 Proyeksi Jumlah Penduduk Lampung Selatan 2025-2045 per Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	Kondisi 2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Natar	193.446	192.339	192.894	193.449	194.004	194.559
2	Jati Agung	138.637	170.916	210.161	249.406	288.651	327.896
3	Tanjung Bintang	86.431	93.018	102.808	112.598	122.388	132.178
4	Tanjung Sari	33.309	36.360	40.335	44.310	48.285	52.260
5	Katibung	75.578	81.329	88.809	96.289	103.769	111.249
6	Merbau Mataram	60.809	69.350	80.880	92.410	103.940	115.470
7	Way Sulan	25.172	27.310	29.810	32.310	34.810	37.310
8	Sidomulyo	68.920	78.729	90.324	101.919	113.514	125.109
9	Candipuro	59.157	62.493	66.513	70.533	74.553	78.573
10	Way Panji	18.576	19.985	21.575	23.165	24.755	26.345
11	Kalianda	97.305	104.203	112.608	121.013	129.418	137.823
12	Rajabasa	26.197	29.250	33.005	36.760	40.515	44.270
13	Palas	62.859	67.921	73.821	79.721	85.621	91.521
14	Sragi	36.769	39.902	43.417	46.932	50.447	53.962
15	Penengahan	44.880	51.075	58.650	66.225	73.800	81.375
16	Ketapang	54.914	58.580	63.200	67.820	72.440	77.060
17	Bakauheni	25.144	25.766	26.796	27.826	28.856	29.886
	Jumlah	1.108.102	1.208.526	1.335.606	1.462.686	1.589.766	1.716.846

Sumber: RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045

Tabel II.39 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Laki-Laki	566.001	583.962	628.864	673.766	718.668	763.570
2	Perempuan	542.134	560.919	607.879	654.840	701.800	748.761
3	Rasio	104,40	104,11	103,45	102,89	102,40	101,98

Sumber: RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045

Tabel II.40 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	0-4	82.896	100.068	102.597	105.126	107.655	110.184
2	5-9	99.401	97.992	101.267	104.542	107.817	111.092
3	10-14	103.526	93.468	98.262	103.057	107.851	112.645
4	15-19	72.672	89.480	92.345	95.209	98.074	100.938
5	20-24	90.938	89.274	89.359	89.444	89.529	89.614
6	25-29	85.928	88.757	90.820	92.883	94.946	97.009
7	30-34	83.078	86.137	88.630	91.124	93.617	96.110
8	35-39	86.258	88.951	93.158	97.365	101.572	105.780
9	40-44	89.294	88.091	87.651	92.211	96.770	101.330
10	45-49	77.676	75.419	81.312	87.204	93.097	98.989
11	50-54	65.329	63.422	69.029	74.636	80.242	85.849

No	Kelompok Umur	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
12	55-59	51.142	53.133	58.463	63.793	69.123	74.452
13	60-64	42.132	41.357	46.143	50.929	55.715	60.501
14	65-69	28.366	29.878	33.696	37.513	41.331	45.149
15	70-74	19.110	18.895	21.926	24.956	27.986	31.017
16	75+	23.630	18.531	20.801	23.070	25.340	27.610
17	Angka Ketergantungan		47,28	47,50	47,71	47,90	48,07

Sumber: RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam penghitungannya nilai PDRB didasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (harga pada tahun tertentu).

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa geliat perekonomian Kabupaten Lampung Selatan cenderung stabil di angka 4-5% dari tahun 2019 sampai tahun 2024 yang mencapai 4,62%. Namun, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga -1,73 persen. Konstraksi ini disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19.

Tabel II.41 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha		Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,07	1,02	0,63	2,69	0,12	-1,93
B	Pertambangan dan Penggalian	5,83	-0,46	-4,76	2,11	1,94	3,85
C	Industri Pengolahan	6,21	-4,10	3,07	2,31	2,41	6,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,47	4,58	4,52	4,80	2,91	2,22
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,08	3,73	2,45	5,25	4,48	-0,86
F	Konstruksi	7,74	-3,49	5,48	7,24	8,25	5,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,20	-1,22	4,52	11,03	13,35	9,94
H	Transportasi dan Pergudangan	6,04	-15,16	0,11	13,12	11,24	9,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,85	-4,09	0,40	10,73	11,55	5
J	Informasi dan Komunikasi	7,81	8,71	5,91	0,91	4,50	7,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,32	4,52	3,14	-1,77	0,70	6,24
L	Real Estate	5,14	-1,82	2,26	2,29	1,47	6,61
M,N	Jasa Perusahaan	4,50	-1,68	1,53	14,8	1,81	9,24

Lapangan Usaha		Tahun					2024
		2019	2020	2021	2022	2023	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,86	4,90	4,03	-0,77	1,48	7,13
P	Jasa Pendidikan	7,94	2,54	1,30	2,50	2,54	1,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,66	9,73	3,43	-0,10	3,70	4,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,89	-4,25	-1,18	25,20	15,32	9,86
Produk Domestik Regional Bruto		5,13	-1,73	2,6	4,81	4,82	4,62

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

Sepanjang tahun 2024, beberapa sektor mengalami kontraksi. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Jasa Lainnya dan Perdagangan Besar dan Eceran yang masing-masing tumbuh 9.86% dan 9.94%. Lalu ada Jasa Transportasi dan Pergudangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,81%.

Tabel II.42 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2024

Tahun	Lampung Selatan	Lampung	Nasional
2019	5,13	5,26	5,02
2020	-1,73	-1,67	-2,07
2021	2,68	2,79	3,69
2022	4,81	4,28	5,31
2023	4,82	4,55	5,05
2024	4,62	4,57	5,03

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan kembali mengalami kenaikan sebesar 2,68%. Hal tersebut tidak terlepas dari segala upaya pemulihan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Pada Tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan mencapai 4,81% dan 4,82%, melampaui capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,28% dan 4,55%, namun masih berada di bawah capaian Nasional sebesar 5,31% dan 5,05%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh aktivitas perekonomian masyarakat yang berangsur normal serta pembangunan infrastruktur yang semakin intensif di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan pada tahun 2024 sebesar 4,62% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,57% namun tetap lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%.

Produktivitas merupakan salah satu indikator paling penting dalam aktivitas ekonomi. Produktivitas merupakan kunci pendorong vital dalam pertumbuhan ekonomi, yakni sebagai daya ungkit (*leverage*) bagi

pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Salah satu kriteria yang sering digunakan untuk mengetahui keadaan perekonomian di suatu daerah adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

Sektor berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) sektor/lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, Pertambangan Dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik Dan Gas, Pengadaan Air, Sampah Dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar Dan Eceran, Transportasi Dan Pergudangan, Informasi Dan Komunikasi, Jasa Keuangan Dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun 2019-2023 (Milyar rupiah) adalah sebesar 30.267,88; 29.743,30; 33.528,67 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 44.685; 44.293,00; 46.090,82; 51.480,77; 55.759,40. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah per sektor/lapangan usaha (ADHK dan ADHB) di Kabupaten Lampung Selatan selama 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel II.43 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

KATEGORI	PDRB KAB. LAMPUNG SELATAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.487,56	8.541,41	8.761,20	8.768,34	8.599,31
B. Pertambangan dan Penggalian	494,35	470,82	480,76	490,10	508,96
C. Industri Pengolahan	6.932,86	7.145,69	7.313,03	7.489,71	7.941,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	42,01	43,91	46,02	47,36	48,41
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	37,44	38,36	40,38	42,19	41,83
F. Konstruksi	3.775,26	3.982,00	4.272,34	4.625,29	4.875,58
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.908,45	4.085,04	4.539,38	5.146,30	5.657,62
H. Transportasi dan Pergudangan	1.533,74	1.535,38	1.738,72	1.934,67	2.124,42
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	389,75	391,31	433,31	483,35	507,51
J. Informasi dan Komunikasi	1.179,04	1.248,75	1.260,15	1.316,87	1.411,49
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	519,98	536,33	526,84	530,54	563,67
L. Real Estate	690,68	706,30	722,44	733,08	781,52
M,N. Jasa Perusahaan	24,22	24,59	28,24	28,75	31,40
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	633,04	658,55	653,47	663,15	710,41
P. Jasa Pendidikan	733,75	743,31	761,93	781,25	792,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	190,16	196,69	196,50	203,77	212,81
R,S,T,U. Jasa Lainnya	171,00	168,98	211,55	243,96	268,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29.743,30	30.517,40	31.986,26	33.528,67	35.077,05

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Selatan, 2024

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah PDRB Kabupaten Lampung Selatan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha relatif meningkat dari tahun ke tahun, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan yang mampu memberikan sumbangan terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel II.44 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

KATEGORI	PDRB KAB. LAMPUNG SELATAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.060,98	13.278,98	14.528,95	15.331,94	15.665,73
B. Pertambangan dan Penggalian	724,57	703,48	745,70	783,92	814,03
C. Industri Pengolahan	10.639,86	11.257,90	12.064,88	12.797,49	14.176,48
D. Pengadaan Listrik dan Gas	51,84	54,18	57,44	59,31	57,22
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57,91	59,39	63,18	66,70	69,91
F. Konstruksi	5.491,44	5.967,11	6.776,74	7.507,88	7.971,04
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.513,37	5.765,84	7.045,27	8.361,88	9.436,50
H. Transportasi dan Pergudangan	2.337,56	2.346,16	2.946,69	3.610,88	4.030,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	645,11	656,61	740,40	836,05	897,48
J. Informasi dan Komunikasi	1.335,51	1.384,55	1.409,81	1.481,04	1.584,53
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	782,15	851,07	914,93	937,69	1.006,79
L. Real Estate	959,50	983,29	1.036,17	1.073,94	1.164,31
M,N. Jasa Perusahaan	38,60	39,52	47,11	49,60	55,75
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.033,60	1.072,00	1.087,79	1.118,71	1.232,67
P. Jasa Pendidikan	1.098,40	1.134,38	1.200,68	1.272,34	1.381,36
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	272,54	287,39	295,70	316,00	338,89
R,S,T,U. Jasa Lainnya	250,07	248,95	323,55	389,25	437,81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	44.293,00	46.090,82	51.285,00	55.994,61	60.320,97

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Selatan, 2024

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan serta dapat juga digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Dari Tabel di atas, jumlah PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan menurut lapangan usaha cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan yang mampu memberikan sumbangan terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2020 hingga 2024, yakni dengan

persentase kontribusi sebesar 30% dari total keseluruhan PDRB ADHB. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap perekonomian baik terhadap struktur, laju pertumbuhan ekonomi maupun terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel II.45 Kontribusi Sektor PDRB berdasarkan Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024

KATEGORI	DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KAB. LAMPUNG SELATAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,49	28,81	28,33	27,38	25,97
B. Pertambangan dan Penggalian	1,64	1,53	1,45	1,40	1,35
C. Industri Pengolahan	24,02	24,43	23,53	22,85	23,50
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,11	0,11	0,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
F. Konstruksi	12,40	12,95	13,21	13,41	13,21
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,45	12,51	13,74	14,93	15,64
H. Transportasi dan Pergudangan	5,28	5,09	5,75	6,45	6,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,46	1,42	1,44	1,49	1,49
J. Informasi dan Komunikasi	3,02	3,00	2,75	2,64	2,63
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	1,85	1,78	1,67	1,67
L. Real Estate	2,17	2,13	2,02	1,92	1,93
M,N. Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	2,33	2,12	2,00	2,04
P. Jasa Pendidikan	2,48	2,46	2,34	2,27	2,29
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,62	0,58	0,56	0,56
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,56	0,54	0,63	0,70	0,73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Selatan, 2024

Kaitan dengan produktivitas dimana sektor yang memberikan kontribusi dan membuat daya ungkit (*leverage*) bagi pertumbuhan ekonomi adalah sektor/lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, Pertambangan Dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik Dan Gas, Pengadaan Air, Sampah Dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar Dan Eceran, Transportasi Dan Pergudangan, Informasi Dan Komunikasi, Jasa Keuangan Dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung stabil walaupun sempat terjadi penurunan. Sementara, sektor industri pengolahan mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun

terakhir, sedangkan sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu hingga tahun 2020, namun terjadi penurunan di tahun 2022 yang disebabkan lesunya perekonomian karena Pandemi Covid-19.

Tabel II.46 Sektor Basis berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,99	1,00	1,01	1,02	1,01
B. Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,28	0,29	0,29	0,29
C. Industri Pengolahan	1,32	1,27	1,23	1,24	1,23
D. /Electricity and Gas	0,76	0,75	0,74	0,78	0,74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya	1,20	1,20	1,20	1,18	1,20
F. Konstruksi	1,25	1,28	1,31	1,29	1,31
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	1,04	1,04	1,05	1,12	1,05
H. Transportasi dan Pergudangan	1,16	1,15	1,12	1,01	1,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,93	0,90	0,90	0,90
J. Informasi dan Komunikasi	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82
L. Real Estat	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76
M,N. Jasa Perusahaan	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
P. Jasa Pendidikan	0,83	0,82	0,81	0,79	0,81
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,64	0,63	0,62	0,63	0,62

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Selatan, 2024

Sektor basis merupakan sektor unggulan, dimana sektor yang bersangkutan bisa memenuhi kebutuhan dalam maupun luar daerah dan sangat berpotensi positif pada perekonomian daerah apabila dikembangkan dengan tepat. Berdasarkan Tabel di atas diperoleh data bahwa sektor basis di Kabupaten Lampung Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat 6 sektor ($LQ > 1$), yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya; Sektor Konstruksi; serta Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan, sedangkan 11 sektor lainnya termasuk sektor non basis.

Berdasarkan kondisi ini kaitannya dengan produktivitas daerah bahwa sektor -sektor yang menjadi sektor basis merupakan sektor kuat disebabkan karena nilai yang lebih besar dari satu ($LQ>1$). Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor tersebut potensial dalam menunjang perekonomian Kabupaten Lampung Selatan (mampu memenuhi

kebutuhan internal) dan mempunyai kemampuan untuk ekspor/memenuhi kebutuhan daerah lain. Sedangkan yang menjadi sektor non basis yaitu sektor-sektor yang nilainya lebih kecil dari satu ($LQ < 1$) sehingga menyebabkan sektor-sektor ini mempunyai kecenderungan untuk impor dari daerah lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan adanya ekspor maka Kabupaten Lampung Selatan akan memperoleh pendapatan. Dengan adanya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di Kabupaten Lampung Selatan, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru.

2.1.2.1.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Indikator pendapatan per kapita dapat juga digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk. PDRB ADHK per kapita menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Tabel II.47 PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024 (Rp/Jiwa)

Tahun	PDRB ADHB Per Kapita	PDRB ADHK Per Kapita
2020	41.704.922	28.005.367
2021	42.846.721	28.369.435
2022	47.210.058	29.332.760
2023	50.461.132	30.342.760
2024	55.573.345	34.654.365

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa trend laju pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2020 mengalami penurunan, namun kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2021 sampai 2023, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku.

Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 55.573.345, sementara berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 34.654.365. PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain dipengaruhi inflasi yang berdampak terhadap daya beli, juga karena pola distribusi pendapatan regional Lampung Selatan yang tidak mutlak merata.

2.1.2.1.3 Rasio Gini

Rasio Gini atau Koefisien Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini (Gini Rasio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Tabel II.48 Gini Rasio Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	0,295	0,281	0,284	0,274	0.272
Tanggamus	0,293	0,265	0,261	0,256	0.254
Lampung Selatan	0,299	0,268	0,260	0,257	0.255
Lampung Timur	0,315	0,284	0,283	0,315	0.318
Lampung Tengah	0,304	0,291	0,299	0,285	0.283
Lampung Utara	0,301	0,275	0,284	0,300	0.305
Way Kanan	0,311	0,283	0,283	0,281	0.279
Tulangbawang	0,279	0,292	0,287	0,284	0.282
Pesawaran	0,288	0,299	0,251	0,287	0.290
Pringsewu	0,31	0,277	0,272	0,306	0.309
Mesuji	0,308	0,272	0,280	0,285	0.288
Tulang Bawang Barat	0,272	0,282	0,261	0,274	0.277
Pesisir Barat	0,281	0,322	0,290	0,315	0.320
Kota Bandar Lampung	0,359	0,344	0,369	0,381	0.382
Kota Metro	0,3	0,309	0,299	0,289	0.291
Provinsi Lampung	0,327	0,323	0,314	0,324	3,323

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan selama periode 2020-2024. Berdasarkan data Gini Ratio, wilayah ini berhasil menurunkan angka ketimpangan dari 0,299 pada tahun 2020 menjadi 0,255 di tahun 2024, penurunan sebesar 0,044 poin yang menjadikannya salah satu

wilayah dengan perbaikan terbaik di Provinsi Lampung. Prestasi ini tidak terlepas dari efektivitas beberapa program pembangunan seperti optimalisasi sektor pertanian dan perikanan yang merata, program padat karya infrastruktur pedesaan, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu menjadi perhatian khusus. Ketimpangan spasial antara wilayah pesisir dan pedalaman masih terlihat, dengan desa-desa di kawasan pesisir seperti Candipuro dan Kalianda menunjukkan perkembangan yang lebih lambat dibanding wilayah lain. Selain itu, kesenjangan akses ekonomi bagi UMKM di sektor informal dan keterbatasan diversifikasi ekonomi di luar sektor pertanian menjadi hambatan yang perlu segera diatasi.

Untuk mempertahankan momentum positif ini, pemerintah daerah perlu memperkuat tiga strategi utama: pertama, meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah tertinggal melalui program padat karya berbasis komunitas; kedua, memperluas akses permodalan dan pelatihan bagi UMKM lokal; dan ketiga, mendorong investasi di sektor non-pertanian seperti pariwisata bahari dan industri pengolahan hasil perikanan. Dengan fokus pada pemerataan yang inklusif, Lampung Selatan berpotensi menjadi contoh sukses pengurangan ketimpangan di tingkat regional.

2.1.2.1.4 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Tabel II.49 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2024

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	12,92	12,52	12,82	11,71	11,17	10,68
Tanggamus	12,05	11,68	11,81	10,98	10,52	10,28
Lampung Selatan	14,31	14,08	14,19	13,14	12,79	12,57
Lampung Timur	15,24	14,62	15,08	13,98	13,80	13,19
Lampung Tengah	12,03	11,82	11,99	10,96	10,65	10,37
Lampung Utara	19,90	19,30	19,63	18,41	17,17	16,92
Way Kanan	13,07	12,90	13,09	11,76	11,02	10,43
Tulang Bawang	9,35	9,33	9,67	8,42	8,04	7,88
Pesawaran	15,19	14,76	15,11	13,85	12,89	11,86
Pringsewu	10,15	9,97	10,11	9,34	9,14	8,32
Mesuji	7,47	7,33	7,54	6,84	6,73	6,31
Tulang Bawang Barat	7,75	7,39	8,32	7,44	7,25	7,22
Pesisir Barat	14,48	14,29	14,81	13,84	13,49	12,64
Bandar Lampung	8,71	8,81	9,11	8,21	7,77	7,37
Metro	8,68	8,47	8,93	7,87	7,28	6,78
Provinsi Lampung	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11	10,69

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Tabel di atas menunjukkan secara umum presentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan masih di atas rata-rata Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir. Namun demikian, presentase ini masih lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten lainnya, seperti Lampung Utara, Lampung Timur dan Pesisir Barat.

2.1.2.1.5 Kesenjangan Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Lampung Selatan pada 2024 mencapai 132,38 ribu orang (12,57 persen) berkurang sebesar seribu orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2023 yang tercatat sebesar 133,67 ribu orang (12,79 persen). Garis kemiskinan pada 2024 sebesar Rp528.226.

Tabel II.50 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	389.236	144,44	14,31	2,32	0,58
2020	422.328	143,33	14,08	2,52	0,60
2021	439.421	145,85	14,19	2,37	0,60
2022	470.857	136,21	13,14	1,87	0,41
2023	508.494	133,67	12,79	2,16	0,55
2024	528.226	132,38	12,57	1,94	0,46

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Hingga tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan cenderung stabil di angka 1,94% dan pada indeks keparahan kemiskinan berada pada level 0,46%. Angka ini menunjukkan bahwa *gap* antar sesama penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan turun, angka kemiskinan masih di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Lampung, yang sebesar 12,57% di tahun 2024.

2.1.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

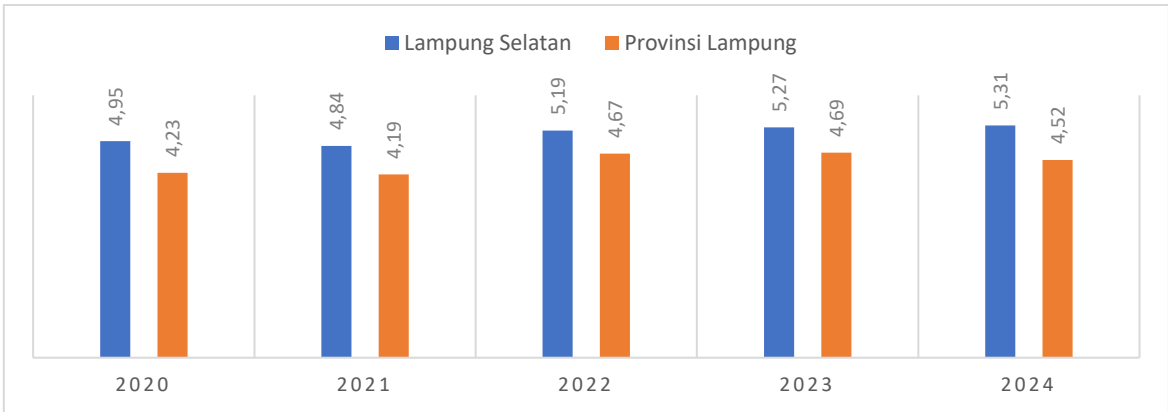
Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Data Lampung Selatan menunjukkan variasi nilai yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024, dengan kisaran antara 4,19 hingga 5,31. Nilai tertinggi tercapai pada tahun 2024 (5,31), sementara terendah terjadi pada tahun 2021 (4,19). Secara umum, tren cenderung meningkat, terutama setelah 2021, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2023 (4,67).

Faktor yang mungkin memengaruhi fluktuasi ini meliputi dinamika sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, atau pariwisata, serta dampak kebijakan daerah dan program pembangunan. Puncak nilai pada 2024 mengindikasikan potensi pemulihan ekonomi atau keberhasilan intervensi tertentu. Namun, diperlukan analisis lebih mendalam terhadap

variabel spesifik (misalnya: inflasi, investasi, atau produktivitas sektoral) untuk memastikan penyebab perubahan ini.

Gambar II.41 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024

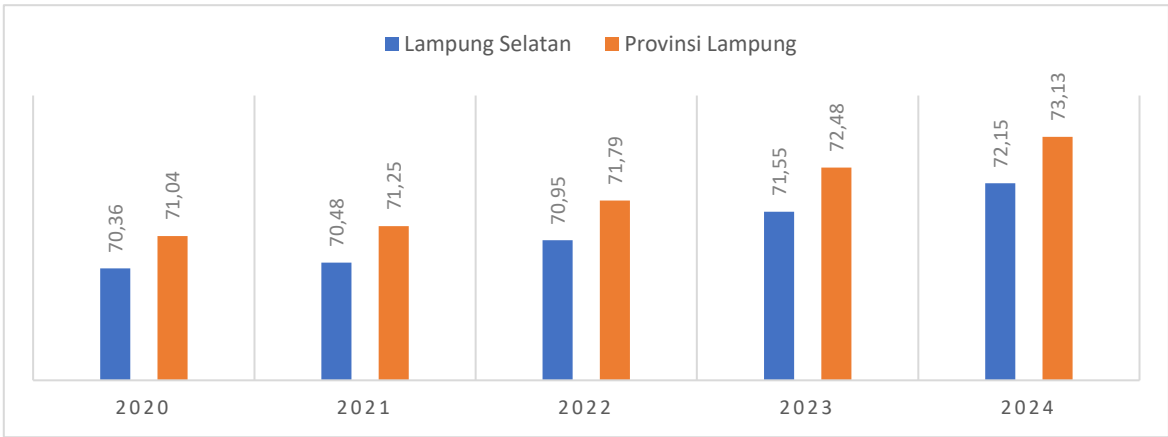


Sumber: Lampung Selatan dalam Angka, 2024

2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Indeks Modal Manusia (IMM)

Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Dalam kerangka pembangunan, penduduk merupakan sumber utama modal pembangunan. Penduduk berperan dan berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam semua proses kegiatan pembangunan. Peranan dan partisipasi penduduk sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas penduduk itu sendiri. Kuantitas penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali menjadi pendorong kelangsungan pembangunan. Sedangkan kualitas penduduk yang tinggi menjadi modal dasar peningkatan kemajuan pembangunan. Salah satu Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kuantitas dan kualitas penduduk ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar II.42 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung dan Lampung Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

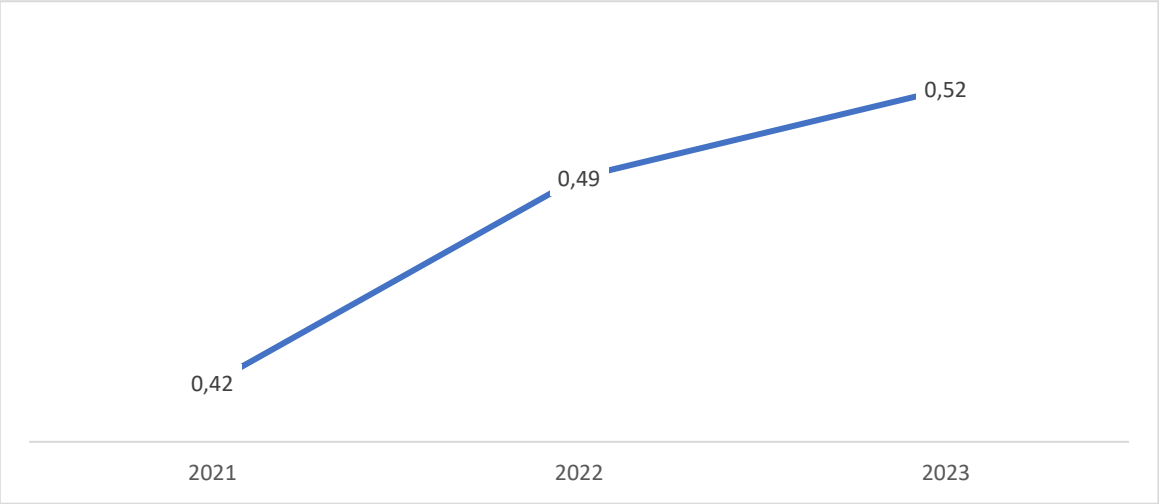
Selama lima tahun terakhir, baik Kabupaten Lampung Selatan maupun Provinsi Lampung secara keseluruhan menunjukkan kemajuan yang stabil dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Lampung Selatan mengalami peningkatan konsisten dari 70,36 pada tahun 2020 menjadi 72,15 di tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata 0,45 poin per tahun. Sementara itu, IPM Provinsi Lampung tumbuh lebih pesat dari 71,04 menjadi 73,13 dalam periode yang sama, menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan sekitar 0,98 poin yang perlu menjadi perhatian.

Pencapaian positif ini terutama terlihat pada periode pasca pandemi (2022-2024), dimana terjadi akselerasi pertumbuhan IPM di kedua wilayah. Faktor pendorong utamanya antara lain pemulihan sektor pendidikan dengan berjalannya kembali pembelajaran tatap muka, peningkatan cakupan layanan kesehatan, serta perbaikan daya beli masyarakat. Namun, Lampung Selatan masih menghadapi beberapa tantangan seperti perluasan akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil, penurunan angka stunting, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan keterampilan.

Dengan mempertahankan tren positif ini dan menyasar intervensi di bidang-bidang strategis, Lampung Selatan memiliki peluang besar untuk mengejar ketertinggalan dan menyamai tingkat pembangunan manusia rata-rata provinsi dalam beberapa tahun mendatang.

Selain IPM, Indeks Modal Manusia (IMM) juga dapat digunakan dalam mengukur produktivitas angkatan kerja di masa depan melalui kontribusi kesehatan dan pendidikan. IMM dikembangkan oleh Bank Dunia dan digunakan untuk membantu negara-negara memahami potensi ekonomi yang hilang akibat kesenjangan modal manusia serta potensi keuntungan dari investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa untuk tingkat Kabupaten tidak direkomendasikan untuk menggunakan indikator IMM, sehingga untuk capaian IMM Kabupaten Lampung Selatan merujuk pada capaian IMM Provinsi Lampung. Berikut adalah capaian IMM Provinsi Lampung:

Gambar II.43 Indeks Modal Manusia (IMM) Provinsi Lampung Tahun 2021-2023



Sumber: RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

2.1.2.1.8 Pengeluaran Per Kapita

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian, hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping sebagai konsumen akhir produk barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor industri lain.

Trend pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024 setelah sebelumnya mengalami penurunan di Tahun 2020. Pada Tahun 2019 pengeluaran per kapita sebesar 9.978 ribu rupiah/orang/tahun, menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar 9.875 ribu rupiah/orang/tahun. Penurunan yang relatif kecil merupakan akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian secara global menurun yang tentunya juga berdampak pada Kabupaten Lampung Selatan dan mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan pada Tahun 2021, rata-rata pengeluaran kembali meningkat sebagai dampak dari upaya pemulihan ekonomi menjadi sebesar 9.931 ribu rupiah/orang/tahun. Dan pada Tahun 2024 kembali meningkat hingga mencapai angka 11.133 ribu rupiah/orang/tahun.

Tabel II.51 Rata-rata pengeluaran per Kapita Kabupaten Lampung Selatan (Ribuan Rupiah/Tahun) 2019-2024

Tahun	Rata-rata pengeluaran per Kapita (Ribuan Rupiah/Tahun)
2019	9.978
2020	9.875
2021	9.931
2022	10.226
2023	10.617
2024	11.133

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel II.52 Angka Harapan Hidup di Lampung Selatan (SP 2020), 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,79	73,85	74,03	74,22	74,46

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Angka harapan hidup Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan peningkatan sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan terus terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hingga tahun 2024, angka harapan hidup Kabupaten Lampung Selatan mencapai 74,46 tahun.

2.1.2.2.2 Balita Gizi Buruk

Balita gizi kurang adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score <-2 standar deviasi. Balita pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan gabungan dari istilah sangat pendek dan pendek dengan Z score <-2 standar deviasi. Balita kurus adalah Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut

tinggi badan (BB/TB) yang merupakan gabungan dari istilah sangat kurus dan kurus dengan Z score < -2 standar deviasi. Z Score merupakan nilai simpangan berat badan atau tinggi badan dari nilai berat badan atau tinggi badan normal menurut baku pertumbuhan WHO.

Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan *underweight* adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U). Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1 Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO.

Tabel II.53 Jumlah Balita Gizi Buruk

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Balita Gizi Buruk	3	3	3	3	2	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2024 (data diolah)

Dari data diatas, Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir mengalami Penurunan. Terdapat sebanyak 1 orang Balita gizi buruk di wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024, angka ini turun dari tahun 2023 yaitu sebanyak 2 orang Balita. Persentase kasus Balita gizi buruk yang mendapat perawatan baik yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan adalah 100%.

Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

2.1.2.2.3 UHC Kabupaten Lampung Selatan

Universal Health Coverage (UHC) merupakan program jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil dan terjangkau. UHC Kabupaten Lampung Selatan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

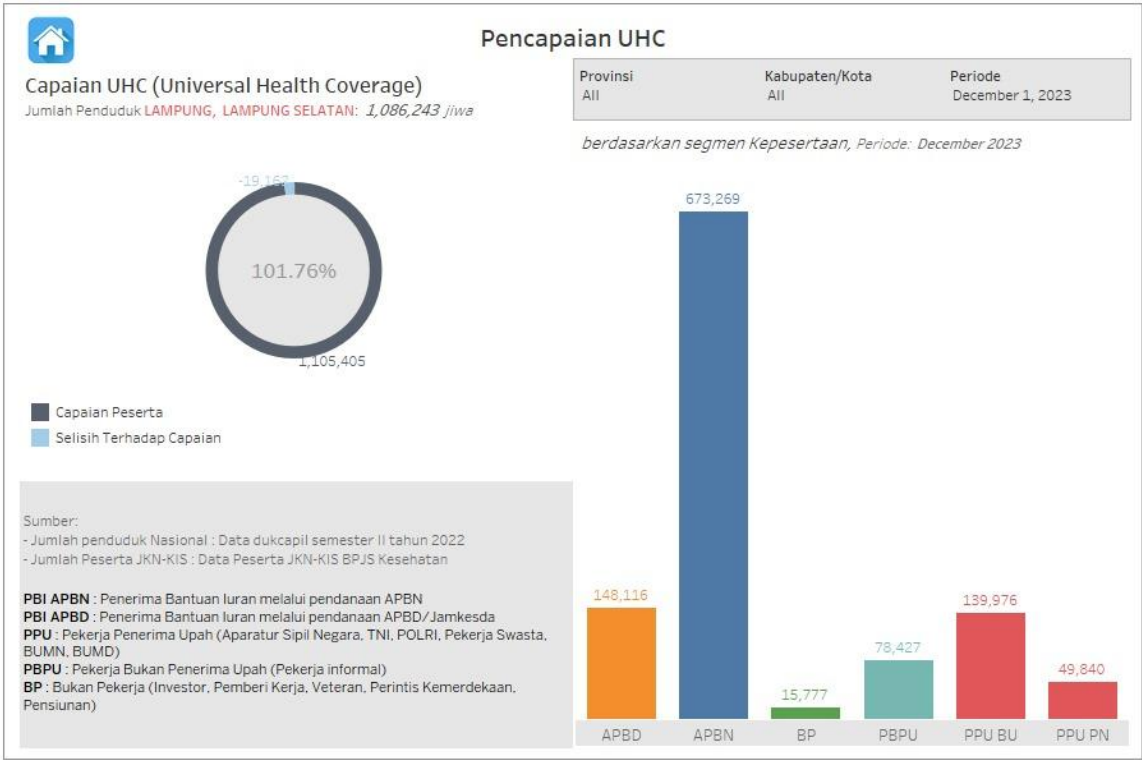
Tabel II.54 *Universal Health Coverage (UHC)*, 2019-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Universal Health Coverage (UHC)</i>	80,45	81,73	97,33	101,76	102,53

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Berdasarkan data, Cakupan UHC Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 81,23% menjadi 102,53%. Atas capaian tersebut Kabupaten Lampung Selatan meraih Penghargaan UHC pada tahun 2024. Penghargaan UHC adalah apresiasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mencapai target 98% dari total penduduk perlindungan BPJS untuk masyarakatnya.

Gambar II.44 Persentase Capaian UHC Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2025

2.1.2.2.4 **Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Cakupan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengacu pada jumlah total peserta yang terdaftar dan aktif dalam program JKN, yang berarti mereka memenuhi syarat untuk menerima manfaat layanan kesehatan yang disediakan oleh program ini. Cakupan keaktifan peserta di Kabupaten Lampung Selatan dalam 3 bulan terakhir cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya

pemutakhiran data yang dilakukan oleh pihak BPJS, dan kesulitan masyarakat dalam memenuhi iurannya.

Tabel II.55 Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025

JENIS SEGMENT	STATUS	MEI		JUNI		JULI	
		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
PBPU PEMDA (Dibiayai Oleh Provinsi Dan Kabupaten)	Non-Aktif	22,2%	38.926	21,7%	38.729	21,5%	38.596
	Aktif	77,8%	136.748	78,3%	139.525	78,5%	141.113
			175.674		178.254		179.709
PBI JK (Dibiayai Oleh Pemerintah Pusat)	Non-Aktif	13,5%	87.094	17,4%	110.857	17,8%	112.897
	Aktif	86,5%	559.622	82,6%	524.477	82,2%	520.213
			646.716		635.334		633.110
BP (Investor, Pemberi kerja, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan)	Non-Aktif	9,8%	1.520	9,7%	1.506	10,8%	1.693
	Aktif	90,2%	13.916	90,3%	13.953	89,2%	13.994
			15.436		15.459		15.687
PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)/ Mandiri	Non-Aktif	64,8%	48.560	64,1%	48.015	65,0%	48.867
	Aktif	35,2%	26.381	35,9%	26.871	35,0%	26.273
			74.941		74.886		75.140
PPU BU (Pegawai Swasta)	Non-Aktif	24,7%	35.697	25,5%	36.878	27,2%	39.524
	Aktif	75,3%	108.537	74,5%	107.721	72,8%	105.748
			144.234		144.599		145.272
PPU PN (Pegawai Negeri)	Non-Aktif	9,2%	4.820	8,2%	4.307	8,1%	4.251
	Aktif	90,8%	47.662	91,8%	48.214	91,9%	48.388
			52.482		52.521		52.639
TOTAL PESERTA	Non-Aktif	19,3%	216.617	21,4%	240.292	21,9%	245.828
	Aktif	79,4%	892.866	76,5%	860.761	76,1%	855.729
			1.109.483		1.101.053		1.101.053
PENDUDUK			1.124.683		1.124.683		1.124.683

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2025

2.1.2.2.5 Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang adalah kondisi ketika balita tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk perkembangan organ vital dan pertumbuhannya. Balita gizi kurang dapat ditandai dengan Berat badan menurut panjang badan (BB/TB) atau tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar deviasi dan/atau Lingkar lengan 11,5-12,5 cm pada anak usia 6-59 bulan. Anak terlihat kurus Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1 tentang Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO.

Tabel II.56 Balita Gizi Kurang Tahun 2019-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Balita Gizi Kurang	2,76	2,75	2,04	1,94	1.83

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Cakupan Balita gizi kurang di Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun mengalami penurunan. Cakupan Balita gizi kurang pada 2024 yaitu sebanyak 1.375 Balita atau 1,83% dari sasaran Balita di ukur 70.917 Balita. Hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 1,94%.

2.1.2.2.6 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.

Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

- 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan:** AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan Kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan.
- 2. Akses Pelayanan Kesehatan:** AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3. Pendidikan Kesehatan:** AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
- 4. Status Gizi:** AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.

5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

Tabel II.57 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 2019-2024

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (AKI)	42,9	38,04	62,33	29,43	27,5	26,3

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan fluktuatif sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan terus terjadi peningkatan dan penurunan kualitas kesehatan Masyarakat khususnya ibu hamil. Hingga tahun 2024, Angka Kematian Ibu Kabupaten Lampung Selatan mencapai 26,3 per 100.000 kelahiran hidup.

2.1.2.2.7 Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010.

Tabel II.58. Prevalensi Stunting di Kabupaten Lampung Selatan

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	30,39	-	16,3	9,9	10,3	10,4

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir, walaupun pada tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,1% dari tahun 2023.

2.1.2.2.8 **Insidensi Tuberkulosis (TB)**

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:

- 1. Penemuan Kasus: ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.
- 2. Pengobatan Kasus: ini merujuk pada kemampuan sistem Kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis (TB).

Tabel II.59. Insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Selatan

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)	67,00	35,32	41,05	65,00	51,69	51,04
Angka Keberhasilan pengobatan tuberkolosis (<i>treatment succes rate</i>) (%)	97,30	99,80	95,70	96,80	98,00	98,00

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2024*

Tabel diatas adalah data cakupan penemuan kasus tuberkulosis di Kabupaten Lampung Selatan, pada tahun 2024 Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*case detection rate*) sebesar 51,04% cenderung menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 65,00%, dengan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) secara yang cenderung meningkat yaitu sebesar 98% ditahun 2023 san 2024.

2.1.2.2.9 **Indeks Keluarga Sehat**

IKS singkatan dari Indeks Keluarga Sehat, merupakan indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai kesehatan masyarakat dengan melihat aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan keluarga. IKS mengukur sejauh mana keluarga memiliki akses dan praktik hidup sehat.

IKS menggunakan 12 indikator kesehatan keluarga untuk menentukan status kesehatan suatu keluarga. Indikator-indikator ini meliputi:

- ✓ Penerapan Keluarga Berencana (KB)
- ✓ Persalinan di fasilitas kesehatan
- ✓ Imunisasi dasar lengkap pada bayi
- ✓ ASI eksklusif pada bayi
- ✓ Pemantauan pertumbuhan balita
- ✓ Pengobatan TB paru
- ✓ Pengobatan hipertensi
- ✓ Pengobatan gangguan jiwa
- ✓ Tidak ada anggota keluarga yang merokok
- ✓ Keanggotaan JKN
- ✓ Akses air bersih
- ✓ Akses jamban sehat

IKS dihitung berdasarkan pencapaian indikator-indikator tersebut, dengan skor antara 0 sampai 1. Keluarga sehat memiliki skor IKS > 0,8 (80%). Keluarga prasehat memiliki skor IKS 0,5 – 0,8 (50-80%), dan Keluarga tidak sehat memiliki skor IKS < 0,5 (50%).

Tabel II.60 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Lampung Selatan

Tahun	Nilai IKS
2020	16,4
2021	21,4
2022	25,5
2023	39,1
2024	42,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Perkembangan Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2020-2024 menunjukkan tren positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat, nilai IKS Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan dari 16,4 pada tahun 2020 menjadi 42,5 di tahun 2024. Capaian ini menempatkan wilayah tersebut dalam kategori "Tidak Sehat".

Beberapa tantangan yang masih menghambat upaya peningkatan IKS, yaitu masih tingginya perilaku merokok di kalangan laki-laki dewasa (59,77%) dan keluarga menjadi anggota JKN (66,21%) menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, disparitas antara wilayah pesisir dan pedalaman juga tampak signifikan, di mana daerah kawasan pesisir seperti Rajabasa baru mencapai 13,1%. Untuk mencapai target "Sehat Utama" (IKS

>80) dalam beberapa tahun ke depan, diperlukan penguatan intervensi lintas sektor, khususnya dalam percepatan penurunan stunting, peningkatan promosi hidup sehat, dan pemerataan layanan kesehatan di daerah terpencil. Dengan komitmen yang konsisten, Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi besar untuk mencapai keluarga yang lebih sehat dan sejahtera di masa mendatang

2.1.2.2.10 Penyakit Menular Lainnya

Penyakit menular atau penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteri atau parasit), bukan disebabkan faktor fisik atau kimia. Cara penularan penyakit ini melalui 2 cara, yaitu: 1) Media langsung dari orang ke orang; dan 2) Media udara.

Tabel II.61 Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun 2020-2024

No	Nama Penyakit	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus Diare	18.435	13.045	12.405	13.270	14.144
2	Penderita Demam Berdarah	457	462	246	264	152
3	Penemuan Pneumonia	1.828	1.389	1.101	972	1.010
4	Suspek Campak	-	2	-	20	125
5	Malaria	105	36	7	-	-
6	Kasus Baru HIV AIDS	215	178	108	110	120

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Selatan, 2025

Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan perkembangan yang beragam dalam penanganan penyakit menular selama lima tahun terakhir. Kasus diare tetap menjadi penyakit terbanyak meskipun mengalami penurunan signifikan dari 18.435 kasus di tahun 2020 menjadi 14.144 kasus di tahun 2024, namun perlu diwaspadai adanya tren kenaikan kembali dalam dua tahun terakhir. Pencapaian gemilang terlihat pada penurunan kasus demam berdarah dengue (DBD) sebesar 66,7% dan eliminasi malaria yang berhasil dipertahankan sejak tahun 2023.

Beberapa tantangan kesehatan masih perlu mendapat perhatian serius. Kasus HIV/AIDS yang sempat menurun hingga 50% pada 2022, kembali menunjukkan tren kenaikan di tahun 2024. Lonjakan kasus suspek campak dari hanya 2 kasus di 2021 menjadi 125 kasus di 2024 menjadi alarm penting bagi cakupan imunisasi di wilayah ini. Pneumonia menunjukkan perkembangan menggembirakan dengan penurunan 44,7%

selama periode pengamatan, meski sempat mengalami sedikit kenaikan di tahun terakhir.

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan beberapa langkah strategis, termasuk: intensifikasi surveilans penyakit menular, optimalisasi cakupan imunisasi lengkap, penguatan program pencegahan DBD berbasis masyarakat, serta inovasi dalam penanganan HIV/AIDS melalui pendekatan kelompok risiko. Keberhasilan dalam eliminasi malaria patut dipertahankan sekaligus menjadi model untuk pengendalian penyakit menular lainnya di wilayah ini.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator tingkat pendidikan masyarakat pada suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah dapat diartikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Tabel II.62 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	7,6	7,85	8,06	8,07	8,20	8,56
Tanggamus	6,96	7,21	7,22	7,34	7,35	7,38
Lampung Selatan	7,68	7,69	7,70	7,72	7,77	7,78
Lampung Timur	7,57	7,59	7,6	7,77	8,04	8,2
Lampung Tengah	7,51	7,57	7,58	7,59	7,64	7,97
Lampung Utara	8,19	8,2	8,21	8,34	8,35	8,38
Way Kanan	7,35	7,39	7,7	7,71	7,72	7,75
Tulang Bawang	7,22	7,23	7,49	7,55	7,56	7,65
Pesawaran	7,47	7,6	7,7	7,71	7,77	8
Pringsewu	8,01	8,19	8,38	8,39	8,40	8,53
Mesuji	6,6	6,61	6,88	7,08	7,09	7,21
Tulang Bawang Barat	7,1	7,13	7,24	7,39	7,72	7,8
Pesisir Barat	7,59	7,82	8,01	8,19	8,53	8,73
Kota Bandar Lampung	10,9	10,92	10,93	10,95	10,96	10,99
Kota Metro	10,61	10,64	10,96	10,97	10,98	11,01
Provinsi Lampung	7,82	7,92	8,05	8,08	8,18	8,36

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Kabupaten Lampung Selatan memiliki angka rata-rata lama sekolah yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jenjang pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas. Hingga tahun 2024, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Selatan mencapai 7,78 yang

memiliki arti bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan hingga SMP kelas VIII.

Lebih jauh, jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 menempati urutan ke-12. Sementara diatasnya adalah Kabupaten Pesawaran dan Lampung Timur dengan angka rata-rata lama sekolah 8 dan 8,2 tahun.

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan dari sebesar 12,50 pada tahun 2020 menjadi 12,65 pada tahun 2024.

Tabel II.63 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	12,25	12,26	12,27	12,29	12,3
Tanggamus	12,18	12,19	12,3	12,31	12,33
Lampung Selatan	12,50	12,52	12,54	12,64	12,65
Lampung Timur	12,85	12,86	12,96	12,97	12,98
Lampung Tengah	12,92	12,93	12,95	13,04	13,17
Lampung Utara	12,48	12,49	12,54	12,55	12,56
Way Kanan	12,36	12,37	12,42	12,43	12,44
Tulang Bawang	11,89	11,95	12,28	12,29	12,3
Pesawaran	12,36	12,59	12,61	12,62	12,63
Pringsewu	12,83	12,84	12,91	12,92	12,93
Mesuji	11,63	11,64	11,8	11,81	11,82
Tulang Bawang Barat	12,05	12,06	12,09	12,10	12,12
Pesisir Barat	11,99	12,00	12,13	12,14	12,16
Bandar Lampung	14,64	14,70	14,71	14,72	14,73
Metro	14,47	14,75	14,76	14,77	14,79
Provinsi Lampung	12,65	12,73	12,74	12,77	12,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung Selatan, 2025

2.1.2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

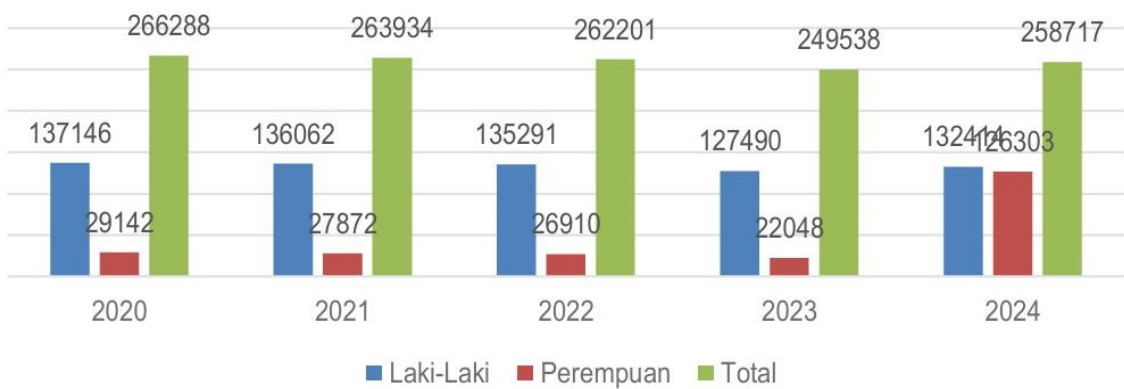
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan penggunaan literasi dalam kehidupan sehari-hari. IPLM terdiri dari beberapa unsur utama, seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi.

2.1.2.4 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.4.1 Pembangunan Pemuda

Masalah krisis moral yang dialami pemuda telah meluas dan dapat mengancam masa depan bangsa (dekadensi moral) seperti pengangguran, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pornografi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, perilaku LGBT dan paham radikalisme. Hal-hal tersebut menyebabkan belum optimalnya potensi pemuda dalam mengaktualisasikan dirinya. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Lampung Selatan belum optimal.

Gambar II.45 Jumlah Pemuda (15-29 Tahun) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah pemuda (usia 15-29 tahun) di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2020, jumlah pemuda laki-laki tercatat 137.146 orang, sementara perempuan sebanyak 129.142 orang, dengan total 266.288 orang. Angka ini terus menurun, sehingga pada tahun 2023 jumlah

pemuda laki-laki menjadi 127.490 orang dan perempuan 122.048 orang, dengan total hanya 249.538 orang. Namun Pada Tahun 2024, Jumlah pemuda kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan total 258.717 orang.

Kenaikan jumlah pemuda ini, dapat mengindikasikan beberapa isu penting, seperti migrasi pemuda ke dalam daerah sebagai tempat tinggal, dan peningkatan angka kelahiran dalam dua dekade terakhir, mengingat kelompok usia ini merupakan hasil kelahiran sekitar 15–29 tahun sebelumnya. Isu ini penting karena pemuda adalah motor penggerak pembangunan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dengan bonus demografi ini, Kabupaten Lampung Selatan berpotensi menghadapi tantangan berlimpahnya tenaga kerja produktif yang perlu diimbangi dengan kebijakan strategis seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses pendidikan, serta menyelenggarakan program pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar untuk meningkatkan kapabilitas pemuda dan mempertahankan kontribusi mereka di Kabupaten Lampung Selatan.

2.1.2.4.2 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dalam Pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di parlemen, Sumbangan Pendapatan Perempuan dan Perempuan sebagai tenaga Profesional.

Tabel II.64 Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,545	0,553	0,536	0,499	0,465	0,394
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,4	59,59	59,27	59,37	63,28	70,98
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,54 *	90,05	90,08	90,28	90,56	90,80
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	10	10,2	10	10	14	10
Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	29,46	29,61	29,42	29,15	28,8	28,47
Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	51,9	52,8	49,64	48,24	51,04	56,37

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Dilihat dari data, maka tergambar bahwa dari tahun ke tahun terjadi penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam bidang-bidang seperti akses pendidikan, kesehatan, penghasilan, dan posisi politik.

Sejalan dengan IKG, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan nilai IDG mengindikasikan bahwa perempuan di Kabupaten Lampung Selatan semakin diberdayakan dan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang seperti akses pendidikan, kesehatan, penghasilan, dan posisi politik. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pencapaian kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan di Kabupaten Lampung Selatan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan semakin kecil perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat, khususnya dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mengukur IPG sama dengan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Menurut Badan Pusat Statistik, nilai IPG berkisar antara 0-100. Ketika angka IPG mendekati 100 maka ketimpangan pembangunan gender semakin rendah, dan sebaliknya ketika nilai IPG semakin jauh dari angka 100 maka ketimpangan pembangunan gender semakin lebar.

Pencapaian penurunan IKG di Kabupaten Lampung Selatan yang menunjukkan peran perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, penghasilan, dan politik ditunjukkan oleh data Keterlibatan Perempuan di Parlemen dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional yang semakin meningkat dari tahun ketahun, walaupun Sumbangan Pendapatan Perempuan mengalami penurunan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan

penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase

Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif. Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggung nya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan.

Tabel II.65 Angka Ketergantungan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019*	2020*	2021*	2022	2023	2024
1	Angka Ketergantungan	NA	NA	NA	47,31	48,51	48,51

*data pada tahun tersebut tidak tersedia

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Angka ketergantungan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022 mencapai angka 47,31 yang kemudian naik menjadi 48,51 di tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukan bahwa angka ketergantungan penduduk tidak produktif semakin meningkat. Angka ketergantungan 47,31 menunjukan bahwa sebanyak 47-48 penduduk usia tidak produktif bergantung pada 100 orang penduduk dengan usia produktif.

2.1.3.2 Integritas Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.2.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk

keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Tabel II.66 Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan PMTB (% PDRB)	36,41	36,57	35,01	35,29	32,58

Sumber: Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Dapat dilihat pada tabel diatas merupakan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Pengeluaran atas dasar harga konstan, pada tahun 2020 kontribusi PMTB adalah sebesar 36,41% dan berangsur-angsur turun hingga pada tahun 2024 hanya sebesar 32,58%.

2.1.3.2.2 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.

Tabel II.67 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,21	0,56	3,30	2,54	2,54

Sumber: Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Dapat dilihat pada Tabel diatas bahwa kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan terjadi kenaikan secara signifikan, pada tahun 2020 kontribusi ekspor barang dan jasa sebesar 0,21% terhadap PDRB dan terakhir pada tahun 2024 melonjak menjadi 2,54% dan merupakan penurunan dari sebelumnya tahun 2022 yang sebesar 3,30%.

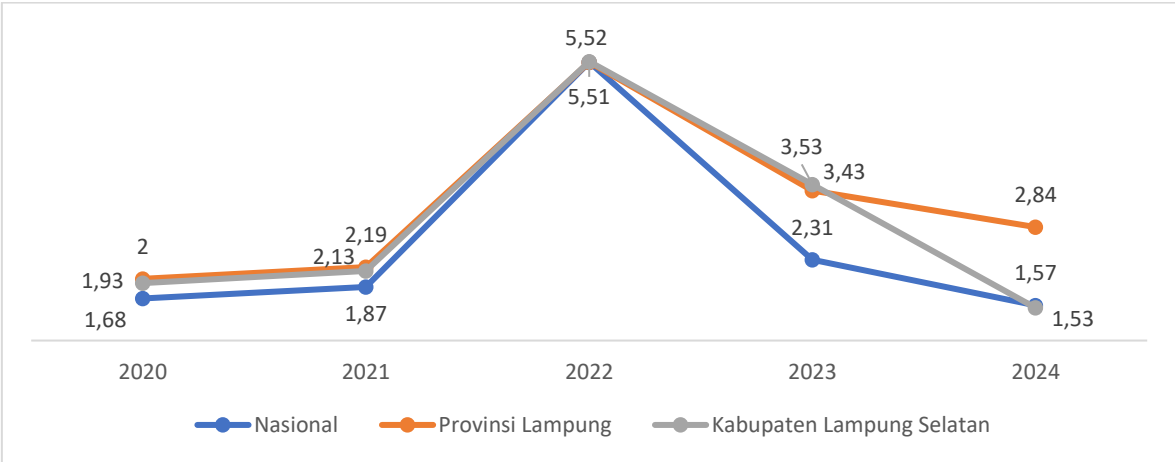
Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu daerah dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan maka pendapatan negara juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.

2.1.3.3 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.3.1 Tingkat Inflasi

Dalam lima tahun terakhir, laju inflasi Kota Kalianda cenderung stabil di bawah angka 4%. Namun pada Tahun 2022, terjadi kelonjakan tingkat inflasi di daerah, Provinsi Lampung hingga Nasional. Inflasi Kota Kalianda pada Tahun 2023 merujuk inflasi Kota Bandar Lampung sebagai *sister city* adalah sebesar 3,52%, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Lampung dan nasional yang sebesar 3,47%. Pada Tahun 2024, berbagai upaya penekanan laju inflasi oleh Pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga inflasi Kalianda diharapkan tetap stabil di angka proyeksi 3 + 1% di tengah belum stabilnya perekonomian tidak hanya lokal, tapi juga nasional dan global.

Gambar II.46 Laju Inflasi Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional 2020-2024



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Berdasarkan data yang tercantum dalam grafik, terlihat bahwa inflasi di tingkat nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, inflasi di ketiga wilayah tergolong rendah, mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang menekan permintaan dan aktivitas ekonomi. Namun, mulai tahun 2021, inflasi menunjukkan tren kenaikan, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, inflasi nasional melonjak signifikan, mencapai sekitar 5-6%, didorong oleh kenaikan harga energi dan komoditas pangan secara global serta dampak ketegangan geopolitik. Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan mengikuti pola yang serupa, meskipun angkanya lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, menunjukkan stabilitas harga yang relatif lebih baik di tingkat lokal.

Memasuki tahun 2023, inflasi di ketiga wilayah mulai menurun, dengan tingkat nasional berada di bawah 3%. Penurunan ini diduga kuat akibat kebijakan moneter Bank Indonesia yang ketat serta stabilisasi pasokan pangan. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana inflasi diperkirakan tetap terkendali, mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih stabil. Secara keseluruhan, perbedaan angka inflasi antara tingkat nasional dan regional menunjukkan bahwa faktor lokal seperti kebijakan pemerintah daerah dan ketersediaan komoditas turut berperan penting dalam mengendalikan kenaikan harga. Data ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter nasional dan strategi daerah untuk menjaga stabilitas harga di masa depan.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan perkembangan kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan dan keberhasilan reformasi dalam sistem hukum suatu negara. Indeks ini mengukur sejauh mana suatu negara telah melakukan perubahan dan peningkatan dalam sistem hukumnya untuk mencapai tujuan seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan, transparansi, efisiensi hukum, dan kepastian hukum.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang terfokus pada penajaman pelaksanaan reformasi pada substansi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai *leading institution* pada pelaksanaan program meso pada lingkup reviu terhadap Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan pengukuran Indeks Reformasi Hukum, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan serta sistem regulasi pusat maupun daerah.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) yaitu:

- 1. memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam pengharmonisasian regulasi;
- 2. mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu;
- 3. mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan; serta
- 4. meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (*legal drafter*) pusat maupun daerah.

Tabel II.68 Indeks Reformasi Hukum

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	N/A	45,02	46,65

Sumber: Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 tercatat sebesar 46,65. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:

- a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
- b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.
- c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%.
- d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.

2.1.4.1.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Tabel II.69 Indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	N/A	N/A	1,70	3,33	3,08

Sumber: Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 berdasarkan Kepmen PANRB No 663 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE mendapatkan predikat “baik” dengan nilai indeks 3,08, meningkat dari Tahun 2022 yang sebesar 1,7 (predikat kurang). Hal ini menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang telah mempersiapkan langkah-langkah diantaranya melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang SPBE, pembuatan peta rencana SPBE, dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik berbasis elektronik.

2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan

Pelayanan, Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Tabel II.70 Indeks Pelayanan Publik

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	1,70	2,50 (Cukup dengan catatan)	3,89 (Baik)

Sumber: Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Capaian Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 mendapatkan predikat “Cukup dengan Catatan” dengan nilai indeks sebesar 2,50 dan pada Tahun 2024 meningkat dengan predikat “Baik” dengan nilai indeks 3,89.

2.1.4.1.4 Nilai Survei Penilaian Integritas

Nilai Survei Penilaian Integritas adalah alat atau metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas atau kejujuran suatu negara. Integritas dalam konteks ini mencakup berbagai aspek seperti anti-korupsi, transparansi, akuntabilitas pemerintah, penegakan hukum yang adil, serta tata kelola yang baik dan bersih.

Nilai Survei Penilaian Integritas memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan integritas suatu negara dan bisa digunakan sebagai alat untuk membandingkan kinerja antar negara. Hasil dari indeks ini dapat memberikan masukan berharga untuk perbaikan kebijakan, perencanaan strategis, serta pembangunan kapasitas dalam upaya meningkatkan integritas pemerintahan dan mendorong tata kelola yang lebih baik.

Tabel II.71 Nilai Survei Penilaian Integritas

Indikator	2021	2022	2023	2024
Nilai Survei Penilaian Integritas	58,68	71,68	68,77	73,91

Sumber: Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Capaian Nilai Survei Penilaian Integritas Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 adalah sebesar 73,91. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan perlu meningkatkan perilaku anti korupsi dan integritas.

2.1.4.1.5 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Reformasi Birokrasi

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021-2024), Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan konsistensi dan peningkatan kinerja dalam dua aspek penting, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Pada SAKIP, daerah ini secara konsisten meraih predikat "B" (Baik) dari tahun 2021 hingga 2024, mengindikasikan bahwa tata kelola akuntabilitas kinerja pemerintahannya telah memenuhi standar yang ditetapkan secara berkelanjutan.

Sementara itu, dalam Reformasi Birokrasi, terjadi peningkatan signifikan. Pada 2021-2022, Lampung Selatan masih berada pada peringkat "CC" (Cukup) dalam evaluasi RB, namun pada 2023-2024 berhasil naik ke level "BB" (Baik). Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola birokrasi, seperti pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi, yang menjadi fokus pembenahan Pemkab.

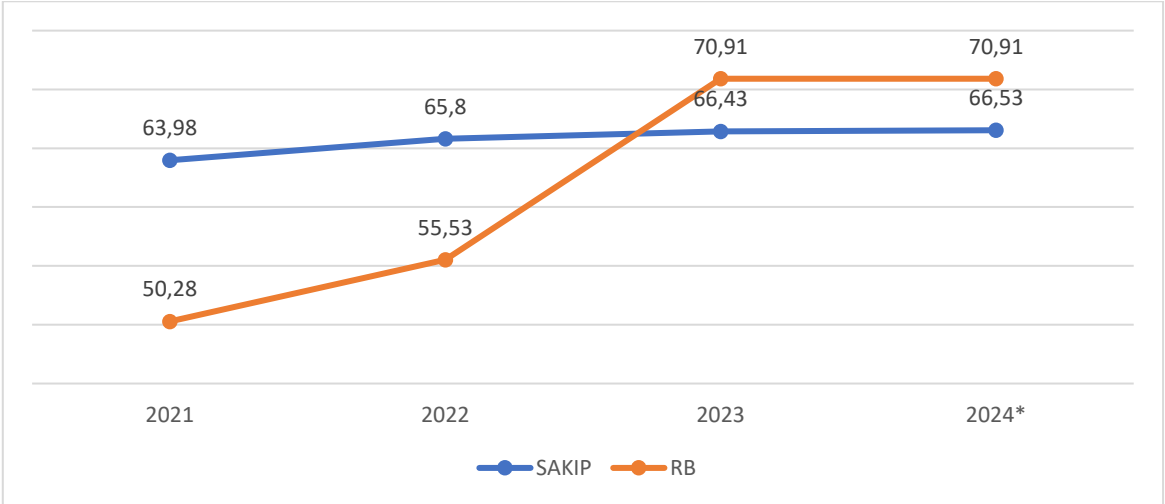
Pencapaian ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memperkuat akuntabilitas dan reformasi birokrasi terus mengalami kemajuan. Namun, tetap diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai predikat "A" (Sangat Baik) di kedua aspek tersebut, guna mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Tabel II.72 Predikat SAKIP dan RB Lampung Selatan

Tahun	SAKIP	RB
2021	B (63,98)	CC (50,28)
2022	B (65,80)	CC (55,53)
2023	B (66,43)	BB (70,91)
2024	B (66,53)	BB (70,91)

Sumber: Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Gambar II.47 *Trend Capaian SAKIP dan RB Lampung Selatan*



Sumber: Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru. Berikut data IDI di Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2020-2024.

Tabel II.73 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021*	2022*	2023*	2024*
1	Indeks Demokrasi Indonesia	72,79	80,18	78,32	78,37	80,18

*metode baru perhitungan IDI

Sumber: BPS Provnsi Lampung, 2024

2.1.4.2.2 Angka Kriminalitas

Berdasarkan data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan yang disajikan pada Tabel di bawah ini, BPS Kabupeten Lampung Selatan mencatat Tindak Pidana atau Konflik yang terjadi pada tahun 2021-2023 cenderung meningkat, dimana jumlah konflik

ini di nilai masih tinggi yaitu mencapai angka 1.187 di tahun 2023, sehingga dengan keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di Kabupaten Lampung Selatan guna memberikan rasa aman kepada warga masyarakat.

Tabel II.74 Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Tingkat Kepolisian di Kabupaten Lampung Selatan, 2021-2023

Kesatuan	Jumlah Tindak Pindana			Penyelesaian Tindak Pidana		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Reskrim	276	503	440	201	50	220
Narkoba	121	86	79	121	43	99
Natar	71	84	115	61	3	109
Tj. Bintang	45	56	110	42	32	69
KSKP Bakauheni	26	11	15	26	1	65
Kalianda	21	27	53	20	-	70
Katibung	35	38	39	24	10	53
Penengahan	29	33	88	27	19	51
Palas	16	22	22	11	-	35
Candipuro	43	19	34	19	11	20
Sidomulyo	34	30	28	25	6	34
Sragi	11	17	10	1	3	2
Jati Agung	29	56	129	36	20	48
Merbau Mataram	35	25	25	20	19	37
Jumlah	792	1.007	1.187	634	217	912

Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung Selatan, 2024

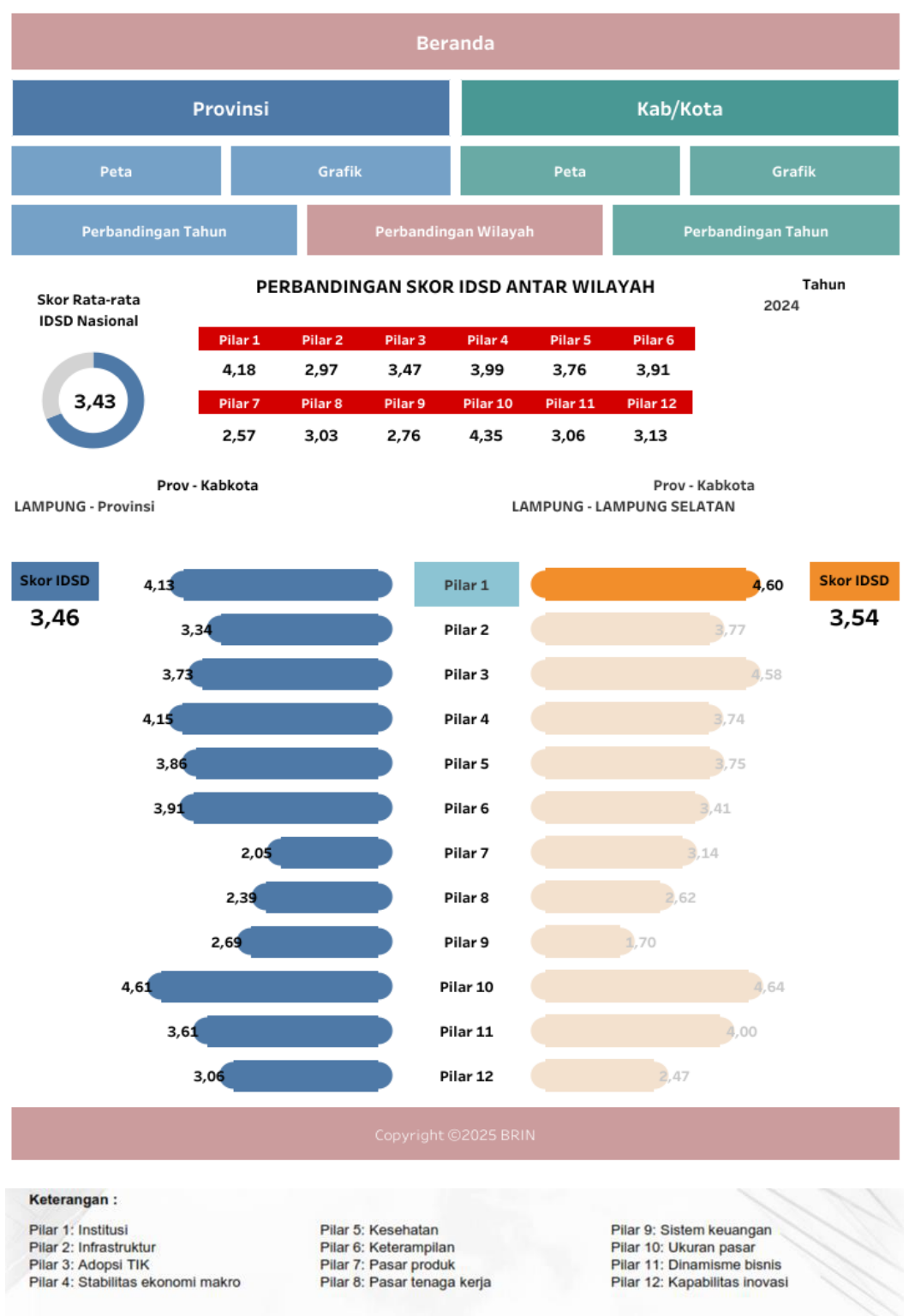
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari IDSD adalah memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2024 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2024 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Penyusunan IDSD 2024 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standardisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi. Capaian skor IDSD Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 sebesar 3,54 diatas rata-rata Nasional dan Provinsi Lampung.

Gambar II.48 Capaian Skor IDSD Kabupaten Lampung Selatan, 2024



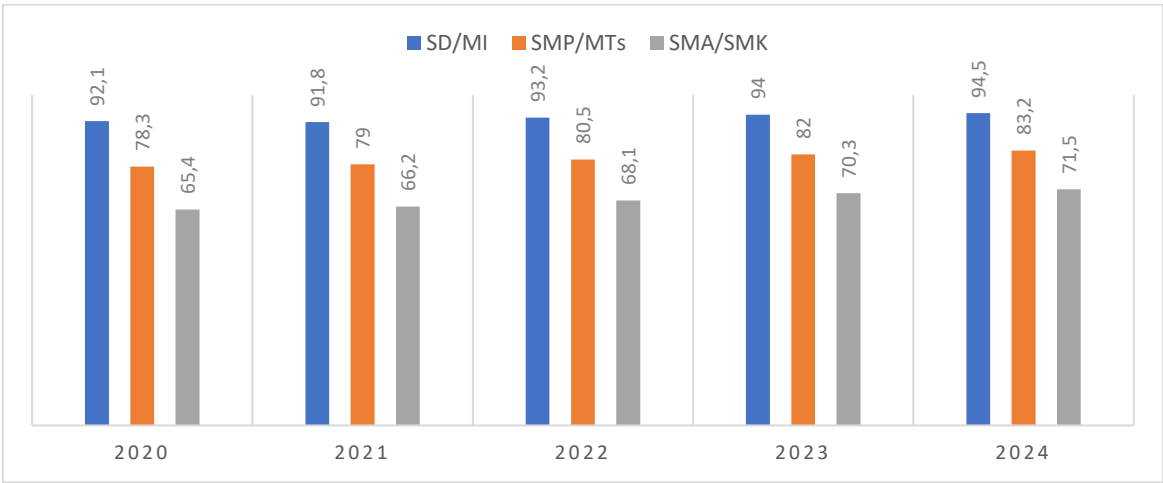
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.4.4.1 Bidang Urusan Pendidikan

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Daya saing SDM dapat dicerminkan oleh beberapa indikator, diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kelompok usia. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar II.49 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

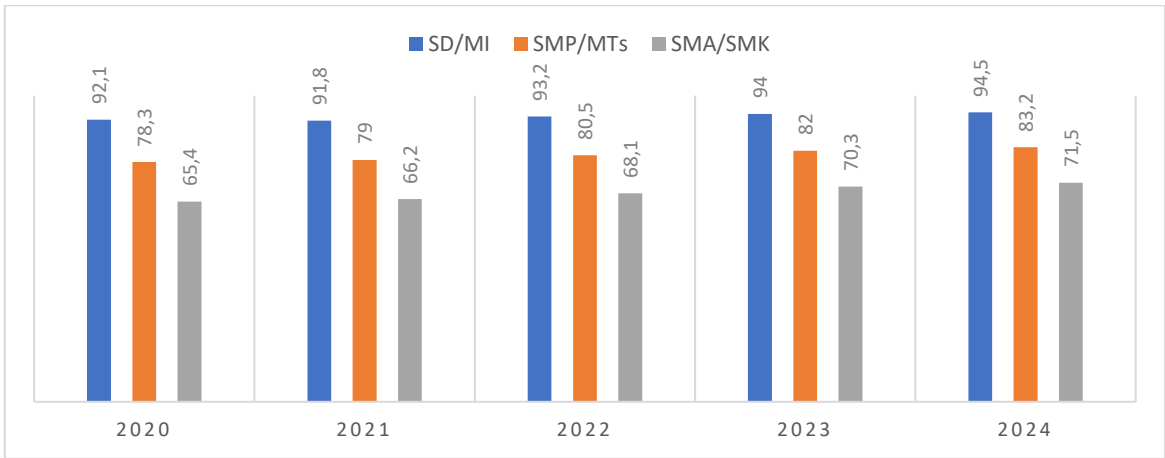
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 APK kelompok sekolah dasar di Kabupaten Lampung Selatan berada pada angka 104,86 dan menurun pada tahun berikutnya sebesar 2,74 poin dan berada pada nilai APK 104,86 di tahun 2019. Tren negatif ini terus berlanjut hingga tahun 2021 yang mencapai posisi 102,17. Hal serupa terjadi pada jenjang sekolah menengah pertama yang pada tahun 2019 berada pada angka 93,54 melemah hingga 0,53 poin pada tahun 2023 menjadi APK Sekolah Menengah Pertama 84,74. Berbeda dengan kelompok sebelumnya, APK pada kelompok menengah atas justru mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, APK kelompok SLTA/MA sederajat tercatat sebesar 74,8 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 hingga mencapai nilai APK 81,61.

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan Dasar dan Menengah pertama yang masih bersekolah pada jenjang Pendidikan yang sesuai dengan kelompok

umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar II.50 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Berdasarkan data dari Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 2020-2024. Pada jenjang sekolah dasar, APM mengalami peningkatan konsisten sejak tahun 2020 dengan nilai awal 98,33, dan terus menunjukkan tren naik hingga tahun 2024. Pola serupa juga terlihat pada jenjang sekolah menengah pertama, di mana partisipasi pendidikan terus membaik selama lima tahun terakhir.

Peningkatan APM ini mencerminkan keberhasilan program pemerintah daerah dalam perluasan akses pendidikan dasar dan menengah. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi antara lain: (1) pembangunan infrastruktur sekolah di daerah terpencil, (2) program bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, dan (3) sosialisasi pentingnya pendidikan dasar 12 tahun. Namun demikian, data tahun 2024 belum menunjukkan apakah tren positif ini berlanjut atau mengalami perubahan.

C. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS ini juga memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. APS di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.75 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	07 – 12 (Sekolah Dasar)	99,78	100	99,80	99,72	99,74
2	13–15 (Sekolah Menengah Pertama)	94,76	93,31	93,42	93,98	98,23
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	65,90	71,83	71,93	72,36	72,36

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lampung Selatan pada rentang usia 7-12 memiliki tren stabil selama rentang waktu 2020-2024, yaitu berkisar di angka 99. Namun persentase APS usia Sekolah Dasar di Lampung Selatan masih sedikit lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata APS Provinsi Lampung. Selaras dengan kondisi ini pada rentang usia 13-15 tahun menunjukkan tren yang juga fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2020 APS berada pada angka 94,76 dan kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya dan berada pada APS 93,31. Penurunan APS pada kelompok SMP/MTs sederajat ini berlangsung hingga tahun 2023 yang mencapai APS 93,98 namun kembali mencapai angka 98,23 pada tahun 2024. Sementara, APS pada kelompok sekolah menengah atas bergerak stabil, pada tahun 2021 diketahui APS kelompok SLTA/MA sederajat berada pada posisi 71,83 dan sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 72,36. Walaupun peningkatan yang relatif kecil, namun APS kelompok SLTA/MA sederajat Lampung Selatan ini berada di atas rata-rata APS Provinsi Lampung.

D. Minat Baca

Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Seseorang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran sendiri atau dorongan dari luar.

Sedangkan tujuan membaca adalah untuk mendapatkan informasi. Informasi yang dimaksud disini mencakup informasi bisa tentang fakta dan kejadian sehari-hari sampai informasi tingkat tinggi tentang teori-teori serta penemuan dan temuan ilmiah yang canggih. Tujuan ini mungkin berkaitan dengan keinginan pembaca untuk mengembangkan diri, tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Makna atau arti (*meaning*) erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan atau intensif kita dalam membaca.

Tabel II.76 Persentase Jumlah Masyarakat yang Minat Membaca di Perpustakaan Tahun 2020-2024					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Minat Baca Masyarakat	NA	74%	48%	51%	56%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Minat Baca Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan tren penurunan yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, sebelum kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023. Pada tahun 2021, tingkat minat baca masyarakat sebesar 74%, yang kemudian menurun drastis menjadi 48% pada tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya penurunan aktivitas kunjungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan ke perpustakaan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan menjadi 56%, menunjukkan adanya upaya atau faktor tertentu yang mendorong kembali minat baca masyarakat, meskipun capaian tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Penurunan tajam di tahun 2022 kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebiasaan masyarakat, kurangnya akses atau daya tarik layanan perpustakaan, atau dampak dari situasi pandemi Covid-19 yang mengubah pola interaksi sosial dan budaya membaca. Sementara itu, peningkatan pada tahun 2023 dapat mencerminkan pemulihan sebagian dari kondisi tersebut atau keberhasilan upaya meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan.

E. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah di Kabupaten Lampung selatan pada tahun 2020 tedapat 0,17% pada jenjang sekolah menengah pertama dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 0,005 persen. Angka yang sama pula terjadi pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 Angka Putus Sekolah kembali meningkat menjadi 0,06 dan di tahun 2024 kondisi ini meningkat hingga mencapai 1,33. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.77 Angka Putus Sekolah dari per10.000 murid Tahun 2020-2024						
No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Orang Tidak Sekolah	0,17	0,005	0,005	0,06	1,33

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2024 (data diolah)

F. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Angka Kelulusan di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.78 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,35	98,26	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,13	98,19	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Selatan pada kedua jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2020 angka kelulusan sekolah dasar ada pada angka 99,35 persen dan sekolah menengah pertama ada pada angka 99,13 persen dan pada tahun berikutnya masing-masing mengalami penurunan 1,09 persen dan 0,94 persen menjadi 98,26% pada jenjang sekolah dasar dan 98,19 persen pada jenjang sekolah menengah pertama. Namun, pada tahun 2022, AL mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 100 persen untuk ke dua jenjang pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa di tahun 2022 hingga 2024, semua siswa di kedua jenjang tersebut berhasil lulus sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan di Lampung Selatan berhasil dalam meluluskan semua siswanya.

G. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan dapat dilihat dari jumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan, dari Taman Kanak-Kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), di setiap Kecamatan.

Tabel II.79 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2020-2024

Wilayah	PAUD					SD					SMP					Total				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Natar	103	108	110	114	119	66	66	67	68	69	25	27	28	29	31	194	201	205	211	219
Jati Agung	70	73	80	79	82	50	51	52	52	52	25	27	27	30	30	145	151	159	161	164
Kalianda	61	61	61	60	61	44	45	45	45	45	12	12	12	13	15	117	118	118	118	121
Tanjung Bintang	46	52	54	54	54	40	41	41	41	41	12	12	12	12	12	98	105	107	107	107
Sidomulyo	47	47	49	50	51	37	37	37	37	37	10	10	10	10	10	94	94	96	97	98
Candipuro	38	37	39	39	38	38	38	38	38	29	6	5	6	6	10	82	80	83	83	77
Kec. Palas	36	37	37	39	40	26	26	26	27	38	10	10	10	10	6	72	73	73	76	84
Katibung	37	38	38	38	38	30	31	30	30	31	6	6	6	7	8	73	75	74	75	77
Merbau Mataram	32	32	31	33	33	29	29	29	29	29	10	9	10	11	11	71	70	70	73	73
Ketapang	28	31	31	31	31	26	30	26	26	26	5	3	6	6	6	59	64	63	63	63
Penengahan	29	28	31	31	32	30	26	30	30	30	3	5	3	3	3	62	59	64	64	65
Sragi	22	22	23	23	23	19	19	19	19	19	4	4	5	5	5	45	45	47	47	47
Tanjung Sari	20	20	20	22	20	15	15	15	18	16	5	5	5	4	4	40	40	40	44	40
Rajabasa	22	22	21	20	22	18	18	18	15	18	4	4	4	4	4	44	44	43	39	44
Way Sulan	17	17	17	17	17	9	9	9	9	9	3	3	3	4	4	29	29	29	30	30
Bakauheni	15	15	15	15	17	11	11	11	11	11	5	5	5	4	4	31	31	31	30	32
Way Panji	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	25	25	25	25	25
Lampung Selatan	636	653	670	678	691	497	501	502	504	509	148	150	155	161	166	1.281	1.304	1.327	1.343	1.366

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sekolah di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan peningkatan yang konsisten pada semua jenjang pendidikan, yaitu PAUD, SD, dan SMP selama periode tahun 2020-2024. Pada jenjang PAUD, pertumbuhan terbesar terjadi antara tahun 2020 dan 2021, yaitu sebanyak 17 sekolah. Secara keseluruhan, dari tahun 2020 sampai 2024, jumlah sekolah PAUD meningkat dari 636 sekolah pada tahun 2020 menjadi 691 sekolah pada tahun 2024, dengan total penambahan 55 sekolah.

Pada jenjang SD, walaupun peningkatan jumlah sekolah tidak sebesar PAUD, tren yang sama juga terlihat, dengan jumlah sekolah bertambah setiap tahun. Penambahan tertinggi terjadi pada tahun 2023 ke 2024, yaitu sebanyak 5 sekolah. Secara keseluruhan, jumlah sekolah SD bertambah dari 497 sekolah pada tahun 2020 menjadi 509 sekolah pada tahun 2024, menghasilkan peningkatan total sebanyak 12 sekolah selama tahun 2020-2024.

Jenjang SMP juga mengalami peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Penambahan terbesar terjadi antara tahun 2021 dan 2022, yaitu sebanyak 5 sekolah. Selama tahun 2020-2024, jumlah sekolah SMP bertambah dari 148 pada tahun 2020 menjadi 166 pada tahun 2024, dengan total peningkatan 18 sekolah.

Secara keseluruhan, total jumlah sekolah di semua jenjang di Kabupaten Lampung Selatan meningkat dari 1.281 sekolah pada tahun 2020 menjadi 1.366 sekolah pada tahun 2024, dengan total kenaikan sebesar 85 sekolah selama tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam penyediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan.

2.1.4.4.2 Bidang Urusan Kesehatan

A. Rasio Posyandu Per 100 Balita

infrastruktur Kesehatan juga menjadi bagian penting untuk menjadi perhatian dalam rencana pembangunan. Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari

petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Jumlah fasilitas pelayanan Posyandu di Kabupaten Lampung Selatan terus meningkat namun jangkauan pelayanan belum optimal, ini ditunjukkan dari belum maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal ini disebabkan pembiayaan kesehatan belum menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Lampung Selatan khususnya masyarakat miskin yang belum mempunyai kartu jaminan kesehatan.

Rasio Posyandu terhadap jumlah balita adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak Posyandu yang tersedia untuk melayani balita (bayi di bawah lima tahun) dalam suatu wilayah. Rasio ini penting untuk menilai ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang difokuskan pada tumbuh kembang balita, imunisasi, pemantauan gizi, serta kesehatan ibu dan anak. Jumlah fasilitas pelayanan Posyandu di Kabupaten Lampung Selatan terus meningkat untuk memaksimalkan jangkauan pelayanan kesehatan balita.

Tabel II.80 Rasio Posyandu Per 100 Balita Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Posyandu per 100 balita	1,4	1,19	1,22	1,3	1,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Tabel di atas menunjukkan, rasio posyandu terhadap jumlah balita. Diketahui bahwa pada tahun 2020, rasio ini hanya sebesar 1,4. Artinya, dari 1.000 balita yang ada di Kabupaten Lampung Selatan hanya terdapat kurang lebih 1 posyandu saja. Namun angka ini mengalami penurunan hingga tahun 2024 telah mencapai 1,3.

B. Rasio Pelayanan Unit Kesehatan Per 1.000 Penduduk

Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai ujung tombak program-program kesehatan tentu saja rasio pelayanan unit kesehatan terhadap satuan penduduk menjadi salah satu tolak ukur dalam hal ketercapaian program kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020 tercatat puskesmas per-1000 penduduk sebesar 0,027, Poliklinik per-1000 penduduk 0,071, dan puskesmas pembantu 0,075. Selama 5 tahun, rasio ini mengalami fluktuasi tetapi cenderung kearah positif. Pada tahun 2024 telah tercatat rasio puskesmas per-1000 penduduk sebesar 0,026, Poliklinik per-1000 penduduk 0,083, dan puskesmas pembantu per-1000 penduduk 0,069.

Tabel II.81 Rasio Pelayanan Unit Kesehatan Per 1.000 Penduduk Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio puskesmas per-1000 penduduk	0,027	0,027	0,027	0,026	0,026
2	Rasio Poliklinik per-1000 penduduk	0,071	0,066	0,086	0,073	0,083
3	Puskesmas Pembantu per-1000 penduduk	0,075	0,074	0,070	0,069	0,069

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

C. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terhitung cenderung meningkat dari 0,005 menignkat menjadi 0,006, hal ini terjadi karena terdapat penambahan jumlah rumah sakit. Berikut adalah tabel jumlah dan rasio rumah sakit penduduk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel II.82 Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk, 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit	5	6	6	6	6
2	Jumlah Penduduk	992.763	1.002.285	1.045.662	1.064.301	1.064.301
3	Rasio	0,005	0,006	0,006	0,006	0,006

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2024 (data diolah)

2.1.4.4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Rasio Panjang Jalan

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam

meningkatkan kegiatan perekonomian dalam hal distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Secara umum jaringan jalan di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari jaringan jalan Nasional 154 km, Jaringan jalan provinsi 104 km, Jaringan Jalan Tol 105 km, jaringan jalan kabupaten 1.204,10 dan Jaringan Jalan Desa 5.040 km dengan total ruas panjang jalan sepanjang 6.608 km dengan rincian sebagai berikut:

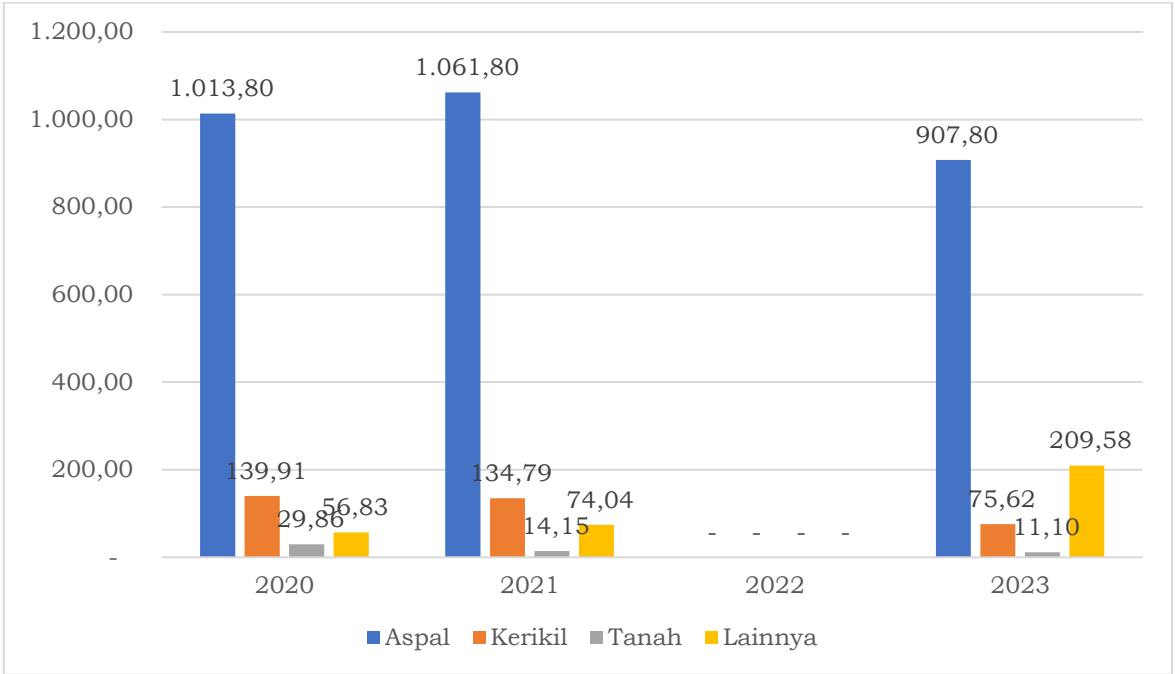
Tabel II.83 Panjang Jalan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024 (km)

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan	1.284,78	1.284,78	1.284,78	1.204,10	1.204,10

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Ketersediaan panjang jalan di Kabupaten Lampung Selatan relatif tidak berkembang, bahkan ada penurunan jumlah panjang jalan terutama dari jalan nasional dan provinsi. Sementara panjang jalan kabupaten selama lima tahun terakhir juga tidak bertambah.

Gambar II.51 Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Sedangkan panjang jalan menurut permukaan jalan di Kabupaten Lampung Selatan dengan kondisi permukaan sudah di aspal terus menunjukkan peningkatan pada 2020 panjang jalan yang sudah diaspal sepanjang 1.013,80 Km sementara pada tahun 2021 panjang jalan yang sudah diaspal telah mencapai 1.061,80 Km. Pada tahun 2023 data panjang jalan menurut kondisi permukaan jalan menurun sebesar 907,80 Km.

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dilintasi oleh 5 (empat) jaringan jalan yang merupakan lintasan jalan yang dominan bagi pergerakan kendaraan baik lokal, regional maupun lintas terusan, yaitu:

- 1) Jalan Lintas Tengah, melintasi dari Bakauheni-Bandar Lampung-Kotabumi-Bukit Kemuning-Blambangan Umpu-Batas Sumatera Selatan sepanjang 318,95 Km
- 2) Jalan Lintas Barat, melintasi Bakauheni-Kalianda-Bandar Lampung-Kotabumi-Bukit Kemuning-Liwa-Krui-Pugung Tampak-Batas Bengkulu sepanjang 430,33 Km
- 3) Jalan Lintas Pantai Timur, melintasi dari Bakauheni-Ketapang-Labuhan Maringgai-Sukadana-Menggala-Pematang Panggang-Batas Sumatera Selatan sepanjang 294,04 km, dan
- 4) Jalan Lintas Pantai Barat, melintasi Bakauheni-Bandar Lampung-Pringsewu-Kota Agung-Bengkunat-Biha-Krui-Pugung Tampak- Batas Bengkulu, sepanjang 416,48 km.
- 5) Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,94 km yang merupakan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

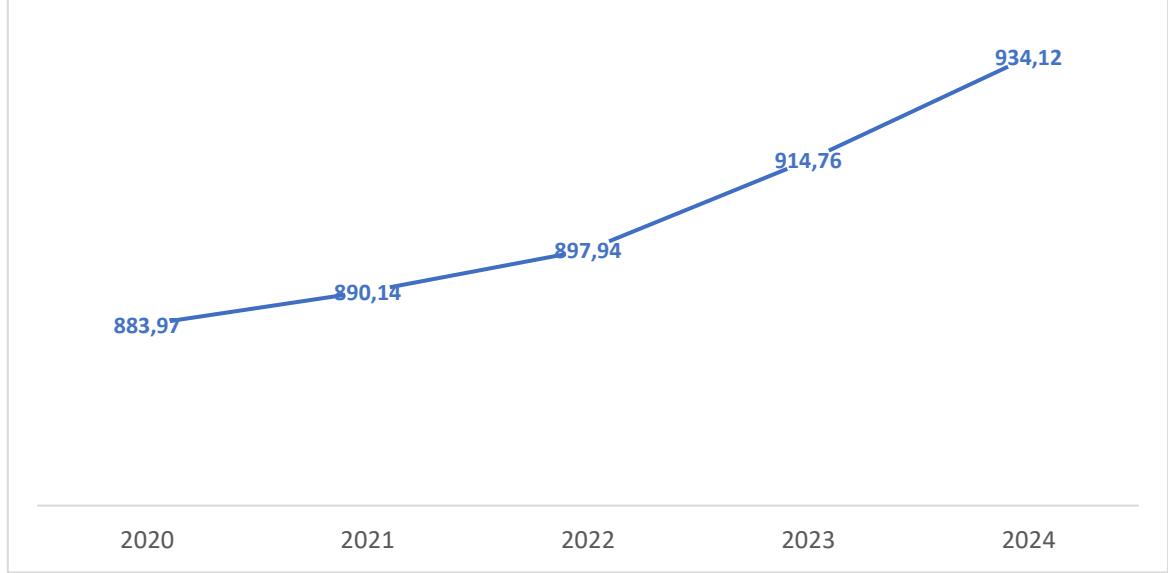
Penyelenggara angkutan umum jalan raya di Kabupaten Lampung Selatan dikategorikan sebagai angkutan lokal, yaitu berupa angkutan pedesaan. Angkutan pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan melayani 9 lintasan trayek dengan jumlah armada 336 unit. Terminal merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan memiliki dua terminal penumpang dengan terminal tipe C, yaitu Terminal Kalianda dan Terminal Bunut.

Lebih jauh, Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding

dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Gambar II.52 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024



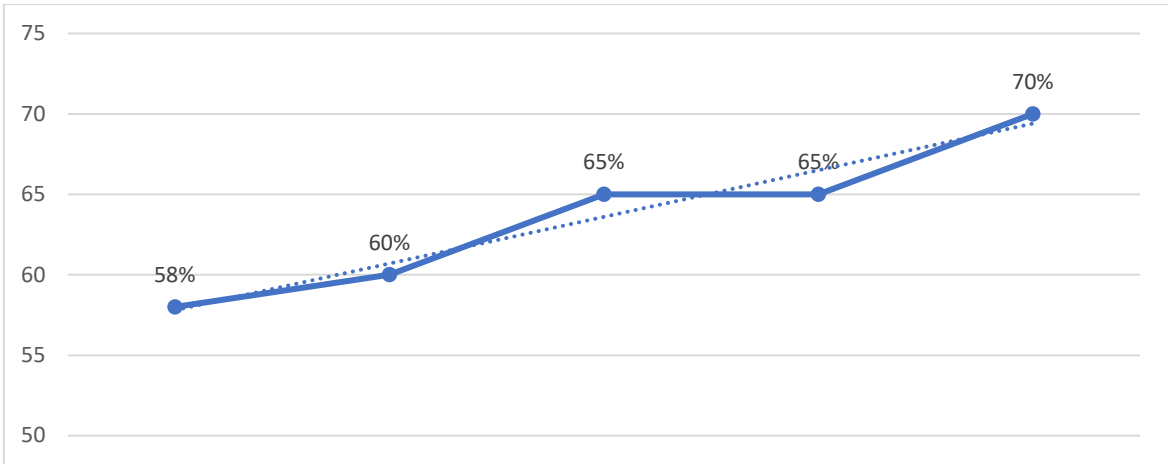
Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), Kabupaten Lampung Selatan mengalami perubahan rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk, yang mencerminkan perkembangan infrastruktur transportasi dan dinamika kependudukan. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 934,12, menunjukkan bahwa setiap kilometer jalan melayani sekitar 934 penduduk.

B. Jalan Kabupaten Kondisi Mantap

Lebih lanjut, bila dilihat dari gambar di bawah ini dapat terlihat bahwa presentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Tampak bahwa di tahun 2020 terdapat 58 % pemukiman penduduk yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda 4, dan proporsi ini meningkat hingga ke level 70 % di tahun 2024.

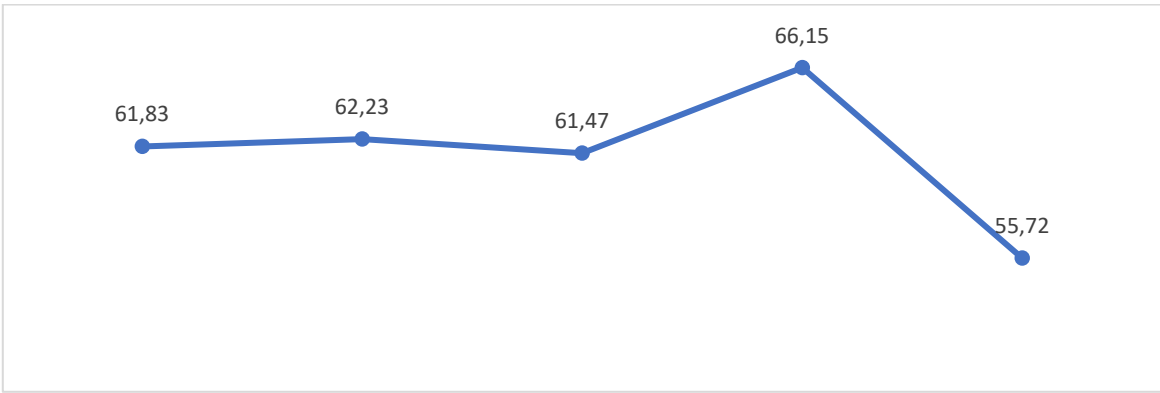
Gambar II.53 Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Dari gambar di bawah ini dapat diketahui bahwa persentase jalan Kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi mantap atau dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2022 namun mengalami penurunan di tahun 2023 dimana hanya 55,72 % dari total Panjang jalan Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar II.54 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (> 40 KM/Jam) Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Dapat dijabarkan bahwa jalan Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 415,08 km dalam kondisi baik 255,90 km dalam kondisi sedang 225,06 km dalam kondisi rusak 308,07 dalam kondisi rusak berat dari total Panjang jalan di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan persentase panjang jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Lampung Selatan sepanjang 1.204 km, dengan persentase tertinggi terdapat di Kecamatan Natar 13,79%, Kecamatan Tanjung Bintang 10,40%, Kecamatan Kalianda 9,59%, Kecamatan Jati Agung 9,26%

Kecamatan Katibung 8,64% Kecamatan Palas 6,45% Kecamatan Sidomulyo 5,86% Kecamatan Merbau Mataram 5,36% Kecamatan Candipuro 5,26% Kecamatan Ketapang 5,04% dan 7 kecamatan lainnya berada dibawah 5% selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

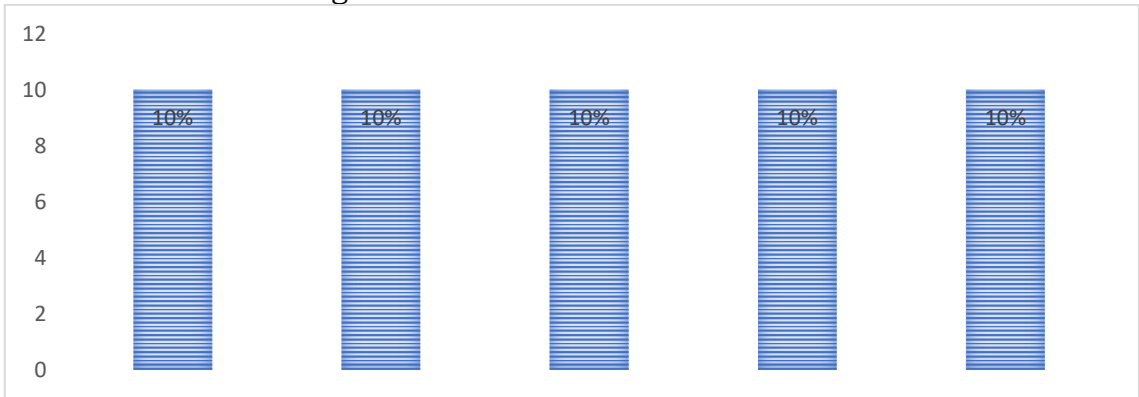
Tabel II.84 Persentase Panjang Jalan Kabupaten per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk (org)	Layanan jalan (org/Km)	Jalan Kabupaten		Prioritas dalam pembangunan dan kawasan
				Panjang (Km)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6=3/5	7
1	Natar	193.172	1.164	166	13,79%	Bandara Raden Intan, Mendukung ibukota propinsi, Jalan Tol dan Jalan Nasional
2	Tanjung bintang	82.757	661	125	10,40%	Kawasan industri Lampung, Mendukung ibukota propinsi, Jalan Tol dan Jalan Nasional
3	Kalianda	94.784	821	115	9,59%	Ibukota pemerintahan, Pariwisata, Pertanian, Pusat jasa, Jalan Tol dan Jalan Nasional
4	Jati Agung	129.501	1.162	111	9,26%	Permukiman, Mendukung ibukota propinsi, Jalan Tol dan Kota baru
5	Katibung	73.069	702	104	8,64%	Pelabuhan, Industri, Mendukung ibukota propinsi, Jalan Tol dan Jalan Nasional
6	Palas	61.289	789	78	6,45%	Lubung Padi, Pertanian, perdagangan/jasa dan mendukung kabupaten
7	Sidomulyo	65.748	931	71	5,86%	Pariwisata, Jalan Propinsi, Jalan Tol, Pertanian dan Jalan Nasional
8	Merbau Mataram	56.901	882	64	5,36%	Hutan, Pertanian, Jalan Tol dan Permukiman
9	Candipuro	58.029	915	63	5,26%	Lubung Padi, Pertanian, Jalan Propinsi dan berbatasan dengan Kab. Lampung Timur
10	Ketapang	53.518	883	61	5,04%	Pertanian, kawasan industri lampung, berbatasan dengan Kab. Lampung Timur dan Jalan Nasional lintas timur
11	Penengahan	42.555	708	60	4,99%	Lubung Jagung, Mendukung ibukota kabupaten, Jalan Tol dan Jalan Nasional
12	Tanjung Sari	32.044	606	53	4,39%	Perkebunan, pemukiman, mendukung ibukota propinsi dan Jalan Nasional
13	Sragi	35.914	706	51	4,23%	Lubung Padi, Pertanian, berbatasan dengan Kab. Lampung Timur dan Jalan Nasional lintas timur
14	Way Sulan	24.496	753	33	2,70%	Pertanian, Perkebunan, dan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
15	Way Panji	18.232	785	23	1,93%	Pertanian, mendukung ibukota Kabupaten, Jalan Tol dan Jalan Nasional
16	Bakauheni	24.696	1.191	21	1,72%	Pelabuhan Bakauheni, Tugu Siger, Mendukung kepentingan Nasional, Jalan Tol dan Jalan Nasional
17	Rajabasa	25.022	5.423	5	0,38%	Gunung Krakatau, Gunung Rajabasa, Mendukung sumber air untuk Kawasan bakauheni, Pariwisata dan Jalan Propinsi
Jumlah		1.071.727	890	1.204	100,00%	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Persentase bahu jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir ini cenderung stabil, yaitu sebesar 10%.

Gambar II.55 Persentase Bahu Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Tahun 2020-2024



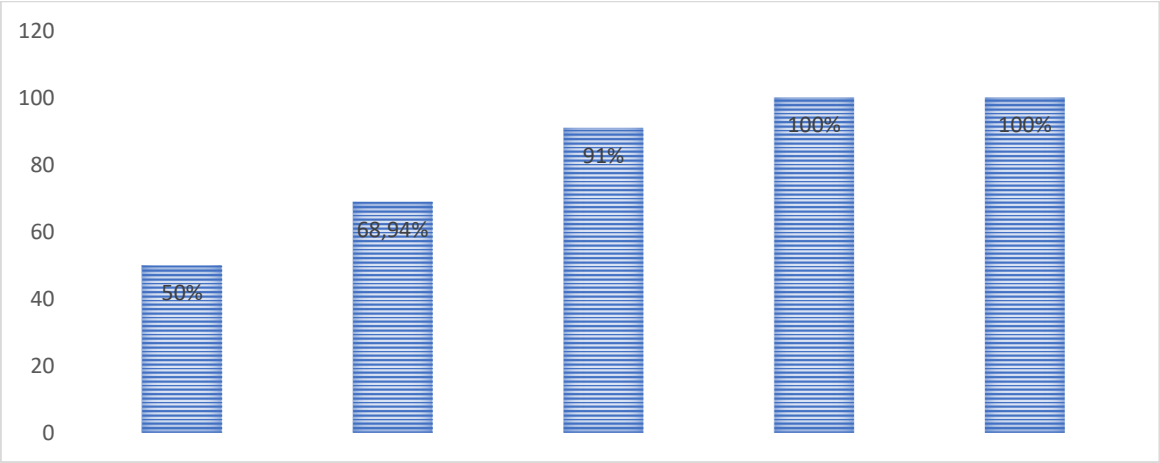
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.4.4.4 Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman

A. Rumah Tinggal Bersanitasi

Gambar di bawah ini menunjukkan persentase rumah tinggal masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan yang telah memiliki akses sanitasi selama 2020-2024. Dari gambar dapat diketahui bahwa persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2020 proporsinya hanya 50% dan meningkat di tahun 2023 dan 2024 yaitu telah mencapai 100%.

Gambar II.56 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2020-2024

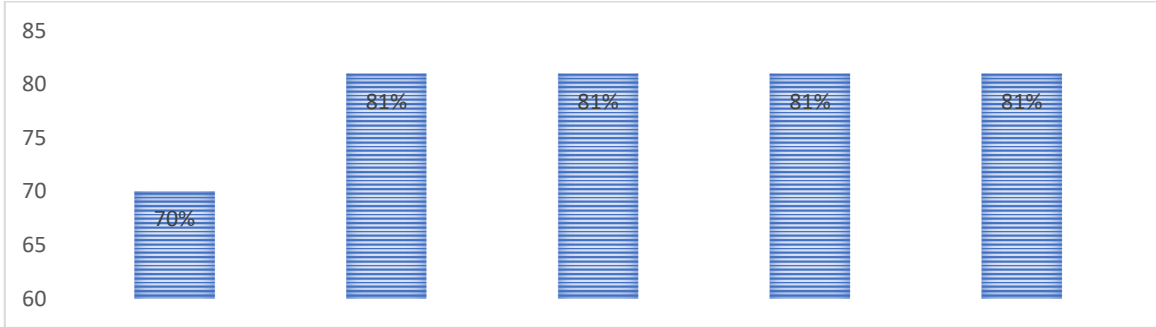


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

B. Drainase Kondisi Baik

Gambar di bawah ini menunjukkan persentase drainase dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir. Dapat diketahui melalui grafik bahwa pada tahun 2020 persentase drainase dengan status baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat adalah sebesar 70 persen. Persentase ini mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya yaitu menjadi 81 persen hingga tahun 2024.

Gambar II.57 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2020-2024

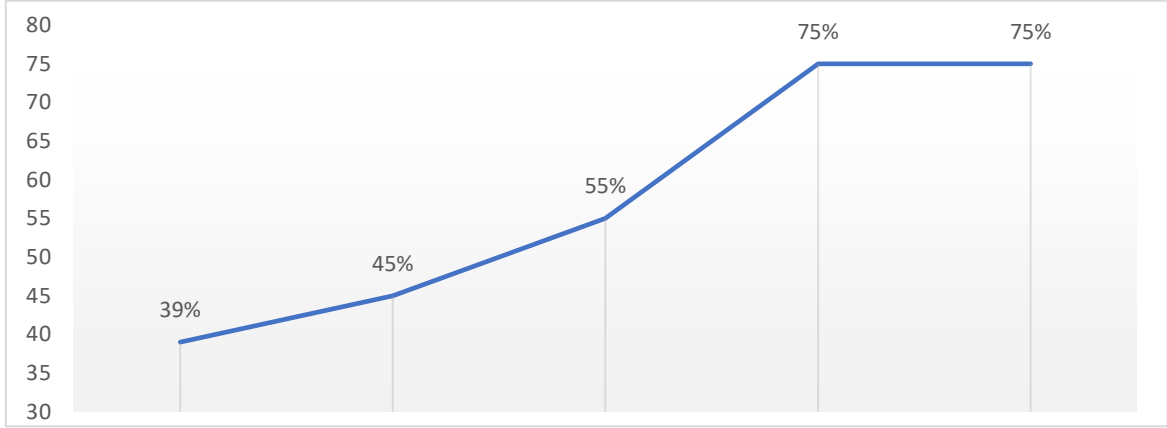


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

C. Irigasi Kondisi Baik

Grafik di bawah ini menunjukkan persentase irigasi kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi baik. Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap persentase irigasi kabupaten ini. Dimana pada tahun 2020 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik hanya mencapai 39 persen, dan meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2024, yang mencapai 75 persen.

Gambar II.58 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

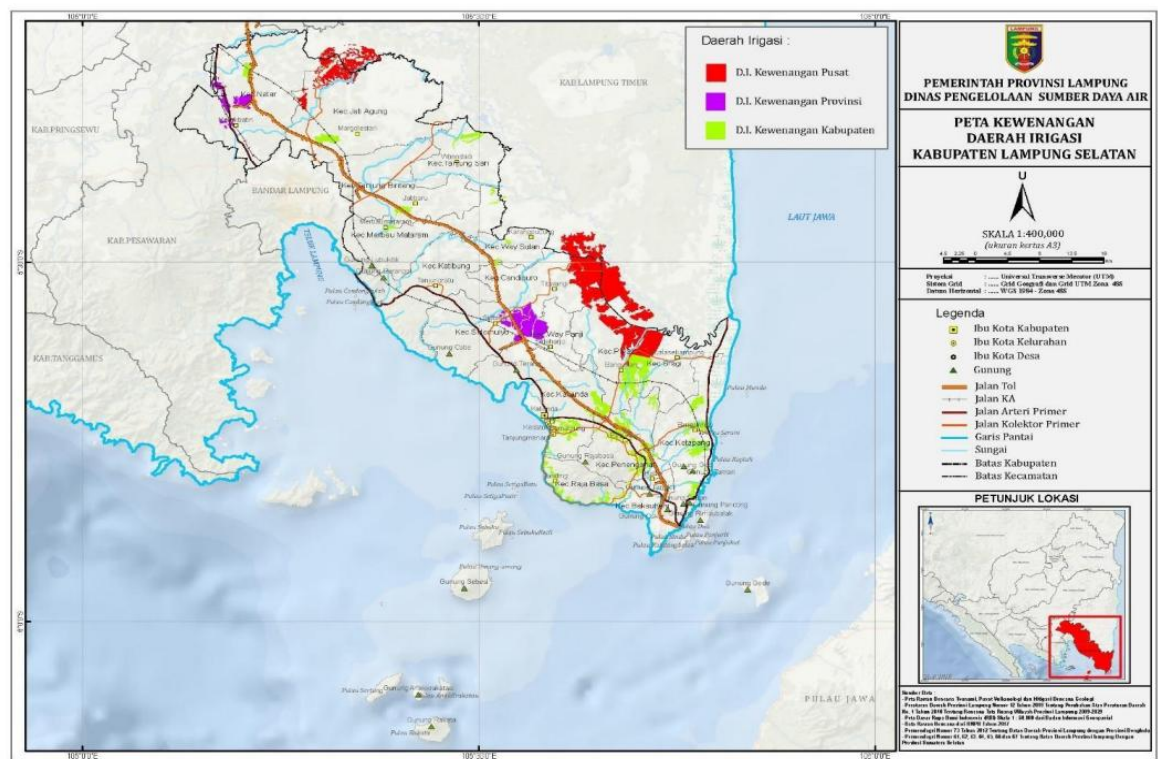
Daerah irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Selatan menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015 terbagi menjadi 3 kewenangan yaitu D.I. Kewenangan Pusat, D.I. Kewenangan Provinsi dan D.I. Kewenangan Kabupaten. D.I. Kewenangan Pusat dalam Peraturan Menteri adalah D.I. Pisang dengan luasan 10.525 Ha dan D.I. Way Kandis II dengan luasan 3.500 Ha. D.I. Kewenangan Provinsi terbesar yaitu D.I. Way Ketibungan dengan luasan 1.550 Ha. Sedangkan untuk D.I. Kewenangan Kabupaten terbesar adalah D.I. Way Pisang 1 dengan luasan 972 Ha. Detail Dearah Irigasi yang lain dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel II.85 Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

No	Nama Daerah Irigasi	Luasan (Ha)	No	Nama Daerah Irigasi	Luasan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1.	D.I. Way Asahan	500	53.	D.I. Way Tajimalela	270
2.	D.I. Way Bamban	34	54.	D.I. Way Tanjung Iman	100
3.	D.I. Way Belerang	150	55.	D.I. Way Tuba Mati	265
4.	D.I. Way Belerang II	60	56.	D.I. Way Tutung	150
5.	D.I. Way Bojong	75	57.	D.I. Way Asahan Hulu	125
6.	D.I. Way Buha	60	58.	D.I. Way Asin	160
7.	D.I. Way Canggal	80	59.	D.I. Way Batu Agung	45
8.	D.I. Way Cempaka	798	60.	D.I. Way Belajung	70
9.	D.I. Way Cidatuan	80	61.	D.I. Way Betung	40
10.	D.I. Way Hamkawoan	777	62.	D.I. Way Buah Berak	150
11.	D.I. Way Hamsari	326	63.	D.I. Way Canggung	91
12.	D.I. Way Jembatan Baru	30	64.	D.I. Way Cermin I	110
13.	D.I. Way Kedaton	150	65.	D.I. Way Cermin II	101
14.	D.I. Way Kekiling	157	66.	D.I. Way Cermin III	110
15.	D.I. Way Kelau I	20	67.	D.I. Way Cugung I	25
16.	D.I. Way Keroncong	100	68.	D.I. Way Cugung II	100
17.	D.I. Way Kertosari	250	69.	D.I. Way Curup	58
18.	D.I. Way Kesugihan I	150	70.	D.I. Way Gresik	40
19.	D.I. Way Kesugihan II	50	71.	D.I. Way Jejur	45
20.	D.I. Way Kupang Curup	105	72.	D.I. Way Kelau II	9
21.	D.I. Way Kuripan	865	73.	D.I. Way Kelau III	17
22.	D.I. Way Mahima	63	74.	D.I. Way Kelau IV	169
23.	D.I. Way Maja	53	75.	D.I. Way Kelau V	25
24.	D.I. Way Memata	100	76.	D.I. Way Kunjir I	58
25.	D.I. Way Merak I	18	77.	D.I. Way Kunjir II	200
26.	D.I. Way Merak II	40	78.	D.I. Way Kunjir III	92
27.	D.I. Way Muli I	20	79.	D.I. Way Lappai Tengah	52
28.	D.I. Way Muli II	35	80.	D.I. Way Pahibungan I	25
29.	D.I. Way Negeri Pandan	309	81.	D.I. Way Pahibungan II	40
30.	D.I. Way Nyimut	161	82.	D.I. Way Pematang	50
31.	D.I. Way Panas	90	83.	D.I. Way Penengahan II	410
32.	D.I. Way Pancur Timah	176	84.	D.I. Way Rengas	215
33.	D.I. Way Pangkul	150	85.	D.I. Way Ruguk	325
34.	D.I. Way Pardasuka	30	86.	D.I. Way Sabah Bajau	106
35.	D.I. Way Pelita Dewa	55	87.	D.I. Way Samoja	200
36.	D.I. Way Pematang I	200	88.	D.I. Way Serpong I	15
37.	D.I. Way Pematang II	150	89.	D.I. Way Serpong II	75
38.	D.I. Way Penengahan I	143	90.	D.I. Way Sinar Karya	25
39.	D.I. Way Pisang Hulu	34	91.	D.I. Way Sobah Limbang	125
40.	D.I. Way Pisang I	972	92.	D.I. Way Sukaratu Kanan	100
41.	D.I. Way Rajabasa II	150	93.	D.I. Way Sukaratu Kiri	50
42.	D.I. Way Sededer	300	94.	D.I. Way Sumur Dewa	300
43.	D.I. Way Semambo	150	95.	D.I. Way Sumur I	125
44.	D.I. Way Gendang Sari I	87	96.	D.I. Way Tabu	150
45.	D.I. Way Gendang Sari II	80	97.	D.I. Way Tajimela I	23
46.	D.I. Way Suban	217	98.	D.I. Way Tajimela II	66
47.	D.I. Way Suka Maju	100	99.	D.I. Way Tajimela III	36
48.	D.I. Way Sumber Agung	10	100.	D.I. Way Tanjung Harapan	100
49.	D.I. Way Sumpuk	74	101.	D.I. Way Tebing Cepa	214
50.	D.I. Way Sumur	150	102.	D.I. Way Tengkujuh	125
51.	D.I. Way Sumur Kumbang	122	103.	D.I. Way Tetaan	546
52.	D.I. Way Supi	176			
Luas Total Daerah Irigasi					15.355

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

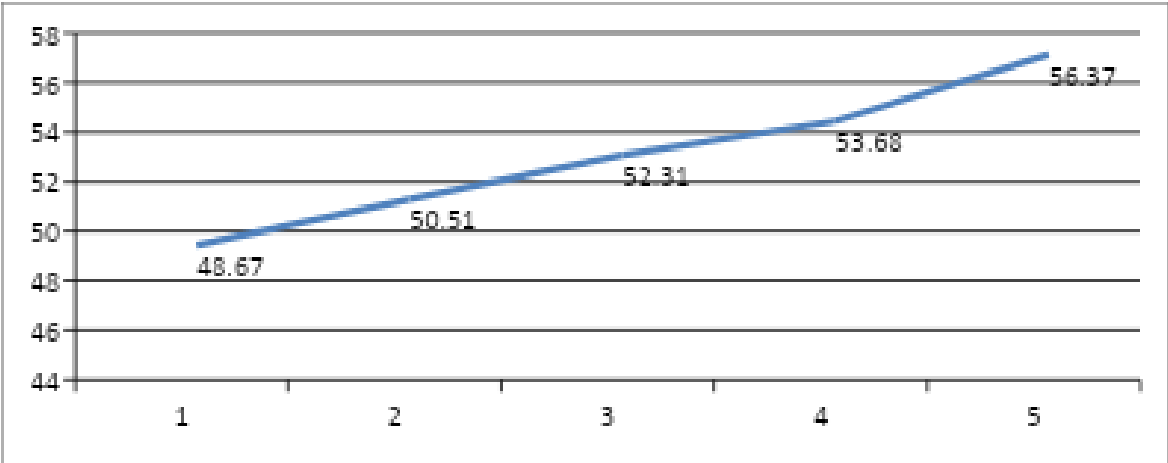
Gambar II.59 Peta Kewenangan Daerah Irigasi



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, 2024

Grafik di bawah ini menunjukkan persentase irigasi kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi baik. Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap persentase irigasi kabupaten ini. Dimana pada tahun 2020 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik hanya mencapai 48%, dan meningkat hampir satu kali lipat di tahun 2024, yang mencapai 56%.

Gambar II.60 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.4.4.5 Bidang Urusan Penanaman Modal

Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Lampung Selatan selama

periode 2020-2024 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.86 Jumlah Nilai Investasi Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No	Indikator	Tahun (Triliun Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Jumlah PMA	359.720	795.557	56.143	395.537	450.000
2	Jumlah PMDN Fasilitas	740.745	311.430	329.169	789.916	850.000
3	Jumlah PMDN Non Fasilitas Skala Besar	735.368	262535	278.128	0	0
4	Jumlah PMDN Non Fasilitas Skala Menengah	0	28.432	11.699	0	0
5	Jumlah PMDN Non Fasilitas Skala Kecil	5.367	20.462	39341	0	0
	Jumlah	1.100.455	1.106.987	385.311	1.194.452	1.300.000

*Angka Sementara

Sumber data: DPMPSTSP Kabupaten Lampung Selatan, 2025

Secara umum, rata-rata nilai realisasi PMDN mengalami peningkatan selama periodesasi 2020-2024. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,3 Triliun rupiah.

2.1.4.4.6 Bidang Urusan Pariwisata

Menurut *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO), wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang berkunjung ke suatu negara di luar tempat tinggalnya untuk beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 bulan. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara yaitu:

- a. Wisatawan (*tourist*) adalah setiap pengunjung yang datang ke suatu tempat dan tinggal di tempat tersebut tidak lebih dari dua belas 12 bulan dengan maksud kunjungan antara lain: berlibur, rekreasi dan olahraga bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan.
- b. Pelancong (*excursionist*) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal ditempat tersebut kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap

pengunjung yang tiba di suatu tempat dengan menggunakan kapal atau kereta api, dan mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Tabel II.87 Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	213	135	629	64	17	109
2.	Jumlah Wisatawan Nusantara	462.800	236.038	443.250	616.728	730.251	1.216.734
TOTAL		463.013	236.173	443.879	616.792	730.268	1.216.843

* Sampai dengan Bulan Oktober 2024
Sumber: Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Tabel di atas menunjukkan data kunjungan wisatawan di Kabupaten Lampung Selatan sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020, dimana Pandemi Covid terjadi, pada tahun 2020, kunjungan wisatawan hanya mencapai angka 236.173 orang. Setelah tahun 2020, dapat dilihat juga bahwa, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan sampai dengan Bulan Oktober 2024 telah mencapai 1.216.843 orang.

Jumlah kunjungan yang meningkat, tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan *stakeholders* terkait. Upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata menjadi prioritas. Sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Lampung Selatan mempunyai 92 objek wisata, yang terdiri dari 14 objek wisata terpadu, 8 objek wisata sejarah, 20 objek wisata alam, dan 50 objek wisata bahari.

Tabel II.88 Daftar Objek Wisata di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kelompok	Objek Wisata	
1	Wisata Terpadu (14 Objek Wisata)	• Tabek Indah • Slanik Center • Taman Asmoro • Grand Elty • Dayn Water Boom • Wisma Belerang • Negeri Baru Resort	• Pantai TPI BOM • Hutan Mangrove (Merak Belantung) • Kebun Edukasi • Krakatau Kahai Beach • Menara Siger • Hutan Mangrove • Bambu kuning
2.	Wisata Sejarah (8 Objek Wisata)	• Makam Al-Habib Ali Bin Alwi Al-Idrus • Makam Keratuan Darah Putih • Makam Radin Intan II • Prasasti Batu Bertulis	• Benteng Cempaka • Rumah Radin Intan II • Benteng Tanah Cempaka • Makam Ratu Menangsih
3.	Wisata Alam	• Air Terjun Raja Saka • Air Terjun Jamara	• Air Panas Ciperes • Air Terjun Anakan • Air Terjun Cijuwet

No	Kelompok	Objek Wisata	
	(20 Objek Wisata)	• Pematang Sunrise • Air Terjun Curug Layang • Air Terjun Way Kalam • Air Terjun Curuk Anakan • Way Tebing Ceppa • Way Benteng Kedagaan • Pemandian Alami Way Penagan	• Air Terjun Way Tayas • Gunung Krakatau • Pulau Umang • Way Guyuran • Cecaha Way Pkehos • Pemandian Way Belerang • Gunung Batu • Air Panas Natar
4.	Wisata Bahari (50 Objek Wisata)	• Pantai Onaria/ Tridarmayoga • Pantai Batu Putih • Pantai Minang Rua/Tanjung Tuha • Pantai Mengkudu • Pantai Batu Alif • Pantai Belebuk • Pantai Sekepol • Batu Lapis • Pantai Canti Indah • Pantai Kunjir • Pantai Wartawan/De mansion • Pantai Merpati • Pantai Banding Resort • Pantai Setigi Heni • Pantai Way Kulut • Pantai Guci Batu Kapal • Pantai Semukuk • Sanggar Beach • Pantai Kedu • Pantai Pelangi • Kalianda Beach • Benteng Food Station • Pantai Arora • Pantai Kedu Warna • Pantai Batu Rame	• Pantai Laguna/Alau-alau • Pantai Ketang • Pantai Bagus Beach Walk • Pantai Senja • Pantai Indah • Pantai MB beach (Merak Belantung) • Pantai Tanjung Beo • Pantai Sapenan • Pantai Kalianda Resort • Pantai Cemara • Pantai Tapak Kera • Pantai Marina • Teluk Nipah • Pantai Arang Grill and Beach • Pantai Rio by The Beach • Pantai Suak Indah • Pantai Resort Suak • Pantai Klara • Pantai Perak • Pantai Suak Labuhan • Pantai Sebalang • Pantai Tanjung Selaki • Pantai Pasir Putih • Pantai Pulau Pasir • Pulau Condong

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Lampung Selatan mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya yang tidak terwujud, seperti seni tari, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, dan praktik budaya lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa contoh WBTB di Lampung Selatan antara lain adalah Tari Selapanan, kain tenun ikat Inuh, dan Prasasti Palas Pasemah.

Berikut adalah beberapa WBTB di Lampung Selatan:

1. Tari Selapanan:

Tarian ini merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat Lampung Selatan, yang biasanya ditampilkan dalam acara-acara penting seperti pernikahan atau perayaan keagamaan.

2. Kain Tenun Ikat Inuh:

Kain tenun ini memiliki motif khas Lampung Selatan dan merupakan bagian dari tradisi pakaian tradisional masyarakat.

3. Prasasti Palas Pasemah:

Prasasti ini merupakan peninggalan sejarah dan budaya yang memiliki nilai sejarah penting di Lampung Selatan.

4. Lamban Pesagi:

Lamban Pesagi adalah jenis rumah adat tradisional Lampung Selatan yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal dan tempat pertemuan masyarakat.

5. Tari Melinting:

Tarian ini merupakan salah satu bentuk seni tari tradisional Lampung Selatan yang ditampilkan dalam berbagai acara kebudayaan.

6. Gamolan:

Gamolan adalah alat musik tradisional Lampung Selatan yang digunakan dalam berbagai acara kebudayaan dan ritual.

7. Muayak:

Muayak adalah bentuk sastra lisan tradisional Lampung Selatan, yang berisi cerita-cerita rakyat dan legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut.

8. Cangget Bakha:

Cangget Bakha adalah tarian tradisional Lampung Selatan yang memiliki gerakan yang unik dan memiliki makna simbolis.

9. Tari Rudat Lampung:

Tari Rudat Lampung adalah tarian tradisional Lampung Selatan yang ditampilkan dalam berbagai acara keagamaan dan kebudayaan.

10. Tari Bujantan Budamping:

Tari Bujantan Budamping adalah tarian tradisional Lampung Selatan yang ditampilkan dalam acara-acara penting seperti pernikahan.

11. Peros Masin:

Peros Masin adalah permainan tradisional Lampung Selatan yang dimainkan dengan alat musik tradisional.

12. Petikan Gitar Klasik:

Petikan Gitar Klasik adalah seni musik tradisional Lampung Selatan yang menggunakan gitar sebagai alat musik utama.

13. Tari Sigeh Pengunten:

Tarian ini merupakan salah satu tarian tradisional Lampung Selatan yang biasanya ditampilkan dalam berbagai acara kebudayaan.

14. Sulam Tapis:

Sulam Tapis adalah seni sulam tradisional Lampung Selatan yang digunakan untuk menghiasi pakaian tradisional.

15. Sulam Usus:

Sulam Usus adalah seni sulam tradisional Lampung Selatan yang digunakan untuk menghiasi pakaian tradisional.

16. Gulai Taboh:

Gulai Taboh adalah hidangan tradisional Lampung Selatan yang memiliki rasa khas dan merupakan bagian dari kuliner tradisional.

17. Sakura Cakak Buah:

Sakura Cakak Buah adalah permainan tradisional Lampung Selatan yang dimainkan dengan alat musik tradisional.

18. Seruit:

Seruit adalah hidangan tradisional Lampung Selatan yang memiliki rasa khas dan merupakan bagian dari kuliner tradisional.

19. Kain Tenun Ikat Inuh:

Kain tenun ini merupakan warisan budaya tak benda Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2016.

Warisan budaya tak benda Lampung Selatan ini merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan dan dijaga agar tetap lestari di masa depan.

2.1.4.4.7 Bidang Urusan Perikanan

Perikanan tangkap merupakan komoditas unggulan kedua terbesar se-Provinsi Lampung dengan nilai produksi sebesar 32.708,21 ton pada tahun 2024 meningkat sebesar 3,5% dibandingkan tahun 2023. Perikanan budidaya merupakan komoditas perikanan ikan air tawar dan ikan air payau dengan jumlah produksi sebesar 33.990,22 ton. Sektor perikanan merupakan komoditas yang potensial untuk dikembangkan sehingga dapat menambah nilai konsumsi gizi.

Tabel II.89 Produksi Sektor Perikanan

KOMODITAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan Tangkap (ton)	30.953,49	31.108,00	31.244,65	31.297,64	32.094,41	32.708,21
Perikanan Budidaya (ton)	29.620,27	31.101,28	31.443,94	32.840,22	33.533,76	33.990,22

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.4.4.8 Bidang Urusan Pertanian

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, dapat dilihat bahwa sektor yang memberikan kontribusi dan membuat daya ungkit (leverage) bagi pertumbuhan ekonomi terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2023 menjadi penghasil padi nomor 4 se-Provinsi Lampung. Kenaikan produksi padi sebesar 7,9% pada tahun 2024 dengan jumlah produksi sebesar 317.834 ton. Produksi jagung mengalami penurunan sebesar 1,3% pada tahun 2024. Kab. Lampung Selatan pada tahun 2024 menjadi penghasil jagung nomor 2 se-Provinsi Lampung. Produksi cabai besar menurun sebesar 32% di tahun 2024 dan merupakan komoditas penghasil cabai besar nomor 2 se-Provinsi Lampung. Produksi bawang merah turun sebesar 28% di tahun 2024 dan merupakan penghasil komoditas nomor 1 se-Provinsi Lampung pada tahun 2023. Pisang adalah komoditas pertanian dengan jumlah produksi sebesar 516.112 ton pada tahun 2024 terbesar se-Provinsi Lampung dan merupakan komoditas unggulan di bidang hortikultura. Produksi komoditas Kelapa dalam sebesar 20.340 ton pada tahun 2024 yang merupakan penghasil terbesar se-Provinsi Lampung. Komoditas Kelapa sawit merupakan komoditas di bidang perkebunan dengan produksi sebesar 9.569 ton di tahun 2024.

Tabel II.90 Produksi Sektor Pertanian Tahun 2019-2024

KOMODITAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Padi (ton)	265.878	311.668	330.326	339.942	294.549	317.834
Jagung (ton)	539.302	705.855	738.178	878.640	793.936	783.027
Cabai Besar (ton)	7.093	5.216	3.353	2.861	1.730	1.831
Bawang Merah (ton)	2.469	661	800	680	734	400
Pisang (ton)	490.784	490.981	490.982	512.370	570.234	755.983
Kelapa Dalam (ton)	21.814	26.921	20.836	20.742	20.520	20.340
Kelapa Sawit (ton)	11.640	10.981	9.977	9.918	9.701	9.569

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Populasi sapi merupakan salah satu komoditas yang berkontribusi dalam pemenuhan konsumsi daging sapi dengan total sebesar 101.090 ekor pada tahun 2023 dan naik 30,1 persen di tahun 2024. Populasi kambing merupakan salah satu komoditas yang dapat menunjang produktivitas daging kambing dengan total 106.940 ekor ekor pada tahun 2023 dan naik 46,7% di tahun 2024. Populasi ayam ras petelur adalah populasi untuk mendukung produksi telur dengan total sebesar 2.600.000 ekor pada tahun 2024. Populasi ayam ras pedaging adalah salah satu komoditas untuk

mendukung produksi daging ayam dengan total sebesar 16.226.000 ekor pada tahun 2024. Produksi daging adalah penunjang komoditas terbesar kedua dengan total produksi sebesar 1.799.903 kg di tahun 2024. Produksi telur dengan total produksi sebesar 19.475.000 kg ditahun 2024.

Tabel II.91 Produksi Sektor Peternakan

KOMODITAS	2020	2021	2022	2023	2024
Populasi Sapi (ekor)	151.510	152,942	155.408	101.090	131.682
Populasi Kambing(ekor)	362.298	377.434	379.508	106.940	156.818
Populasi Ayam Ras Petelur (ekor)	2.649.646	2.459.525	2.511.060	5.847.553	2.600.000
Populasi Ayam Ras Pedaging (ekor)	13.618.172	15.997.461	16.109.345	16.897.909	16.226.000
Produksi Daging (kg)	1.505.310	1.551.866	1.583.537	1.645.960	1.799.903
Produksi Telur(kg)	17.774.307	18.324.028	18.890.750	19.305.710	19.475.000

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.4.4.9 Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Lampung Selatan memiliki potensi panas bumi terutama di Kecamatan Kalianda (Gunung Rajabasa) dengan perkiraan kapasitas ~110 MW. Namun, eksploitasi komersial masih terbatas. Berikut data perkembangan eksplorasi dan potensi:

Tabel II.92 Potensi Panas Bumi di Kabupaten Lampung Selatan

Tahun	Status Eksplorasi	Potensi (MW)	Catatan
2020	Studi Kelayakan	110	Proyek oleh PT. Pertamina Geothermal
2021	Pembangunan Sumur Uji	110	2 sumur eksplorasi
2022	Penundaan Proyek	110	Kendala lingkungan & investasi
2023	Revisi AMDAL	110	Persiapan ulang
2024	Target Operasi Pembangkit	110 (fase awal)	Rencana komersialisasi sebagian

Sumber: Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2024

Kabupaten Lampung Selatan memiliki sumber daya Bahan Galian C yang melimpah, meliputi pasir, batu split (kerikil), tanah liat, dan sirtu (campuran pasir dan batu). Bahan-bahan ini menjadi tulang punggung industri konstruksi, perumahan, dan infrastruktur di wilayah Lampung dan sekitarnya. Berikut analisis mendalam mengenai produksi, pemanfaatan, dan tren pengembangan bahan galian C di Lampung Selatan selama lima tahun terakhir (2020–2024).

Tabel II.93 Data Produksi/Ketersediaan Bahan Galian C Tahun 2020-2024

Tahun	Pasir (ton)	Batu Split (Ton)	Tanah Liat (Ton)	Pasir Batu (Ton)
2020	500.000	300.000	150.000	200.000
2021	520.000	320.000	155.000	210.000
2022	550.000	350.000	160.000	230.000

Tahun	Pasir (ton)	Batu Split (Ton)	Tanah Liat (Ton)	Pasir Batu (Ton)
2023	580.000	370.000	165.000	250.000
2024	600.000	400.000	170.000	270.000

Sumber: Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2024

2.1.5 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah sebuah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. *SDGs* merupakan skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kondisi *baseline* indikator *SDGs* meliputi kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. *SDGs* terdiri dari 17 tujuan/*goal*, 169 target, dan 247 indikator dengan mengampu prinsip-prinsip yaitu : 1. Universal, dilaksanakan oleh seluruh dunia, 2. Integrasi, dilaksanakan secara integrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. 3. Inklusif, melibatkan semua dan memberikan manfaat pada semua, tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan atau *no-one left behind* dari pembangunan yang dilaksanakan.

Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan integrasi antara target-target *SDGs* dengan target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah baik jangka menengah maupun tahunan. Sampai dengan Tahun 2022, masih banyak target indikator yang masih belum tercapai sehingga perlu kerja keras dari Perangkat Daerah penanggungjawab untuk memastikan bahwa target *SDGs* telah terintegrasi dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Selain itu juga masih banyak indikator *SDGs* yang belum ada data (kategori N/A) yang perlu diupayakan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak di luar PD dalam mengoptimalkan penyediaan data seperti Badan Pusat Statistik, Bulog, PLN, Polres dan lain sebagainya.

Dampak Pandemi Covid-19 yang melanda beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan melambatnya perkembangan indikator pada SDGs. Pemerintah Daerah perlu melakukan akselerasi pencapaian SDGs mengingat waktu yang disepakati masyarakat global adalah Tahun 2030 (kurang dari 10 tahun). Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa upaya yang diantaranya adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai sumber daya seperti Desa (melalui SDGs Desa), dunia usaha dan akademisi serta dengan meningkatkan inovasi pendukung.

Tabel II.94 Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023-2024

Indeks	Indikator	Target		Capaian		Status	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2023	2024		
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL							
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan							
1.1.1*	Tingkat Kemiskinan Ekstrem;	0	0	2,16		Belum Tercapai	17 Perangkat Daerah
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	12,5	12	12,79	12,57	Belum Tercapai	17 Perangkat Daerah
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	100	100	101,73	98,63	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
1.4.1*	Proporsi penduduk/ru mah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (a) akses layanan air minum	100	100	100	100	Tercapai	PUPR
1.4.1*	Proporsi penduduk/ru mah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (b) akses layanan sanitasi layak;	72	76	75	85,16	Tercapai	PUPR
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	<14%	<14%	10,3% (SSGI 2023)	10,4% (SSGI 2023)	Tercapai	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun,	7,30%	7%	7,1% (SSGI 2023)	belum keluar hasil	Belum Diketahui	Dinas Kesehatan

Indeks	Indikator	Target		Capaian		Status	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2023	2024		
	berdasarkan tipe						
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan (Beras Medium)	5	5	5.39	2.66	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	50	45	27,9	21,7	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	100%	100%	100	92,1% (19.177)	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya; (b) di fasilitas kesehatan.	100%	100%	100	92,1% (19.177)	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3.2.1* (a)	Angka Kematian Balita (AKBa)	0	0	24	0	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.2.1* (b)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1,5	1,25	21	1,14	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	11	10	14	1,1	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	0,01	0,01	0,01	0,01	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	199	223	197	223	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0	0	0	0	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	2,5	2,5	0,88	0,85	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis	0	0	0	0	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi	9	11	9	11	Tercapai	Dinas Kesehatan

Indeks	Indikator	Target		Capaian		Status	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2023	2024		
	terhadap penyakit tropis yang terabaikan (b) Kusta.						
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kot a dengan eliminasi kusta.	0	0	0	0	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kot a endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	0	0	0	0	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	0	0		72	Belum Tercapai	Dinas Perhubungan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	69,77	66.00	58	64,4	Belum Tercapai	Dinas dalduk dan KB
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	12.2	29.1	25,72	24.1	Belum Tercapai	Dinas dalduk dan KB
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,36	2,32	2,18	2,31	Tercapai	Dinas dalduk dan KB
3.8.2.(a)*	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100%	100,00%	89,19%	97.37%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.		100,00%	95,00%	100,00%	Tercapai	Dinas Kesehatan
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas							
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca,(ii) matematika. (Capaian	60 40 60 40	60 40 60 40	62,78 46,79 62,71 41,07	66.87% 55,78% 70,28% 66,40%	Tercapai	Dinas Pendidikan

Indeks	Indikator	Target		Capaian		Status	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2023	2024		
	Literasi SD) (Capaian Numerasi SD) (Capaian Literasi SMP) (Capaian Numerasi SMP)						
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat .	100		100		Belum Diketahui	Dinas Pendidikan
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat .	10		10		Belum Diketahui	Dinas Pendidikan
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sed erajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ la ki-laki, (b) pedesaan/ perk otaan, (c) kuintil terbawah/ terat as, (d) disabilitas/ tan pa disabilitas.	APM SD 95.44 APM SMP 79.50 APK SD 103.77 APK SMP 109.9		APM SD 95.44 APM SMP 79.50 APK SD 103.77 APK SMP 109.9		Belum Diketahui	Dinas Pendidikan
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	SMP 33,47 SD 21,14 PAUD 35,76		SMP 33,47 SD 21,14 PAUD 35,76		Belum Diketahui	Dinas Pendidikan
Tujuan 5 Kesetaraan Gender							
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	2	2	2	2	Tercapai	DPPPA
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64	0	0	0,004%	0,006%	Belum Tercapai	DPPPA

Indeks	Indikator	Target		Capaian		Status	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2023	2024		
	tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0	0	0,022%	0,015%	Belum Tercapai	DPPPA
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	15	15	6	6	Belum Tercapai	Sekretariat DPRD
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/me miliki telepon genggam.		0	60%	50%	Tercapai	Diskominfo
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI							
Tujuan 9 Industri, Industri dan Infrastruktur							
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	0,23	0,25	0,23		Belum Diketahui	Disnakertrans
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB/APBD	2.661.203.000	4.698.104.000	2.616.499.127	4.621.557.092	Belum Tercapai	BRIDA
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan							
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	2 (0,78%)	20 (7,81%)	2 (0,78%)	20 (7,81%)	Tercapai	DPMD
Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	0,62	0,63	0,62	0,63	Tercapai	BPPRD
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB (Harga Belaku)	0,30	0,31	0,3	0,31	Tercapai	BPPRD
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik / PAD	18,14	19,12	18,14	19,12	Tercapai	BPPRD
PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN							
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak							
6.2.1*	Persentase rumah tangga			0.85%		Belum Diketahui	Dinkes

Indeks	Indikator	Target		Capaian		Status	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2023	2024		
	yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.						
6.2.1* (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air			80.3		Belum Diketahui	Dinkes
6.2.1* (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	100	100,00%	100	100,00%	Tercapai	Dinas PUPR
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Layak							
11.1.1.(a)*	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	4	8	4,0	8	Tercapai	Dinas Perumahan dan Permukiman Lampung Selatan
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	0	0	4	1	Belum Tercapai	BPBD
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	0	0	125.000.00 0	0	Tercapai	BPBD
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.	90	90	40	45	Belum Tercapai	DLH
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.	86.59 (Rumusan Lama)	86,69 (Rumusan lama)	84,7 (Rumusan Lama) 69.61 (Rumusan Baru)	91.71 (Rumusan lama)	Tercapai	DLH
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA							
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat							
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100	100	100	100	Tercapai	BPKAD
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq$ B	B	BB	B	0	Belum Diketahui	Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq$ B	72.00	73.00	70.00		Belum Diketahui	Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah	82.00	82.00	76.63	86.62	Tercapai	Bagian Organisasi Setdakab

Indeks	Indikator	Target		Capaian		Status	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2023	2024		
	dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.						Lampung Selatan
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	30	30	12	12	Belum Tercapai	Sekretariat DPRD
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	90,00	99,00	97,03	99,80	Tercapai	Disdukcapil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	92,76	95,87	92,76	99,18	Tercapai	Disdukcapil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	99,50	99,76	99,74	99,37	Tercapai	Disdukcapil

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi SDGs Kab. Lampung Selatan, 2025

Pembangunan berkelanjutan di Lampung Selatan menunjukkan kemajuan di beberapa bidang, meskipun beberapa target masih belum tercapai. Tingkat kemiskinan ekstrem dan kemiskinan nasional masih di atas target, masing-masing sebesar 2,16% dan 12,57% pada 2024. Namun, akses terhadap layanan dasar seperti air minum dan sanitasi telah mencapai target 100%. Di sektor kesehatan, prevalensi stunting dan wasting berhasil dikendalikan di bawah 14%, sementara angka kematian ibu, bayi, dan neonatal menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun, cakupan JKN masih di bawah target (97,37%), dan persentase persalinan oleh tenaga kesehatan serta di fasilitas kesehatan turun menjadi 92,1%.

Dalam pendidikan, capaian literasi dan numerasi SD serta SMP meningkat, dengan beberapa indikator melebihi target. Namun, data penyelesaian pendidikan dan kualifikasi guru masih belum tersedia. Kesetaraan gender menunjukkan kemajuan dalam kepemilikan telepon genggam (50%), tetapi keterwakilan perempuan di DPRD masih rendah (6%), dan kasus kekerasan terhadap perempuan masih terjadi.

Di sektor ekonomi, proporsi tenaga kerja di industri manufaktur stagnan di 0,23, sementara anggaran riset hampir mencapai target (Rp4,62 triliun dari Rp4,69 triliun). Desa mandiri berhasil ditingkatkan dari 2 menjadi 20 desa. Pendapatan pemerintah dan rasio pajak terhadap PDRB sesuai target.

Pada aspek lingkungan, akses sanitasi layak mencapai 100%, tetapi pengelolaan sampah perkotaan masih rendah (45%). Indeks kualitas udara membaik, namun korban bencana masih ada (1 orang per 100.000 penduduk). Di bidang tata kelola, opini WTP BPK tercapai 100%, tetapi SA-KIP dan indeks RB belum memenuhi standar. Kepatuhan pelayanan publik meningkat menjadi 86,62%, dan cakupan akta kelahirannya hampir sempurna (99,8%).

Secara keseluruhan, Lampung Selatan berhasil mencapai beberapa target prioritas, terutama di kesehatan dasar, infrastruktur, dan tata kelola keuangan, tetapi perlu perbaikan dalam pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan kualitas layanan publik

2.1.6 Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD 2021-2026

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021–2026, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 terdapat 1 Tujuan, 3 Sasaran dan 5 Indikator Kinerja;
2. Misi 2 terdapat 1 Tujuan, 6 Sasaran dan 10 Indikator Kinerja;
3. Misi 3 terdapat 1 Tujuan, 4 Sasaran dan 10 Indikator Kinerja;
4. Misi 4 terdapat 1 Tujuan, 7 Sasaran dan 7 Indikator Kinerja;
5. Misi 5 terdapat 1 Tujuan, 5 Sasaran dan 7 Indikator Kinerja.

2.1.6.1 Misi 1: Meningkatkan Penerapan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Keluarga dalam Kehidupan

Misi pertama Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga dalam RKPD hanya terdiri dari satu tujuan dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Ketahanan Sosial Budaya.

Tabel II.95 Capaian Indikator Tujuan dari Misi 1

Misi/ Tujuan/ Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi I: Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya, dan keluarga dalam kehidupan							
Tujuan: Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis							
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,7	73,9	74,20	72,2	73,35	74,03
Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Poin	78,0	78,5	78,70	73,33	74,72	74,72*

Sumber : Bappeda Lampung Selatan, 2025

Selama Tahun 2022–2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis melalui penguatan nilai-nilai agama, budaya, dan keluarga sebagai fondasi sosial. Misi pertama ini bertujuan untuk meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat serta memperkuat ketahanan sosial budaya, yang tercermin dalam dua indikator utama, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Ketahanan Sosial Budaya.

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kerukunan Umat Beragama menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 72,2 poin pada 2022 menjadi 74,03 poin pada 2024, mendekati target yang ditetapkan sebesar 74,20 poin. Peningkatan ini menggambarkan bahwa upaya pemerintah dalam mempromosikan toleransi dan dialog antaragama telah memberikan dampak yang signifikan. Program-program seperti forum kerukunan umat beragama, sosialisasi nilai-nilai multikultural, dan kolaborasi dengan tokoh agama telah berkontribusi pada terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih harmonis.

Sementara itu, Indeks Ketahanan Sosial Budaya juga mengalami peningkatan, meskipun belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2022, indeks ini berada pada 73,33 poin, kemudian naik menjadi 74,72 poin pada 2023 dan 2024, sementara target pada 2024 adalah 78,70 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya lokal, penguatan peran keluarga, dan pencegahan degradasi moral masyarakat telah memberikan hasil, meskipun masih perlu penguatan lebih lanjut. Beberapa tantangan, seperti pengaruh globalisasi dan perubahan nilai sosial, mungkin menjadi faktor yang menghambat pencapaian target maksimal.

Secara keseluruhan, perkembangan kedua indikator ini membuktikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan telah berada pada arah yang tepat. Namun, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor penghambat sekaligus menyusun strategi yang lebih efektif, seperti peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan pendidikan karakter, dan optimalisasi peran lembaga adat dan keagamaan. Dengan demikian, target di tahun-tahun berikutnya dapat dicapai dengan lebih optimal, menuju terwujudnya masyarakat yang lebih rukun, berbudaya, dan berketahanan sosial yang kuat.

Tabel II.96 Capaian Indikator Sasaran dari Misi 1

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	Poin	73,7	73,9	74,2	72,7	73,35	74,03
Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (poin)	Poin	78	78,5	78,7	73,33	74,72	74,72*
Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (poin)	Poin	89,9	90	90,2	90,28	90,56	90,56*
	Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	Poin	59,7	59,9	61	59,37	63,28	63,28*
	Pencapaian Kabupaten Layak anak (level)	Level	Madya (601-700)	Madya (601-700)	Utama (801-900)	Madya (659,15)	Nindya (763,37)	Nindya* (763,37)

Sumber: Bappeda Lampung Selatan, 2025

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sosial melalui berbagai program strategis. Pada aspek kerukunan umat beragama, Indeks Kerukunan Umat Beragama terus menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 72,7 poin (2022) menjadi 74,03 poin (2024), meskipun masih sedikit di bawah target 74,2 poin. Capaian ini mencerminkan efektivitas program dialog antaragama dan penguatan forum kerukunan yang telah dilaksanakan.

Di bidang ketahanan sosial, Indeks Ketahanan Sosial Budaya mengalami peningkatan dari 73,33 poin (2022) menjadi 74,72 poin (2023-2024), walaupun belum mencapai target 78,7 poin. Data yang stagnan pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya revitalisasi program pemberdayaan

masyarakat dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal untuk mencapai target yang diharapkan.

Dalam aspek kesetaraan gender dan perlindungan anak, capaian terlihat lebih menggembirakan. Indeks Pembangunan Gender secara konsisten melampaui target, dari 90,28 poin (2022) menjadi 90,56 poin (2023-2024), di atas target 90,2 poin. Demikian pula Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan lonjakan signifikan dari 59,37 poin (2022) menjadi 63,28 poin (2023-2024), jauh melampaui target 61 poin. Pencapaian Kabupaten Layak Anak juga mengalami peningkatan level dari Madya (659,15) pada 2022 menjadi Nindya (763,37) pada 2023-2024, meskipun belum mencapai level Utama yang ditargetkan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan sosial telah berjalan dengan baik, khususnya dalam aspek kesetaraan gender. Namun, masih diperlukan upaya lebih intensif untuk meningkatkan kerukunan beragama dan ketahanan sosial budaya, terutama melalui program-program yang lebih partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Evaluasi menyeluruh terhadap program yang kurang mencapai target perlu segera dilakukan untuk menyusun strategi yang lebih efektif di tahun-tahun mendatang.

2.1.6.2 Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial

Misi kedua RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel II.97 Capaian Indikator Misi 2

Misi/ Tujuan/ Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi II: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial							
Tujuan: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan							
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,84	70,13	70,26	70,95	71,55	72,15
Persentase Penduduk Miskin	%	13,00	12,48	12,28	13,14	12,79	12,57

Sumber: Bappeda Lampung Selatan, 2025

Selama periode 2022-2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sebagaimana tercermin dalam Misi II yang berfokus pada pelayanan

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data yang tercatat, upaya-upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.

Salah satu indikator utama yang menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kabupaten Lampung Selatan berhasil mencatatkan peningkatan yang signifikan, dari 70,95 poin pada 2022 menjadi 72,15 poin pada 2024, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,26 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat telah memberikan dampak nyata. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, program kesehatan dasar, serta penguatan ekonomi keluarga menjadi faktor pendorong utama kemajuan ini.

Di sisi lain, upaya pengentasan kemiskinan juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Persentase penduduk miskin berhasil diturunkan dari 13,14% pada 2022 menjadi 12,57% pada 2024, mendekati target 12,28%. Penurunan ini mencerminkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, angka kemiskinan yang masih di atas 12% menunjukkan bahwa upaya penguatan ekonomi inklusif dan perluasan lapangan kerja perlu terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, capaian dalam pembangunan manusia dan penurunan kemiskinan selama tiga tahun terakhir patut diapresiasi. Namun, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu terus memperkuat sinergi antar-sektor, memperluas cakupan program perlindungan sosial, dan meningkatkan kualitas layanan dasar agar target-target pembangunan dapat tercapai secara optimal di tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat dapat terus ditingkatkan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Tabel II.98 Capaian Indikator Sasaran Misi 2

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	Angka rata rata lama sekolah (angka tahun)	Angka	7,89	8	8,1	7,72	7,77	7,78
	Angka Harapan Lama Sekolah (angka)	Angka	12,67	12,75	12,83	12,54	12,64	12,65

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	Jenis	5	6	6	7	5	9
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup (tahun)	Tahun	69,9	70,2	70,5	74,03	74,22	74,46
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (persen)	%	0,75	0,75	0,72	0,90	1,26	1,27
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	%	13	12,48	12,28	13,14	12,79	12,57
	Indeks Gini (poin)	Poin	0,285	0,282	0,28	0,260	0,257	0,257*
Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka /TPT (persen)	%	4,79	4,59	4,39	5,31	4,95	4,84
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	%	65	66	66	65,8	66,43	67,34
Menurunnya desa tertinggal	Indeks Desa Membangun (poin)	Poin	0,734	0,765	0,786	0,7073	0,7145	0,7292

Sumber: Bappeda Lampung Selatan, 2025

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Di bidang pendidikan, meskipun rata-rata lama sekolah (7,72 tahun pada 2022 menjadi 7,78 tahun pada 2024) dan angka harapan lama sekolah (12,54 tahun menjadi 12,65 tahun) masih di bawah target, prestasi di bidang olahraga justru melampaui ekspektasi dengan peningkatan dari 7 cabang olahraga berprestasi (2022) menjadi 9 cabang (2024), melebihi target 6 cabang.

Aspek kesehatan menunjukkan hasil menggembirakan dengan usia harapan hidup yang terus meningkat dari 74,03 tahun (2022) menjadi 74,46 tahun (2024), jauh melampaui target 70,5 tahun. Namun, laju pertumbuhan penduduk justru menunjukkan tren meningkat dari 0,90% (2022) menjadi 1,27% (2024), berlawanan dengan target penurunan menjadi 0,72%, mengindikasikan perlunya penguatan program keluarga berencana.

Di bidang ekonomi, terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 13,14% (2022) menjadi 12,57% (2024), mendekati target 12,28%. Ketimpangan ekonomi yang diukur melalui Indeks Gini menunjukkan

perbaikan (0,260 menjadi 0,257), lebih baik dari target 0,28. Pasar tenaga kerja juga membaik dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,31% (2022) menjadi 4,84% (2024) dan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dari 65,8% menjadi 67,34%.

Pembangunan desa menunjukkan kemajuan dengan peningkatan Indeks Desa Membangun dari 0,7073 (2022) menjadi 0,7292 (2024), meskipun masih di bawah target 0,786. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan telah memberikan dampak positif, meskipun masih diperlukan upaya khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan mempercepat pembangunan desa. Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antar program dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan untuk mencapai target-target yang belum terpenuhi.

2.1.6.3 Misi 3: Membangun Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah dan Pusat-Pusat Perekonomian yang Berkelanjutan

Misi ketiga RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah.

Tabel II.99 Capaian Indikator Tujuan Misi 3

Misi/ Tujuan/ Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi III: Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan							
Tujuan: Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah							
Indeks konektivitas antar wilayah	Poin	73,01	73,65	74,10	6,00	6,00	6,00
Indeks infrastruktur	poin	74,06	75,00	75,90	85,99	87,96	88,93

Sumber: Bappeda Lampung Selatan, 2025

Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun infrastruktur wilayah melalui pelaksanaan Misi III, dengan fokus pada peningkatan konektivitas dan pelayanan sarana prasarana. Selama periode 2022-2024, capaian di bidang infrastruktur menunjukkan hasil yang beragam. Indeks Infrastruktur mengalami peningkatan signifikan dari 85,99 poin (2022) menjadi 88,93 poin (2024), jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,90 poin pada 2024.

Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta sarana publik lainnya.

Namun demikian, Indeks Konektivitas Antar Wilayah justru stagnan di angka 6,00 poin selama tiga tahun berturut-turut (2022-2024), sangat jauh di bawah target yang seharusnya mencapai 74,10 poin pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan permukiman di wilayah kabupaten. Disparitas antara capaian kedua indeks ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur fisik berjalan baik, integrasi dan efektivitas jaringan transportasi antar wilayah masih memerlukan perhatian khusus.

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program konektivitas wilayah, termasuk mengidentifikasi hambatan-hambatan teknis dan non-teknis yang menyebabkan ketertinggalan ini. Perlu adanya penyesuaian strategi pembangunan yang lebih terintegrasi, dengan memperhatikan aspek perencanaan tata ruang, penguatan jaringan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas wilayah-wilayah terpencil. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata akan konektivitas yang lebih baik antar wilayah di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel II.100 Capaian Indikator Sasaran Misi 3

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Persentase jalan mantap	%	85	86	87,00	66,15	69,66	70,15
	Indeks angka kecelakaan lalu lintas	Poin	24	24	23,00	27,93	31,87	28,75
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	61,41	61,93	62,84	61,99	60,55	69,69
	Indeks Risiko Bencana	Poin	182	180	176,00	176,14	167,23	151,15
Peningkatan infrastruktur permukiman dan	Luas kawasan kumuh	Ha	28,83	27,83	26,83	59,79		

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
penanganan kawasan kumuh	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	53	54	56,20	53,68	56,66	58,9
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) yang aman	%	96,12	97,09	98,06	95,36	97,53	100,00
	Persentase rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak	%	82	82,31	82,93	82,48	83,5	85,57
	Persentase rasio elektrifikasi	%	99	100	100,00	99,92	100,00	100,00
Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru	Usulan pembentukan daerah otonomi baru	Usulan	0	1	1	0	0	0

Sumber: Bappeda Lampung Selatan, 2025

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan perkembangan yang beragam. Di sektor transportasi, persentase jalan mantap meningkat dari 66,15% (2022) menjadi 70,15% (2024), meski masih jauh dari target 87%. Sementara itu, indeks angka kecelakaan lalu lintas menunjukkan fluktuasi, mencapai 28,75 poin pada 2024 (target 23 poin), mengindikasikan perlunya peningkatan keselamatan jalan.

Di bidang lingkungan hidup, terjadi peningkatan signifikan indeks kualitas lingkungan hidup dari 61,99 (2022) menjadi 69,69 (2024), melampaui target 62,84. Indeks risiko bencana juga menunjukkan perbaikan dari 176,14 (2022) menjadi 151,15 (2024), lebih baik dari target 176, mencerminkan efektivitas program pengurangan risiko bencana.

Pada sektor permukiman, persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik meningkat dari 53,68% (2022) menjadi 58,9% (2024), melebihi target 56,2%. Capaian luar biasa terlihat pada akses sanitasi aman yang mencapai 100% pada 2024 (target 98,06%), serta akses air minum layak yang mencapai 85,57% (2024), melampaui target 82,93%. Rasio elektrifikasi telah mencapai 100% sejak 2023, sesuai target.

Namun, penanganan kawasan kumuh masih menjadi tantangan dengan luas 59,79 ha (2022) yang jauh melebihi target 28,83 ha, sementara data 2023-2024 belum tersedia. Pembentukan daerah otonomi baru juga belum terealisasi hingga 2024 (target 1 usulan). Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur dasar menunjukkan kemajuan signifikan, meski perlu perhatian khusus pada peningkatan kualitas jalan, penanganan kumuh, dan keselamatan lalu lintas untuk mendukung konektivitas wilayah yang lebih baik.

2.1.6.4 Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Potensi Unggulan Daerah

Misi keempat RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh.

Tabel II.101 Capaian Indikator Tujuan dari Misi 4

Misi/ Tujuan/ Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi IV: Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah							
Tujuan: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh							
Pertumbuhan ekonomi	%	3,00	4,00	5,00	4,81	4,82	4,62
PDRB ADHB	Milyar rupiah	46.200	47.100	47.900	51.285,00	55.994,61	60.320,97

Sumber: Bappeda Lampung Selatan, 2025

Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan kinerja ekonomi yang stabil dalam tiga tahun terakhir melalui pelaksanaan Misi IV yang berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan potensi unggulan daerah. Pertumbuhan ekonomi tetap konsisten di kisaran 4,6-4,8% selama periode 2022-2024, meskipun belum mencapai target 5% di tahun 2024. Capaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah tantangan global, dengan rata-rata pertumbuhan yang tetap berada di atas target minimal yang ditetapkan.

Di sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, pencapaian justru melampaui ekspektasi. Nilai PDRB meningkat signifikan dari Rp51,285 triliun (2022) menjadi Rp60,321 triliun (2024), jauh di atas target Rp47,900 triliun. Lonjakan ini mencerminkan efektivitas

strategi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi belum mencapai target tertinggi, stabilitas di kisaran 4,6-4,8% menunjukkan fondasi ekonomi yang semakin kokoh. Pencapaian PDRB yang konsisten melampaui target mengindikasikan bahwa pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan potensi daerah telah berkontribusi positif terhadap pembentukan struktur ekonomi yang lebih berdaya tahan. Ke depan, diperlukan akselerasi program-program yang lebih inovatif untuk mendorong pertumbuhan mencapai target 5%, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel II.102 Capaian Indikator Sasaran dari Misi 4

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Stabilitas inflasi daerah	Laju tingkat inflasi	%	3 (± 1)	3 (± 1)	3 (± 1)	5,52	3,52	3,52*
Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani / NTP (poin)	Poin	103	104	105	105,22	119,35	124,98
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,45	12,5	12,70	13,74	17,84	15,64
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,5	2,7	2,80	1,44	1,83	1,49
Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	24	25	25	23,05	28,32	23,50
Meningkatnya investasi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi penanaman modal	%	10	10	10,00	8,8	-11,9	29,6
Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80,5	80,6	80,8	81,81	85,46	84,46

Sumber: Bappeda Lampung Selatan, 2025

Kabupaten Lampung Selatan telah mencatat berbagai capaian penting dalam stabilitas ekonomi dan pengembangan sektor unggulan selama periode 2022-2024. Laju inflasi daerah berhasil dikendalikan dari 5,52% (2022) menjadi 3,52% (2023-2024), mendekati kisaran target 3±1%, menunjukkan efektivitas kebijakan pengendalian harga dan stabilisasi pasokan komoditas. Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan signifikan dari 105,22 (2022) menjadi 124,98 (2024), jauh melampaui target 105, yang mencerminkan membaiknya

kesejahteraan petani melalui peningkatan harga produk pertanian dan efisiensi biaya produksi.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan kinerja positif, meski fluktuatif, dengan capaian 15,64% (2024) di atas target 12,7%. Namun, sektor pariwisata masih belum optimal dengan kontribusi 1,49% (2024), jauh di bawah target 2,8%, mengindikasikan perlunya strategi pemulihan yang lebih agresif pasca pandemi. Sementara itu, sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi, mencapai 23,5% (2024) dari target 25%, menandakan perlunya penguatan rantai pasok dan nilai tambah industri lokal.

Di bidang investasi, terjadi peningkatan signifikan pada 2024 dengan pertumbuhan penanaman modal sebesar 29,6%, melampaui target 10%, setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada 2023. Capaian ini menunjukkan keberhasilan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Indeks Ketahanan Pangan juga menunjukkan performa yang baik dengan skor 84,46 (2024) di atas target 80,8, mencerminkan ketahanan sistem pangan daerah meski masih perlu penguatan di sektor hulu hingga hilir.

Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang baik, meskipun perlu upaya lebih besar untuk mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata dan industri, serta menjaga stabilitas investasi dan ketahanan pangan jangka panjang.

2.1.6.5 Misi 5: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Efektif, dan Akuntabel

Misi kelima RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, taat hukum, responsif, dan transparan.

Tabel II.103 Capaian Indikator Tujuan dari Misi 5

Misi/ Tujuan/ Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi V: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang professional, transparan, efektif dan akuntabel							
Tujuan: Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, taat hukum, responsive, dan transparan							
Indeks Reformasi Birokrasi	poin	71,00	72,00	73,00	55,53	70,91	70,91*

Sumber: Bappeda Lampung Selatan, 2025

Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan Misi V yang berfokus pada reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan signifikan dari 55,53 poin (2022) menjadi 70,91 poin (2023-2024), meskipun belum mencapai target 73 poin (2024). Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program perbaikan sistem birokrasi, meski masih terdapat tantangan dalam mencapai standar ideal.

Peningkatan tajam pada tahun 2023 menunjukkan efektivitas implementasi kebijakan seperti digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas ASN, dan penguatan sistem akuntabilitas. Namun, stagnansi pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah dijalankan. Faktor penghambat seperti perubahan regulasi, keterbatasan anggaran, atau resistensi internal perlu diidentifikasi untuk memastikan percepatan reformasi di tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, kemajuan dalam Indeks Reformasi Birokrasi patut diapresiasi sebagai fondasi menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Tabel II.104 Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Indeks merit	kategori	2	2	3	1	1	1*
	Maturitas SPIP	Nilai	3,083	3,083	3,084	3,025	3,134	3,134*
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP	Predikat	B (60 - 70)	BB (70 - 80)	BB	65,80 (B)	66,43 (B)	66,53 (B)
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	12,79	13	13,20	14,39	15,5	14,92
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	Poin	81	82	82	85,96	87,49	87,49*
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Level	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif (59,92)	Sangat Inovatif (62,06)	Sangat Inovatif

Sumber: Bappeda Lampung Selatan, 2025

Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan selama periode 2022-2024. Indeks Merit masih berada pada kategori 1 (2022-2024), belum mencapai target kategori 3 pada 2024, mengindikasikan perlunya penguatan sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit. Namun, Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) mengalami peningkatan dari 3,025 (2022) menjadi 3,134 (2023-2024), melampaui target 3,084, yang mencerminkan penguatan sistem pengawasan internal.

Di bidang akuntabilitas, Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menunjukkan peningkatan dari 65,80 (B) pada 2022 menjadi 66,53 (B) pada 2024, meski belum mencapai target predikat BB. Sementara itu, Opini BPK berhasil mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara konsisten selama tiga tahun, membuktikan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Kemandirian fiskal daerah tercermin dari peningkatan Persentase PAD terhadap total pendapatan yang mencapai 14,92% (2024), melampaui target 13,20%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah.

Di sisi pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terus meningkat dari 85,96 (2022) menjadi 87,49 (2023-2024), jauh di atas target 82, yang menunjukkan kualitas pelayanan yang semakin baik. Indeks Inovasi Daerah juga mengalami kemajuan signifikan, naik dari level Inovatif (59,92) pada 2022 menjadi Sangat Inovatif (62,06) pada 2023-2024, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan solusi kreatif untuk pelayanan publik.

Secara keseluruhan, Kabupaten Lampung Selatan telah mencapai kemajuan penting dalam tata kelola pemerintahan, meskipun masih perlu penguatan di beberapa aspek, terutama sistem merit dan akuntabilitas kinerja. Dengan mempertahankan capaian positif dan memperbaiki area yang masih tertinggal, pemerintah daerah dapat semakin mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

2.1.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan

Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

2.1.7.1 Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada Tahun 2024, nilai akumulasi dari ketercapaian SPM bidang Pendidikan adalah sebesar 93,02%. Dari ketiga indikator tersebut, belum ada indikator yang berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan. Pencapaian SPM pendidikan kesetaraan pada Tahun 2023 berada di angka 98,61%.

Tabel II.105 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	%	54,50	83,88	93,79	85,29	62,06
2	Pendidikan Dasar	%	109,8	95,61	98,41	95,15	92,51
3	Pendidikan Kesetaraan	%	N/A	78,41	96,14	98,61	44,19

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), 2024

2.1.7.2 Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada kabupaten terdapat 12 indikator jenis layanan dasar.

Tabel II.106 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	96,67	98,92	98,45	98,18	92,68
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	92,08	99,03	98,40	98,23	93,11
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	99,99	98,12	99,52	98,18	93,95
4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	86,62	80,72	97,87	99,47	99,13
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	62,38	46,02	98,29	98,30	98,27
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	51,14	63,21	95,97	97,42	99,17
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	66,29	76,58	96,58	96,88	97,09
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	62,23	67,99	96,23	96,73	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	78	80,56	100	99,17	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	54,5	50,74	96,59	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	74,82	100,00	99,95	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	%	71,98	58,44	97,04	100	100

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Kategori indeks pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 adalah Tuntas Utama dengan total pencapaian sebesar 100 persen. Pencapaian dengan kategori ini adalah pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar yang nilainya 90-99 persen. Dari 12 indikator yang ada, 3 indikator capaiannya sudah 100 persen yaitu indikator pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, sedangkan 9 indikator lainnya dengan capaian diatas 95 persen, yaitu pelayanan kesehatan Ibu Hamil, pelayanan kesehatan Ibu Bersalin, pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir, pelayanan kesehatan Balita, pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, pelayanan kesehatan

pada Usia Produktif, pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut, pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi dan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus.

2.1.7.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No.29/PRT/M/2018. Adapun capaian SPM sub urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel II.107 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah WN yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	81,3	100	92,95	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah WN yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	66,67	94,78	100	100

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun 2024 adalah sebesar 100 persen, dengan indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mengalami peningkatan sebesar 7,05 persen menjadi 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang dilakukan pada Tahun 2022 dan 2023 di 10 lokus desa penerima manfaat yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Katibung, Sragi dan Bakauheni. Penerima manfaat ditargetkan sebanyak 410 sambungan rumah terlayani sambungan IPAL komunal atau setara 1.600 jiwa terlayani akses sanitasi yang layak.

Indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari juga mengalami peningkatan menjadi 100 persen. Pengelolaan air minum di

Lampung Selatan didukung oleh jaringan perpipaan yang ada pada PDAM Tirta Jasa dan juga melalui pengelolaan SPAM yang ada di masyarakat. Permasalahan yang ada pada pelayanan air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jasa adalah ketersediaan air baku dan jumlah unit pengolahan air minum yang sedikit. Kapasitas produksi PDAM Tirta Jasa secara keseluruhan adalah 5.736,6 m³/hari dengan sumber air baku berasal dari mata air, air tanah, dan sungai. Hal ini dirasakan masih kurang mengingat luasnya wilayah yang ada di Lampung Selatan dan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani.

Selain pelayanan yang dilakukan PDAM Tirta Jasa, kinerja pelayanan air minum juga didukung dengan keberadaan program penyediaan air minum baik oleh APBD maupun APBN melalui kegiatan PAMSIMAS dan Pembangunan SPAM Pedesaan. Pada Tahun 2022 jumlah desa yang telah mendapatkan program PAMSIMAS sejumlah 136 desa. Pada Tahun 2022 ini, program PAMSIMAS telah membangun sepanjang 11.195 meter di 15 lokus Desa dari 8 Kecamatan. Total jumlah sambungan rumah baik perkotaan maupun perdesaan pada Tahun 2022 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 6,224 jiwa terlayani akses air minum layak. Dari data tersebut sebagian besar masyarakat menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih berupa sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa dan sumur bor dengan pompa. Selain itu, kegiatan pembangunan SPAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik SPAM pedesaan maupun PAMSIMAS sebagian besar menggunakan air tanah sebagai air baku. Hanya beberapa lokasi yang menggunakan air baku berasal dari mata air, terutama daerah yang berada di sekitar kawasan Gunung Rajabasa.

2.1.7.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM bidang Perumahan Rakyat yang harus dipenuhi yaitu pelaksanaan SPM terkait pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan pelaksanaan SPM terkait relokasi program pemerintah Kabupaten. Berikut adalah kinerja pelayanan sub perumahan rakyat:

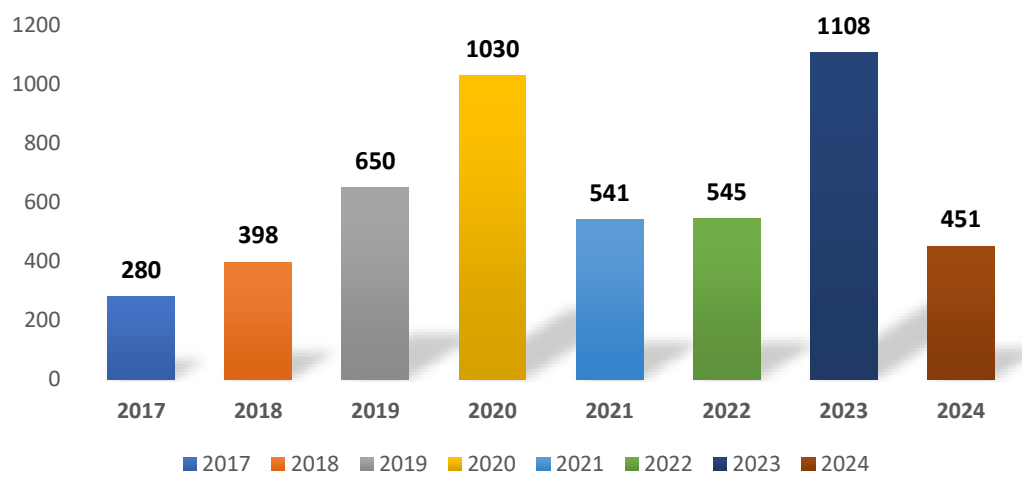
Tabel II.108 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah WN korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	242 (100%)	42 (100%)	132 (100%)	14 (100%)	100
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah WN yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA	3.415 (26,42%)	14 (100%)	80

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), 2024

Pencapaian SPM sub bidang perumahan rakyat pada Tahun 2024 adalah sebesar 100 persen, di mana indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten keduanya mencapai 100 persen. Salah satu tantangan dari pencapaian indikator ini adalah identifikasi terhadap ketersediaan lahan potensial sebagai alternatif lokasi relokasi.

Gambar II.61 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017-2024



Berdasarkan data Tahun 2016 di Kabupaten Lampung Selatan terdapat sejumlah 13.221 unit rumah tidak layak huni. Pada tahun 2024 sejumlah 451 unit rumah telah mendapatkan bantuan penanganan. Sampai tahun 2024 total RTLH yang telah ditangani mencapai 5.003 unit rumah, penanganan RTLH tersebut juga terintegrasi dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Penanganan RTLH di Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya bersumber dari APBD melainkan juga kolaborasi sumber pendanaan lainnya seperti APBD Provinsi Lampung,

APBN, BAZNAS dan juga keterlibatan Forum CSR. Pada tahun 2023 – 2024 Kab.Lampung Selatan juga telah melakukan pendataan ulang Rumah Tidak Layak Huni yang ada di wilayah dan terdapat 9.288 Unit yang tersebar di 17 Kecamatan.

2.1.7.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Pasal 9 sebagai berikut:

- 1. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.
- 2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :
 - Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Pelayanan informasi rawan bencana;
 - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel II.109 Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	NA	82,88	91,32	97,31	99,84
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	99,10	73,03	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	75,10	100	100	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	85,20	83,33	100	88	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	NA	82,50	98,33	96,34	97,04

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada Tahun 2024 adalah sebesar 99,84%, naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pencapaian indikator lainnya naik maksimal dengan angka 100 persen.

2.1.7.6 Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten mencakup 5 hal, yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel II.110 Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10,69	14,05	100,00	100,00	100
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10,23	8,82	97,33	100,00	100
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	4,30	7,38	98,67	100,00	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)		8,19	89,33	100,00	100

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota Jumlah Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana	100	76,51	96,00	100,00	100

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM bidang sosial pada Tahun 2024 adalah sebesar 100 persen. Pada Tahun 2024, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebanyak 299 orang, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sebanyak 227 orang, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sebanyak 322 orang, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebanyak 21 orang, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 202 orang. Upaya pencapaian SPM bidang sosial diantaranya adalah pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas, pemberian bantuan permakanaan bagi penyandang disabilitas dan anak terlantar, penanganan orang dengan gangguan jiwa serta perlindungan dan jaminan sosial tanggap darurat bagi korban bencana.

2.1.8 Kerjasama Daerah

Berdasarkan PP. Nomor 28/2018, “Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan Pihak ketiga, dan/antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan,”

Beberapa kerjasama daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan antara lain:

- Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
- Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) Tahap VI dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) dan Universitas Mitra Lampung (UMITRA)

Selain kerjasama diatas, kerjasama dalam bidang infrastruktur juga diperlukan seperti pembangunan bendungan atau jalan tol. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwa pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindakan untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber daya air.

Pembangunan Infrastruktur sumber daya air merupakan salah satu prioritas strategis dalam mendukung ketahanan air dan pangan daerah, dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, Pemerintah Pusat berkomitmen untuk membangun bendungan (bendungan sidodadi) yang berkolasi di Desa Klaten Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan

Pembangunan bendungan (bendungan sidodadi) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air, mengurangi risiko kekeringan dan banjir, serta mendukung pengembangan sektor pertanian melalui penyediaan air irigasi yang andal dan berkelanjutan.

Kerjasama dalam sektor pariwisata juga sangat diperlukan dalam meningkatkan durasi berkunjung (*length of stay*) wisatawan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pihak pengelola pariwisata dan hotel untuk melaksanakan kerjasama dalam upaya optimalisasi sumber daya pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Selatan.

2.1.9 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota

Rencana Pembangunan Infrastruktur tahun 2025-2029 adalah salah satu fokus utama dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029. RPJMN menetapkan prioritas nasional yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu kunci utama. Rencana pembangunan infrastruktur dalam RPJMN tercantum pada arah pengembangan kewilayahan yang dibagi per wilayah bahkan Provinsi dengan lokus di beberapa kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu lokus rencana pengembangan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Lampung. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga turut serta mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Secara lebih lengkap intervensi prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.111 Indikasi Intervensi Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan

Lokus Nasional dan Provinsi	APBN	APBD Provinsi	APBD Lampung Selatan	Lokus Kabupaten Lampung Selatan
Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan	Pengembangan koridor industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, dan industri makanan & minuman)		Pengembangan kawasan industri dengan tetap pada pembangunan keberlanjutan	Kecamatan Kalianda, Katibung dan Tanjung Bintang
	Pengembangan SPAM Regional Pesawaran Bandar Lampung-Lampung Selatan			
	Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 Kv Kalianda-Merak (Interkoneksi 500 Kv Sumatera-Jawa)		Pengelolaan hasil energi/listrik untuk kepentingan warga	Kawasan Gunung Rajabasa
	Pembangunan TPST Regional Bandar			

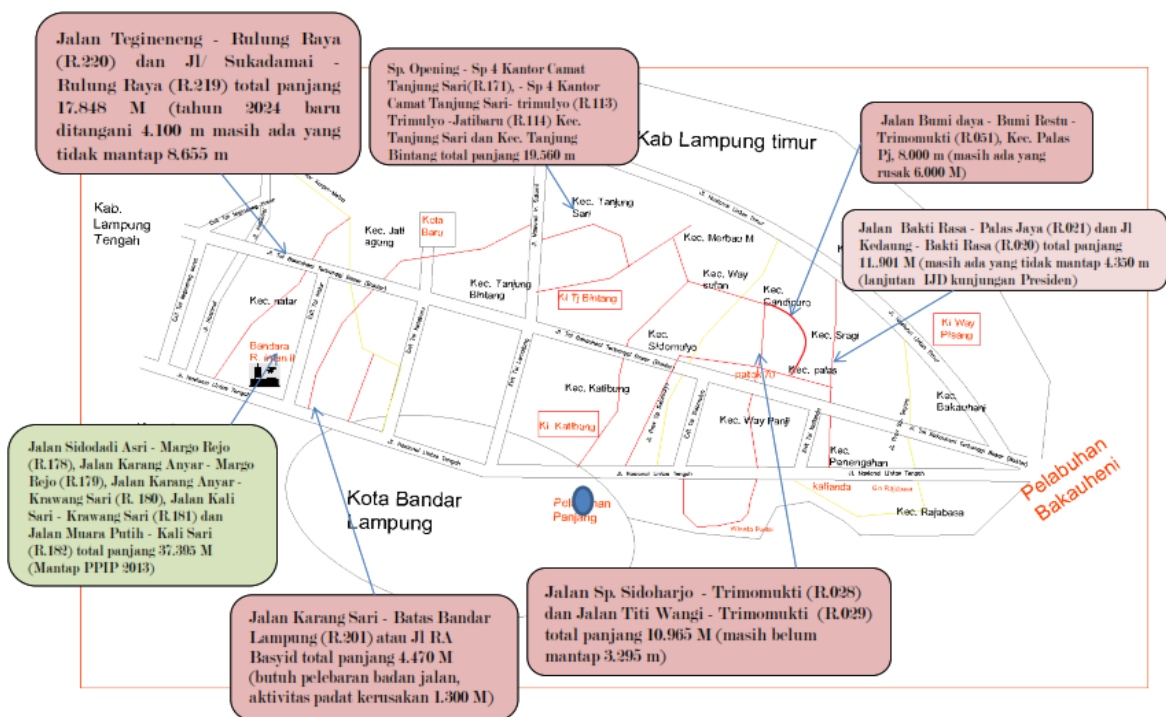
Lokus Nasional dan Provinsi	APBN	APBD Provinsi	APBD Lampung Selatan	Lokus Kabupaten Lampung Selatan
	LampungMetro-Lampung Selatan			
Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung yaitu Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab.Lampung Selatan)	Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Lampung Timur, Tulangbawang, dan Lampung Selatan		Pengembangan kawasan pariwisata yang mengedepankan fungsi lingkungan	Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Rajabasa
Kabupaten Lampung Selatan		Kawasan Waterfront City		
		Kawasan sekitar bandara Radin Inten II		
		Kawasan Kota Baru Jatiagung		
		Pembangunan Stasiun Relung Helok, Karangsari, Sabah Balau, dan Stasiun Bandara		
		Rencana kawasan industri katibung	Penyediaan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri	Kecamatan Bakauheni, Katibung, Ketapang, Merbau Mataram, Natar, Sidomulyo, Tanjung Bintang, dan Tanjung Sari
		Sport Center	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan setiap Kawasan	

Lokus Nasional dan Provinsi	APBN	APBD Provinsi	APBD Lampung Selatan	Lokus Kabupaten Lampung Selatan
		Aerocity bandara Raden Inten II		
		Pengembangan pelabuhan sebalang		
		Bakauheni Harbour city	Pemanfaatan kawasan sebagai pariwisata nasional	
		Rencana pengembangan kereta		

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI, 2024

Rencana infrastruktur strategis terkait kemantapan jalan di Kabupaten Lampung Selatan difokuskan pada peningkatan kualitas jaringan jalan untuk menjamin kelancaran arus barang dan orang secara berkelanjutan. Kabupaten Lampung Selatan sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera memiliki posisi strategis yang menuntut kondisi jalan yang mantap, khususnya pada ruas-ruas penghubung antar kecamatan, jalan menuju kawasan industri, pertanian, dan akses ke Pelabuhan Bakauheni. Pemerintah daerah merencanakan penanganan menyeluruh terhadap jalan-jalan yang rusak, termasuk rehabilitasi jalan dengan tingkat kerusakan tinggi, peningkatan struktur perkerasan, dan pelebaran pada ruas dengan volume lalu lintas tinggi. Prioritas juga diberikan pada ruas yang mendukung layanan publik, akses pendidikan, serta konektivitas kawasan wisata. Upaya peningkatan kemantapan jalan ini ditargetkan untuk mencapai 87% jalan mantap secara bertahap, melalui sinergi antara APBD, dana pusat, dan skema pendanaan alternatif seperti KPBU. Dengan demikian, pembangunan jalan yang mantap diharapkan dapat mempercepat pembangunan wilayah, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung Selatan. Berikut adalah gambaran rencana strategis infrastruktur jalan:

Gambar II.62 Gambaran Rencana Infrastruktur Strategis



2.1.10 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki BUMD yang mendukung pelayanan Pemerintah, yaitu BUMD Tirta Jasa yang bergerak dibidang diantaranya:

- **Penyediaan Air Bersih & Air Minum**
 - o Mengelola sistem perpipaan (PDAM) untuk distribusi air bersih ke rumah tangga, industri, dan fasilitas publik.
 - o Pengembangan infrastruktur air baku (misalnya: jaringan pipa, instalasi pengolahan air).
- **Pengelolaan Sumber Daya Air**
 - o Konservasi sumber air (mata air, sungai, waduk) untuk kebutuhan jangka panjang.
 - o Pengendalian kualitas air sesuai standar kesehatan.
- **Layanan Komersial Terkait Air**
 - o Pemasangan meteran air dan penagihan retribusi.
 - o Layanan perbaikan jaringan pipa dan instalasi.
- **Program Khusus**
 - o Penyediaan air bersih untuk daerah rawan krisis air.

Tabel II.112 Proyeksi Penambahan Jumlah Sambungan Perumda Tirta Jasa

No	Uraian	Tahun					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pelanggan Domestik						
	Rumah Tangga	5.653	5.863	6.073	6.283	6.493	6.703
	Niaga Kecil + Sedang	200	210	220	230	240	250
	Hunian Vertikal + Kawasan Hunian	0	0	0	0	0	0
	Hidran Umum	33	43	53	63	73	83
	Rencana Penambahan SR			260	385	535	685
2	Pelanggan Non Domestik						
	Sosial	81	82	83	84	85	86
	Niaga	55	57	59	61	63	65
	Industri	8	9	10	11	12	13
	Instansi Pemerintah	99	100	102	103	105	106
	Lainnya	60	64	69	73	78	82

Sumber: Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan, 2025

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Realisasi APBD 2020-2024

Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 3,92 persen. Peningkatan ini didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat sebesar 7,20 persen, baik dari potensi pajak daerah melalui opsen pajak maupun retribusi daerah. Selain dari PAD, peningkatan pendapatan daerah juga didukung oleh pendapatan transfer yang meningkat sebesar 2,32 persen, baik dari potensi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Fiskal (DIF) sebagai insentif bagi Kabupaten berprestasi serta dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Lampung.

PAD merupakan dana yang bersumber dari daerah dan menjadi kewenangan daerah. Jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, maka dapat dilihat bahwa kontribusinya masih sangat kecil, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya. Selama periode 2020-2024 PAD hanya menyumbang rata-rata 13,29 persen. Pajak daerah hanya menyumbang rata-rata 6,11 persen dan retribusi daerah lebih rendah lagi, yaitu hanya 0,43 persen. Artinya, keuangan daerah Lampung Selatan masih sangat tergantung pada pusat. Namun demikian, kondisi ini merupakan kondisi yang umum secara nasional untuk tingkat Kabupaten.

Tabel II.113 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	275.142.995.036,48	295.717.851.539,68	310.575.860.422,56	347.290.190.268,50	362.885.675.432,94
	- Pajak Daerah	116.024.528.576,65	135.103.960.649,36	160.601.068.770,78	169.393.265.642,60	190.399.953.185,30
	- Retribusi Daerah	9.379.646.992,00	7.086.373.595,00	8.421.260.162,00	11.123.245.496,00	19.037.260.164,39
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.647.397.668,51	10.487.200.822,78	7.681.891.576,36	7.217.718.421,08	7.341.474.786,85
	- Lain-Lain PAD yang Sah	140.091.421.799,32	143.040.316.472,54	133.871.711.913,42	159.555.960.708,82	146.106.987.296,40
	B. Pendapatan Transfer	1.318.199.690.560,00	1.672.194.652.419,00	1.829.339.116.874,00	1.893.208.874.654,00	2.090.897.229.125,00
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.288.544.572.002,00	1.571.573.120.253,00	1.704.472.706.095,00	1.783.314.411.310,00	1.947.054.471.086,00
	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.655.118.558,00	100.621.532.166,00	124.866.410.779,00	109.894.463.344,00	143.842.758.039,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	516.503.811.951,74	108.678.830.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.109.846.497.548,22	2.076.591.333.958,68	2.139.914.977.296,56	2.240.799.064.922,50	2.453.782.904.557,94
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	1.475.680.470.995,37	1.492.348.447.747,58	1.485.327.334.017,09	1.532.305.682.728,71	1.626.774.552.877,00
	B. Belanja Modal	266.883.972.121,00	254.313.025.764,15	373.814.714.671,73	255.416.444.519,28	342.913.941.175,94
	C. Belanja Tak Terduga	44.385.453.256,48	5.595.829.982,00	400.981.912,68	173.291.268,00	314.526.345,00
	D. Belanja Transfer	441.164.057.850,00	415.735.497.656,00	406.230.292.600,00	370.415.541.747,00	407.191.851.028,00
	JUMLAH BELANJA	2.228.113.954.222,85	2.167.992.801.149,73	2.265.773.323.201,50	2.158.310.960.262,99	2.377.197.871.425,94
	SURPLUS/DEFISIT	(118.267.456.674,63)	(91.401.467.191,05)	(125.858.345.904,94)	82.488.104.659,51	76.585.033.132,00
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	296.856.316.675,37	160.468.018.200,74	157.996.672.932,69	28.988.327.027,75	100.360.168.225,26
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	296.856.316.675,37	160.468.018.200,74	69.066.551.009,69	28.988.327.027,75	100.360.168.225,26
	- Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	88.930.121.923,00	0,00	0,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	18.120.841.800,00	0,00	3.150.000.000,00	11.116.263.462,00	22.232.526.924,00
	- Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.120.841.800,00	0,00	0,00	11.116.263.462,00	22.232.526.924,00
	PEMBIAYAAN NETTO	278.735.474.875,37	160.468.018.200,74	154.846.672.932,69	17.872.063.565,75	78.127.641.301,26
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	160.468.018.200,74	69.066.551.009,69	28.988.327.027,75	100.360.168.225,26	154.712.674.433,26

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2025

Belanja terus meningkat sejalan dengan kemajuan yang dicapai. Belanja tumbuh rata-rata 1,80% per tahun selama periode 2020-2024. Alokasi belanja yang terbesar adalah untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan lain-lain, yaitu rata-rata 75,73% per tahun. Belanja Operasi terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 2,50% pertahun selama periode 2020-2024. Alokasi terbesar belanja operasi adalah untuk belanja pegawai, yaitu mencapai rata-rata 54,77% per tahun selama periode 2020-2024. Belanja pegawai rata-rata tumbuh 0,43% per tahun. Selain belanja operasi, yang mengalami pertumbuhan terbesar berikutnya adalah belanja modal dengan rata-rata meningkat sebesar 11,21 persen, yang dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur daerah.

Pembiayaan selalu dalam posisi positif karena penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dibandingkan pengeluaran pembiayaan. Dan jumlah surplus penerimaan pembiayaan menunjukkan peningkatan dari ke tahun. Surplus tersebut bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Hal ini masih bisa dioptimalkan pemanfaatannya sehingga lebih banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan masalah pembangunan.

Pengeluaran pembiayaan berfluktuasi dengan alokasi terbesar pada pembayaran pokok utang. Alokasi lainnya adalah untuk penyertaan modal/investasi daerah. Periode lima tahun kedepan hutang sudah lunas sehingga beban pembayaran cicilan dan bunga akan hilang. Karena itu, kedepan investasi daerah bisa ditingkatkan.

Tabel II.114 Neraca Keuangan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	2	3	4	5	6	7
1	ASET					
	A. Aset Lancar	290.379.081.695,34	200.331.916.342,50	180.303.797.819,42	282.883.892.834,60	354.962.849.793,05
	B. Investasi Jangka Panjang	35.867.406.977,22	35.769.960.199,79	39.319.471.498,91	37.618.378.805,09	37.345.509.762,30
	C. Aset Tetap	2.814.457.002.504,86	2.984.295.299.520,02	3.070.805.269.831,04	2.949.113.366.401,82	2.950.094.351.196,07
	D. Aset Lainnya	351.514.063.639,93	87.728.114.949,93	115.891.525.861,96	109.191.206.857,96	111.980.970.020,12
	JUMLAH ASET	3.492.217.554.817,35	3.308.125.291.012,24	3.406.320.065.011,33	3.378.806.844.899,47	3.454.383.680.771,54
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	43.139.004.200,69	50.778.829.573,16	62.248.515.302,49	108.778.665.132,94	90.596.632.583,01
	B. Kewajian Jangka Panjang	-	-	77.813.856.853,00	55.581.326.713,00	33.348.796.573,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	43.139.004.200,69	50.778.829.573,16	140.062.372.155,49	164.359.991.845,94	123.945.429.156,01
3	EKUITAS					
	Ekuitas	3.449.078.550.616,66	3.257.346.461.439,08	3.266.257.692.855,84	3.214.446.853.053,53	3.330.438.251.615,53
	JUMLAH EKUITAS	3.449.078.550.616,66	3.257.346.461.439,08	3.266.257.692.855,84	3.214.446.853.053,53	3.330.438.251.615,53
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.492.217.554.817,35	3.308.125.291.012,24	3.406.320.065.011,33	3.378.806.844.899,47	3.454.383.680.771,54

*) Neraca 2024 *Unaudited*

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2025

Struktur neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.115 Indikator Neraca Keuangan Lampung Selatan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Current Ratio</i>	6,731242	3,945186	2,896516	2,600546	3,918058
2	<i>Debt to Aset Ratio</i>	0,012353	0,01535	0,041118	0,048644	0,035881
3	<i>Debt to Equity Ratio</i>	0,012507	0,015589	0,042882	0,051132	0,037216
4	Pertumbuhan Aset		-5,3%	3,0%	-0,8%	2,2%

Sumber: Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2024 (Diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa *Current Ratio* Neraca Kabupaten Lmpung Selatan sempat menunjukkan penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 yang kemudian naik menjadi 3,9 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sementara itu untuk indikator *Debt Aset Ratio* (DAR) menunjukkan tren yang sama dengan *Current Ratio*. Namun, pada tahun 2024 DAR Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan penurunan meskipun tidak begitu besar dari 0,048 menjadi 0,035 yang mengindikasikan bahwa ada penurunan ketergantungan APBD Kabupaten Lampung Selatan terhadap hutang. Selantunya untuk rasio *Debt Equity Ratio* (DER) memiliki tren yang terus meningkat sejak tahun 2020-2023 yang kemudian menurun pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa struktur pendanaan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan mulai cenderung bergantung kepada modal sendiri dibandingkan dengan hutang. Terakhir, Pertumbuhan Aset Kabupaten Lampung Selatan mengalami fluktuasi. Namun pada tahun 2024 nilai Aset Kabupaten Lampung Selatan berhasil kembali tumbuh positif sebesar 2,2%

2.2.2 **Proyeksi APBD Tahun 2025-2029**

Berdasarkan kondisi keuangan yang ada maka disusun perencanaan keuangan dimasa depan. Perencanaan tentu disusun berdasarkan pendekatan teknokratik. Tapi mengingat adanya pandemi Covid-19 diawal Tahun 2020 yang berdampak luas baik ekonomi maupun sosial. Dampak ini baru mulai dan belum bisa diperkirakan sampai kapan

berakhir. Perkiraan ini sangat dipengaruhi banyak faktor, terutama besaran dampaknya yang sampai saat ini belum bisa dipetakan.

Itulah sebabnya, dasar pijakan perkiraan adalah kebijakan pemerintah pusat. Pertama, karena sifat dampaknya yang nasional maka kebijakannya pun secara nasional dan Pemerintah Daerah berkontribusi menjalankannya. Kedua, Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada anggaran Pusat. Atas dasar pertimbangan tersebut maka disusun perencanaan kerangka keuangan daerah Lampung Selatan 2025-2030.

Dalam memproyeksikan kapasitas keuangan daerah dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan merujuk pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun sebelumnya. Proyeksi belanja daerah akan disesuaikan dengan potensi pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,2 persen dan pendapatan transfer yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,32 persen. Selain itu, potensi dari penerimaan pembiayaan yang diproyeksikan Rp. 10 Milyar setiap tahunnya dengan beban pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang yang akan selesai pada Tahun 2027.

Tabel II.116 Proyeksi APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	424.263.176.331,00	454.825.247.700,00	487.588.877.600,00	522.712.656.700,00	560.366.599.850,00
	B. Pendapatan Transfer	2.007.646.952.981,00	2.054.256.783.050,00	2.101.948.713.900,00	2.150.747.867.700,00	2.200.679.949.900,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah					
	JUMLAH PENDAPATAN	2.431.910.129.312,00	2.509.082.030.750,00	2.589.537.591.500,00	2.673.460.524.400,00	2.761.046.549.750,00
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	1.606.824.067.112,38	1.658.156.120.950,00	1.729.121.625.800,00	1.784.944.230.000,00	1.843.203.395.400,00
	B. Belanja Modal	375.014.778.661,22	386.995.106.400,00	403.557.662.200,00	416.586.034.250,00	430.183.072.400,00
	C. Belanja Tak Terduga	9.675.207.000,00	9.984.293.850,00	10.411.600.050,00	10.747.725.950,00	11.098.523.200,00
	D. Belanja Transfer	424.163.076.538,40	437.713.509.550,00	456.446.703.450,00	471.182.534.200,00	486.561.558.750,00
	JUMLAH BELANJA	2.415.677.129.312,00	2.492.849.030.750,00	2.599.537.591.500,00	2.683.460.524.400,00	2.771.046.549.750,00
	SURPLUS/DEFISIT	16.233.000.000,00	16.233.000.000,00	-10.000.000.000,00	-10.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	26.233.000.000,00	26.233.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(16.233.000.000,00)	(16.233.000.000,00)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Sumber: Data diolah, 2025

Dalam mendukung potensi pendapatan daerah yang telah diproyeksikan pada tabel di atas, maka perlu dilakukan langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak daerah, yang diantaranya:

1. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah

Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa ketentuan yang baru terkait dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, antara lain yaitu adanya restrukturisasi pajak dimana terdapat reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu pajak barang dan jasa tertentu, sehingga aturan turunannya pun harus menyesuaikan.

Sampai dengan saat ini Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah diundangkan, namun masih diperlukan beberapa Peraturan Kepala Daerah untuk mengatur kegiatan yang lebih teknis dan standar operasional prosedur sebagai standar bagi Pegawai BPPRD dalam melaksanakan tugasnya. Adapun Perkada dan SOP tersebut antara lain:

- Perkada tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- Perkada tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Perkada tentang Validasi dan Penghapusan Piutang PBBP2;
- Perkada tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Reklame;
- Perkada tentang Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- Perkada tentang Pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB;
- Perkada tentang Opsen MBLB;
- SOP Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak;
- SOP tentang Penagihan Pajak Daerah;
- SOP tentang Pelayanan Pajak Daerah;
- SOP tentang Keberatan dan Banding;
- SOP tentang Pembukuan;

2. Pendataan, pengembangan dan penyusunan potensi pajak daerah

Dalam rangka optimalisasi pajak daerah, tentu diperlukan data pajak daerah yang akurat sebagai landasan pengambilan Keputusan. Sehingga, Pendataan juga memiliki peran penting agar BPPRD Kabupaten Lampung

Selatan dapat menyusun rencana kerja berdasarkan data dan informasi tersebut. Salah satu pendataan yang akan dilakukan selama tahun 2025-2030 yaitu Pendataan Kendaraan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan untuk Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, pendataan Pajak-pajak lainnya dapat dikemas dengan Penyusunan Potensi Pajak Daerah yang melibatkan Tim Profesional serta Aparatur di Kecamatan dan di Desa.

3. Penilaian ulang objek pajak

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka optimalisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Diperlukan penilaian ulang karena belum pernah adanya pendataan secara menyeluruh objek PBBP2 di Kabupaten Lampung Selatan dan masih banyak objek PBB yang nilai pajaknya di bawah nilai seharusnya. Fokus kegiatan ini hanya pada objek pajak golongan IV dan golongan V lebih khusus lagi yaitu Perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Sampai dengan tahun 2024 dari 4.775. Objek pajak milik perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, baru 33 Objek milik perusahaan yang dapat dinilai ulang. Target penilaian ulang selama tahun 2025-2030 yaitu 150 objek pajak milik perusahaan.

4. Penyempurnaan ZNT dan NJOP

Penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan kegiatan untuk Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak, dimana pada saat ini harga NJOP yang dipakai tidak lagi relevan dengan keadaan dan perkembangan di beberapa kawasan. Sehingga, penyempurnaan ZNT ini dapat memberikan dampak positif pada peningkatan realisasi Pajak Daerah terutama pada PBBP2 dan BPHTB. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penilaian PBBP2 yang menyebutkan bahwa "Kepala Daerah menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya"

5. Penyusunan data kadaster fiskal *nextgen* terintegrasi

Kadaster fiskal terintegrasi yaitu Data Pajak Daerah dalam bentuk spasial (peta) yang dirancang untuk memperoleh, menyimpan, memperbaharui, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk geografis dari objek pajak ditambah dengan informasi pajak daerah lainnya. Penyusunan peta ini mengintegrasikan segala informasi PBBP2 seperti kepemilikan tanah dan data Pajak Daerah lainnya berada pada satu sistem. Sehingga,

memungkinkan BPPRD mengetahui secara komprehensif terhadap Objek Pajak yang terdata dan meminimalkan praktik korupsi atau penyelewengan. Selain itu, dengan tersusunnya data kadaster fiskal ini Informasi tentang objek Pajak dapat diketahui dengan valid dan tepat, kemudian sistem ini juga menyajikan data yang akurat terkait Titik lokasi, ZNT, NJOP, Omzet, dan Informasi Pajak lainnya.

6. Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan

Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, mencegah kebocoran pajak, dan mendeteksi potensi penggelapan atau ketidak patuhan wajib pajak. Adapun kegiatannya yaitu antara lain Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Pemanfaatan alat perekam pajak, Pengawasan langsung, pelaksanaan razia gabungan kendaraan bermotor, Pemeriksaan pajak pada Objek tertentu, dan optimalisasi peran UPT Pelayanan Pajak.

7. Penguatan pelayanan dan konsultasi pajak

Pelayanan dan konsultasi pajak mempunyai peran untuk membantu wajib pajak mengatasi permasalahan umum terkait dengan pajak daerah seperti cara perhitungan, pelaporan dan pemahaman perihal peraturan perpajakan. Saat ini, kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak telah ada di mall pelayanan publik Kabupaten Lampung Selatan, kedepan diperlukan pelatihan-pelatihan tambahan kepada petugas agar Pelayanan Prima dapat tercapai.

8. Sosialisasi dan penyuluhan kebijakan pajak daerah

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilakukan untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan langsung dengan wajib pajak melalui media cetak, maupun media elektronik. Selain itu, upaya apresiasi kepada masyaakat yang taat pajak, diadakan Gebyar Pajak Daerah.

9. Penagihan

Penagihan pajak merupakan ujung tombak BPPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam menyelamatkan penerimaan dari sektor pajak, Kegiatan ini merupakan wujud upaya pencairan tunggakan utang pajak, meliputi pemberitahuan Surat Teguran dan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan, pelaksanaan penyanderaan, dan/atau penjualan barang sitaan secara lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu,

penyediaan dana yang cukup serta SDM yang kompeten dan berintegritas sangat diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak aktif maupun pasif.

10. Validasi piutang

Per 31 Desember 2023 Piutang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan senilai Rp.89.990.687.927,72 angka tersebut merupakan jumlah piutang dari 10 mata pajak, piutang terbesar dari Pajak Bumi dan Bangunan. Angka tersebut belum divalidasi menyeluruh, sehingga potensi pendapatannya tidak bisa diyakini senilai tersebut. Rata-rata penerimaan dari piutang setiap tahunnya sebesar Rp.6.000.000.000,00 lebih kecil dari nilai piutang yang tercatat, sehingga validasi piutang merupakan keharusan untuk memperoleh data yang lebih akurat.

11. Pengolahan dan pemeliharaan basis data

Pengelolaan pajak daerah Kabupaten Lampung Selatan sudah memaksimalkan pemanfaatan teknologi, saat ini penggunaan internet dan basis data merupakan suatu keharusan untuk mempercepat dan mempermudah akses dan pembaharuan data, selain itu juga bermanfaat untuk mengatur serta menjaga konsistensi dan integritas data. Kegiatan pengolahan dan pemeliharaan basis data bertujuan untuk memastikan keamanan data, menciptakan basis data pajak daerah yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir.

12. Digitalisasi dan elektronifikasi transaksi pajak daerah dan retribusi daerah

Kegiatan ini berupaya untuk mengubah cara pembayaran pajak daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital, sampai dengan saat ini pengelolaan transaksi pajak daerah di Kabupaten Lampung Selatan sudah berstatus digital, namun pesatnya perkembangan transaksi digital mengharuskan BPPRD Kabupaten Lampung Selatan untuk terus berkembang dan berinovasi. Kedepan, tujuan akhirnya adalah migrasi pengelolaan pajak dan retribusi secara menyeluruh ke ekosistem digital dimana sistem dan aplikasi saling terhubung dan pembayaran non tunai bisa menjadi budaya di Kabupaten Lampung Selatan.

Beberapa upaya pada Kegiatan ini yaitu Penyusunan *Road Map* Digitalisasi Daerah, perluasan instrumen dan kanal pembayaran pajak, pembentukan Satgas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Pembuatan *Billing Centre*.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2025-2030 diproyeksikan untuk memenuhi amanat *mandatory spending* dan melaksanakan program prioritas

daerah yang telah disinergikan dengan prioritas Provinsi Lampung dan Nasional yang diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Belanja *Mandatory Spending*

1. *Mandatory spending* bidang pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah;
2. *Mandatory spending* bidang pengawasan sebesar 0,5% dari total belanja daerah;
3. *Mandatory spending* pengembangan SDM sebesar 0,16% dari total belanja daerah;
4. Bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari pendapatan pajak daerah;
5. Bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari pendapatan retribusi daerah dikurangi retribusi bidang kesehatan;
6. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);
7. Infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% dari total belanja daerah di luar belanja transfer;
8. Belanja atas hasil penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 10% dari pendapatan pajak kendaraan bermotor;
9. Belanja atas hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik sebesar 10% dari pendapatan PBJT atas tenaga listrik;
10. Belanja atas hasil penerimaan pajak air tanah sebesar 10% dari pendapatan pajak air tanah; dan
11. Belanja iuran JKN sebesar 37,5% dari pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah.

B. Belanja Prioritas

1. Dukungan atas prioritas Nasional
 - Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas;
 - Pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Unggul;
 - Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di Kabupaten/Kota;
 - Program penuntasan TBC; dan
 - Mendukung arah pembangunan kewilayahan RPJMN dengan lokus Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, yang

diantaranya kawasan perkotaan Bandar Lampung dan kawasan pengembangan industri Bandar Lampung-Lampung Selatan, kawasan swasembada pangan dan air seputih sekampung, kawasan komoditas unggulan ekonomi biru pesisir Timur Lampung, kawasan komoditas unggulan kopi dan kelapa Lampung Barat – Selatan, dan kawasan rawan bencana tsunami di Lampung.

2. Dukungan atas prioritas Provinsi Lampung
 - Dukungan terhadap MBG;
 - Optimalisasi potensi
 - Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas Bumdes dan Koperasi;
 - Lampung menjadi Lumbung Pangan Nasional;
 - Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan;
 - Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal tersedia dipasar Lokal;
 - Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan;
 - Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan kemantapan Jalan di Desa.
3. Prioritas Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui pembangunan terpadu dan terintegrasi melalui konsep agroeduwisata.

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2025-2030 diproyeksikan untuk membiayai pembayaran pokok utang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp. 22.233.000.000 yang akan berakhir pada Tahun 2027 dan penyertaan modal kepada BUMD Lampung Selatan Maju sebesar Rp. 4.000.000.000 yang juga akan berakhir pada Tahun 2027. Dari sisi penerimaan pembiayaan diproyeksikan melalui Silpa yang stabil di angka Rp. 10.000.000.000.

Dalam menunjang optimalisasi pencapaian program prioritas yang telah direncanakan, Pemerintah Pusat melalui RPJMN Tahun 2025-2029 mendorong Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan skema pembiayaan kreatif di luar APBD melalui kemitraan publik-swasta dan pembiayaan hibah dari lembaga-lembaga internasional, antara lain:

1. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau *Public-Private Partnership* (PPP);
2. Penerbitan obligasi daerah;
3. Pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan filantropi;
4. Pinjaman daerah melalui lembaga keuangan seperti PT. SMI, bank Daerah maupun lembaga keuangan lainnya dengan skema berkelanjutan;

- Sinergitas BUMN dan BUMD;
- Skema LVC (*Land Value Capture*) dan VGF (*Viability Gap Fund*); dan
- Pembiayaan hijau (*green finance*) yang diarahkan pada proyek ramah lingkungan melalui *carbon trade*.

Tabel II.117 Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Pembiayaannya

No	Rencana Pembangunan Infrastruktur	Sumber Pembiayaan
1.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten dan Lingkungan	APBD; Pinjaman Daerah
2.	Pembangunan <i>Convention Center</i> dan Hotel	APBD; Kerjasama Badan Usaha/PPP; Pinjaman Daerah; CSR
3.	Pengembangan kawasan pariwisata <i>Sunset of South</i>	APBD; Kerjasama Badan Usaha/PPP; Pinjaman Daerah; CSR
4.	Pengembangan kawasan pariwisata <i>Krakatoa</i>	APBD; Kerjasama Badan Usaha/PPP; Pinjaman Daerah; CSR
5.	Pengembangan kawasan pariwisata <i>Sigerland</i>	APBD; Kerjasama Badan Usaha/PPP; Pinjaman Daerah; CSR
6.	Pengembangan kawasan industri Katibung	APBD; Kerjasama Badan Usaha/PPP; Pinjaman Daerah
7.	Pengembangan Balai Latihan Kerja Daerah	APBD; Kerjasama Badan Usaha/PPP

2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan capaian kinerja pembangunan daerah yang belum sesuai dengan target yang telah ditentukan atau dengan kata lain kondisi masyarakat belum terwujud sesuai harapan. Setelah permasalahan pembangunan daerah dirumuskan secara baik dan tepat akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah. Isu-isu strategis pembangunan daerah tersebut kemudian menghasilkan berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Lampung Selatan, rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah ini akan menjadi bagian penting untuk menentukan kebijakan pembangunan daerah dalam jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan masih pada peringkat ke 8 se Provinsi Lampung, pertumbuhan IPM Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir masih belum maksimal peningkatannya hanya sebesar rata-rata kenaikan selama 5 tahun yakni 0,94 poin, hal ini masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu diatasi

untuk memastikan pembangunan manusia yang lebih merata dan berkelanjutan.

B. Kemiskinan

Penurunan kemiskinan sebesar 1,51% dalam empat tahun (2020–2024) menunjukkan progres, tetapi masih relatif lambat dibandingkan target penanggulangan kemiskinan nasional. Jika tren ini berlanjut, pencapaian target *SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) 2030 untuk pengentasan kemiskinan ekstrem bisa terhambat. Meski kemiskinan ekstrem turun, masih ada sekitar 2,16% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, menunjukkan kerentanan pangan dan akses dasar yang masih kritis dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung dari 4,55% (2023) menjadi 4,57% (2024), kenaikan yang kurang signifikan (hanya 0,02 poin) ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan tantangan mendasar. Kenaikan 0,02% menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung cenderung stagnan, bahkan hampir tidak mengalami perubahan signifikan. Dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (yang biasanya di atas 5%), Lampung masih tertinggal dan belum menunjukkan akselerasi yang memadai. Begitu juga di Lampung Selatan dimana pertumbuhan ekonomi belum mencapai 5 % selama lima tahun terakhir.

D. PDRB Perkapita

PDRB per kapita Lampung Selatan meningkat dari Rp48,19 juta (2023) menjadi Rp51,37 juta (2024), pertumbuhan ini belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Salah satu masalah utamanya adalah ketimpangan distribusi pendapatan, di mana pertumbuhan ekonomi mungkin hanya dinikmati oleh segelintir kelompok. Misalnya, jika kenaikan PDRB didorong oleh sektor pertambangan atau perkebunan skala besar yang dikuasai korporasi, manfaatnya tidak otomatis dirasakan oleh masyarakat kecil, seperti petani atau buruh harian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Gini Ratio Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 sebesar 0,245, yang mengindikasikan ketimpangan sedang. Artinya, meskipun PDRB naik, gap antara penduduk kaya dan miskin tetap signifikan.

Selain itu, kenaikan PDRB per kapita tidak selalu sejalan dengan peningkatan daya beli. Jika inflasi di Lampung tinggi, harga kebutuhan pokok bisa naik lebih cepat daripada pendapatan riil masyarakat. Contohnya, inflasi tahunan Lampung Selatan pada 2024 mencapai 5,2%, lebih tinggi dari rata-rata nasional (2,61%). Hal ini berarti, meskipun pendapatan rata-rata naik secara nominal, kenaikan harga barang dan jasa bisa mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, PDRB tidak memperhitungkan faktor non-ekonomi seperti akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

E. Akses masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar yang Layak

Akses sanitasi layak di Lampung Selatan telah mencapai 100 % pada tahun 2024, hal ini berarti masyarakat di Lampung Selatan seluruhnya sudah bisa mengakses sarana sanitasi yang baik, tetapi untuk akses sanitasi Aman masih berada pada 1,02 % sedangkan target nasional sebesar 15 % pada tahun 2024 dan 30 % pada tahun 2030. Dalam menuju sanitasi yang aman dibutuhkan penyiapan infrastruktur sanitasi yang baik seperti, IPAL/IPLT, Tangki Septic di masyarakat serta Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

Akses Air Minum di Lampung Selatan Tahun 2024 sebesar 85,57 %, sedangkan akses aman air minum yang dihitung dari sarana perpipaan perkotaan maupun pedesaan sejumlah 16,35 %. Sementara itu data hasil audit kinerja BPKP terhadap kinerja Perumdam Tirta Jasa Lampung Selatan saat ini memiliki jumlah pelanggan 9.688 dan yang menjadi pelanggan aktif hanya sejumlah 5.938 dengan cakupan layanan 5,51% hal ini harus ditingkatkan karena target pada RPJMN terkait air minum aman pada tahun 2030 sebesar 30%.

Dari Hasil pendataan ulang yang dilakukan tahun 2023 - 2024 terhadap Rumah Tidak Layak Huni yang ada di Lampung Selatan saat ini terdapat sejumlah 9.288 Unit RTLH yang tersebar di 17 Kecamatan. Penanganan RTLH juga menjadi bagian dalam pengentasan kemiskinan di Lampung Selatan sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi Kab.Lampung Selatan

F. Tata Kelola Pemerintahan

Pada 2024, Lampung Selatan meraih skor 72,5 dalam Indeks Reformasi Birokrasi, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 68,9. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem birokrasi, meskipun masih berada di kategori "Sedang" (skala 0-100, dengan ≥ 75 sebagai kategori "Baik"). Begitu

juga dengan nilai MCP KPK dimana nilai indeks MCP KPK Kabupaten Lampung Selatan masih menjadi rangking ke 7 se- Provinsi Lampung pada tahun 2024

G. Keamanan Wilayah

Menurut catatan Polres Lampung Selatan, selama Januari-Mei 2024, tercatat 285 kasus kejahatan, dengan dominasi pencurian (32%), penganiayaan (25%), dan penipuan (18%). Meski angka ini turun 7% dibanding periode yang sama di 2023, beberapa wilayah seperti Kalianda, Tanjung Bintang, dan Palas masih menjadi titik rawan criminal/kejahatan. Selain itu, Lampung Selatan menjadi salah satu daerah transit narkoba dari jalur Sumatera-Jawa. BNN mencatat 47 kasus narkoba dalam 5 bulan pertama 2024, dengan penyitaan 12 kg sabu dan 5.000 pil ekstasi. Lokasi rawan meliputi pelabuhan Bakauheni dan kawasan pariwisata Pantai Mutun.

Kabupaten Lampung Selatan juga sebagai pintu gerbang Sumatera, kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Korlantas Polri mencatat 112 kasus kecelakaan di Lampung Selatan (Januari-Mei 2024), dengan korban meninggal 32 orang.

2.3.1.2 Permasalahan Pembangunan Per Bidang Urusan Pemerintahan

1. Pendidikan

- Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 telah mencapai 95,4 yang menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah SD/MI belum seluruhnya dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan SD;
- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Lampung selatan tahun 2024 masih mencapai angka 83,2 yang menunjukkan bahwa penduduk usia SMP/MTs masih belum seluruhnya menyelesaikan jenjang Pendidikan SMP/MTs;
- Angka partisipasi kasar SMP/MTs turun pada tahun 2024 dari 91,82 menjadi 89,12 yang menunjukkan bahwa penurunan proporsi penduduk yang mengakses pendidikan di jenjang SMP/MTs.

2. Kesehatan

- Terdapat peningkatan prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 0,1% dari sebelumnya sebesar 10,3 pada tahun 2023 menjadi 10,4 pada tahun 2024.
- Cakupan penemuan penyakit Turbekolosis belum mencapai 100%

- Indeks keluarga sehat masih berada di kategori keluarga tidak sehat, yang menunjukkan bahwa masih terdapat indikator yang belum tertangani dengan baik.
3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- Panjang jalan dengan permukaan tanah masih sepanjang 1.485,03 Km yang terdiri dari 9.30 Km jalan Kabupaten, dan 1.475,73 Km jalan desa.
 - Masih rendahnya panjang jalan Onderlag/Batu/Base masih sepanjang 179,39 untuk jalan Kabupaten dan 895,87Km untuk jalan Desa.
 - Akses Air Minum Perpipa di wilayah perkotaan yang saat ini baru mencapai 5,51% berdasarkan hasil audit kinerja oleh BPKP.
 - Akses sanitasi Aman di Lampung Selatan masih berada pada 1.02 % sedangkan pada RPJMN 2025 – 2029 menargetkan 30% akses aman.
4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- Masih minim data tentang perumahan sehingga belum ada dasar data untuk melakukan perencanaan yang terarah.
 - Masih minim peraturan terkait perumahan.
 - Masih tingginya Kawasan kumuh di Kabupaten Lampung Selatan.
 - Berdaasrkan hasil pendataan tahun 2023-2024 saat ini Lampung Selatan memiliki jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 9.288 unit rumah yang tersebar di 17 Kecamatan. Penanganan RTLH juga bisa terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan, dan juga penurunan kasus Stunting yang ada di Kabupaten Lampung Selatan
 - Luasan kawasan kumuh di Lampung Selatan saat ini mencapai 85.3 ha yang tersebar di 7 Kecamatan (Bakauheni, Kalianda, Natar, Jatimulyo, Katibung, Palas dan Sragi)
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
- Optimalisasi fungsi sekretariat penyidik pegawai negeri sipil yang belum maksimal sehingga koordinasi PPNS di Kabupaten Lampung Selatan belum berjalan dengan baik;
 - Belum optimalnya pemberdayaan potensi masyarakat dan kolaborasi eksternal lainnya seperti pelaku usaha, Lembaga sosial maupun organisasi kemasyarakatan) untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - Keterbatasan sistem informasi yang ada terkait penyajian data capaian kinerja yang mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

- Indeks Risiko Bencana di Lampung Selatan saat ini masih dalam kategori TINGGI (151,15 Point) dengan 8 potensi bencana yang ada seperti Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor serta Gelombang Ekstrim, Abrasi dan Kekeringan.
6. Sosial
- Akurasi data pemerlu pelayanan secara berkesinambungan.
 - Kurangnya kualitas SDM aparatur pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial.
 - Kurang memadainya sarana prasarana penunjang pelayanan.
 - Kurang tersedianya regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman secara teknis dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
7. Tenaga Kerja
- Angka pengangguran terbuka naik dari 5,27% pada tahun 2023 menjadi 5,31 pada tahun 2024.
 - Tingginya potensi sengketa hubungan industrial mengingat Kabupaten Lampung Selatan memiliki Kawasan Industri.
8. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkerja anak, perkawinan anak, anak sebagai objek pornografi dan anak berhadapan dengan hukum.
 - Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
 - Perempuan banyak menjadi objek pornografi, , menjadi perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
9. Pangan
- Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Turun dari 85,46 pada tahun 2023 menjadi 84,46 pada tahun 2024.
 - Luas fungsi penyediaan pangan yang masuk dalam kategori sangat rendah dan rendah berjumlah 8,46%.
10. Pertanian
- Potensi konflik agraria masih tinggi, sepanjang tahun 2021-2025 terdapat 36 perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kalianda, dengan jumlah perkara yang telah diputuskan sebanyak 12 perkara. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi konflik agrarian masih cukup tinggi di Kabupaten Lampung Selatan.

11. Lingkungan Hidup

- Terdapat penurunan kualitas lingkungan hidup, pada tahun 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan mencapai 63,17 yang kemudian menurun menjadi 60,97 pada tahun 2024.
- Pemanfaatan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan (berkelanjutan).
- Pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih cukup rendah.
- Laboratorium Lingkungan Hidup belum terakreditasi sebagai penyedia data yang valid dan akurat terkait pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah.
- Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan (IKL) perlu ditingkatkan
- Penanganan Sampah sudah cukup baik tapi tidak diimbangi dengan pengurangan sampah hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan atas pengelolaan sampah dengan metode *reuse* dan *recycle*, sehingga perlu dibentuk bank sampah dan unit-unit pengelolaan sampah lainnya.

12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat, maka mempengaruhi proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon.
- Salah satu syarat untuk mendapatkan izin akses pemanfaatan data Kabupaten/Kota sudah menerapkan ISO 27001 yaitu standar internasional yang mengatur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Standar ini memberikan pedoman untuk mengelola risiko keamanan informasi dalam suatu organisasi. Kabupaten Lampung Selatan belum menerapkan ISO 27001 untuk *cyber* keamanan data.
- Rentang Kendali Pelayanan masih perlu ditingkatkan dan digitalisasi pelayanan.

13. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- Potensi Desa yang besar untuk menjadi sumber pendapatan desa dan ekonomi masyarakat namun belum tergarap secara optimal.

- Masih terdapat pemerintah desa yang belum melaksanakan penatausahaan Keuangan dan Aset Desa secara baik berdasarkan ketentuan yang ada.
 - Masih rendahnya desa status mandiri.
14. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- Cakupan KB Aktif Tahun 2024 baru mencapai 70,89%.
 - Angka pemakaian kontrasepsi Tahun 2024 baru mencapai 70,64%.
15. Perhubungan
- Konektivitas jaringan transportasi yang masih rendah untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dan kegiatan antar wilayah;
 - Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 - Ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan sebagai penunjang kegiatan transportasi kewilayahan di Kabupaten Lampung Selatan;
 - Masih tingginya tingkat *Over Dimension Over Loaded* (ODOL); Belum ada transportasi massal dan penghubung wilayah;
16. Komunikasi Dan Informatika
- Masih belum terpenuhinya sarana pendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - Kurangnya keamanan dan privasi dalam SPBE.
17. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
- Masih rendahnya tata Kelola organisasi kelembagaan , daya saing usaha serta kepatuhan koperasi dalam mentaati aturan perkoperasian yang terlihat masih rendahnya koperasi yang sehat dan yang melaksanakan RAT;
 - Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM;
 - Masih rendahnya kewirausahaan;
 - Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat/Pelaku usaha mikro kecil menengah tentang perizinan UMKM dan manfaat yang didapat;
 - Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk.
 - Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum efektif dan terserap sepenuhnya.
18. Penanaman Modal
- Masih ada beberapa produk perizinan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tapi belum terakomodir dalam *sistem Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS).

- Masih banyak pelaku usaha terutama dari kalangan mikro usaha kecil yang belum dapat mengoperasikan sistem perizinan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS).
- Masih ditemukan kejanggalan dalam penyajian data perizinan dan investasi yang bersumber dari sistem *Online Single Submission RiskBased Approach* (OSS) dan masih sering terjadi gangguan pada sistem OSS.
- Masih sering terjadinya gangguan jaringan internet.
- Banyaknya Pelaku Usaha yang tidak mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang seharusnya dibuat setiap triwulan/semester.

19. Kepemudaan Dan Olah Raga

- Tingkat pengangguran terbuka pemuda (15-24 tahun) mencapai 18,5%, lebih tinggi dari rata-rata nasional (15,5%);
- Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/organisasi kepemudaan dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal.

20. Statistik

- Kurangnya keterbukaan informasi publik;
- Pemahaman terkait pengumpulan data sektoral melalui kegiatan statistik dan metadata statistik masih minim;
- Sebaran data sektoral masih belum sesuai prinsip satu data.

21. Persandian

- Perlu peningkatan keamanan riptografi dan keamanan informasi terutama terkait dengan keamanan data dan komunikasi pemerintah

22. Kebudayaan

- Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal yang menyebabkan terjadinya degradasi budaya lokal dalam lingkungan masyarakat.

23. Perpustakaan

- Rendahnya Minat baca Masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari memang belum adanya kebiasaan membaca dimasyarakat, kuantitas dan kualitas bahan bacaan yang diterbitkan, sampai pada belum siapnya lembaga yang seharusnya membudayakan membaca dikalangan Masyarakat baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

24. Kearsipan.

- Masih Kurangnya Kesadaran dari masyarakat dan OPD akan pentingnya arsip sehingga banyak OPD yang belum menyerahkan

arsipnya ke depo arsip sehingga mempengaruhi jumlah arsip yang dikelola di depo arsip Kabupaten Lampung Selatan.

- Masih Kurangnya sarana dan prasana yang berada di gedung penyimpanan arsip (depo arsip) Kabupaten Lampung Selatan.
- Belum adanya tenaga pengelola arsip di masing-masing OPD.

25. Kelautan dan Perikanan

- Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap
- Masih rendahnya kemampuan pemerintah untuk pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara optimal
- Masih minimnya jumlah pusat pendaratan ikan yang terfasilitasi sarana prasarana yang memadai
- Masih rendahnya penyediaan prasarana dan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap
- Masih rendahnya SDM Dinas perikanan dalam pemberdayaan nelayan kecil
- Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya
- Masih rendahnya penyediaan prasarana dan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan
- Belum optimalnya pengelolaan kesehatan ikan/udang dan lingkungan budidaya
- Belum termanajemen dengan baik Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan Air dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
- Masih rendahnya kesadaran pembudidaya untuk memiliki Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)
- Saluran masuk dan saluran buang pada tambak yang masih menjadi satu sehingga mengakibatkan tambak mudah terserang penyakit.
- Tingginya biaya operasional tambak bagi pelaku usaha budidaya skala kecil
- Terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih ikan unggul.
- Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan
- Belum optimalnya mutu produk olahan hasil perikanan
- Belum optimalnya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
- Masih rendahnya fasilitas sarana dan prasarana bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil

26. Pariwisata

- Komitmen dan kebijakan politik dari berbagai pihak terkait kepariwisataan belum terlaksana dengan optimal.
- Keterbatasan dana pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.
- Kualitas sumber daya manusia pariwisata yang relatif masih rendah sehingga kurang mendukung program kepariwisataan.
- Belum ada program yang terstruktur untuk mengembangkan kepariwisataan.
- Sarana dan prasarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap dan tidak tersebar merata serta belum dimanfaatkan secara optimal.
- Aksesibilitas menuju obyek dan daya tarik wisata kurang mendukung, terutama di kawasan wisata unggulan yang telah ditetapkan, dan
- Sistem promosi dan pemasaran pariwisata tidak dilakukan secara terpadu.
- Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 mencapai 1,2 Juta Jiwa tetapi *share* sektor pariwisata di PDRB kabupaten Lampung Selatan hanya 2,04% hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan wisatawan yang berkunjung dengan urang yang diserap dari sector pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan.

27. Pertanian

- Relatif rendahnya kualitas sumber daya pertanian dan kurangnya dukungan kelembagaan
- Pendayagunaan potensi lahan belum optimal
- Rendahnya tingkat penerapan teknologi spesifik lokasi
- Pengembangan komoditas unggulan belum optimal, sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat
- Potensi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan belum dimanfaatkan untuk pengembangan potensi diluar sektor pertanian seperti agrowisata

28. Energi Dan Sumber Daya Mineral

- Berdasarkan data PT. PLN Cabang Lampung Selatan tahun 2024, teridentifikasi beberapa permasalahan krusial dalam distribusi dan konsumsi listrik di wilayah ini. Pertama, terjadi ketimpangan distribusi daya terpasang antar kecamatan, di mana ULP Natar memiliki

kapasitas terbesar (6,58 juta VA), sementara ULP Sidomulyo hanya 2,72 juta VA, padahal kebutuhan industri di Sidomulyo justru tertinggi (86,55 juta kWh). Kedua, beban konsumsi rumah tangga mendominasi (318,93 juta kWh atau 49% dari total produksi), tetapi tidak diimbangi dengan pemerataan infrastruktur, terlihat dari rasio daya terpasang per kapita yang rendah di kecamatan terpencil seperti Sutami. Ketiga, sektor industri menyumbang 35,7% konsumsi listrik (232,22 juta kWh), terutama di Sidomulyo dan Sutami, namun sering mengalami pemadaman bergilir akibat keterbatasan jaringan. Keempat, alokasi listrik untuk fasilitas publik seperti jalan umum sangat minim (73.700 kWh untuk seluruh kabupaten), mengindikasikan kurangnya penerangan jalan yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan.

29. Perdagangan

- Ketimpangan Distribusi Sarana Perdagangan, dengan hanya 11 pasar yang tersebar di seluruh kabupaten, atau rata-rata 1 pasar per 2-3 kecamatan, mengakibatkan akses masyarakat terhadap pusat perdagangan formal menjadi terbatas, terutama di wilayah pedesaan.
- Dominasi kios (736 unit) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM beroperasi secara informal dengan skala kecil, yang berpotensi menghadapi masalah permodalan dan daya saing.
- Minimnya Infrastruktur Pasar Modern, dengan sebagian besar pasar yang ada merupakan pasar tradisional dengan fasilitas terbatas (sanitasi buruk, drainase tidak memadai, dan kurangnya pendingin untuk produk segar).
- Tidak adanya pasar modern atau pusat perbelanjaan berskala besar mengakibatkan masyarakat berbelanja ke Bandar Lampung, sehingga uang beredar keluar daerah.

30. Perindustrian

- Masih terbatasnya kemampuan IKM dalam penerapan standar mutu/kualitas produk (PIRT, BPOM, HALAL, HACCP), penggunaan teknologi, inovasi, diversifikasi produk dan pengemasan produk;
- Terbatasnya jumlah industri besar dan sedang.
- Terhambatnya pembangunan Kawasan industri Way Pisang

31. Transmigrasi.

- Banyaknya peminat untuk menjadi peserta transmigrasi tetapi kuota pemberangkatan oleh pemerintah sangat terbatas, sehingga pada

tahun anggaran 2024 hanya mendapat kuota pengiriman calon transmigrasi sebanyak 2 (dua) KK.

- Tempat tujuan transmigrasi yang disediakan pemerintah terkadang belum sesuai dengan keinginan calon transmigrasi.

32. Perencanaan Pembangunan

- Proses perencanaan dan evaluasi belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh Perangkat Daerah, Paradigma baru membutuhkan kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah dengan koordinator Bappeda, seringkali laporan yang harus disampaikan ke Bappeda mengalami keterlambatan;
- Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun internal Bappeda maupun oleh Perangkat Daerah Teknis terkait.
- Belum terkelolanya sumber data informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam yang implikasinya berimbas pada dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi serta pengendalian perencanaan pembangunan;

33. Keuangan

- Status Kepemilikan Aset yang tumpang tindih dengan pihak lain.
- Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 sebesar 1,174 dengan kategori sedang masih dibawah Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung sebesar 1,671 dengan kategori sedang.
- Tahun 2024 berdasarkan data yang dirilis BPS, Komposisi pendapatan menunjukkan ketergantungan sebesar 84.45% pada dana perimbangan (Rp1.893 triliun dari total Rp2.240 triliun) Hanya 15.5% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

34. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- Penyelesaian PPPK dan pegawai Non ASN, dimana Regulasi yang membatasi jumlah formasi yang dapat diangkat untuk menjadi PPPK
- Penataan Jabatan Struktural maupun Fungsional, bahwa mekanisme pengisian Jabatan melalui proses lelang, jobfit dan penilaian kinerja yang perlu di lakukan dengan cermat.
- Penerapan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, bahwa implementasi penerapan E-Kinerja belum optimal

- Tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam pelayanan kepegawaian belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kompetensi ASN
- Penyederhanaan birokrasi yang mempengaruhi penataan ASN, struktur organisasi serta rencana pengembangan kompetensi pegawai sesuai jabatan yang saat ini belum optimal dilaksanakan.
- Implementasi Absensi Online belum optimal sebagai dasar dalam penegakan disiplin serta perhitungan pemberian tunjangan kinerja

35. Penelitian dan pengembangan

- Arah penelitian dan pengembangan sering kali kurang mempertimbangkan kebutuhan riil sehingga berpengaruh terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perumusan kebijakan daerah;
- Belum terpadunya database kelitbangan;
- Kurangnya penyebaran informasi hasil penelitian (diseminasi), advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK;
- Pelaksanaan inovasi daerah belum optimal. Penyelenggaraan inovasi daerah harus berorientasikan pada kinerja dan perlu dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak sehingga inovasi daerah yang dihasilkan berdampak kepada masyarakat;
- Kapasitas Kelembagaan dan SDM kelitbangan masih rendah. Kualitas dan kuantitas SDM di bidang riset dan inovasi masih rendah. Belum adanya Fungsional Peneliti dan masih rendahnya jumlah fungsional yang berkaitan dengan kegiatan riset dan inovasi, sehingga tidak semua kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah serta kajian dilakukan secara mandiri oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

36. Pengawasan

- Masih terdapat target kinerja pada sasaran strategis pemda yang belum ditetapkan dengan tepat, sasaran OPD, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang belum berorientasi outcome dan kurang relevan dengan sasaran di atasnya serta indikator kinerja yang tidak SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound Goals*);
- Belum seluruh Perangkat Daerah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan Manajemen Risiko secara memadai;
- Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko belum sepenuhnya memadai;

- Implementasi manajemen risiko belum diintegrasikan ke dalam proses bisnis maupun dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah dan pimpinan OPD secara memadai;
- Belum seluruh Perangkat Daerah mengelola risiko terkait fraud dan kemitraan secara memadai;
- Kualitas hasil audit ketaatan belum menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperbaiki tata kelola di Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan pengawasan audit kinerja masih dalam ruang lingkup operasional ketercapaian tujuan kegiatan di tingkat OPD dan belum menyentuh ketercapaian *ultimate outcome* yang bersifat strategis di tingkat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Hasil pengawasan APIP tidak segera di tindak lanjuti (TL) oleh obrik;
- Tingginya tingkat pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Inspektorat terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan Desa yang tidak sesuai *Standard Operasional Prosedur* (SOP).
- Nilai MCP KPK Kabupaten Lampung Selatan yang masih di peringkat ke 6 (enam) se-Provinsi Lampung ini menunjukkan Kabupaten Lampung Selatan harus lebih transparan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah, yang akan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Dengan demikian, suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu baik internasional, nasional, regional, provinsi dan kabupaten itu sendiri.

2.3.2.1 Isu Internasional

Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 31 Desember 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara negara ASEAN. Hal ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan secara cermat dan

terintegrasi. Untuk menyambut hal tersebut, agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri, Kabupaten Lampung Selatan harus mampu meningkatkan daya saing perekonomian daerah, melalui peningkatan kualitas produksi barang dan jasa produk unggulan daerah serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja lokal. Hal ini wajib dilakukan agar Kabupaten Lampung Selatan dapat berpartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN secara produktif dan tidak hanya menjadi masyarakat konsumtif yang menjadi target pasar negara ASEAN lainnya.

Sustainable Development Goals (SDGs). Pada sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25-27 September 2015, telah disepakati kerangka pembangunan global yang baru yakni *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang disepakati oleh 192 negara termasuk Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai platform pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan dimana pada tahun 2030 cita-cita dari SDGs yang tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus dicapai. Upaya percepatan pencapaian Target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri merupakan titik tolak perubahan industri secara fundamental dikenal dengan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Revolusi 1.0 atau revolusi pertama dimulai pada akhir abad ke 18 dengan ditandai ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad 20 dimana pada tahap ini listrik menggantikan peran tenaga uap dan air menjadi sumber utama industri. Revolusi industri 3.0 ditengarai muncul perdana pada awal tahun 1970. Dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Sedangkan revolusi industri 4.0 yang terakhir dan sekaligus yang kita alami saat ini diprakarsai oleh Prof. Klaus Schwab, ekonom terkenal dari Jerman yang mengenalkan konsep Revolusi Industri 4.0 dalam

bukunya *“The Fourth Industrial Revolution”*. Beliau menegaskan bahwa revolusi industri 4.0 telah mengubah kerja manusia secara fundamental. Pada saat ini industri telah menyentuh virtual, konektivitas manusia, mesin, dan data. Berdasarkan analisis *Mckinsey Global Institute*, Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja di dunia. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi perubahan ini dengan tepat melalui penyusunan strategi yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menciptakan lapangan yang lebih luas. Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visi penyusunan Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

Bonus Demografi. Di sela kemajuan zaman dengan segala plus minusnya bagi generasi muda, saat ini, Indonesia dianugerahi “Bonus Demografi” yang harus mendapat perhatian serius. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus tersebut di tahun 2020-2030 dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif tersebut akan menguntungkan dari sisi pembangunan dimana banyaknya penduduk yang bekerja maka akan memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Bonus demografi tidak didapat secara otomatis, tetapi harus diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Lampung Selatan juga mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi. Penduduk usia produktif saat ini mendominasi total populasi penduduk di Kabupaten Lampung Selatan. Tingginya jumlah dan proporsipenduduk usia kerja tersebut selain meningkatkan angkatan kerja dalam daerah juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi daerah lain bahkan Negara lain yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun. Kondisi ini menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk menyiapkan kebijakan yang tepat bagigenerasi mudanya untuk lebih mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha sehingga pada saatnya nanti generasi bonus demografi Kabupaten Lampung Selatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Lampung Selatan.

2.3.2.2 Isu Kebijakan Nasional

2.3.2.2.1 Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah diantaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

2.3.2.2.2 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$ 28.600 per pekerja, Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$ 149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan *Association of Southeast Asian Nations* sebesar US\$ 30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja

diantaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment*, siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Co-operation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.3.2.2.3 Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

2.3.2.2.4 Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

2.3.2.2.5 Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024),

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi

tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particulate matter* 2,5 (*World Health Organization, 2021*). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi *Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021*). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun, Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (*United Nations Environment Programme, 2023*), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

2.3.2.2.6 Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik

di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas, Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (*International Monetary Fund*, 2024). Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (*International Monetary Fund*, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh *The Federal Reserve*. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti *Bank of England* dan *The Federal Reserve*. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global. Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan

akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan *Baltic Dry Index level* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2021.

Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

2.3.2.2.7 Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung Pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.3.2.3 Isu Pembangunan Provinsi Lampung

2.3.2.3.1 Belum Optimalnya Hilirisasi pada Kinerja Sektor Industri dalam Meningkatkan Nilai Tambah Perekonomian Daerah

Provinsi Lampung menghadapi tantangan struktural dalam mengakselerasi peningkatan nilai tambah di sektor industri pengolahan dan pertanian. Laju pertumbuhan industri pengolahan yang hanya mencapai 1,90% selama lima tahun terakhir belum mampu mengimbangi kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sebesar 19,15%. Rendahnya penyerapan bahan baku lokal serta dominasi ekspor komoditas mentah yang mencapai 68,01% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa proses hilirisasi belum berjalan secara optimal.

Berbagai hambatan seperti inefisiensi proses produksi, lemahnya struktur industri, dan minimnya pemanfaatan teknologi memperkuat perlunya pembangunan kawasan industri yang terintegrasi. Langkah ini penting untuk menarik investasi, memperkuat rantai pasok lokal, serta meningkatkan daya saing daerah. Meskipun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat menjadi 4,14% pada tahun 2023, kontribusinya terhadap PDRB belum maksimal, antara lain karena pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) belum optimal serta sistem perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam OSS-RBA dengan rencana tata ruang (RTRW dan RDTR).

Saat ini, struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor primer, terutama pertanian, dengan kontribusi 26–30%. Sektor ini tetap menjadi penopang utama, namun rentan terhadap fluktuasi harga dan belum menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Di sisi lain, Lampung berhasil mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional, terlihat dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2024 Provinsi Lampung sebesar 82,58 merupakan peringkat 10 secara nasional dan peringkat 2 se-Sumatera, meskipun produktivitas komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, dan lada menunjukkan tren penurunan.

Produktivitas beberapa komoditas pangan seperti jagung dan ubi meningkat, memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Ini menunjukkan perlunya strategi hilirisasi dan peningkatan produktivitas yang lebih terpadu. Dalam konteks keberlanjutan, diversifikasi pangan berbasis keanekaragaman hayati lokal perlu diperkuat. Ketergantungan terhadap beras sebagai sumber utama karbohidrat perlu mulai dikurangi melalui edukasi dan promosi konsumsi alternatif sehat seperti jagung, singkong, ubi jalar, dan kentang yang semuanya merupakan komoditas unggulan daerah. Hal ini tidak

hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga pelestarian lingkungan dan nilai budaya lokal. Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan agar tidak terpaku pada beras, melainkan membuka ruang lebih luas bagi konsumsi pangan lokal non-nasi yang bergizi dan bernilai ekonomi tinggi bagi petani Lampung.

Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu diarahkan pada penguatan hilirisasi sektor industri, pertanian, sektor kehutanan dan perikanan melalui peningkatan investasi yang terarah, reformasi tata Kelola perizinan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Transformasi struktural ini menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2.3.2 Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang belum optimal mencerminkan lemahnya daya ungkit sektor produktif, terutama di pedesaan yang kaya potensi namun belum tergarap maksimal. Ketergantungan pada sektor primer bernilai tambah rendah, minimnya investasi, terbatasnya infrastruktur dan akses pembiayaan, serta lemahnya kapasitas kelembagaan menjadi hambatan utama.

Kesenjangan juga tampak dalam sektor pertanian dan perikanan, di mana kebutuhan benih unggul belum terpenuhi akibat data yang tidak akurat, distribusi alat pertanian yang tidak tepat sasaran, hingga alih fungsi lahan yang tak terkendali, yang berdampak pada penurunan produktivitas. Di sektor perikanan, menurunnya produksi akibat penyakit ikan, mahalnya pakan karena bahan impor, dan belum optimalnya distribusi solar bersubsidi memperparah kondisi nelayan kecil. Sementara itu, geliat sektor pariwisata yang mencatat 13,98 juta kunjungan wisatawan pada 2023 belum diiringi kesiapan infrastruktur, akses transportasi publik, promosi digital, maupun integrasi UMKM lokal. Tiga dari tujuh kawasan wisata unggulan berkembang optimal, sisanya belum tergarap maksimal karena minimnya sinergi antar pihak, pendanaan terbatas, serta lemahnya strategi dan promosi *event*. Pengembangan Taman Hutan Raya (TAHURA) sebagai destinasi wisata juga masih belum optimal dan memerlukan dukungan investasi untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pembangunan daerah masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi konvensional yang belum mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau

secara menyeluruh, padahal peluang besar ada di sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan industri daur ulang. Konsep Blue Economy pun menghadapi tantangan serius, mulai dari degradasi ekosistem laut akibat polusi dan perubahan iklim, hingga rendahnya kapasitas SDM dan kurangnya teknologi ramah lingkungan. Untuk itu, diperlukan reformasi tata kelola, penguatan data dan regulasi, integrasi ekonomi hijau dan biru dalam perencanaan pembangunan, serta sinergi lintas sektor untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Lampung.

2.3.2.3.3 Angka Kemiskinan yang Masih Tinggi Terutama di Perdesaan

Angka Kemiskinan yang masih tinggi terutama di perdesaan menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Meskipun berbagai program bantuan sosial serta pembangunan infrastruktur telah digulirkan oleh pemerintah, namun penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak desa yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah memperdalam jurang kesejahteraan antara desa dan kota.

Pembangunan ekosistem ekonomi berbasis desa masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya integrasi program pengentasan kemiskinan dengan potensi local desa, yang disebabkan oleh kurangnya konvergensi dalam perencanaan antara pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa. Hal ini menyebabkan intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya selaras dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat desa secara menyeluruh. Perencanaan di Tingkat desa cenderung berfokus pada pencapaian target SDGs Desa, namun masih mengabaikan pemanfaatan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) sebagai dasar perencanaan. Selain itu, lemahnya komunikasi dan sinergi dengan perencanaan di tingkat daerah menyebabkan proses perencanaan desa belum mampu merespons kebutuhan riil serta menggali potensi local secara komprehensif dan berkelanjutan. Program-program pengentasan kemiskinan hingga saat ini masih bersifat sektoral dan *top-down*, tanpa melibatkan perencanaan partisipatif dari masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDesa yang diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi lokal, belum mampu

berperan secara optimal akibat berbagai keterbatasan, baik dari sisi kapasitas kelembagaan, akses pembiayaan, maupun dukungan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Pengentasan kemiskinan di desa membutuhkan program yang focus dilaksanakan di desa, untuk itu pemerintah pusat mencanangkan program koperasi desa merah putih. Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk memotong rantai pasok yang panjang dalam tata niaga di desa, dimana dalam tata niaga di desa masih banyak dikuasai oleh tengkulak/middleman sehingga petani/nelayan mendapatkan margin yang minim dan masyarakat sebagai konsumen akhir mendapatkan harga yang tinggi.

Selain mensukseskan Program Koperasi Desa Merah Putih diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang menggabungkan pemanfaatan data desa secara akurat, pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan, penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMDesa, serta sinergi antarlembaga pemerintah di semua tingkatan. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar tepat sasaran, kontekstual, dan berkelanjutan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.

2.3.2.3.4 Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang Fiskal dalam Mendukung Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Peningkatan ruang fiskal di Provinsi Lampung hingga saat ini masih belum optimal. Hal ini tercermin dari berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas penerimaan dan belanja daerah. Salah satu tantangan utama Adalah penetapan target penerimaan pajak daerah yang belum sepenuhnya didasarkan pada potensi riil yang dimiliki. Formulasi penetapan target yang cenderung bersifat inkremental dan belum berbasis pada data wajib pajak yang valid mengakibatkan terjadinya gap antara potensi dan realisasi penerimaan. Berdasarkan hasil perhitungan potensi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat selisih potensi pajak yang cukup signifikan, yakni lebih dari Rp58 miliar, yang hingga kini belum dapat digarap secara optimal.

Selain itu, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen belum merata. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hanya BUMD yang bergerak di sektor jasa keuangan yang secara konsisten memberikan kontribusi dividen kepada daerah. Sementara itu, kinerja BUMD di sektor non-jasa dan non-keuangan belum menunjukkan hasil yang optimal. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor

pariwisata, di mana kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah masih terbatas, meskipun tren peningkatan kunjungan wisata menunjukkan korelasi positif terhadap penerimaan retribusi dan pajak daerah.

Di sisi lain, efektivitas belanja daerah dalam mendukung pencapaian *outcome* pembangunan masih menghadapi tantangan. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting yang mencapai Rp1,38 triliun tercatat belum sepenuhnya efektif, di mana sebesar 54,38% dari total anggaran tersebut belum secara langsung mendukung capaian akhir yang ditargetkan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar belanja daerah benar-benar berorientasi pada hasil (*outcome-based budgeting*).

2.3.2.3.5 Belum Optimalnya Ketahanan dan Kemandirian Energi untuk Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Daerah

Ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Lampung menjadi isu yang semakin mendesak, terutama di tengah tingginya dominasi penggunaan energi fosil seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Ketergantungan terhadap sumber energi tersebut tidak hanya melemahkan ketahanan energi daerah, tetapi juga menjadi hambatan dalam percepatan transisi menuju energi bersih. Tantangan utama dalam proses transisi ini meliputi belum memadainya infrastruktur energi, terbatasnya investasi, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan energi terbarukan. Selain itu, masih terjadi ketimpangan akses energi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana sejumlah wilayah perdesaan menghadapi keterbatasan akses terhadap listrik yang andal. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mendorong percepatan pembangunan energi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, khususnya dari sumber panas bumi, tenaga surya, air, dan bioenergi. Dari total 13 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang ada di Lampung, saat ini baru WKP Ulubelu yang telah beroperasi secara komersial. Oleh karena itu, percepatan pengembangan WKP lainnya perlu menjadi prioritas guna memperkuat pemanfaatan potensi energi lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Selain panas bumi, pemanfaatan energi surya dan bioenergi juga memiliki prospek yang menjanjikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah terpencil dan perdesaan. Diversifikasi sumber energi terbarukan ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan energi daerah, tetapi

juga mendorong kemandirian energi regional yang berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan berwawasan lingkungan di Provinsi Lampung.

2.3.2.3.6 Belum Optimalnya Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru berbasis *Eco-City* yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan yang signifikan, utamanya disebabkan oleh belum meratanya pusat-pusat kegiatan ekonomi serta ketimpangan konektivitas antarwilayah. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pengembangan kawasan ekonomi baru yang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi menjadi salah satu langkah strategis. Pembangunan Kawasan ekonomi berbasis *eco-city* diarahkan untuk mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan, mendorong pertumbuhan wilayah baru yang berwawasan lingkungan, serta memastikan aksesibilitas yang inklusif dan efisien. Selain bertujuan untuk mengurangi tekanan pembangunan yang terkonsentrasi di Kota Bandar Lampung, strategi ini juga diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi alternatif di wilayah lain yang memiliki potensi unggulan, baik di wilayah daratan maupun pesisir dan kepulauan.

Namun demikian, upaya pengembangan kawasan ekonomi baru di Provinsi Lampung masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur konektivitas yang belum optimal. Hingga tahun 2023, tingkat kemantapan Jalan Nasional di Provinsi Lampung tercatat baru mencapai 93,90%, sementara kemantapan jalan kabupaten masih bervariasi antara 23,59% hingga 64,99%, jauh di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMN. Di sisi lain, alokasi anggaran pemeliharaan jalan kabupaten belum mampu mendorong peningkatan signifikan terhadap kualitas jaringan jalan tersebut. Ancaman terhadap keberlanjutan infrastruktur jalan juga datang dari tingginya frekuensi kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) yang mempercepat kerusakan jalan, untuk mengatasi hal ini pemerintah merencanakan peningkatan kondisi jalan mantap dengan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun pada tahun 2026. Minimnya aksesibilitas turut terlihat pada sektor pelabuhan, di mana sejumlah pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung belum beroperasi secara optimal untuk mendukung arus logistik, khususnya di wilayah pesisir dan *hinterland*. Sementara itu, konektivitas udara juga masih menghadapi berbagai kendala. Bandar Udara Taufiq Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat masih terkendala proses perluasan lahan, sedangkan Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan belum memiliki grand design pengembangan

dan belum didukung oleh moda transportasi massal yang memadai sebagai penghubung antarwilayah.

Dalam rangka mewujudkan proyeksi strategis jangka panjang yaitu pengembangan kawasan ekonomi berbasis *eco-city* (Kota Baru) untuk merespons kepadatan spasial dan beban pertumbuhan Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Komitmen terhadap pengembangan kawasan ini telah dinyatakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025–2029, serta diperkuat dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan panjang, termasuk dalam RTRW Provinsi Lampung, maka dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan integratif. Penguatan konektivitas melalui pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, optimalisasi pelabuhan, peningkatan fasilitas bandara, dan pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan menjadi kunci utama. Selain itu, pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungan, integrasi tata ruang, serta prinsip keberlanjutan melalui *green* infrastruktur dan penataan hunian yang inklusif. Dengan pendekatan tersebut, Provinsi Lampung diarahkan untuk membangun kawasan ekonomi baru yang berdaya saing, berkelanjutan, serta tangguh secara sosial dan lingkungan.

2.3.2.3.7 Tingginya Proporsi Penduduk Usia Produktif yang Belum Diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja secara Optimal

Secara demografi, proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 yang tertuang dalam buku publikasi BPS, bahwa jumlah penduduk Lampung di tahun 2030 diproyeksikan sebanyak 10 juta jiwa. Jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) akan terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2035. Disisi lain, angka ketergantungan (*dependency ratio*) cenderung berada pada posisi yang relatif rendah atau dibawah 50 %. Kondisi dominannya penduduk usia produktif dan angka ketergantungan yang relatif rendah ini disebut sebagai Bonus Demografi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terutama dalam hal produktivitas sumber daya manusia (SDM) yang memerlukan dukungan agar lebih sehat, terdidik dan berdaya saing.

Bonus demografi diprediksi akan meningkatkan jumlah angkatan kerja sehingga harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang luas, hal inilah yang menjadi tantangan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang luas dan mampu memberikan kesejahteraan bagi penduduk usia produktif. Selain ketersediaan lapangan pekerjaan, harus diimbangi pula dengan peningkatan keterampilan soft skill dan hard skill, baik melalui

pendidikan sekolah menengah vokasi, pelatihan tenaga kerja serta fasilitasi sertifikasi profesi tenaga kerja.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal penting dalam mewujudkan Transformasi Sosial menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam konteks tersebut, isu dan tantangan SDM yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Pada aspek kualitas pendidikan isu yang dihadapi mencakup kompetensi minimum pendidikan dan pendidikan karakter, lulusan pendidikan kejuruan (SMK) dan pelatihan vokasi yang siap berwirausaha dan bekerja bersama dunia usaha dan dunia industri, kurikulum yang relevan dan metode pengajaran yang efektif, serta materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu perlu didorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui pemerataan akses pendidikan untuk memastikan semua individu memiliki kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan wajib belajar 13 tahun. Perbaikan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai, subsidi pendidikan bagi kelompok kurang beruntung, mendorong pendidikan non formal, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta digitalisasi proses pembelajaran, serta memenuhi hak-hak disabilitas dengan meningkatkan sarana prasarana pendidikan sekolah inklusi. Upaya peningkatan kualitas dan akses yang merata dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Faktor lainnya yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan Adalah pemuda. Pemuda menjadi kunci sukses dalam memanfaatkan bonus demografi, karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi motor penggerak perubahan dan pembangunan di masa depan. Di bidang ekonomi, pemuda dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif, agen transformasi digital, wirausahawan, tenaga kerja terampil, dan konsumen cerdas. Kewirausahaan membantu pemuda menjadi mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Pemuda yang menjadi pengusaha muda (entrepreneur) memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan potensi ini, pemuda perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang tepat.

Sedangkan di bidang olahraga, pemuda memiliki peran penting dari menjadi atlet, pelatih, motivator, hingga pengelola dan pembina cabang

olahraga, yang dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan olahraga. Pemuda dapat menjadi agen perubahan dalam dunia olahraga, dengan mendorong inovasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas olahraga di berbagai bidang. Untuk mendukung prestasi pemuda dan olahraga maka perlu membangun sinergitas para pemuda, atlet, dan organisasi olahraga; menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat mulai dari desa, sekolah, dan instansi; memberikan apresiasi terhadap prestasi pemuda bidang akademik, seni, lingkungan, dan olahraga; serta membangun pusat olahraga berstandar internasional (Lampung *Sport Center*).

Berdasarkan publikasi Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024, status gizi masyarakat masih kurang baik ditandai dengan angka prevalensi stunting Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen, untuk itu perlu dilakukan konvergensi dari semua pihak yang dapat menurunkan prevalensi stunting melalui intervensi sensitif maupun intervensi spesifik. Tantangan lain di bidang kesehatan dalam menghadapi kondisi bonus demografi yang perlu mendapat perhatian diantaranya: peningkatan prevalensi penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes tipe 2, obesitas, dan kanker yang terjadi akibat perubahan gaya hidup dan kurangnya aktivitas fisik. Penduduk usia produktif sering menghadapi stres akibat tuntutan pekerjaan dan kehidupan dan berdampak pada kesehatan mental. Upaya lainnya adalah peningkatan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana untuk mendukung perencanaan keluarga dan kesehatan ibu. Disisi lain, kewaspadaan terhadap potensi kuncunya pandemi penyakit baru (*new emerging disease*) perlu terus dilakukan sekaligus perluasan cakupan vaksinasi dan pemantauan untuk penyakit menular seperti campak, polio, dan influenza. Untuk mendukung hal itu semua, peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan melalui pendirian dan peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C dan B di kabupaten/kota serta pengembangan teknologi kesehatan digital dan *telemedicine* sebagai potensi dalam mengatasi masalah kesehatan di masa mendatang.

Selain itu, proporsi penduduk lanjut usia (lansia) umur 60 tahun ke atas di tahun 2035 diproyeksikan akan mencapai 1,606 juta penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memasuki fase struktur umur penduduk menua, sehingga harus dipersiapkan dan diantisipasi melalui strategi menjelang “*aging population*” seperti penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki

usia lansia, serta pengembangan peluang kerja bagi lansia agar tetap produktif, penyelenggaraan program jaminan sosial secara konvergen dalam memberikan perlindungan dan jaminan hari tua bagi pekerja informal.

Keluarga berkualitas perlu dipersiapkan dalam menghadapi bonus demografi. Tantangan yang dihadapi mencakup: ketimpangan komunikasi dan kesehatan mental terhadap dinamika keluarga; keterbatasan ekonomi yang berdampak pada kualitas kehidupan keluarga; penentuan dan pembagian peran serta tanggung jawab secara adil dalam keluarga. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga juga menjadi ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda, maka dari itu Upaya yang perlu dilakukan melalui penguatan ketahanan keluarga untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi tantangan dan perubahan, baik secara fisik, ekonomi, sosial, maupun psikologis, agar tetap harmonis dan sejahtera. Salah satu bentuknya adalah membudayakan keluarga inti harmonis serta meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan pranata sosial budaya yang tangguh.

2.3.2.3.8 Peran Iptek dan Inovasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Peran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptek dan Inovasi) menjadi katalis strategis bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang inklusif dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital secara massif diperlukan untuk mendorong produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, industri kreatif, dan UMKM, sekaligus meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi. Lampung memiliki potensi besar sebagai daerah inovatif, sebagaimana tercermin dalam penggunaan teknologi tepat guna di desa, tumbuhnya layanan teknologi informasi di wilayah perkotaan, dan berbagai inovasi lokal yang dikembangkan melalui perguruan tinggi serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Namun, pengembangan ekosistem inovasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan industri, keterbatasan insentif bagi riset yang aplikatif, serta rendahnya tingkat adopsi dan komersialisasi hasil inovasi.

Menjawab tantangan tersebut, penguatan kapasitas sumber daya manusia berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak, didukung oleh regulasi yang adaptif, pendanaan inovasi yang berkelanjutan, serta pengembangan pusat kreativitas dan inkubasi inovasi daerah. Penerapan konsep desa cerdas dan hilirisasi komoditas unggulan berbasis teknologi juga menjadi bagian dari

strategi transformasi struktural daerah. Inovasi harus ditempatkan bukan sekadar sebagai instrumen peningkatan daya saing, tetapi sebagai fondasi pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta menopang ketahanan ekonomi jangka panjang.

2.3.2.3.9 Belum Optimalnya Pelestarian Nilai Religi, Budaya, dan Nasionalisme sebagai Modal Sosial dalam Mendukung Stabilitas, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Provinsi Lampung sebagai wilayah dengan karakter masyarakat yang multietnis, multikultural, dan multiagama memiliki kekayaan sosial budaya yang sangat potensial dalam mendukung terwujudnya kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Keberagaman ini menjadi kekuatan apabila dikelola secara bijaksana melalui penguatan nilai-nilai religiusitas, adat istiadat, serta semangat kebangsaan yang telah mengakar kuat di berbagai komunitas. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang inklusif, toleran, dan taat hukum, sekaligus menjadi modal sosial strategis dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pelestarian nilai religi, budaya, dan nasionalisme sangat penting sebagai modal sosial untuk pembangunan, karena nilai-nilai ini membentuk karakter bangsa, mendorong toleransi, dan memperkuat persatuan, yang semuanya mendukung stabilitas dan kemajuan nasional. Nilai religius yang dipedomani pada seluruh lingkup kehidupan masyarakat akan tercermin dari budaya dan kehidupan bermasyarakat, hal ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan karena merupakan modal sosial yang sangat mendasar sebagai pilar karakter bangsa yang mampu memperkuat persatuan dan stabilitas sosial.

Di Lampung, pelestarian ini tercermin dari berbagai upaya seperti penguatan keimanan melalui kegiatan keagamaan, pelestarian tradisi adat, pengusulan cagar budaya, penggunaan aksara dan bahasa Lampung di ruang publik, hingga sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan semangat "Lampung Bersama", yang dapat diperkuat melalui revitalisasi nilai-nilai lokal seperti "Piil Pesenggiri" sebagai prinsip hidup orang Lampung, serta pendekatan budaya Sakai Sambayan yang menumbuhkan solidaritas dan semangat gotong royong antarwarga. Penyelenggaraan festival seni, revitalisasi sarana budaya, dan penguatan kelembagaan adat menjadi bagian penting dari strategi

pembangunan kebudayaan (sanggar, balai desa, perguruan silat, Lembaga adat) yang inklusif dan berdaya tahan.

Kondisi penduduk Lampung yang majemuk dan sangat heterogeny dengan beragam sosial dan budaya memiliki kerentanan mengalami konflik antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) secara vertikal maupun horizontal. Kemajemukan sosial budaya menyimpan potensi konflik SARA yang perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan stabilitas politik serta keamanan daerah. Kerentanan ini dapat diperburuk oleh faktor eksternal seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, dan tingginya pengangguran, yang mendorong timbulnya tindakan kriminal dan penyalahgunaan sosial. Oleh karena itu, stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibumlinmas) harus menjadi prasyarat utama dalam menciptakan ruang hidup yang aman, harmonis, dan terlindungi, guna mendukung iklim pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

2.3.2.3.10 Belum Optimalnya Mitigasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan yang Berdampak pada Kualitas Lingkungan Hidup

Provinsi Lampung menghadapi tekanan serius terhadap kualitas lingkungan hidup akibat dampak perubahan iklim dan meningkatnya intensitas bencana. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 menunjukkan angka 73,11 (kategori baik), capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Indeks Kualitas Air (IKA) masih berada pada kategori sedang (62,97) akibat pencemaran limbah domestik dan pertanian, sementara Indeks Kualitas Lahan menunjukkan angka yang memprihatinkan (38,49), mencerminkan masifnya alih fungsi kawasan lindung dan praktik pemanfaatan tanah yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini mengancam daya dukung dan daya tampung lingkungan, menurunkan produktivitas lahan, serta meningkatkan kerentanan ekologis masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah pedesaan dan pesisir.

Perubahan iklim memperparah kondisi tersebut melalui peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan pergeseran musim yang berdampak pada kekeringan, gagal panen, dan penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Emisi gas rumah kaca dari sektor-sektor utama seperti pertanian, energi, dan peternakan terus meningkat, termasuk kontribusi signifikan gas metana dari 775.000 ekor sapi potong yang mencapai 96.000 ton per tahun. Sementara itu, potensi penyerapan karbon dari kawasan pesisir seluas ±39.200 hektar (mangrove, lamun, rawa) belum dimanfaatkan secara optimal sebagai

penyeimbang emisi. Apabila tidak diintervensi, akumulasi emisi ini akan mendorong peningkatan suhu rata-rata Lampung dan berdampak sistemik terhadap kesehatan, ekonomi, dan kelestarian ekosistem.

Di sektor kelautan, praktik ilegal seperti illegal fishing yang menggunakan alat tangkap merusak, seperti bom dan pukat harimau, turut mempercepat degradasi lingkungan laut. Kerusakan terumbu karang, berkurangnya populasi ikan, serta hilangnya habitat biota laut berdampak langsung pada keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan ketahanan ekosistem pesisir terhadap bencana. Reklamasi pesisir yang tidak terkontrol juga memperburuk kondisi, karena mengorbankan hutan mangrove—pelindung alami dari badai dan abrasi—dan memicu pencemaran serta konflik sosial akibat terganggunya ruang hidup masyarakat pesisir. Jika dibiarkan, kedua praktik ini akan mempercepat krisis ekologis di wilayah pesisir dan memperbesar risiko bencana lingkungan jangka panjang.

Di sisi lain, tekanan kebencanaan yang meningkat signifikan—di mana 43% kejadian bencana dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren kenaikan—menambah kompleksitas tantangan lingkungan di Lampung. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi, diperparah dengan kerentanan geologis akibat posisi Lampung yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau, Gunung Rajabasa, dan zona sesar aktif. Khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung, frekuensi dan dampak banjir yang semakin tinggi menuntut upaya pengendalian banjir yang lebih intensif, karena telah mengganggu aktivitas masyarakat, merusak infrastruktur, dan meningkatkan potensi kerugian sosial-ekonomi. Selain merusak infrastruktur dan mengancam keselamatan jiwa, rangkaian bencana ini mempercepat pencemaran dan degradasi kualitas air serta tanah yang berdampak pada ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Menghadapi ancaman ganda dari perubahan iklim dan kebencanaan, Provinsi Lampung membutuhkan pendekatan pembangunan yang integrative dan berkelanjutan. Kebijakan mitigasi perubahan iklim harus dipadukan dengan strategi adaptasi berbasis komunitas dan penguatan system peringatan dini. Pengendalian emisi, pelestarian kawasan lindung, percepatan transisi menuju energi bersih, serta pengembangan ekonomi rendah karbon menjadi langkah krusial agar pembangunan tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga tangguh dalam menjaga keberlanjutan ekologis dan ketahanan lingkungan hidup jangka panjang.

2.3.2.3.11 Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang Belum Optimal

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan menekankan pada transparansi, efisiensi, dan integritas. Provinsi Lampung saat ini telah mencapai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,68 dengan kategori “A”, sebuah capaian positif yang mencerminkan keberhasilan penguatan kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM aparatur, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik. Capaian ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui Penguatan birokrasi yang berintegritas di Provinsi Lampung, antara lain melalui: menguatkan jejaring kerjasama antar kota/kabupaten; memperkuat instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif; percepatan peran pemerintah daerah dalam intermediasi sektor keuangan pada sektor prioritas; pengembangan MPP (Mal Pelayanan Publik) yang memungkinkan masyarakat lebih mudah dalam pengajuan perizinan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, retribusi, dan layanan lainnya dilakukan secara online melalui portal resmi pemerintah daerah; Optimalisasi fungsi hotline atau aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital; serta mengadakan forum dialog publik secara rutin untuk membahas perkembangan pembangunan daerah serta mendengarkan masukan dari masyarakat.

Namun demikian, pengendalian fraud di berbagai level pemerintahan masih menjadi tantangan yang belum tertangani secara sistematis. Di Tingkat pemerintah daerah, belum tersedia standar operasional prosedur (SOP) yang komprehensif dalam aspek pencegahan, deteksi, dan respon terhadap *fraud*. Sistem *whistleblowing* pun belum berjalan optimal karena lemahnya perlindungan bagi pelapor. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya monitoring dan evaluasi atas kegiatan antikorupsi, sehingga efektivitas implementasinya tidak terukur dengan baik. Masalah ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih kuat serta sistem pengawasan berbasis risiko yang terintegrasi.

Keterbatasan kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengelola risiko fraud dan melakukan pencegahan menjadi penghambat dalam menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel. Di tingkat desa, tantangan semakin kompleks karena masih kuatnya intervensi kepala desa, lemahnya pengawasan oleh BPD dan APIP daerah, serta ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan BUMDes. Banyak BUMDes juga

menjalankan usaha tanpa analisis potensi desa yang matang, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kegagalan bisnis.

Di sisi lain, kelembagaan BUMD menghadapi berbagai hambatan struktural seperti lemahnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah, ketiadaan satuan pengawas internal, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya komitmen pimpinan terhadap integritas serta prinsip *good corporate governance*. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan pentingnya reformasi pengawasan dan penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh agar pengelolaan dana publik dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berintegritas, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan BUMD.

2.3.2.3.12 Belum Optimalnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Bagi Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Terlantar

Dalam konteks pembangunan daerah, “*No One Left Behind*” atau “tidak ada satu pun yang tertinggal” menjadi target utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang tidak hanya mencerminkan komitmen global, tetapi juga menjadi prinsip moral dan strategi pembangunan yang mengutamakan keadilan sosial dan inklusivitas di Provinsi Lampung. Prinsip tersebut mengamanatkan bahwa seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, harus menjadi bagian dari pembangunan yang turut merasakan hasilnya dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang masih terjadi terutama terhadap kelompok-kelompok rentan yang mencakup anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan kelompok terlantar atau dikenal juga dengan istilah GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*) atau kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

Kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi Lampung pada tahun 2022 diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA), yang menunjukkan angka capaian sebesar 64,78. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak belum sepenuhnya optimal, mengingat angka tersebut masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2020–2024, yaitu sebesar 69,57 untuk tahun 2022. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sinergi lintas sektor serta penguatan program dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemenuhan hak anak guna mencapai target yang telah direncanakan.

Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah dituntut memperkuat sistem perlindungan sosial dan memastikan akses setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peradilan, serta membangun sistem pembangunan yang berpihak kepada kelompok yang paling membutuhkan. Hal ini hanya dapat dicapai melalui ketersediaan data terpilah yang akurat, kebijakan yang responsif terhadap gender dan disabilitas, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Pendekatan partisipatif dan berbasis data menjadi kunci dalam memastikan bahwa program pembangunan menjangkau dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, Pemenuhan hak Penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dapat dilakukan melalui perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang selaras dengan pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus perlindungan sosial diantaranya untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga kesinambungan kesejahteraan melalui bantuan sosial, tanggap risiko bencana alam dan non alam, layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi para penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok terlanjar serta hunian yang layak dan terjangkau.

2.3.2.4 Isu Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan

2.3.2.4.1 Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Lampung Selatan memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, mulai dari pantai, pulau, hingga warisan budaya masyarakat adat. Untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan daya saing daerah, pariwisata dikembangkan dengan pendekatan regeneratif, yakni pariwisata yang tidak hanya melestarikan, tetapi juga memulihkan lingkungan dan memperkuat nilai-nilai lokal. Komunitas dilibatkan aktif dalam pengelolaan destinasi, pengembangan ekonomi kreatif, serta promosi budaya melalui desa wisata dan ekowisata.

Sebagai penguatan identitas daerah, *city branding* Lampung Selatan diarahkan pada penciptaan citra yang menggambarkan harmoni antara alam, budaya, dan masyarakat. *Branding* ini diwujudkan melalui slogan, desain visual destinasi, kampanye digital, dan festival budaya yang konsisten mempromosikan kekhasan daerah. Sinergi antara pariwisata regeneratif dan *city branding* diharapkan menjadikan Lampung Selatan sebagai destinasi unggulan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Pembangunan Kawasan Pariwisata Terintegrasi rencananya akan dibangun pada tiga klaster utama, yaitu daerah Bakauheni, Kalianda, dan Rajabasa (Pulau Sebesi, Sebuk, dan Krakatau). Pengembangan kawasan pariwisata Nasional tepatnya di Desa Bakauheni Lampung Selatan. Kepemilikan lahan di wilayah Bakauheni untuk pengembangan awal memiliki total luasan 175,9 hektar, dengan rincian Pemerintah Provinsi memiliki lahan seluas 15,1 Hektar, PT. ASDP 69,8 hektar, dan PT. Hutama Karya memiliki lahan seluas 91 hektar. Rencana pengembangan kawasan diproyeksikan mencapai 251 Ha.

2.3.2.4.2 Demokrasi

Berdasarkan data nasional, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung umumnya berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2022, misalnya, IDI Lampung mencapai 66,72 (kategori "sedang"), lebih rendah dibandingkan angka nasional yang berada di 73,04. Sementara itu, Kabupaten Lampung Selatan sendiri pada tahun 2021 tercatat memiliki IDI sebesar 64,50, sedikit di bawah rata-rata provinsi. Angka ini mengindikasikan bahwa demokrasi di Provinsi Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek kebebasan sipil, partisipasi politik, dan hak-hak warga negara.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya indeks demokrasi di Lampung Selatan antara lain tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik yang masih terbatas, maraknya praktik politik uang selama pemilihan umum, serta keterbatasan akses informasi di daerah pedesaan. Selain itu, partisipasi perempuan dalam ranah politik juga relatif rendah, menunjukkan perlunya peningkatan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan.

Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat sendiri. Peningkatan pendidikan politik, penguatan peran media, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pemilu bisa menjadi langkah awal. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi demokrasi di kabupaten ini dapat dilakukan secara lebih efektif ke depannya.

2.3.2.4.3 Pemerintahan

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya

manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju *agile governance*. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta dapat adaptif dengan perubahan yang dinamis. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Perubahan reformasi birokrasi, meliputi reformasi birokrasi general dan tematik yang terdiri dari meningkatkan mental aparatur (terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel); Organisasi (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran); Tata laksana (sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*); Peraturan perundang-undangan (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif); Sumber daya manusia aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera); Pengawasan (meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN); Akuntabilitas (meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi); Pelayanan publik (pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat).

2.3.2.4.4 Sumber Daya Manusia

Kabupaten Lampung Selatan menghadapi tantangan strategis dalam pembangunan SDM yang terlihat dari tren partisipasi pendidikan dalam lima tahun terakhir. Data menunjukkan gejala mengkhawatirkan dimana APK SD mengalami penurunan dari 104,86 (2019) menjadi 102,17 (2021), sementara APK SMP turun lebih drastis dari 93,54 (2019) menjadi 84,74 (2023). Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam akses pendidikan dasar dan menengah pertama, diduga kuat akibat faktor ekonomi keluarga, kurang menariknya kualitas pembelajaran, dan maraknya pekerja anak di sektor informal.

Di sisi lain, peningkatan APK SMA/MA dari 74,8 (2019) menjadi 81,61 (2023) patut disikapi secara kritis. Meski menunjukkan kemajuan, angka ini masih jauh dari ideal dan belum berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas SDM, terbukti dari IPM yang stagnan di angka 64,7. Masalah utama terletak pada rendahnya proporsi lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi (hanya 20%) dan ketidaksesuaian kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan industri.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi terpadu yang mencakup: (1) program retensi siswa berbasis data real-time untuk jenjang SD-SMP, (2) revitalisasi SMK melalui penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri lokal, dan (3) penguatan sistem beasiswa berkelanjutan. Yang tak kalah penting adalah sinergi lintas sektor antara dinas pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pendidikan berkualitas. Tanpa langkah strategis ini, Lampung Selatan berisiko tertinggal dalam menyongsong bonus demografi.

Selain itu, Kabupaten Lampung Selatan menghadapi tiga tantangan strategis utama dalam pembangunan SDM berdasarkan tren partisipasi pendidikan lima tahun terakhir. Pertama, meskipun angka partisipasi sekolah dasar (usia 7-12 tahun) relatif stabil di kisaran 99,7-100%, stagnansi ini justru mengkhawatirkan karena menunjukkan belum tercapainya universalitas pendidikan dasar secara optimal. Kedua, partisipasi sekolah menengah pertama (usia 13-15 tahun) menunjukkan fluktuasi dengan titik terendah 93,31% (2021) sebelum meningkat signifikan menjadi 98,23% (2024), yang mengindikasikan adanya kerentanan dalam transisi dari SD ke SMP. Ketiga, partisipasi sekolah menengah atas (SMA/MA) meskipun terus meningkat dari 65,90% (2020) menjadi 72,36% (2023-2024), tetap menjadi concern serius karena masih terdapat sekitar 27% remaja usia SMA yang tidak terlayani pendidikan.

Situasi ini diperparah oleh beberapa faktor kritis: (1) peningkatan partisipasi SMP di tahun 2024 belum tentu berkelanjutan tanpa intervensi sistematis, (2) gap yang masih lebar antara partisipasi SMP (98,23%) dan SMA (72,36%) menunjukkan tingginya angka putus sekolah setelah menyelesaikan pendidikan dasar, serta (3) kualitas pembelajaran yang perlu ditingkatkan untuk memastikan outcome pendidikan sejalan dengan investasi yang telah dilakukan. Tantangan utama yang harus segera diatasi meliputi: penguatan program wajib belajar 12 tahun, peningkatan akses pendidikan menengah di daerah terpencil, dan penyediaan alternatif pendidikan vokasi bagi remaja yang

tidak melanjutkan ke SMA. Tanpa penanganan menyeluruh, Kabupaten Lampung Selatan berisiko mengalami pemborosan sumber daya manusia dan kehilangan momentum bonus demografi.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang menjadi prioritas dalam menanggulangi masalah ketimpangan pendidikan yang juga menjadi isu prioritas pengembangan pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan diantaranya adalah Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Kebijakan ini untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

2.3.2.4.5 Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Lampung Selatan, menciptakan keseimbangan pembangunan melalui pemenuhan dan peningkatan penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik) secara merata, meningkatkan daya tarik investasi daerah dan mampu mempercepat pertumbuhan wilayah terutama pada kawasan pengembangan pariwisata, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan produktivitas pertanian dan kawasan kumuh. Pembangunan infrastruktur dalam rangka memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan harus memperhatikan aspek potensi ekonomi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan serta mempermudah aktivitas masyarakat untuk mengakses fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, keuangan serta memperlancar alur pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.

Selain itu, untuk pengembangan wilayah khususnya dikawasan perbatasan perlu menjadi perhatian khusus agar mampu menangkap peluang menjadi *buffer area* yang menampung luberan aktivitas ekonomi wilayah kabupaten yang berbatasan. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan kedepan mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang selama ini masih terpusat di beberapa wilayah Kabupaten Lampung Selatan, seperti di Natar, Kalianda dan sekitarnya.

Kabupaten Lampung Selatan menghadapi tantangan serius dalam konektivitas infrastruktur yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Meskipun wilayah ini menjadi pintu

gerbang utama Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni—yang melayani lebih dari 14 juta penumpang dan 3,5 juta kendaraan per tahun (BPS, 2023)—infrastruktur pendukungnya masih belum memadai. Hal ini membuktikan bahwa Pelabuhan Bakauheni sebagai simpul strategis Nasional yang terhubung dengan Jalan Tol, Kereta Api dan Pelabuhan Logistik. Ruas Jalan Lintas Sumatera (JLS) di Lampung Selatan sering mengalami kemacetan parah, terutama saat arus mudik, dengan tingkat kepadatan mencapai 3-4 kali kapasitas normal (Kementerian PUPR, 2023). Sementara itu, sekitar 35% jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak atau tidak memadai (Dinas PU Lampung Selatan, 2023), menghambat distribusi logistik dan aksesibilitas wilayah pedesaan.

Selain itu, keterbatasan moda transportasi umum menjadi masalah, karena rasio angkutan umum terhadap jumlah penduduk hanya 1:5.000 (Dishub Lampung Selatan, 2023), jauh di bawah standar ideal. Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (yang ditargetkan rampung 2024) diharapkan dapat mengurangi beban JLS, namun keterlambatan pembebasan lahan dan pendanaan masih menjadi kendala. Jika isu ini tidak segera diatasi, kerugian ekonomi akibat inefisiensi logistik di Lampung Selatan diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun per tahun (Kadin Lampung, 2023), sekaligus menghambat potensi pariwisata dan investasi di daerah ini.

Selain itu, Saat ini di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat isu proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang rencananya akan menjadi Kabupaten Bandar Negara. Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk mempermudah pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pembentukan Kabupaten Bandar Negara ini melibatkan lima kecamatan yang akan memisahkan diri dari 12 kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Kelima kecamatan ini dianggap memiliki potensi yang besar untuk berkembang secara mandiri. Dengan pemekaran wilayah, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Kelima kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Jati Agung, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari. Kelima kecamatan ini dianggap memiliki potensi yang besar untuk berkembang secara mandiri. Dengan pemekaran wilayah, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.3.2.4.6 Ekonomi

Kabupaten Lampung Selatan menghadapi beberapa tantangan strategis dalam pembangunan ekonomi yang memerlukan penanganan khusus. Pertama, ketergantungan berlebihan pada sektor primer (pertanian dan perikanan) yang menyumbang lebih dari 35% PDRB, namun rentan terhadap fluktuasi harga dan dampak perubahan iklim. Kedua, industri pengolahan yang belum berkembang optimal, ditunjukkan oleh kontribusi sektor industri pengolahan yang masih di bawah 15% terhadap PDRB, padahal wilayah ini memiliki potensi bahan baku pertanian dan perikanan melimpah.

Lebih lanjut, potensi pariwisata bahari yang belum termanfaatkan dampak ekonominya secara maksimal meski memiliki garis pantai terpanjang di Lampung. Kunjungan wisatawan hanya tumbuh rata-rata 5% per tahun, jauh di bawah potensi sebenarnya. Terakhir, kesenjangan pembangunan antarwilayah dimana pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di kawasan pesisir, sementara wilayah timur relatif tertinggal.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi terpadu: (1) pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan (udang, kopi, kelapa), (2) percepatan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, (3) peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi, (4) penguatan ekonomi kreatif dan pariwisata bahari, serta (5) pemerataan pembangunan melalui penguatan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah tertinggal.

Upaya hilirisasi sektor pertanian memegang peranan krusial dalam meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Strategi ini berfokus pada pengolahan bahan baku pertanian menjadi produk bernilai lebih tinggi, bukan hanya menjualnya dalam bentuk mentah. Salah satu langkah konkret adalah mendorong industri pengolahan pangan, seperti pabrik pengolahan kopi, kakao, kelapa sawit, buah-buahan, dan sayuran. Dengan mengolah komoditas ini menjadi produk jadi seperti bubuk kopi instan, cokelat batangan, minyak goreng kemasan, jus buah, atau makanan olahan, petani tidak hanya mendapatkan harga jual yang lebih baik tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru di sepanjang rantai pasok.

Selain itu, mengingat peran Kabupaten Lampung Selatan sebagai lumbung pangan Provinsi Lampung dan Nasional maka upaya peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi isu prioritas daerah. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam mengembangkan pertanian cerdas (*smart farming*) yang akan menjadi percontohan untuk wilayah lain di Lampung Selatan.

Lebih lanjut, Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dimana perlu adanya kajian pangan berbasis potensi sumber daya lokal di wilayah masing masing dalam rangka identifikasi potensi sumber daya lokal dan pemetaan kelayakan pangan lokal sebagai komponen cadangan pangan dan bantuan pangan di Kabupaten Lampung Selatan. Optimalisasi kegiatan percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal sangat diperlukan dalam rangka memperkuat dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memproduksi olahan dari bahan lokal demi mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. Definisi Ketahanan Pangan menurut UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam memetakan kondisi ketahanan dan dan kerentanan pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan setiap tahunnya membuat Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan (*Food Security and Vulnerability Atlas/ FSVA*).

Terdapat 3 Pilar Ketahanan Pangan yaitu :

1. Ketersediaan
 - a. Produksi pangan
 - b. Stok /Cadangan pangan
 - c. Ekspor-Import
2. Keterjangkauan
 - a. Distribusi
 - b. Stabilisasi pasokan dan harga
 - c. Manajemen stok
 - d. Daya beli Masyarakat
 - e. Akses terhadap pasar dan informasi
3. Pemanfaatan
 - a. Perbaikan pola konsumsi

- b. Penganekaragaman konsumsi
- c. Perbaikan gizi
- d. Keamanan dan mutu pangan

Ketiga pilar ini dapat mendukung strategi ketahanan pangan di Lampung Selatan. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal;
- b. Pembukaan lahan pertanian-pertanian baru;
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan;
- e. Pemerataan ketersediaan tenaga kesehatan;

Tabel II.118 Skor Pola Pangan Harapan dan Angka Kecukupan Gizi

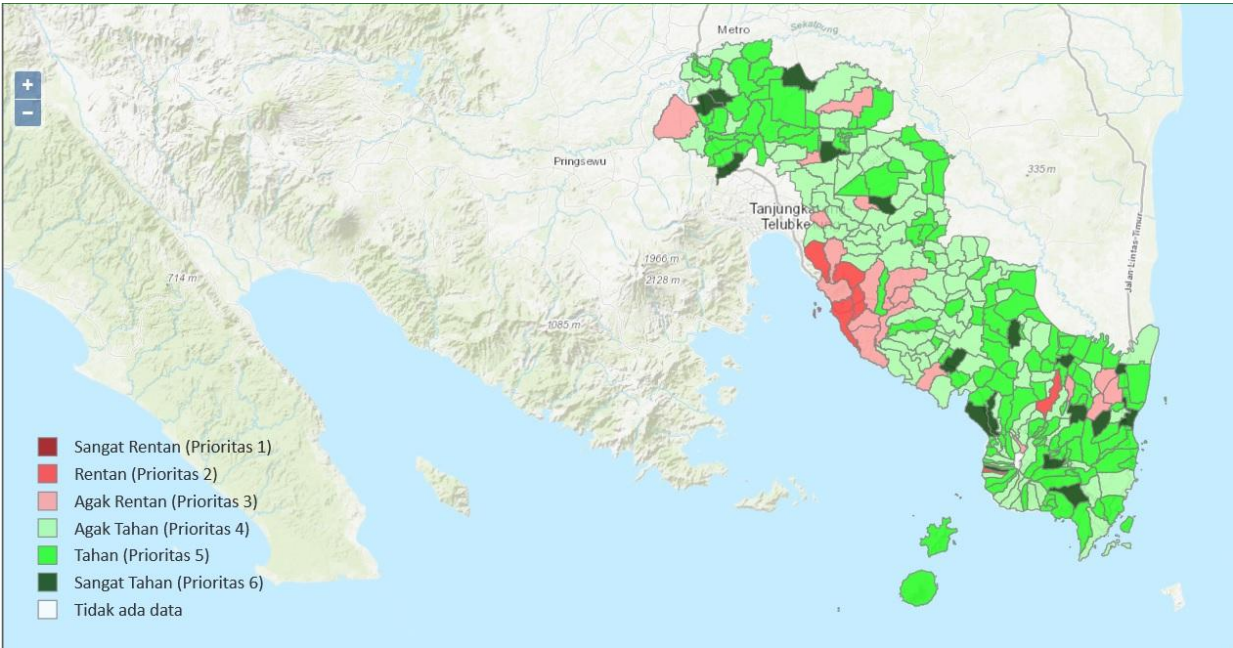
Tahun	Score PPH	Kecukupan Kalori/Energi (2100 kkal) Kal/kapita/hari	Kecukupan Protein (57 gram protein) Kons. Protein/kapita/hari
2020	85,9	2.077,82	59,32
2021	91,2	1.999,57	56,92
2022	91,8	2.167,98	61,27
2023	94,8	1.740,76	58,70
2024	92,8	1.994,10	57,29

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan data yang tersaji, terlihat fluktuasi dalam kecukupan pangan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, tingkat kecukupan kalori mencapai 2.077,82 kkal/kapita/hari dengan konsumsi protein 59,32 gram/kapita/hari, melebihi standar kecukupan nasional (2.100 kkal dan 57 gram protein). Namun, terjadi penurunan signifikan di tahun 2021 dimana kecukupan kalori turun menjadi 1.999,57 kkal dan protein menjadi 56,92 gram, meskipun skor PPH mencapai 91,2 yang menunjukkan keragaman pangan yang baik. Pemulihan terjadi di tahun 2022 dengan peningkatan kecukupan kalori menjadi 2.167,98 kkal dan protein 61,27 gram, disertai peningkatan skor PPH menjadi 91,8. Namun, tahun 2023 menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan dengan penurunan drastis kecukupan kalori menjadi 1.740,76 kkal (di bawah standar), meskipun skor PPH mencapai titik tertinggi (94,8). Di tahun 2024, terjadi perbaikan moderat

dengan kecukupan kalori 1.994,10 kkal dan protein 57,29 gram, sementara skor PPH sedikit menurun menjadi 92,8.

Gambar II.63 Peta FSVA Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Cadangan pangan pemerintah dapat dicerminkan melalui jumlah lumbung dan kapasitasnya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, data jumlah lumbung dan kapasitasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.119 Jumlah Lumbung dan Kapasitasnya menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan	Jumlah Lumbung		Kapasitas		Kondisi Baik		Kondisi Rusak Ringan	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Natar	23	24	345	445	11	13	12	11
Jati Agung	8	8	80	80	6	6	2	2
Tanjung Bintang	13	13	130	130	5	5	8	8
Tanjung Sari	2	2	30	30	2	2	-	-
Katibung	4	6	60	60	3	4	1	2
Merbau Mataram	6	4	60	60	4	3	2	1
Way Sulan	8	11	120	165	5	6	3	5
Sidomulyo	14	8	280	120	7	5	7	3
Candipuro	9	9	180	180	6	6	3	3
Way Panji	11	14	165	280	6	8	5	6
Kalianda	16	17	320	420	8	10	8	7
Rajabasa	1	1	15	15	1	1	-	-
Palas	25	26	750	850	14	16	11	10
Sragi	5	5	100	100	4	4	1	1
Penengahan	3	3	45	45	3	3	-	-
Ketapang	5	5	100	100	4	4	1	1
Bakauheni	3	3	30	30	2	2	1	1
Lampung Selatan	156	159	2.810	3.110	91	98	65	61

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 terdapat Prioritas Nasional nomor 2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Sasaran dalam RPJMN antara lain meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus) dengan arah kebijakannya swasembada pangan. Terdapat 8 Program hasil terbaik cepat (*quick wins*) dalam RPJMN yang mana terdapat 2 program khusus pangan yang dapat diterapkan di Kabupaten diantaranya :

1. Memberi makan gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional

Sinergitas antara Program, Kebijakan, Sasaran di RPJMN dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan diharapkan akan menjadi instrumen untuk menjadikan Lampung Selatan Maju Ketahanan Pangan.

Selain itu, penguatan komoditas unggulan dilakukan melalui pendekatan terpadu. Untuk sektor kelautan, strategi mencakup revitalisasi tambak tradisional, pengembangan *cold chain system*, dan pembangunan infrastruktur pengamanan pantai. Kawasan komoditas unggulan ekonomi biru pesisir timur Lampung, terdapat beberapa highlight intervensi yang dilakukan yaitu:

- a. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap;
- b. Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya;
- c. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat.

2.3.2.4.7 Daya Saing Daerah

Kabupaten Lampung Selatan mencatat pencapaian signifikan dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 dengan skor 3,54, melampaui rata-rata nasional dan Provinsi Lampung. Capaian ini mencerminkan kemajuan dalam produktivitas dan efisiensi pembangunan daerah. Namun, untuk memastikan keberlanjutan daya saing, diperlukan kajian mendalam terhadap isu-isu strategis yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kapasitas inovasi di masa depan. Pencapaian saat ini harus

menjadi landasan untuk memperkuat pondasi daya saing sekaligus mengatasi tantangan struktural yang masih menghambat potensi optimalisasi pembangunan daerah.

Salah satu isu kritis yang perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi pilar-pilar daya saing yang belum merata. Meskipun skor IDSD secara keseluruhan tinggi, kemungkinan terdapat disparitas antarpilar, seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), atau kapasitas inovasi. Misalnya, jika pilar infrastruktur masih tertinggal, hal ini dapat menghambat distribusi ekonomi dan akses pasar. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan menyeluruh untuk mengidentifikasi pilar mana yang masih lemah sehingga intervensi kebijakan dapat lebih terfokus dan efektif. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan, listrik, dan konektivitas digital, harus dipercepat untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor unggulan.

Isu strategis kedua adalah peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi. Skor IDSD yang tinggi belum tentu mencerminkan kedalaman inovasi di Lampung Selatan. Masih terdapat tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi di sektor usaha mikro dan kecil (UMK), minimnya kolaborasi antara pelaku industri dengan lembaga riset, serta terbatasnya anggaran penelitian dan pengembangan (R&D). Untuk memperkuat daya saing jangka panjang, pemerintah daerah perlu mendorong ekosistem inovasi melalui insentif bagi pelaku usaha yang mengadopsi teknologi, memperkuat pendidikan vokasi, dan membangun pusat inovasi yang terhubung dengan kebutuhan industri. Sinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga dapat diperkuat untuk mendorong transfer pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, pemerataan pembangunan antarkawasan menjadi tantangan yang tidak boleh diabaikan. Capaian IDSD yang tinggi mungkin terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah tertinggal masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi dan layanan dasar. Jika tidak ditangani, kesenjangan ini dapat memicu ketimpangan sosial dan mengurangi dampak positif pertumbuhan ekonomi. Strategi yang dapat dilakukan antara lain penguatan kawasan ekonomi lokal, peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha di daerah terpencil, serta pembangunan infrastruktur yang inklusif. Program seperti smart village atau pengembangan klaster industri berbasis potensi lokal dapat menjadi solusi untuk mendorong pertumbuhan yang merata.

Terakhir, sinergi kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat harus diperkuat untuk memastikan bahwa peningkatan daya saing selaras

dengan agenda pembangunan nasional. Misalnya, kebijakan industri, perdagangan, dan ketenagakerjaan di Lampung Selatan perlu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam hal pendanaan, regulasi, dan dukungan teknis akan mempercepat pencapaian target daya saing. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, Lampung Selatan tidak hanya dapat mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan daya saing tinggi, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel II.120 Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Pertanian & Perkebunan: Komoditas unggulan padi, lada, kopi, dan kelapa.	Degradasi Lingkungan: Alih fungsi lahan pertanian, deforestasi, abrasi pantai.	Tata Ruang Tidak Berkelanjutan: Konversi lahan produktif ke tambang/perkebunan monokultur.	- Perubahan iklim ancam produktivitas pertanian & pesisir.	- Kontribusi ketahanan pangan nasional (beras, ikan).	- Integrasi ekonomi dengan Prov. Lampung & Sumsel.	- Revitalisasi lahan pertanian & diversifikasi komoditas.
Perikanan & Kelautan: Potensi budidaya udang, ikan tangkap, dan rumput laut.	Ekonomi Lemah: Ketergantungan pada komoditas primer, nilai tambah industri rendah.	Kerusakan Ekosistem Pesisir: Penurunan luas mangrove & overfishing.	Negara dengan deforestasi tertinggi: Indonesia, Brasil, Malaysia, dan Myanmar.	Indonesia kehilangan 40% mangrove sejak 1980 (KLHK), tercepat di dunia, dan Overfishing: 55% stok ikan Indonesia sudah fully exploited/overexploited (KKP).	Mangrove Lampung berkurang dari 32.000 ha (1990) menjadi ±18.000 ha (2023) karena alih fungsi tambak dan pemukiman dan Overfishing di Selat Sunda menyebabkan turunnya tangkapan ikan pelagis (tenggiri, tongkol).	- Pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan.
Pariwisata Alam: wisata pantai, dan budaya lokal.	Infrastruktur Terbatas: Akses air bersih, listrik, dan jalan pedalaman belum merata.	Risiko Bencana: Tsunami, banjir bandang, dan longsor.	memperbaiki sistem peringatan dini, dan meningkatkan mitigasi bencana, termasuk pembangunan infrastruktur seperti tembok laut raksasa	Indonesia terletak di "Cincin Api Pasifik", yang membuatnya rentan terhadap gempa bumi dan tsunami.	Wilayah pesisir Lampung, terutama di Kabupaten Lampung Selatan, rawan tsunami akibat aktivitas di Selat Sunda. Tsunami terakhir yang terjadi di Lampung adalah pada tahun 2018, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan.	- Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.
Infrastruktur Strategis: Pelabuhan Bakauheni (gerbang Sumatra-Jawa) dan jalur lintas selatan Sumatra.	SDM Rendah: Angka kemiskinan & stunting tinggi, akses pendidikan terbatas.	Pencemaran Lingkungan: Limbah tambang & pertanian (pestisida).	pemanasan global, polusi plastik, dan kehilangan keanekaragaman hayati, yang saling terkait dan berdampak pada kelangsungan hidup di Bumi.	pencemaran udara, air, tanah, dan laut, serta dampak perubahan iklim. Pencemaran industri, limbah pertanian, sampah plastik, dan kebakaran hutan merupakan faktor utama penyebabnya.	pencemaran air laut, sungai, dan tanah, serta masalah sampah, terutama plastik dan mikroplastik. Beberapa penyebab utama pencemaran di Lampung termasuk limbah industri, pembuangan sampah tidak bertanggung jawab, dan kegiatan pertambangan.	- Pengembangan energi terbarukan (surya, bayu).
SDA Tambang: Galian C, dan mineral lain.	Konflik Lahan: Pertambangan vs. lahan pertanian/pemukiman .	Pengelolaan SDA: Eksploitasi berlebihan & dampak sosial.	perubahan iklim, krisis air, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, dan limbah	degradasi daerah aliran sungai, eksploitasi air tanah yang tak terkendali, konservasi lahan, ketersediaan infrastruktur yang belum memadai, konflik penggunaan air, keterbatasan pemahaman publik, dan korupsi	Lampung memiliki potensi SDA yang melimpah, seperti hasil pertanian (padi, singkong, kopi, lada), sumber daya air, dan potensi kelautan. Namun, pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	- Penegakan hukum lingkungan di sektor tambang.

Sumber : Data Diolah, 2025

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Lampung Selatan periode 2025-2029 adalah ***“Mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***. Secara filosofis, visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lampung Selatan Maju

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata “maju” merujuk pada membawa ke dalam keadaan yang lebih baik (sempurna dan sebagainya); menjadikan berkembang. Lampung Selatan Maju merujuk pada upaya peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menuju kualitas kehidupan yang baik, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 merujuk pada visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Indonesia Emas 2045 menggambarkan cita-cita Indonesia pada usia 100 tahun kemerdekaannya untuk menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Makna utama diantaranya adalah:

a) Negara Maju

- Indonesia memiliki perekonomian yang kuat, masuk ke jajaran 5–6 besar dunia.
- Pendapatan per kapita tinggi (kelas menengah ke atas secara global).

b) Kesejahteraan Merata

- Tingkat kemiskinan sangat rendah.
- Kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok menurun.
- Layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dapat diakses seluruh rakyat.

c) SDM Unggul

- Generasi muda memiliki kompetensi, kreativitas, dan daya saing global.
- Bonus demografi (2020–2035) dimanfaatkan maksimal sehingga tenaga kerja produktif mendominasi.

d) Berdaulat dan Mandiri

- Mampu mengelola kekayaan alam sendiri dengan teknologi modern.
- Pangan, energi, dan industri strategis tidak bergantung penuh pada negara lain.

- e) Demokrasi Kuat dan Pemerintahan Bersih
 - Penegakan hukum adil, bebas korupsi, dan transparan.
 - Sistem politik stabil dan partisipasi masyarakat tinggi.
- f) Lingkungan Berkelanjutan
 - Pembangunan tidak merusak ekosistem.
 - Energi terbarukan menjadi prioritas.

Lebih lanjut penjabaran visi di atas dijabarkan kedalam tujuh misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan visi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah, yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isu-isu strategis, faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal, berupa variabel kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antara berbagai faktor tersebut, untuk kemudian menetapkan Misi daerah.

Adapun Misi yang ditetapkan guna mewujudkan Visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah Pancasila.**
- Misi 2 : Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai**
- Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance***
- Misi 4 : Memajukan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan**
- Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berkeadilan dan berkelanjutan**
- Misi 6 : Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju**
- Misi 7 : Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional**

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada.

Tujuan diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita, dan tidak terbatas pada:

- a. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan;
- b. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;
- c. Peningkatan produktivitas daerah;
- d. Penguatan daya saing SDM berkelanjutan;
- e. Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju;
- f. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
- g. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

Tujuan : Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab

- Sasaran :
- 1. Peningkatan kehidupan masyarakat yang berkebudayaan maju
 - 2. Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai

Tujuan : Masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai

- Sasaran :
- 1. Peningkatan penegakan hukum dan keamanan daerah
 - 2. Peningkatan pelaksanaan penegakan demokrasi

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance*

Tujuan : Tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance*

Sasaran : Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital

Misi 4 : Memajukan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan

Tujuan : Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara berkelanjutan

Sasaran :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
3. Peningkatan keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif

Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berkeadilan dan berkelanjutan

Tujuan : Pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan

Sasaran :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif
2. Perluasan lapangan pekerjaan
3. Peningkatan akses dan mutu infrastruktur daerah
4. Peningkatan desa mandiri, inklusif dan berkelanjutan

Misi 6 : Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju

Tujuan : Wilayah pantai dan pegunungan Kabupaten Lampung Selatan semakin maju

Sasaran :

1. Peningkatan industri pengolahan yang sinergi, optimal dan berkelanjutan
2. Peningkatan daya tarik pariwisata
3. Peningkatan produktivitas UMKM, koperasi dan BUMD
4. Pelestarian lingkungan hidup
5. Peningkatan kesiagaan bencana

Misi 7 : Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional

Tujuan : Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional

Sasaran : Peningkatan daya saing daerah untuk mendukung perekonomian domestik dan global

Tabel III.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2030

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	MEWUJUDKAN LAMPUNG SELATAN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045											
1.	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	74,07	74,40	74,74	75,07	75,41	75,75		
			Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)	56,16	56,78	57,40	58,03	58,67	59,32		
			Peningkatan Kerukunan Hidup antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	74,07	74,40	74,74	75,07	75,41	75,75		
2.	Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai		Indeks Demokrasi Indonesia (Angka)	79,36	79,86	80,36	80,86	81,37	81,88		
			Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
			Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (Angka)	79,36	79,86	80,36	80,86	81,37	81,88		
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>		Nilai Survei Penilaian Integritas (Angka)	74,50	75,50	76,50	77,50	78,50	79,50		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	2,63	2,70	2,77	2,84	2,92	2,99		
				Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (Angka)	1	1	1	1	1	1		
4.	Memajukan dan Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan	Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara Berkelanjutan		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	72,55	72,95	73,36	73,76	74,17	74,58		
			Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,59	74,78	74,97	75,15	75,34	75,53		
				Prevalensi Stunting (%)	10	9,6	9,4	9,2	9	8,8		
			Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,81	7,83	7,85	7,87	7,89	7,91		
5.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan	Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,89	5,17	5,47	5,78	6,12	6,47		
				Tingkat Kemiskinan (%)	12,01	11,47	10,96	10,47	10,01	9,56		
			Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif	Inflasi (%)	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2,5-3,5		

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Berkeadilan dan Berkelanjutan		Perluasan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,65	4,56	4,41	4,32	4,11	4,00	
			Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi (%)	12,40	12,41	12,42	12,43	12,44	12,45	
			Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri (%)	8,20	8,59	8,98	9,38	9,77	10,16	
6.	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju	Wilayah Pantai dan Pegunungan Kabupaten Lampung Selatan Semakin Maju		Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	59,19	59,66	60,14	60,62	61,11	61,60	
			Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	23,86	24,09	24,31	24,54	25,5	26	
			Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,86	
			Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	11,81	12,07	12,34	12,61	12,88	13,17	
			Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	66,68	66,93	67,18	67,44	67,69	67,94	
			Peningkatan Kesiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana (Angka)	185,95	184,46	182,99	181,52	180,07	177,20	
7.	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan Antar Daerah, Nasional dan Internasional	Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional		Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,26	3,30	3,35	3,40	3,46	3,51	
			Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) (Angka)	6,98	6,80	6,63	6,47	6,31	6,15	

Sumber : Data diolah Bappeda, mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IUP) RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045, 2024

Untuk mendukung Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan turut mendukung Prioritas Program Pemerintah Provinsi tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2 Keselarasan Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Lampung dan Program Prioritas Kabupaten Lampung Selatan

No	Asta Cita	Program Prioritas Lampung Selatan	Program Hasil Terbaik Cepat Provinsi Lampung
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Lampung Selatan Maju Demokrasi (Meliputi 1. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dan pemrintah daerah dalam rangka memperbaiki kinerja maupun sistem kelembagaan, 2. penguatan proses demokrasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik dan akuntabilitas aparat penegak hukum, 3. penguatan peran kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal, 4. penguatan nilai-nilai kesadaran dan penegakan hukum)	
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Lampung Selatan Maju Ekonominya (melalui 1. penguatan regulasi yang melindungi hajat pariwisata agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat 2. pengembangan reklamasi pantai guna mencegah abrasi 3. pengembangan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, 4. peningkatan dan oprimalisasi industri kelautan yang dapat	Mewujudkan Stabilitas Harga Bahan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal

No	Asta Cita	Program Prioritas Lampung Selatan	Program Hasil Terbaik Cepat Provinsi Lampung
		dikembangkan secara sinergi optimal dan berkelanjutan, 5. peningkatan pengembangan kawasan pegunungan, wisata alam dan hutan lindung)	
3.	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	Lampung Selatan Maju Infrastrukturnya (melalui 1. penguatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat 2. Mengupayakan terciptanya iklim ekonomi yang lebih kondusif sehingga memperpendek kesenjangan sosial dalam masyarakat 3. penguatan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan)	
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Lampung Selatan Maju SDMnya (melalui 1. penguatan akses dan mutu pendidikan, tenaga pendidik yang bersertifikasi serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan tinggi sesuai pasar tenaga kerja, 2. memberikan beasiswa bagi masyarakat tidak mampu serta siswa-siswa berprestasi 3. penguatan IPM dan IPG yang berorientasi kepada IMTAK dan IPTEK, 4. mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang guna kesejahteraan masyarakat)	
5.	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Lampung Selatan Maju Pergaulannya melalui 1. penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil dan damai dalam berbagai	Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang

No	Asta Cita	Program Prioritas Lampung Selatan	Program Hasil Terbaik Cepat Provinsi Lampung
		aspek kehidupan 2. peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan daerah secara regional maupun nasional yang semakin nyata dan bermanfaat bagi masyarakat 3. peningkatan kerjasama regional antar daerah kabupaten/kota baik yang langsung maupun yang difasilitasi pemerintah Pusat atau pemerintah Provinsi)	Dikelola oleh BUMDes/Poktan
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Lampung Selatan Maju Pemerintahannya (meliputi 1. peningkatan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, 2. penguatan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis, 3. penguatan dalam peningkatan profesionalisme kerja birokrasi pemerintah melalui DIKLAT, 4. penguatan regulasi serta rekonstruksi kelembagaan)	Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes /Koperasi
		Lampung Selatan Maju Pemerintahannya (meliputi 1. peningkatan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, 2. penguatan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis, 3. penguatan dalam peningkatan profesionalisme kerja birokrasi pemerintah melalui DIKLAT, 4. penguatan regulasi serta rekonstruksi kelembagaan)	Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes/Poktan

No	Asta Cita	Program Prioritas Lampung Selatan	Program Hasil Terbaik Cepat Provinsi Lampung
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	Lampung Selatan Maju Demokrasi (Meliputi 1. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki kinerja maupun sistem kelembagaan, 2. penguatan proses demokrasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik dan akuntabilitas aparat penegak hukum, 3. penguatan peran kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal, 4. penguatan nilai-nilai kesadaran dan penegakan hukum)	
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Lampung Selatan Maju Budayanya (meliputi 1. penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dinamika dalam pergaulan regional , nasional, dan internasional. 2. penguatan nilai kearifan lokal, 3. penguatan sikap yang baik dalam hubungan antar umat beragama, 4. penguatan nilai-nilai baru yang positif dan produktif)	

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan merupakan suatu bentuk usaha tindak lanjut dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai arahan atau panduan bagi pemerintah daerah agar optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rincian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029

No	Misi	Tujuan	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab	Menumbuhkan dan memperkuat karakter masyarakat Lampung Selatan yang berbasis nilai-nilai Pancasila, dan sadar akan pelestarian kebudayaan lokal
2	Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang demokratis
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Lampung Selatan yang digital, akuntabel, partisipatif, dan berbasis kinerja untuk mendukung pelayanan publik yang efisien dan responsif
4	Memajukan dan Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan	Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara Berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang sehat dan cerdas melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan
5	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Berkeadilan dan Berkelanjutan	Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas infrastruktur dasar, dan pelayanan publik secara adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan
6	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju	Wilayah Pantai dan Pegunungan Kabupaten Lampung Selatan Semakin Maju	Mengoptimalkan potensi pantai dan pegunungan Lampung Selatan secara berkelanjutan
7	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional	Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional	Meningkatkan peran strategis dan pengaruh Kabupaten Lampung Selatan dalam kemitraan pembangunan lintas daerah, Nasional dan Internasional secara aktif, inovatif, dan berkelanjutan

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk

mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang. Dari hasil analisis, maka dapat dirumuskan strategi pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel III.4 Penahapan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Strategi Pembangunan				
				Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab	Menumbuhkan dan memperkuat karakter masyarakat Lampung Selatan yang berbasis nilai-nilai Pancasila, dan sadar akan pelestarian kebudayaan lokal	Lampung Selatan Berbudaya	1. Mengembangkan kurikulum muatan lokal daerah bagi peserta didik 2. Menciptakan hubungan baik dengan forum kerukunan umat beragama, komunitas adat, sanggar seni dan UMKM budaya 3. Melestarikan warisan budaya Lampung Selatan 4. Menyelenggarakan festival budaya Lampung Selatan 5. Memetakan potensi unggulan kebudayaan daerah baru	1. Meningkatkan edukasi masyarakat khususnya peserta didik melalui implementasi muatan lokal 2. Mendorong peran aktif forum kerukunan umat beragama, komunitas adat, sanggar seni dan UMKM budaya 3. Melestarikan warisan budaya Lampung Selatan 4. Menyelenggarakan festival budaya Lampung Selatan secara rutin 5. Mengembangkan potensi unggulan kebudayaan daerah baru	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan edukasi muatan lokal yang implementatif 2. Meningkatkan peran aktif forum kerukunan umat beragama, komunitas adat, sanggar seni dan UMKM budaya 3. Melestarikan warisan budaya Lampung Selatan 4. Menyelenggarakan festival budaya Lampung Selatan secara rutin 5. Mengembangkan potensi unggulan kebudayaan daerah baru	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan edukasi muatan lokal yang implementatif 2. Meningkatkan peran aktif forum kerukunan umat beragama, komunitas adat, sanggar seni dan UMKM budaya 3. Melestarikan warisan budaya Lampung Selatan 4. Menyelenggarakan festival budaya Lampung Selatan secara rutin 5. Mengembangkan potensi unggulan kebudayaan daerah baru	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan edukasi muatan lokal yang implementatif 2. Meningkatkan peran aktif forum kerukunan umat beragama, komunitas adat, sanggar seni dan UMKM budaya 3. Melestarikan warisan budaya Lampung Selatan 4. Menyelenggarakan festival budaya Lampung Selatan secara rutin 5. Mengembangkan potensi unggulan kebudayaan daerah baru
Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang demokratis	Lampung Selatan Damai	1. Meningkatkan forum komunikasi dengan pihak keamanan dan masyarakat 2. Mengoptimalkan forum kewaspadaan dini masyarakat 3. Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berlaku 4. Membentuk produk hukum daerah dalam upaya meningkatkan keamanan daerah 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi	1. Meningkatkan forum komunikasi dengan pihak keamanan dan masyarakat 2. Mengoptimalkan forum kewaspadaan dini masyarakat 3. Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berlaku 4. Membentuk produk hukum daerah dalam upaya meningkatkan keamanan daerah 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi	1. Meningkatkan forum komunikasi dengan pihak keamanan dan masyarakat 2. Mengoptimalkan forum kewaspadaan dini masyarakat 3. Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berlaku 4. Membentuk produk hukum daerah dalam upaya meningkatkan keamanan daerah 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi	1. Meningkatkan forum komunikasi dengan pihak keamanan dan masyarakat 2. Mengoptimalkan forum kewaspadaan dini masyarakat 3. Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berlaku 4. Membentuk produk hukum daerah dalam upaya meningkatkan keamanan daerah 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi	1. Meningkatkan forum komunikasi dengan pihak keamanan dan masyarakat 2. Mengoptimalkan forum kewaspadaan dini masyarakat 3. Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berlaku 4. Membentuk produk hukum daerah dalam upaya meningkatkan keamanan daerah 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Lampung Selatan yang digital,	Lampung Selatan Digital Melayani	1. Meningkatkan reformasi birokrasi yang adaptif	1. Meningkatkan implementasi dan evaluasi reformasi birokrasi	1. Meningkatkan implementasi dan evaluasi	1. Meningkatkan implementasi dan evaluasi	1. Meningkatkan implementasi dan evaluasi reformasi

Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Strategi Pembangunan				
				Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	Prinsip <i>Good Governance</i>	akuntabel, partisipatif, dan berbasis kinerja untuk mendukung pelayanan publik yang efisien dan responsif		2. Meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan kolaborasi antar unsur <i>pentahelix</i> 4. Mengembangkan digitalisasi layanan pemerintahan 5. Meningkatkan inovasi daerah 6. Mendukung administratif atas potensi pengembangan daerah otonomi baru	2. Meningkatkan implementasi atas nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan kolaborasi unsur <i>pentahelix</i> plus 4. Meningkatkan digitalisasi layanan pemerintahan secara terpadu 5. Meningkatkan inovasi daerah yang berkelanjutan 6. Mendukung administratif atas potensi pengembangan daerah otonomi baru	2. reformasi birokrasi secara komprehensif 3. Meningkatkan implementasi atas nilai SAKIP Pemerintah Daerah 4. Meningkatkan kolaborasi unsur <i>pentahelix</i> plus 5. Meningkatkan digitalisasi layanan pemerintahan secara terpadu 6. Meningkatkan inovasi daerah yang berkelanjutan 7. Mendukung administratif atas potensi pengembangan daerah otonomi baru	2. reformasi birokrasi secara komprehensif 3. Meningkatkan implementasi atas nilai SAKIP Pemerintah Daerah 4. Meningkatkan kolaborasi unsur <i>pentahelix</i> plus 5. Meningkatkan digitalisasi layanan pemerintahan secara terpadu 6. Meningkatkan inovasi daerah yang berkelanjutan 7. Mendukung administratif atas potensi pengembangan daerah otonomi baru	2. birokrasi secara komprehensif 3. Meningkatkan implementasi atas nilai SAKIP Pemerintah Daerah 4. Meningkatkan kolaborasi unsur <i>pentahelix</i> plus 5. Meningkatkan digitalisasi layanan pemerintahan secara terpadu 6. Meningkatkan inovasi daerah yang berkelanjutan 7. Mendukung administratif atas potensi pengembangan daerah otonomi baru
Memajukan dan Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan	Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara Berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang sehat dan cerdas melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan	Lampung Selatan Maju SDM	1. Pengembangan Sekolah Unggulan 2. Pengembangan Sekolah Rakyat 3. Mendorong Program Pendidikan Non Formal yang merupakan kewenangan Kabupaten 4. Wajib Belajar 13 Tahun 5. Penanganan anak tidak sekolah dengan memastikan keberlanjutan pendidikan dari tiap jenjangnya 6. Pengelolaan Organisasi Pemuda 7. Wirausaha Muda 8. Makan Bergizi Gratis 9. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan	1. Pengembangan Sekolah Unggulan 2. Pengembangan Sekolah Rakyat 3. Mendorong Program Pendidikan Non Formal yang merupakan kewenangan Kabupaten 4. Wajib Belajar 13 Tahun 5. Penanganan anak tidak sekolah dengan memastikan keberlanjutan pendidikan dari tiap jenjangnya 6. Pengelolaan Organisasi Pemuda 7. Wirausaha Muda 8. Makan Bergizi Gratis 9. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan	1. Pengembangan Sekolah Unggulan 2. Pengembangan Sekolah Rakyat 3. Mendorong Program Pendidikan Non Formal yang merupakan kewenangan Kabupaten 4. Wajib Belajar 13 Tahun 5. Penanganan anak tidak sekolah dengan memastikan keberlanjutan pendidikan dari tiap jenjangnya 6. Pengelolaan Organisasi Pemuda 7. Wirausaha Muda 8. Makan Bergizi Gratis 9. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan	1. Pengembangan Sekolah Unggulan 2. Pengembangan Sekolah Rakyat 3. Mendorong Program Pendidikan Non Formal yang merupakan kewenangan Kabupaten 4. Wajib Belajar 13 Tahun 5. Penanganan anak tidak sekolah dengan memastikan keberlanjutan pendidikan dari tiap jenjangnya 6. Pengelolaan Organisasi Pemuda 7. Wirausaha Muda 8. Makan Bergizi Gratis 9. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan	1. Pengembangan Sekolah Unggulan 2. Pengembangan Sekolah Rakyat 3. Mendorong Program Pendidikan Non Formal yang merupakan kewenangan Kabupaten 4. Wajib Belajar 13 Tahun 5. Penanganan anak tidak sekolah dengan memastikan keberlanjutan pendidikan dari tiap jenjangnya 6. Pengelolaan Organisasi Pemuda 7. Wirausaha Muda 8. Makan Bergizi Gratis 9. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada

Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Strategi Pembangunan				
				Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
				Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C	Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C	Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C	Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C	RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C
				10. Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat	10. Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat	10. Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat	10. Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat	10. Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat
				11. Pemeriksaan kesehatan gratis	11. Pemeriksaan kesehatan gratis	11. Pemeriksaan kesehatan gratis	11. Pemeriksaan kesehatan gratis	11. Pemeriksaan kesehatan gratis
				12. Melanjutkan program keluarga harapan dan memastikan hak kaum disabilitas	12. Melanjutkan program keluarga harapan dan memastikan hak kaum disabilitas	12. Melanjutkan program keluarga harapan dan memastikan hak kaum disabilitas	12. Melanjutkan program keluarga harapan dan memastikan hak kaum disabilitas	12. Melanjutkan program keluarga harapan dan memastikan hak kaum disabilitas
				13. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	13. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	13. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	13. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	13. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
				14. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan	14. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan	14. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan	14. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan	14. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
				15. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas	15. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas	15. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas	15. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas	15. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas
				16. Revitalisasi Pendidikan Non Formal	16. Revitalisasi Pendidikan Non Formal	16. Revitalisasi Pendidikan Non Formal	16. Revitalisasi Pendidikan Non Formal	16. Revitalisasi Pendidikan Non Formal
				17. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Stunting, peningkatan gizi	17. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Stunting, peningkatan gizi	17. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Stunting, peningkatan gizi	17. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Stunting, peningkatan gizi	17. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Stunting, peningkatan gizi, lansia serta Keluarga Berencana (KB) dan

Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Strategi Pembangunan				
				Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
				usia sekolah, usia produktif, lansia serta Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Produksi, pemeriksaan gratis, Penyakit Tidak Menular (PTM), Tuberkulosis (TBC), Kesehatan Jiwa	usia sekolah, usia produktif, lansia serta Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Produksi, pemeriksaan gratis, Penyakit Tidak Menular (PTM), Tuberkulosis (TBC), Kesehatan Jiwa	usia sekolah, usia produktif, lansia serta Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Produksi, pemeriksaan gratis, Penyakit Tidak Menular (PTM), Tuberkulosis (TBC), Kesehatan Jiwa	usia sekolah, usia produktif, lansia serta Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Produksi, pemeriksaan gratis, Penyakit Tidak Menular (PTM), Tuberkulosis (TBC), Kesehatan Jiwa	Kesehatan Produksi, pemeriksaan gratis, Penyakit Tidak Menular (PTM), Tuberkulosis (TBC), Kesehatan Jiwa
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Berkeadilan dan Berkelanjutan	Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas infrastruktur dasar, dan pelayanan publik secara adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan Membangun	1. Meningkatkan kualitas jalan kabupaten prioritas pendukung pariwisata 2. Percepatan penyelesaian RTRW 3. Verifikasi dan validasi luasan kawasan kumuh 4. Meningkatkan akses rumah layak huni 5. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 6. Mengembangkan Koperasi Merah Putih 7. Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan 8. Penguatan Dasar Sistem Cadangan dan Distribusi	1. Meningkatkan kualitas jalan kabupaten prioritas pendidikan dan kesehatan 2. Penyediaan fasilitas umum di kawasan kumuh 3. Meningkatkan akses rumah layak huni 4. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 5. Mengembangkan Koperasi Merah Putih 6. Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan 7. Perluasan Aksesibilitas dan Ketersediaan Pangan	1. Meningkatkan kualitas jalan kabupaten prioritas pendidikan dan kesehatan 2. Penyediaan fasilitas umum di kawasan kumuh 3. Meningkatkan akses rumah layak huni 4. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 5. Mengembangkan Koperasi Merah Putih 6. Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan 7. Penguatan Keamanan dan Kualitas Pangan	1. Meningkatkan kualitas jalan kabupaten prioritas pendidikan dan kesehatan 2. Penyediaan fasilitas umum di kawasan kumuh 3. Meningkatkan akses rumah layak huni 4. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 5. Mengembangkan Koperasi Merah Putih 6. Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan 7. Peningkatan Nilai Tambah dan Pengolahan Pangan Lokal	1. Meningkatkan kualitas jalan kabupaten prioritas pendidikan dan kesehatan 2. Penyediaan fasilitas umum di kawasan kumuh 3. Meningkatkan akses rumah layak huni 4. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 5. Mengembangkan Koperasi Merah Putih 6. Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan 7. Kemandirian dan Kesejahteraan Pangan Masyarakat
Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju	Wilayah Pantai dan Pegunungan Kabupaten Lampung Selatan Semakin Maju	Mengoptimalkan potensi pantai dan pegunungan Lampung Selatan secara berkelanjutan	Lampung Selatan Harmoni Wisata	1. Memetakan potensi pariwisata daerah (<i>existing</i> dan baru) 2. Mengembangkan konsep pariwisata terpadu (agroeduwisata) 3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan 4. Membentuk Pertanian Anak Nusantara 5. Mengembangkan koperasi dan UMKM produktif	1. Mengembangkan konsep pariwisata terpadu (agroeduwisata) 2. Membangun sarana dan prasarana dasar pendukung konsep agroeduwisata 3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan 4. Mengembangkan Pertanian Anak Nusantara	1. Mengembangkan konsep pariwisata terpadu (agroeduwisata) 2. Membangun fasilitas umum pendukung konsep agroeduwisata 3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan 4. Meningkatkan Pertanian Anak Nusantara 5. Optimalisasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan	1. Mengembangkan konsep pariwisata terpadu (agroeduwisata) 2. Membangun konsep agroeduwisata secara komprehensif 3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan 4. Meningkatkan Pertanian Anak Nusantara 5. Optimalisasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan	1. Mengembangkan konsep pariwisata terpadu (agroeduwisata) 2. Membangun konsep agroeduwisata secara komprehensif 3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan 4. Meningkatkan Pertanian Anak Nusantara 5. Optimalisasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan 6. Modernisasi pertanian

Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Strategi Pembangunan				
				Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
				6. Akselerasi fasilitasi sertifikasi halal 7. Menyusun perencanaan pembangunan berbasis risiko bencana 8. Memperkuat peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan	5. Meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM 6. Memperkuat lembaga dan SDM pendukung ekosistem halal 7. Membangun sarana mitigasi bencana 8. Memperkuat peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan	6. Modernisasi pertanian 7. Meningkatkan produktivitas dan manajemen risiko pada koperasi dan UMKM produktif 8. Mengembangkan kebijakan ekosistem halal 9. Membangun sarana mitigasi dan penanganan bencana 10. Memperkuat peran masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam	6. Modernisasi pertanian 7. Meningkatkan daya saing produk pada koperasi dan UMKM 8. Memperkuat kemitraan ekosistem halal 9. Membangun sarana mitigasi dan penanganan bencana 10. Memperkuat peran masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam	7. Meningkatkan daya saing produk pada koperasi dan UMKM 8. Mengembangkan riset pendukung ekosistem halal 9. Membangun sarana mitigasi dan penanganan bencana 10. Memperkuat peran masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam
Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan Antar Daerah, Nasional dan Internasional	Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah, Nasional dan Internasional	Meningkatkan peran strategis dan pengaruh Kabupaten Lampung Selatan dalam kemitraan pembangunan lintas daerah, Nasional dan Internasional secara aktif, inovatif, dan berkelanjutan	Lampung Selatan Aktif Bergaul	1. Mengembangkan kapasitas dan <i>branding</i> daerah 2. Meningkatkan kemitraan aktif dalam daerah 3. Meningkatkan peran serta daerah dalam <i>event</i> Nasional	1. Meningkatkan kapasitas dan <i>branding</i> daerah 2. Meningkatkan kemitraan aktif dalam dan luar daerah Provinsi Lampung 3. Meningkatkan peran serta daerah dalam <i>event</i> Nasional	1. Meningkatkan <i>branding</i> dan daya saing daerah 2. Meningkatkan kemitraan aktif dalam dan luar daerah secara Nasional 3. Meningkatkan peran serta daerah dalam <i>event</i> Nasional dan Internasional 4. Mengembangkan event Nasional	1. Meningkatkan <i>branding</i> dan daya saing daerah 2. Meningkatkan kemitraan aktif dalam dan luar daerah secara Nasional 3. Meningkatkan peran serta daerah dalam <i>event</i> Nasional dan Internasional 4. Meningkatkan event Nasional	1. Meningkatkan <i>branding</i> dan daya saing daerah 2. Meningkatkan kemitraan aktif secara Nasional dan Internasional 3. Meningkatkan peran serta daerah dalam <i>event</i> Nasional dan Internasional 4. Mengembangkan event berskala Internasional 5. Menjalin kerjasama berupa pertukaran pengetahuan dan teknologi melalui <i>sister city</i>

Tabel III.5 Penahapan Pembangunan RPJMD

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Pemenuhan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik	Penyelesaian Kemiskinan	Penguatan Ekonomi Lokal	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan arah pembangunan tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel III.6 Arah Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029

No (1)	Misi (2)	Arah Pembangunan (3)	Keterangan (4)
1	Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar
2	Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Penguatan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Stabilitas Makroekonomi Daerah	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	Penguatan pondasi kelembagaan pemerintah, penerapan manajemen risiko pemerintahan, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit.	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
4	Memajukan dan Memperkuat Sumber	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan	Pemenuhan Pelayanan Dasar

No (1)	Misi (2)	Arah Pembangunan (3)	Keterangan (4)
	Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan	dasar dan Pendidikan menengah)	
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Penyelesaian Kemiskinan
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Peningkatan dan Pemerataan SDM yang berkualitas	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Pemenuhan pelayanan dasar, bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.	Penyelesaian Kemiskinan
		Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, Kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan Kesehatan Universal	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Pencegahan dan pengendalian penyakit	Pemenuhan Pelayanan Dasar

No (1)	Misi (2)	Arah Pembangunan (3)	Keterangan (4)
		melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan Stunting	Pemenuhan Pelayanan Dasar
		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan Pendidikan bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
5	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Berkeadilan dan Berkelanjutan	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Penyelesaian Kemiskinan
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Penguatan riset dan inovasi bidang pertanian dalam arti luas dan industri Penyempurnaan pondasi regulasi di bidang ekonomi	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Pengembangan produk unggulan pertanian, perikanan, dan Jasa Pariwisata	Penguatan Ekonomi Lokal
		Peningkatkan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk	Penguatan Ekonomi Lokal
		Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang	Peningkatan dan penguatan sarana dan

No (1)	Misi (2)	Arah Pembangunan (3)	Keterangan (4)
		ramah lingkungan dan ekonomis.	prasarana pelayanan Publik
		Efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Penguatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Peningkatan konsumsi listrik per Kapita	Penyelesaian Kemiskinan
		Peningkatan intensitas energi/primer	Penyelesaian Kemiskinan
		Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan	Penyelesaian Kemiskinan
		Peningkatan kapasitas air baku	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
6	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Pengembangan produk unggulan pertanian, perikanan, dan Jasa Pariwisata	Penguatan Ekonomi Lokal
7	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan Antar Daerah dan Nasional	Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/ teknologi terapan	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal	Penguatan Ekonomi Lokal

No (1)	Misi (2)	Arah Pembangunan (3)	Keterangan (4)
		Pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.	Penguatan Ekonomi Lokal
		Pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip <i>comparative advantage</i>	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Pemenuhan Kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	Penguatan Ekonomi Lokal
		Pembangunan pusat-pusat Pertumbuhan ekonomi baru Melalui Peningkatan investasi dan Perluasan kesempatan kerja Dengan memperhatikan keberlanjutan Lingkungan	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Pemenuhan Kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	Penyelesaian Kemiskinan
		Peningkatan aksesibilitas dan Konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal	Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan Publik
		Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.	Penyelesaian Kemiskinan
		Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

Sumber: Data diolah, 2024

Selain fokus pada arah pembangunan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam RPJPD Lampung Selatan 2025-2045 sebagai rujukan penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029, Kabupaten Lampung Selatan juga turut mendorong arah kebijakan Nasional dan Provinsi Lampung dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Secara eksplisit dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menanggulangi masalah kemiskinan Nasional dan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.

Tabel III.7 Penyelarasan Kebijakan Nasional, Provinsi Lampung dan Daerah

<i>Cascade</i>	Nasional	Provinsi	Kabupaten Lampung Selatan
KEMISKINAN			
Arah Kebijakan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan serta pemerintah yang efektif dan berintegritas	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, perluasan akses layanan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan UMK
Tujuan	Menurunkan angka kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan perdesaaan
Sasaran	Mempercepat penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Pengentasan kemiskinan tepat waktu dan tepat sasaran	Pendapatan masyarakat desa meningkat
Indikator	Tingkat kemiskinan: (7-8% tahun 2025) (4,5-5% tahun 2029) tingkat kemiskinan ekstrem: (0,5-1 tahun 2025) (0% tahun 2029)	Angka kemiskinan: (9,5-10% tahun 2025) (5,79-6-79% tahun 2029)	Angka kemiskinan: (11,8-12,2% tahun 2025) (9-9,5% tahun 2029)
Sasaran Pembangunan Kewilayahan	Sumatera: pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, serta kawasan komoditas unggulan potensi: kelapa sawit: sumatera memiliki perkebunan sawit seluas 10,2 juta hektare dan menghasilkan 67 persen produksi sawit nasional. • komoditas perkebunan potensial lainnya:	15 kabupaten kota: pertanian (arti luas): - peningkatan produksi pertanian (padi) - hilirisasi yang dilakukan petani - peningkatan kapasitas sdm (petani) - peningkatan kapasitas koperasi/bumdes optimalisasi potensi pariwisata, umkm	17 kecamatan: pertanian (arti luas): - peningkatan produksi pertanian (padi) - diversifikasi jenis tanaman, dan pekerjaan petani - perluasan akses pendidikan dan kesehatan dan pelayanan dasar untuk penduduk miskin desa - hilirisasi melalui pengembangan UMKM

Cascade	Nasional	Provinsi	Kabupaten Lampung Selatan
	- karet (70 persen produksi nasional) - kopi (62 persen produksi nasional) - tebu (36 persen produksi nasional) - kelapa (32 persen produksi nasional) • ketahanan pangan: sumatera berkontribusi 27 persen dalam produksi beras nasional, serta berkontribusi sekitar 16 persen dalam produksi perikanan nasional		
Lokus	(Kopi & kelapa) lampung barat lampung selatan	500 desa unit produksi pupuk organik cair (penduduk dengan kategori kesejahteraan desil 1) 24 desa penerima bantuan dryer dan mocaf desa dengan kelembagaan desa: (koperasi/ bumdes/ gapoktan/ pokdarwis, dst)	Petani tanaman pangan dan nelayan
PERTUMBUHAN EKONOMI			
Arah Kebijakan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas infrastruktur dasar, dan pelayanan publik secara adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan
Tujuan	Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan	Terwujudnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan
Sasaran	Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui Produktivitas, Ekosistem Ekonomi	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif

<i>Cascade</i>	Nasional	Provinsi	Kabupaten Lampung Selatan
	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Desa, Ekonomi Kreatif, dan Pembangunan Infrastruktur yang merata	Perluasan Lapangan Pekerjaan Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah
Indikator	Pertumbuhan Ekonomi Nasional (5,3% pada tahun 2025 dan 8% pada tahun 2030)	Pertumbuhan ekonomi (5,1% pada Tahun 2025 – 6,25% pada Tahun 2030)	Pertumbuhan ekonomi (6,47% pada tahun 2030)
Sasaran Pembangunan Kewilayahan	• Pengembangan konektivitas multimodal, termasuk kajian lintas Selat Sunda, pembangunan <i>dry port</i>, dan interkoneksi pelabuhan (<i>port-to-port</i>), serta konektivitas kereta api logistik antara Sumatra dan Jawa. • Penguatan industrialisasi perikanan, khususnya di Lampung Selatan. • Pengembangan agroindustri dan bioindustri sirkular serta hilirisasi sumber daya hayati, khususnya di koridor Pesawaran–Bandarlampung–Kalianda.	• Memberikan kemudahan berinvestasi di Provinsi Lampung • Meningkatkan Promosi dan Branding Investasi Daerah • Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi	• Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan • Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion • Peningkatkan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk
PENGUATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			
Arah Kebijakan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	Mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang sehat dan cerdas melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan

<i>Cascade</i>	Nasional	Provinsi	Kabupaten Lampung Selatan
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan, memperluas akses dan mutu pendidikan, menguatkan karakter bangsa, mengembangkan keterampilan serta produktivitas tenaga kerja, dan pemeratakan kualitas layanan antarwilayah untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara Berkelanjutan
Sasaran	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata Terwujudnya kesehatan untuk semua Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Kesehatan Keluarga	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif
Indikator	Indeks Modal Manusia (IMM) Nasional mencapai 0,59 pada tahun 2029	Indeks Modal Manusia (0,53 pada tahun 2025 dan 0,55 pada tahun 2030)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,58 pada tahun 2030
Sasaran Pembangunan Kewilayahan	• Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah	• Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang merata di seluruh wilayah untuk mendukung peningkatan kualitas SDM • Pendekatan holistik untuk kelompok rentan dan keluarga miskin, melalui perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak, sehingga seluruh wilayah terdorong	• Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan Pendidikan menengah) • Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah • Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis

Cascade	Nasional	Provinsi	Kabupaten Lampung Selatan
		ke arah peningkatan SDM	pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) • Peningkatan dan Pemerataan SDM yang berkualitas • Pemenuhan pelayanan dasar, bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

3.2.2 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program Prioritas merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan agenda yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat saat pelaksanaan kampanye. Agenda kerja menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat dan bermanfaat serta memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Posisi penjabaran Program Unggulan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menuangkannya ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengampu agenda kerja tersebut. Adapun agenda kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah pancasila.

1. Penguatan Budaya Masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional, nasional dan internasional.
2. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis pada modal sosial yang semakin berkembang.

3. Penguatan sikap yang baik dalam hubungan (Toleransi) antar umat beragama di Kabupaten Lampung Selatan.
4. Penguatan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja maupun sistem kelembagaan.
2. Penguatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
3. Penguatan peran kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber dari jati diri budaya masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam pembangunan daerah.
4. Penguatan dalam mendukung pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan.
5. Penguatan nilai-nilai kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance*

1. Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Penguatan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.
3. Penguatan dalam peningkatan profesionalisme kerja birokrasi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui pelatihan (DIKLAT) sehingga dapat meningkatkan sistem dan pelayanan terpadu serta mempersempit kemungkinan penyalahgunaan/penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara.
4. Penguatan regulasi serta rekonstruksi kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat.

Misi 4 : Memajukan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan

1. Penguatan akses dan mutu pendidikan tenaga pendidik yang bersertifikasi serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan menengah tinggi yang sesuai dengan pasar kerja.
2. Memberikan beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu serta siswa-siswa berprestasi guna menjaga serta meningkatkan SDM Lampung Selatan kedepan.
3. Memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang berorientasi kepada IMTAK dan IPTEK guna meningkatkan kualitas akses masyarakat dalam pelayanan pendidikan, kesehatan.
4. Mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang guna kesejahteraan masyarakat.

Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berkeadilan dan berkelanjutan

1. Penguatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dengan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan dan teknologi yang terus meningkat.
2. Mengupayakan terciptanya iklim ekonomi yang lebih kondusif sehingga memperpendek kesenjangan sosial diantara masyarakat.
3. Penguatan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan dengan berkomitmen pada mutu dan kualitas pembangunan.
4. Penguatan kinerja aparat dan atau OPD terkait dalam upaya meminimalkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan jumlah angka pengangguran.
5. Penguatan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses pengelolaan sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin.
6. Mendorong program subsidi terhadap masyarakat agar tepat sasaran dan berkelanjutan bagi yang benar-benar membutuhkan.
7. Penguatan upaya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan kebutuhan primer masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang akan diambil.

Misi 6 : Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju

1. Penguatan regulasi yang melindungi hajat pariwisata agar dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat.
2. Pengembangan reklamasi pantai guna mencegah *abrasi marine* (Pengikisan pantai oleh air laut) dengan pengembangan hutan mangrove (hutan bakau) dan upaya peningkatan biota laut.
3. Pengembangan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agro industri, serta dapat menyokong ketersediaan pangan.
4. Peningkatan optimalisasi industri kelautan yang dapat dikembangkan secara sinergi, optimal dan berkelanjutan.
5. Peningkatan pengembangan kawasan pegunungan sebagai objek wisata alam dan hutan lindung.

Misi 7 : Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan daerah, Nasional dan Internasional

1. Penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan daerah secara regional maupun nasional yang semakin nyata bermanfaat bagi masyarakat.
3. Peningkatan kerjasama regional antar daerah Kabupaten/Kota, baik yang langsung maupun melalui kerjasama yang difasilitasi Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Tabel III.8 Program Prioritas RPJMD

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
MEWUJUDKAN LAMPUNG SELATAN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045							
1.	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab			Indeks Kerukunan Umat Beragama		
			Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan		
				Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Warisan budaya yang Dilestarikan	- Persentase Warisan Cagar Budaya yang Dilestarikan; - Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Meningkatnya tata Kelola taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial
			Peningkatan Kerukunan Hidup antar Umat Beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama		
				Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai			Indeks Demokrasi Indonesia		
			Peningkatan Penegakan		Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah		

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Hukum dan Keamanan Daerah				
				Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Terkait dalam Upaya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
				Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Terkait dalam Upaya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17 Kecamatan
				Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase Jumlah Pemerintahan Desa yang Dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17 Kecamatan
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
			Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi		Indeks Demokrasi Indonesia		
				Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>			Nilai Survei Penilaian Integritas		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital		Indeks Pelayanan Publik		
				Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Pelayanan	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Seluruh Perangkat Daerah
				Meningkatnya jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	Indeks SPBE (Indeks)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Aplikasi Informatika			
				Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah daerah	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
				- Meningkatkan Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan; - Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	- Persentase penetapan Ranperda tahun n (%); - Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%); - Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Tata kelola Anggaran	Persentase OPD Yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Meningkatnya Tata Kelola Aset dan Daerah	Jumlah OPD yang mengelola BMD dengan tertib Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
				Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Pelayanan Kepegawaian (Indeks)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Diklat
				Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah
				Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Riset dan Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Menurunnya terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
				Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan terhadap Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17 Kecamatan
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Diberdayakan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17 Kecamatan
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian Kasus Sengketa Pertanahan yang difasilitasi dan dilakukan melalui mediasi (%)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian pembebasan lahan dan penerima santunan terhadap hasil ganti	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					kerugian tanah untuk pembangunan (%)	UNTUK PEMBANGUNAN	
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase proses pentapan subjek dan objek redistribusi tanah yang telah diinventarisasi dan diidentifikasi (%)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya Tata Kelola tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (%)	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%) Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Menigkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	- Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%); - Kepemilikan Akta Kelahiran (Akta); - Kepemilikan Akta Perkawinan (Akta);	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					- Kepemilikan Akta Kematian (Akta); - Kepemilikan Akta Perceraian (Akta)		
				Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Tata kelola Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
				Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4.	Memajukan dan Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan	Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara Berkelanjutan			Indeks Pembangunan Manusia		
			Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup		
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	- Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH); - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (%); - Persentase Kematian Ibu yang ditolong Persalinannya (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
				Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
				Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah		
				Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	APS Penduduk Usia 5-15 Tahun dan Kesetaraan Usia 7-18 Tahun (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	- Indeks Pemerataan Guru (Indeks); - Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Penerbitan Izin Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Skor)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
				Terkendalinya Pertambahan jumlah Penduduk	- Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (%); - Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Specific Fertility Rate / ASFR 15-19) (%)		
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	- Angka Pravalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR) (%); - Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	- Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%); - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (Dokumen)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (%)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	- Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) ; - Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Berkeadilan dan Berkelanjutan	Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan			Tingkat Kemiskinan		

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif		Inflasi		
				Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	- Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%) - Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Meningkatnya Layanan Penanganan Warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan	- Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (Orang); - Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial
				Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	- Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%); - Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%); - Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%); - Persentase Gelandang dan Pengemis yang	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%); - Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)		
				Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%); - Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi(%); - Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%); - Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
				Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Angka)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah (Desa/Kelurahan) Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
				Meningkatnya Pengawasan mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
				Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi barang yang efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Perluasan Lapangan Pekerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka		
				Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Dokumen Rencana Tenaga Kerja (Dokumen)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak Hak Pekerja dan Dialog Sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase transmigrasi yang diberangkat sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh menteri (%)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah		Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi		
				Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Irigasi	- Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Pemukiman Rawan Banjir (%); - Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase kualitas bangunan gedung yang sesuai standarnya (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran dan Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi	- Konektivitas Darat (Rasio); - Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Rasio)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
				Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah	- Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%); - Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya perumahan dan permukiman yang layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani (Unit Rumah)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan		Persentase Desa Mandiri		
				Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Meningkatnya Fasilitas Kerja sama antar desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
							Masyarakat dan Desa
				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%) ; - Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	- Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%); - Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju	Wilayah Pantai dan Pegunungan Kabupaten Lampung Selatan Semakin Maju			Indeks Ekonomi Hijau		
			Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan		Rasio PDRB Industri Pengolahan		
				Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Meningkatnya distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton); - Peningkatan Produksi Hortikultura (Kuintal); - Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton); - Persentase peningkatan jumlah populasi ternak (%); - Persentase peningkatan jumlah pakan ternak (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Meningkatnya distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	- Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B (Ha); - Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%); - Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	- Persentase Penanganan bencana Pertanian (%); - Persentase Penanganan dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Rekomendasi Izin Usaha Peternakan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan yang Diterbitkan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Penyuluh Pertanian	- Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%); - Persentase Kelembagaan Koperasi tani yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
				Meningkatnya pelaku usaha yang diawasi dan terstandarisasi baik	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi dan terstandarisasi baik (Pelaku Usaha)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan
				Meningkatnya konsumsi Ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
			Peningkatan Daya Tarik Pariwisata		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada Level Kabupaten		
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan Mandiri	Persentase Pertumbuhan Wirausaha (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UMKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pelestarian Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
				Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Banyaknya dokumen kajian LH yang dibuat	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
				Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air; - Indeks Kualitas Udara	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Lombah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Pendamping/Pengawas Lingkungan Hidup Yang ditingkatkan Kompetensinya (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (Rumah Tangga)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Peningkatan Kesiagaan Bencana		Indeks Risiko Bencana		
				- Meningkatkan Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; - Meningkatkan Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat; - Meningkatkan Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	- Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%); - Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%) - Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				- Meningkatkan Layanan Pencegahan Kebakaran; - Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	- Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%); - Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	- Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bencana (%); - Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%);	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					- Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)		
7.	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan Antar Daerah dan Nasional	Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah dan Nasional			Indeks Daya Saing Daerah		
			Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global		Incremental Capital Output Ratio (ICOR)		
				Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
				Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
				Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					bertanda tera sah yang berlaku (%)		
				Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

*) Dicitak tebal merupakan Prioritas Utama

Sumber : Data diolah Bappeda, 2025

Tabel III.9 Aktivitas Belanja Daerah Berdasarkan Outcome

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS Penduduk Usia 5-15 Tahun dan Kesetaraan Usia 7-18 Tahun	BOSDA SD/SMP	Dinas Pendidikan
		Beasiswa jenjang pendidikan SD/SMP	
		Rehabilitasi Sekolah Terpencil	
		Pelatihan Guru Inklusif	
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Pelatihan Implementasi Kurikulum Muatan Lokal	Dinas Pendidikan
		Festival/Ekshibisi Muatan Lokal	
		Penyusunan e-Modul Muatan Lokal	
		Pilot Project di Sekolah Percontohan	
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	Pemenuhan Kebutuhan Guru	Dinas Pendidikan
		Pendistribusian guru berdasarkan kebutuhan	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
		insentif tempat tinggal untuk guru di daerah terpencil	
	Presentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Pembiayaan uji kompetensi guru	
		pelatihan penulisan karya tulis ilmiah	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	Penguatan posyandu dan puskesmas	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
		Pendampingan ibu hamil	
		Penyediaan ambulance	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Suplementasi gizi kronis	
		Edukasi Gizi Keluarga	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Pelatihan Klinis Berjenjang	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
		Sertifikasi Kompetensi	
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
		Penyediaan Makan dan Minum Pasien	
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Pelatihan Kader Posyandu	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Pemukiman Rawan Banjir	Rahbilitasi Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan Irigasi	
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir ROB	Penanaman Mangrove	
		Pembangunan <i>Sea Wall</i> di daerah ROB	
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Pengembangan Embung Multifungsi	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Aman	Pembangunan Sistem Air Bersih Komunal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Subsidi Sambungan untuk Rumah Tangga Miskin	
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Pengembangan TPST 3R (Reduce-Reuse-Recycle) Skala Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemberdayaan Bank Sampah berbasis Digital	
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Konversi Tangki Septik Tradisional dengan Pembangunan septic tank komunal sistem biofil	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Normalisasi Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan Biopori dan Rain Garden	
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kualitas bangunan gedung yang sesuai standarnya	Rehabilitasi Gedung Pelayanan Publik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Revitalisasi Kawasan Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	Pembangunan jalan beton mutu tinggi di ruas strategis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi Jalan Rusak	
		Pengaspalan jalan yang masih dalam kondisi permukaan tanah dan batu	
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Sertifikasi BNSP Masal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran dan Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	Membentuk satgas pelanggaran pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Mediasi Konflik Lahan	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Pembangunan rumah khusus korban bencana	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Penyediaan unit rumah susun sederhana sewa	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Penanganan Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	Pembangunan infrastruktur permukiman (drainase, jalan lingkungan)	Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.05 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Pendampingan Sertifikasi dan Registrasi perancangan dan perencanaan rumah serta prasarana utilitas	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian mutu pelayanan dasar wajib urusan trantibum	Peningkatan Kualitas pelayanan trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase capaian warga negara yang menerima pelayanan dasar wajib urusan trantibum	meningkatkan jangkauan layanan trantibum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	membangun media edukasi kebencanaan digital	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	pengadaan logistik darurat bencana	
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	pelatihan dan pendampingan pemulihan pasca bencana	
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Sosialisasi Risiko kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	penambahan jumlah armada pemadam kebakaran dan apar	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	pelatihan kompetensi pekerja sosial	Dinas Sosial
	Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	peningkatan partisipasi pekerja sosial	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
	Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA		
	Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	pendampingan korban bencana paska terjadinya bencana	
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	pelatihan kompetensi SDM kesejahteraan sosial	
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	peningkatan kualitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial	
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Bantuan hukum dan pemulangan TKI	Dinas Sosial
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar	
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lanjut usia yang terlantar	
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Pemenuhan kebutuhan dasar PPKS	
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Peningkatan kesejahteraan sosial penyandang Disabilitas	
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penduduk Lanjut Usia	
	Indeks Peranan Sosial	Peningkatan Peranan Sosial Pemerintah	
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penerima Manfaat	Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Pendampingan Kewirausahaan dan permodalan bagi penerima manfaat	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di tingkat RT	
	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Fakir Miskin	
	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bencana	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Dinas Sosial
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	Sosialisasi Kesiap Siagaan Bencana pada daerah rawan bencana	
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	pemberian layanan sosial bagi korban bencana	
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	Pengelolaan taman makam pahlawan	Dinas Sosial
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Penyusunan Dokumen Ketenagakerjaan	
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi	Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Peningkatan daya saing tenaga kerja lokal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Pendampingan pekerja dalam perlindungan hak-hak pekerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Peningkatan Jumlah Anggaran Responsif Gender Berbasis Outcome	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Pelatihan Tenaga kerja perempuan	
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Pencegahan Kekerasan dan TPPO Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Pelatihan Keluarga tentang Hak Anak dan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Pemutakhiran data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Peningkatan jumlah sekolah dengan standar layak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	peningkatan layanan komprehensif anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	peningkatan perlindungan anak	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Peningkatan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Bulog dan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Pembinaan lumbung dan rehabilitasi lumbung	
		Bantuan gabah	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Pengembangan pangan lokal	Dinas Ketahanan Pangan
		Konsumsi pangan Bergizi, Beragam, Sehat dan Aman (B2SA)	
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah (Desa/Kelurahan) Rentan Rawan Pangan	Bantuan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Menjamin mutu produksi tanaman pangan melalui registrasi dan sertifikasi	Dinas Ketahanan Pangan
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Sertifikasi SDM penilai pemerintah	
Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Presentase Penyelesaian pembebasan lahan dan penerima santunan terhadap hasil ganti kerugian tanah untuk pembangunan	Ganti Rugi Lahan	
Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Sertifikasi Tanah Ulayat	
Penagelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Pengelolaan Tanah Kosong	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
Pengurusan Hak Hak Atas tanah	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Pemenuhan dokumen yang dibutuhkan untuk penetapan hak atas tanah	
Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	Pemenuhan dokumen kepemilikan atas tanah	
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya	peningkatan kompetensi SDM bidang pertanahan	
Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau	Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata	Penataan pertanahan di wilayah pesisir, laut, dan pulau	
Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan informasi pertanahan	
Penanganan Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persentase penyelesaian Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Pendampingan Hukum penyelesaian dokumen kepemilikan tanah pemerintah daerah	
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase penyelesaian Kasus Sengketa Pertanahan yang difasilitasi dan dilakukan melalui mediasi	Mediasi Sengketa Lahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN	Persentase proses pentapan subjek dan objek redistribusi tanah yang telah diinventarisasi dan diidentifikasi	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Dinas Perumahan dan Permukiman

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Konsolidasi penggunaan tanah	Dinas Perumahan dan Permukiman
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi KLH	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Menekan tingkat pencemaran Air	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	melakukan uji emisi karbon kendaraan	
		Penanaman pohon	
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	Penertiban penggunaan lahan	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah R3 yang Terkelola	pengelolaan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Pemantauan kepemilikan izin lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Pendamping/Pengawas Lingkungan Hidup Yang ditingkatkan kompetensinya	peningkatan kompetensi pengawas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	penyelsaian sengketa tindak pidana lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	pemenuhan kebutuhan TPA dan TPSA	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Layanan Dukcapil Keliling	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	insentif pembuatan KTP Digital	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Integrasi kepengurusan dokumen kependudukan	
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	penyebarluasan informasi pencatatan sipil melalui RT	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kepemilikan Akta Kelahiran	Integrasi kepengurusan dokumen kependudukan	
	Kepemilikan Akta Perkawinan	Integrasi kepengurusan dokumen kependudukan	
	Kepemilikan Akta Kematian	Integrasi kepengurusan dokumen kependudukan	
	Kepemilikan Akta Perceraian	Integrasi kepengurusan dokumen kependudukan	
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Peningkatan kualitas informasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	penyusunan data profil kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnta Kualitas penataan desa	menyusun Road Map Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
		pendampingan desa dalam menetapkan prioritas lokasi pembangunan infrastruktur	
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	persentase jumlah desa yang telah melakukan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga dalam kecamatan, kabupaten	Pendampingan Kerjasama ekonomi desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya. 2. Persentase fasilitasi tata kelola desa.	pelatihan aparatur desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	pendampingan dan pemberdayaan LKD dan Lembaga Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR))	Pembentukan Kampung KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	Sosialisasi risiko pernikahan dini	
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	Kerjasama pemerintah dan praktik kesehatan bidang kandungan untuk penggunaan Kontrasepsi modern	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	penyediaan alat kontrasepsi	
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Pendampingan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat	Koordinasi dengan Dinas PUTR tentang kebutuhan infrastruktur penunjang konektifitas	Dinas Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Pemenuhan Kelengkapan Jalan	
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	Pemantauan Alur Pelayaran	Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	penegakan standar pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Menyusun arsitektur SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatatan kualitas SDM Auditor IT	
		Pemenuhan Peta Proses Bisnis	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Intensitas pendampingan dan pendampingan koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Peningkatan akses pasar pada koperasei	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Pelatihan koperasi dalam peningkatan produksi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Penampungan audit dan penyusunan laporan keuangan koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	Pelatihan kewirausahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Bantuan kewirausahaan	
		Pembentukan Kelompok Wirausaha Muda	
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UMKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Pendampingan kerjasama ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	kemudahan investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Insentif Investasi untuk jumlah investasi tertentu	
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Ekspose Potensi Investasi dan Jaminan Keamanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Pendampingan Izin Usaha Bagi UMKM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	pemberantasan mafia izin usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	<i>Update</i> Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Open Akses Informasi Penanaman Modal	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	Peningkatan Jumlah Wirausaha Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda	Pelatihan atlet	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Penguatan masyarakat pramuka	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Implementasi Satu Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Peningkatan keamanan IT Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Melibatkan masyarakat dalam aktivitas kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	pelestarian kebudayaan lokal	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Pengenalan masyarakat terhadap sejarah lokal	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Cagar Budaya yang Dilestarikan	pelestarian cagar budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	inventarisir dan penetapan warisan budaya tak benda	
Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	pelaksanaan event di museum	
		Kerjasama dengan institusi pendidikan dalam pengenalan sejarah	
Perfilman Nasional	persentase Pelaku Industri Perfilman yang Tervalidasi	inventarisir dan pelatihan pelaku industri perfileman	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Pelaksanaan perpustakaan keliling	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	Pengarsipan dokumen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Digitalisasi arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Bantuan alat tangkap	Dinas Perikanan
		Subsidi Bahan Bakar bagi nelayan Miskin	
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Bantuan Pakan Ikan bagi petani ikan miskin	Dinas Perikanan
		Pelatihan penggunaan metode produksi ikan modern	
		Bantuan Peralatan produksi perikanan	
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi dan terstandarisasi baik	Pemantauan standarisasi produksi perikanan	Dinas Perikanan
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Subsidi harga Ikan bagi masyarakat miskin	Dinas Perikanan
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Pelaksanaan Event kepariwisataan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
		Pemenuhan kebutuhan fasilitas penunjang kepariwisataan	
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran	Optimalisasi Media Sosial dalam pemasaran	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Insentif bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	pendampingan pengurusan HAKI bagi pelaku ekonomi kreatif	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Bantuan Pupuk dan pestisida	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Produksi Hortikultura	Bantuan Pupuk dan pestisida	
	Peningkatan Produksi Perkebunan	Bantuan Pupuk dan pestisida	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	Pemberian reward dan punishment dalam kawasan LP2B	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat PRa NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Vaksin PHMS dan Pemantauan izin usaha asal hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan bencana Pertanian	Pembentukan tim cepat tanggap bencana pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase Penanganan dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	pemenuhan sarana dan prasarana penanganan bencana pertanian	
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	pendampingan pengurusan izin usaha pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Pelatihan Penyuluh Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase Kelembagaan Koperasi tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Pembentukan koperasi pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Pelatihan dan pendampingan penyediaan RBT	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Rehabilitasi sarana perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemenuhan kebutuhan bahan pokok dan barang penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Penanganan pengaduan konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Fasilitasi Promosi produk lokal	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	insentif investasi pada kawasan industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigrasi yang diberangkat sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh menteri	koordinasi dengan kementerian terkait	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	pembinaan dan pelatihan transmigran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Sekretariat Daerah
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Sekretariat Daerah
4.02 SEKRETARIAT DPRD			

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penetapan Ranperda tahunan	Inventarisasi dan harmonisasi kebutuhan peraturan daerah	Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	intensifikasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah	
5.01 PERENCANAAN			
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Pengendalian dan evaluasi perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	sinkronisasi dokumen perencanaan	
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sinkronisasi penyusunan Renja PD pada bidang pembangunan manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Sinkronisasi Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Sinkronisasi Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA	
5.02 KEUANGAN			

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Opd Yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	pendampingan pelaksanaan tata kelola keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Alokasi belanja infrastruktur sesuai ketentuan	
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Percepatan realisasi anggaran	
	Persentase Penurunan SILPA	Peningkatan serapan anggaran	
	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	Penyusunan laporan keuangan	
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah OPD yang mengelola BMD dengan tertib	Pemberian punishment atas pelanggaran pengelolaan BMD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Perawatan aset	
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN			
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks pelayanan kepegawaian	pelayanan kepegawaian prima	Badan Kepegawaian dan Diklat
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	Research berbasis isu strategis pembangunan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Riset dan Inovasi yang Dimanfaatkan	pemanfaatan hasil reserach	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH			
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Monitoring tindak lanjut hasil audit BPK	Inspektorat
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan kapabilitas APIP	Inspektorat
7.01 KECAMATAN			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan pelayanan terhadap masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	17 Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan	pendampingan pelaksanaan pelayanan di tingkat desa	17 Kecamatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Fasilitasi peningkatan trantibum	17 Kecamatan
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Pemenuhan administrasi pemerintahan	17 Kecamatan
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	pembinaan pemerintahan desa	17 Kecamatan
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan	Sosialisasi wasawan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partaii Politik	pendidikan politik pada kader partai politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	pembinaan organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	AKTIVITAS BELANJA UNTUK MENCAPAI INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan sosial, budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Penyelesaian konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	peningkatan kepuasan layanan	Seluruh Perangkat Daerah

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2025

3.2.3 Program-Program Unggulan Nasional dan Daerah Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.2.3.1 Makan Bergizi Gratis

Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap agenda prioritas nasional di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini dirancang untuk menjawab permasalahan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, yaitu isu kekurangan gizi dan angka stunting yang cukup tinggi. Melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak sekolah serta kelompok rentan lainnya, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa generasi muda Lampung Selatan dapat tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, dan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi masa depan.

Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis tidak hanya dipandang sebagai intervensi kesehatan semata, tetapi juga sebagai strategi yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan. Anak-anak yang memperoleh asupan makanan bergizi secara teratur cenderung memiliki konsentrasi lebih baik, semangat belajar lebih tinggi, dan tingkat kehadiran di sekolah yang lebih stabil. Dengan demikian, program ini memberikan dampak ganda: memperbaiki kondisi kesehatan siswa sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran.

Lebih jauh, program ini juga membawa implikasi positif terhadap penguatan ekonomi lokal. Bahan pangan yang digunakan dalam penyediaan makanan bergizi diutamakan berasal dari produk petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM setempat. Mekanisme ini bukan hanya menjamin kualitas makanan yang segar dan sehat, tetapi juga menciptakan pasar yang lebih pasti bagi hasil produksi masyarakat. Dengan cara ini, Makan Bergizi Gratis menjadi sarana sinergi antara pembangunan manusia dan penguatan ekonomi daerah, di mana keberhasilan program tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga oleh keluarga produsen pangan di berbagai desa.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui program ini menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan nasional dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan ketahanan gizi masyarakat. Dukungan penuh dari pemerintah pusat,

terutama dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan, semakin memperkuat implementasi di lapangan melalui ketersediaan anggaran, pendampingan teknis, dan sistem monitoring yang terstruktur. Harapannya, Makan Bergizi Gratis dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam menciptakan generasi emas Lampung Selatan yang sehat, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah maupun nasional.

Tabel III.10 Kerangka Kerja Logis Makan Bergizi Gratis

	Ringkasan Desain	Indikator Verifikasi Objektif	Sumber Verifikasi	Asumsi dan Risiko
Tujuan	Mewujudkan generasi muda Lampung Selatan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai, sekaligus mendukung penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional	1. Penurunan prevalensi stunting di Lampung Selatan sesuai target nasional (14% pada 2029) 2. Peningkatan hasil belajar siswa (nilai rata-rata akademik naik $\geq$ 10% dalam 5 tahun) 3. Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Lampung Selatan	1. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2. Laporan Dinas Pendidikan dan sekolah 3. Statistik BPS dan laporan IPM daerah	Asumsi 1. Konsistensi dan prioritas dukungan anggaran dari pemerintah pusat 2. Partisipasi aktif, sekolah puskesmas dan masyarakat Risiko 1. Terlambatnya pencairan anggaran Gangguan distribusi
Sasaran	1. Anak-anak sekolah dasar hingga menengah yang berasal dari keluarga rentan maupun berisiko kekurangan gizi 2. Kelompok rentan lainnya seperti anak usia dini, ibu hamil, dan menyusui 3. Petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia	1. umlah anak sekolah penerima MBG tercapai ($\geq$ 95% dari target tahunan) 2. Jumlah kelompok rentan yang mendapat tambahan gizi 3. Persentase keterlibatan penyedia pangan lokal ($\geq$ 70%).	1. Data penerima manfaat dari sekolah dan Dinas Pendidikan 2. Catatan puskesmas terkait layanan gizi 3. Laporan dinas pertanian/perdagangan terkait rantai pasok	1. Terlambatnya pencairan anggaran Gangguan distribusi
Keluaran	1. Tersedianya makanan sehat dan bergizi secara rutin untuk siswa dan kelompok sasaran sesuai standar gizi nasional 2. Meningkatnya angka kehadiran dan konsentrasi belajar siswa di sekolah 3. Laporan monitoring kesehatan dan status gizi penerima manfaat yang terukur secara berkala	1. Jumlah menu gizi seimbang disajikan setiap hari sesuai standar ($\geq$ 5 kali/minggu) 2. Tingkat kehadiran siswa minimal 95% 3. Jumlah laporan monitoring gizi tersusun setiap semester 4. Persentase bahan pangan berasal dari produsen lokal ($\geq$ 70%)	1. Daftar menu harian dan laporan dapur sekolah 2. Data absensi sisw 3. Laporan monitoring gizi dari puskesmas/sekolah 4. Dokumen kontrak kerja sama dengan penyedia pangan lokal	

	Ringkasan Desain	Indikator Verifikasi Objektif	Sumber Verifikasi	Asumsi dan Risiko
Aktivitas	1. Penyediaan dapur layanan MBG di sekolah atau satuan pelayanan gizi untuk menyiapkan makanan sehat setiap hari 2. Pengadaan bahan pangan lokal melalui kerja sama dengan petani, nelayan, peternak, dan UMKM setempat. 3. Penyusunan menu gizi seimbang oleh tenaga ahli gizi sesuai kebutuhan usia anak 4. Pemantauan kesehatan dan status gizi siswa secara rutin dengan melibatkan puskesmas dan tenaga Kesehatan 5. Pelatihan pengelola dapur dan tenaga pendukung agar pelayanan berjalan sesuai standar 6. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk menjamin keberlanjutan anggaran dan pengawasan mutu	1. Jumlah dapur MBG yang beroperasi sesuai standar 2. Jumlah tenaga pengelola dapur yang dilatih ($\geq 90\%$ dari target) 3. Jumlah kegiatan monitoring kesehatan siswa per semester	1. Laporan kegiatan sekolah dan dinas terkait 2. Daftar hadir pelatihan tenaga pengelola 3. Laporan monitoring kesehatan siswa 4. Berita acara rapat koordinasi.	

3.2.3.2 Koperasi Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan badan usaha yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama

meningkatkan kesejahteraan ekonomi bersama melalui pemberdayaan potensi lokal dan pengelolaan usaha berkelanjutan.

Program prioritas Koperasi Merah Putih di Kabupaten Lampung Selatan merupakan langkah strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pola pengelolaan usaha dan aset secara bersama-sama. Konsep ini menempatkan koperasi bukan sekadar wadah simpan pinjam tradisional, melainkan sebagai instrumen modern yang mampu menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, sarana pemasaran produk lokal, hingga pengelola usaha layanan dasar masyarakat. Landasan hukum dari program ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya revitalisasi dan pendirian koperasi modern di seluruh wilayah Indonesia sebagai penggerak utama ekonomi berbasis gotong royong. Dengan regulasi tersebut, koperasi memperoleh legitimasi kuat untuk berperan lebih luas dalam pembangunan desa, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Kehadiran Koperasi Merah Putih di Lampung Selatan memiliki nilai strategis karena memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha mikro, memperoleh akses permodalan yang lebih terjangkau, serta meningkatkan posisi tawar dalam menjual hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan lokal. Dengan adanya koperasi, rantai distribusi dapat dipersingkat, biaya logistik ditekan, dan keuntungan yang diperoleh dapat dirasakan lebih merata oleh anggota maupun masyarakat sekitar. Model pengelolaan kolektif ini juga menumbuhkan kembali semangat kebersamaan di tingkat desa, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi tersebar lebih luas dan berkeadilan.

Kabupaten Lampung Selatan mendapat kehormatan sebagai wilayah percontohan di Provinsi Lampung melalui pendirian Koperasi Merah Putih di beberapa titik strategis, seperti Kalianda, Way Urang, Sidomulyo, dan Bumisari. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi pertanian dan kegiatan ekonomi masyarakat yang beragam, sehingga koperasi dapat segera berfungsi sebagai simpul baru dalam rantai produksi dan distribusi daerah. Di Kalianda, koperasi berperan sebagai pusat distribusi pangan sekaligus penyerapan hasil nelayan dan petani pesisir, sedangkan di Way Urang dan Sidomulyo

koperasi memperkuat pengelolaan usaha tani sekaligus mendukung UMKM yang tumbuh di desa. Sementara di Bumisari, koperasi memfasilitasi pengolahan hasil bumi secara kolektif agar nilai tambah produk bisa lebih besar dan keuntungan dapat dinikmati lebih adil oleh warga. Dari beberapa titik tersebut, sejumlah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah diresmikan dan menunjukkan capaian yang membanggakan. KDMP Bumisari di Kecamatan Natar, misalnya, dinobatkan sebagai salah satu koperasi terbaik, tidak hanya di Kabupaten Lampung Selatan, tetapi juga di tingkat Provinsi Lampung, dengan inovasi berupa gerai sembako, kios pupuk subsidi, sistem keanggotaan berbasis IT yang transparan, hingga marketplace digital berbentuk website. Sementara itu, KDMP Way Urang di Kecamatan Kalianda ditetapkan sebagai koperasi percontohan di Provinsi Lampung karena memiliki unit usaha yang lengkap, mulai dari gerai sembako, agen mandiri, klinik dan apotek, pangkalan LPG, jasa pos/kurir, hingga layanan keuangan digital, sehingga benar-benar menjadi gambaran koperasi modern yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Implementasi Koperasi Merah Putih di Lampung Selatan juga dihubungkan dengan program prioritas nasional lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui sinergi ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi tulang punggung distribusi pangan sehat untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat. Produk pangan yang digunakan dalam program MBG sebagian besar diserap dari hasil tani, ternak, dan nelayan lokal yang disalurkan melalui koperasi. Dengan demikian, manfaat program menjadi berlapis: kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi, sementara ekonomi desa ikut tumbuh melalui serapan hasil produksi lokal. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan, distribusi, dan pemasaran, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan kemandirian ekonomi lokal. Dengan keterlibatan masyarakat yang aktif, dukungan pemerintah daerah, serta sinergi bersama program prioritas nasional, Lampung Selatan berpotensi menjadi contoh sukses pengembangan koperasi modern yang tidak hanya memperkuat daya tahan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel III.11 Kerangka Kerja Logis Koperasi Merah Putih

	Ringkasan Desain	Indikator Verifikasi Objektif	Sumber Verifikasi	Asumsi dan Risiko
Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara bersama-sama melalui pemberdayaan potensi lokal dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan	1. Peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga desa 2. Penurunan angka kemiskinan desa 3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap koperasi	Data BPS; Laporan keuangan desa; Survei kepuasan Masyarakat.	1. Dukungan pemerintah daerah dan desa tetap konsisten; 2. Partisipasi masyarakat tinggi; 3. Kondisi ekonomi makro stabil.
Sasaran	1. Memperkuat perekonomian desa; 2. meningkatkan nilai tukar petani; 3. menekan inflasi; 4. menciptakan lapangan kerja; 5. meningkatkan inklusi keuangan;	1. Kenaikan nilai tukar petani minimal 0,5% per tahun; 2. Tingkat inflasi desa terkendali; 3. Jumlah UMKM yang bergabung dengan koperasi meningkat; 4. Penyerapan tenaga kerja baru melalui koperasi; 5. Jumlah anggota koperasi yang mengakses layanan keuangan meningkat.	Statistik pertanian dan perdagangan; Laporan Koperasi; Data Dinas Koperasi dan UMKM.	1. Harga komoditas pertanian stabil; 2. Akses pasar terbuka luas; 3. Regulasi mendukung; 4. Tidak terjadi gangguan sosial, politik, maupun bencana besar.
Keluaran	1. Pendirian koperasi baru; 2. Pengembangan koperasi yang telah ada; 3. Revitalisasi koperasi tidak aktif.	1. Jumlah koperasi baru yang berdiri dan aktif; 2. Koperasi existing memiliki SHU meningkat setiap tahun; 3. Minimal 50% koperasi tidak aktif kembali beroperasi.	1. Akta pendirian koperasi; 2. RAT dan laporan koperasi; 3. Laporan pendampingan dan monitoring.	1. Minat masyarakat untuk menjadi anggota tinggi; 2. Persyaratan legalisasi koperasi dapat terpenuhi; 3. Pengurus koperasi memiliki kapasitas manajemen yang baik; 4. dukungan akses permodalan; 5. komitmen anggota lama untuk mengaktifkan kembali koperasi.
Aktivitas	▪ Sosialisasi dan pelatihan koperasi desa merah putih; ▪ Penyusunan AD/ART dan legalisasi koperasi baru; ▪ Pendampingan manajemen dan digitalisasi koperasi existing; ▪ Program restrukturisasi dan reaktivasi koperasi tidak aktif; ▪ Fasilitasi akses permodalan, pemasaran dan kemitraan.	1. Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan; 2. Jumlah AD/ART yang disahkan; 3. Jumlah koperasi existing yang terdigitalisasi; 4. Jumlah koperasi tidak aktif yang diaktifkan kembali; 5. Jumlah mitra usaha/permodalan yang terjalin.	1. Dokumentasi kegiatan; 2. Laporan Dinas Koperasi dan UMKM; 3. Laporan RAT 4. MoU/Perjanjian dengan mitra usaha.	1. Antusiasme peserta pelatihan tinggi; 2. Adanya pendampingan teknis dari dinas/ahli; 3. Tersedia akses teknologi digital; 4. Kemitraan dengan sektor swasta dapat terjalin.

3.2.3.3 Sekolah Unggul Garuda

Program prioritas Sekolah Garuda di Kabupaten Lampung Selatan merupakan langkah strategis dalam menghadirkan lembaga pendidikan unggulan yang berfokus pada pengembangan talenta muda berprestasi. Sekolah ini dirancang sebagai pusat pembinaan generasi dengan potensi tinggi, terutama dalam bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM), yang menjadi kunci daya saing bangsa di era global. Kurikulumnya dipadukan dengan standar internasional sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih luas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan dunia modern. Melalui pendekatan ini, Lampung Selatan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga melahirkan generasi emas yang mampu bersaing dengan siswa terbaik dari berbagai daerah bahkan tingkat global.

Keunggulan Sekolah Garuda terletak pada fasilitas modern yang disiapkan untuk mendukung proses pembelajaran. Laboratorium STEM yang lengkap, kelas digital dengan perangkat mutakhir, ruang riset, serta sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi menjadikan sekolah ini berbeda dari lembaga pendidikan konvensional. Dengan fasilitas tersebut, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat melakukan praktik, penelitian, dan inovasi sejak usia dini. Kehadiran sarana ini mendorong terbentuknya budaya ilmiah dan kreatif di kalangan pelajar Lampung Selatan, sekaligus mempercepat adaptasi mereka terhadap perkembangan teknologi global.

Sekolah Garuda bukan hanya sekadar tempat belajar, tetapi juga menjadi pusat kolaborasi dan ekosistem inovasi di tingkat daerah. Sekolah ini membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia industri, lembaga riset, dan mitra internasional yang relevan dengan bidang pengembangan talenta. Kolaborasi tersebut tidak hanya memberi manfaat berupa transfer pengetahuan dan teknologi, tetapi juga membuka jalan bagi siswa untuk mendapatkan beasiswa, akses magang, hingga kesempatan penelitian bersama. Dengan pola ini, Lampung Selatan dapat memperkuat posisinya sebagai pusat pendidikan unggulan yang mendorong lahirnya inovasi dan sumber daya manusia berkelas dunia.

Bagi Kabupaten Lampung Selatan, keberadaan Sekolah Garuda akan membawa implikasi besar terhadap pembangunan

daerah. Generasi muda yang ditempa melalui sistem pendidikan unggulan ini akan tumbuh dengan kemampuan akademis tinggi, keterampilan teknologi mutakhir, dan karakter kepemimpinan yang kuat. Mereka tidak hanya siap bersaing di tingkat nasional, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat internasional, sehingga dapat berkontribusi lebih luas terhadap pembangunan ekonomi, sosial, maupun budaya. Kehadiran sekolah ini sekaligus memperkuat citra Lampung Selatan sebagai daerah yang peduli pada kualitas pendidikan dan berorientasi pada masa depan.

Melalui Sekolah Garuda Lampung Selatan menegaskan komitmennya bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak hanya difokuskan pada pemerataan akses, tetapi juga pada penciptaan pusat-pusat unggulan yang mampu mengantarkan putra-putri terbaik daerah ini menuju pentas global. Dengan dukungan fasilitas modern, kurikulum internasional, dan jejaring kerja sama yang luas, sekolah ini akan menjadi simbol transformasi pendidikan Lampung Selatan menuju arah yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel III.12 Kerangka Kerja Logis Sekolah Garuda

	Ringkasan Desain	Indikator Verifikasi Objektif	Sumber Verifikasi	Asumsi dan Risiko
Tujuan	Meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan generasi muda berdaya saing yang tetap menjaga kearifan lokal.	1. Rata-rata nilai akademik meningkat $\geq 10\%$ per tahun. 2. 80% lulusan melanjutkan ke Sekolah/Universitas unggulan. 3. Sekolah dikenal sebagai pusat pendidikan unggulan di Kalianda.	1. Hasil Asesmen Nasion 2. Data penerimaan siswa 3. Publikasi pemerintah daerah dan laporan sekolah.	1. Dukungan regulasi Pemerintah Daerah. 2. Stabilitas sosial dan ekonomi. 3. Dukungan masyarakat desa.
Sasaran	Memberikan layanan pendidikan bermutu di wilayah pedesaan dengan integrasi teknologi, budaya lokal, dan pemberdayaan masyarakat.	1. Kurikulum nasional dan muatan lokal diterapkan. 2. 90% siswa aktif di ekstrakurikuler. 3. Tingkat kepuasan orang tua $\geq 85\%$.	1. Dokumen kurikulum dan muatan lokal. 2. Data ekstrakurikuler 3. Survei kepuasan orang tua.	1. Partisipasi aktif siswa dan orang tua. 2. Dukungan pemerintah desa dan kecamatan.
Keluaran	1. Kurikulum berbasis kompetensi, teknologi, dan budaya lokal diterapkan. 2. Guru kompeten dan terlatih 3. Fasilitas pembelajaran	1. Modul pembelajaran berbasis karakter dan budaya lokal tersedia setiap semester. 2. $\geq 80\%$ guru mengikuti pelatihan setiap tahun 3. 1 lab komputer/200 siswa. 4. 50 unit komputer/laptop baru per tahun.	1. Dokumen kurikulum dan modul pembelajaran. 2. Laporan kegiatan pelatihan guru. 3. Sertifikat pelatihan. 4. Inventaris sekolah. 5. Laporan pengadaan fasilitas. 6. Dokumentasi jaringan internet.	1. Dukungan guru dan tokoh adat lokal. 2. Tersedianya lembaga pelatihan dan pendanaan. 3. Anggaran tersedia. 4. Infrastruktur listrik dan

	Ringkasan Desain	Indikator Verifikasi Objektif	Sumber Verifikasi	Asumsi dan Risiko
	berbasis digital tersedia 4. Program pengembangan karakter, kewirausahaan seni budaya berjalan	5. Akses internet stabil di sekolah 6. ≥ 2 kegiatan leadership camp/kewirausahaan per tahun. 7. ≥ 2 kegiatan seni budaya Lampung per tahun. 8. 90% siswa ikut serta	7. Jadwal dan laporan kegiatan. 8. Dokumentasi kegiatan. 9. Laporan kegiatan pelatihan guru. Sertifikat pelatihan. 10. Inventaris sekolah. 11. Laporan pengadaan fasilitas. 12. Dokumentasi jaringan internet. 13. jadwal dan laporan kegiatan 14. Dokumentasi kegiatan.	internet mendukung. 5. Dukungaorang tua dan tokoh masyarakat. 6. Minat siswa tinggi.
Aktivitas	1. Pelatihan guru (metode inovatif dan integrasi IT) 2. Pengadaan sarana prasarana (kelas pintar, lab digital) 3. Penyusunan modul karakter dan budaya lokal 4. Pelaksanaan ekstrakurikuler (olahraga, seni, budaya, kewirausahaan) 5. Program literasi digital untuk siswa dan orang tua 6. Kerjasama dengan universitas/industri dan pemerintah daerah	1. pelatihan guru/tahun. 2. Tersedianya kelas pintar dan lab digital. 3. Modul karakter dan budaya lokal terbit setiap semester. 4. 100% siswa ikut minimal 1 ekstrakurikuler 5. MoU kerjasama eksternal/tahun.	1. Jadwal dan laporan pelatihan. 2. Laporan inventaris sekolah. 3. Dokumen modul pembelajaran 4. Data ekstrakurikuler siswa. 5. Dokumen kerjasama (MoU).	1. Dana tersedia 2. Narasumber pelatihan dan tokoh lokal tersedia 3. Mitra eksternal mau bekerja sama

3.2.3.4 Sekolah Rakyat

Program prioritas Sekolah Rakyat di Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu upaya strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran sekolah ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak, tanpa terkecuali, dan keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi masa depan mereka. Dengan disediakannya sekolah yang bebas biaya, Lampung Selatan ingin memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Model Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya menyediakan ruang kelas modern sebagai sarana utama belajar, tetapi juga melengkapi dengan fasilitas

pendukung berupa asrama, layanan kesehatan, kantin, ruang kegiatan ekstrakurikuler, serta sarana olahraga. Pola ini memberikan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung pembentukan karakter. Anak-anak tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan formal, tetapi juga terbiasa hidup disiplin, mandiri, dan bersosialisasi dalam lingkungan yang positif. Di daerah seperti Lampung Selatan yang memiliki wilayah luas dengan sebaran penduduk yang tidak merata, sistem sekolah berasrama menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi persoalan jarak dan akses menuju sekolah.

Lebih dari sekadar menjawab masalah keterjangkauan biaya dan akses, Sekolah Rakyat membawa implikasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia daerah. Dengan adanya jaminan pendidikan yang merata, angka partisipasi sekolah dapat terus meningkat, sementara angka putus sekolah dari kelompok ekonomi rentan dapat ditekan. Tidak hanya itu, kurikulum yang diterapkan di sekolah ini juga dirancang agar selaras dengan kebutuhan masyarakat, dengan memadukan pelajaran akademik, penguatan karakter, serta keterampilan praktis dan vokasi. Dengan cara ini, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga memiliki kecakapan hidup yang dapat langsung diaplikasikan dalam dunia kerja maupun kegiatan kewirausahaan.

Implementasi Sekolah Rakyat juga melibatkan peran serta pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terpadu. Pemerintah bertugas menyiapkan fasilitas dan tenaga pendidik, sementara masyarakat lokal didorong untuk ikut serta mendukung keberlangsungan sekolah melalui berbagai bentuk partisipasi. Dunia usaha dan industri dapat terlibat dengan membuka ruang kerja sama dalam hal pelatihan, penyediaan fasilitas praktik, maupun dukungan beasiswa lanjutan. Dengan model kolaboratif ini, keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program pendidikan semata, tetapi juga menjadi gerakan bersama untuk membangun generasi Lampung Selatan yang sehat, berkarakter, dan memiliki daya saing.

Sekolah Rakyat adalah gambaran nyata bagaimana sebuah program pendidikan dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial. Program ini menjawab tantangan ketimpangan akses, memperkuat kualitas pendidikan daerah, dan membentuk fondasi

generasi masa depan yang lebih baik. Lampung Selatan menempatkan program ini sebagai prioritas karena diyakini bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan nasional.

Tabel III.13 Kerangka Kerja Logis Sekolah Rakyat

	Ringkasan Desain	Indikator Verifikasi Objektif	Sumber Verifikasi	Asumsi dan Risiko
Tujuan	1. Terwujudnya akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, 2. serta membentuk generasi muda sehat, cerdas, berkarakter, serta memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat	1. Persentase peningkatan angka partisipasi sekolah 2. Persentase lulusan Sekolah Rakyat yang melanjutkan ke pendidikan tinggi atau terserap di dunia kerja	1. Data statistik pendidikan dari Dinas Pendidikan dan BPS 2. Database penerimaan siswa di perguruan tinggi dan penyerapan tenaga kerja.	1. Minat Masyarakat yang tinggi 2. Ketersediaan kesempatan kerja dan pendidikan lanjutan bagi lulusan
Sasaran	1. Meningkatkan angka partisipasi sekolah 2. Terbentuknya lulusan yang memiliki keterampilan vokasi 3. Berkurangnya kesenjangan pendidikan	1. Presentasi peningkatan APM & APK 2. Jumlah siswa yang mengikuti program pelatihan keterampilan vokasi 3. Penurunan angka putus sekolah di wilayah rentan ekonomi	1. Data laporan sekolah dan dinas pendidikan 2. Catatan kehadiran siswa dan laporan pelatihan vokasi 3. Data monitoring angka putus sekolah dari BPS dan Dapodik	Kurikulum vokasi yang sesuai kebutuhan pasar
Keluaran	1. Siswa penerima manfaat mengikuti kegiatan belajar mengajar penuh waktu 2. Kurikulum terintegrasi yang menggabungkan pendidikan akademik, penguatan karakter, keterampilan praktis 3. Tenaga pendidik dan fasilitas sekolah rakyat beroperasi dengan standard pendidikan modern	1. Presentasi kehadiran siswa dalam kegiatan belajar mengajar 2. dokumen kurikulum yang memuat aspek akademik, karakter, dan vokasi 3. Tingkat kelayakan fasilitas sekolah sesuai standar minimal peklayanan	1. Daftar hadir siswa dan laporan presensi harian 2. Dokumen kurikulum dan silabus resmi	Ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai
Aktivitas	Kegiatan utama meliputi pembangunan dan penyediaan fasilitas sekolah berasrama, rekrutmen serta pelatihan guru dan tenaga pendukung, serta seleksi	1. Jumlah unit ruang kelas, asrama, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung yang dibangun atau direnovasi sesuai	1. Laporan proyek pembangunan sekolah dan infrastruktur 2. Berita acara serah terima sarana dan prasarana	1. Dukungan anggaran pembangunan sarana prasarana 2. Dukungan pemerintah pusat dan daerah

	Ringkasan Desain	Indikator Verifikasi Objektif	Sumber Verifikasi	Asumsi dan Risiko
	penerimaan siswa dari keluarga kurang mampu. Di dalamnya juga termasuk pengembangan kurikulum terintegrasi, layanan gizi dan kesehatan, serta kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung keterampilan dan kewirausahaan siswa. Seluruh aktivitas dipantau melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala agar kualitas pendidikan dan pengasuhan tetap terjaga	standar pendidikan modern 2. Persentase kelayakan sarana dan prasarana 3. Persentase tenaga pendidik dan pendukung yang telah mengikuti pelatihan kompetensi dan sertifikasi	3. Daftar guru/staf yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi 4. Laporan monitoring dan evaluasi semesteran.	terhadap program sekolah rakyat

3.2.3.5 Pengembangan Agroeduwisata Berkelanjutan (*Triangle Diamond*)

Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi yang besar di sektor pariwisata. Kondisi topografis Lampung Selatan yang beragam, mulai dari pegunungan hingga panjang garis pantai, yang didukung dengan ragam budaya dan kearifan lokal akan menjadi daya tarik bagi wisatawan jika dikelola secara baik, terintegrasi dan berkelanjutan. Atas dasar hal tersebut maka perlu adanya konsep pengembangan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi wilayah Lampung Selatan yaitu melalui konsep perspektif agro edu wisata. Agro edu wisata merupakan suatu bentuk konsep pariwisata tematik yang menempatkan unsur agrikultur sebagai daya tarik dan menyajikannya dalam bentuk informasi interaktif (edu) dengan tujuan memberikan pengalaman yang berbeda kepada wisatawan.

Program prioritas Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk Pengembangan Potensi Wisata dengan Konsep Agro Edu Wisata merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak perekonomian. Selama ini, Lampung Selatan dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari keindahan pantai, panorama gunung, hingga potensi pertanian dan perkebunan yang bernilai edukatif. Namun,

potensi besar tersebut belum sepenuhnya berkembang dan daerah ini masih relatif minim mendapat ekspos sebagai destinasi wisata unggulan di tingkat nasional. Melalui program ini, pemerintah berupaya menghadirkan terobosan baru yang tidak hanya menonjolkan keindahan alam, tetapi juga memadukannya dengan nilai pendidikan dan pengalaman berbasis pertanian serta budaya lokal.

Konsep agro edu wisata yang diusung dalam program ini berfokus pada pengembangan kawasan wisata yang tidak hanya menawarkan hiburan, melainkan juga edukasi mengenai dunia pertanian, lingkungan, dan kearifan lokal masyarakat. Wisatawan yang datang dapat menikmati keindahan alam, sekaligus memperoleh pengalaman belajar tentang proses pertanian, pengolahan hasil bumi, hingga praktik keberlanjutan lingkungan. Dengan cara ini, sektor wisata Lampung Selatan tidak hanya menghadirkan destinasi rekreasi, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam dan pemberdayaan sektor pertanian.

Sebagai bagian dari perencanaan yang terarah, pemerintah menetapkan deliniasi kawasan atau zoning yang disebut *Diamond Triangle*, mencakup wilayah Kalianda, Rajabasa, dan Bakauheni. Kawasan ini dipilih karena memiliki daya tarik wisata yang beragam sekaligus saling melengkapi. Kalianda dikenal dengan pantainya yang indah dan sentra perkebunannya, Rajabasa memiliki pesona gunung anak Krakatau dan sumber air panas yang khas, sementara Bakauheni menjadi pintu gerbang utama bagi wisatawan dari Pulau Jawa dengan potensi pengembangan kawasan wisata modern. Dengan membangun keterpaduan antarwilayah ini, konsep *Diamond Triangle* diharapkan mampu menghadirkan destinasi wisata terpadu yang memperkuat citra Lampung Selatan sebagai daerah tujuan wisata baru yang layak diperhitungkan.

Konsep agro edu wisata ini juga diarahkan untuk melibatkan masyarakat lokal secara aktif, baik sebagai pelaku usaha wisata, pengelola homestay, maupun penyedia jasa pemandu dan edukator. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, tetapi tersebar luas hingga ke tingkat desa. Kehadiran wisatawan yang meningkat diharapkan akan

memperkuat perputaran ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah berbasis lokal. Pada saat yang sama, kolaborasi dengan dunia pendidikan dapat menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium alam yang mendukung kegiatan penelitian, pengabdian, maupun praktik lapangan bagi pelajar dan mahasiswa.

Melalui pendekatan yang mengintegrasikan potensi alam, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, Pengembangan Potensi Wisata dengan Konsep Agro Edu Wisata di Lampung Selatan diharapkan dapat mengangkat citra daerah ini ke panggung nasional bahkan internasional. Keberhasilan program ini tidak hanya akan memperluas eksposur Lampung Selatan sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi juga menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan yang berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel III.14 Kerangka Kerja Logis *Triangle Diamond*

	Ringkasan Desain	Indikator Verifikasi Objektif	Sumber Verifikasi	Asumsi dan Risiko
Tujuan	1.Menciptakan daya tarik kawasan destinasi yang lebih kuat 2.Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas 3.Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal	1. Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan dalam kawasan <i>diamond triangle</i> 2. Persentase Ruas Antar Simpul dalam Kategori Jalan Mantap 3. Persentase kenaikan omzet UMKM Pariwisata	BPS, Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, BPPRD, BPKAD dan Survey Mandiri	Asumsi 1. Pertumbuhan ekonomi stabil 2. Minat Wisatawan berkunjung meningkat 3. Masyarakat lokal bersedia melestarikan tradisi dan budaya 4. Ada regulasi pelestarian budaya dari Pemerintah Daerah Resiko 1. Krisis ekonomi nasional menurunkan daya beli wisatawan 2. PAD tidak bertambah karena kebocoran retribusi
Sasaran	1.Peningkatan Waktu Lama Tinggal Wisatawan 2.Terciptanya kawasan pariwisata yang berkelanjutan 3.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Lama tinggal rata rata wisatawan (average length of stay) 2. Jumlah destinasi wisata dengan sistem pengelolaan air bersih dan sanitasi yang memadai 3. Pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah	BPS, Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, BPPRD, BPKAD dan Survey Mandiri	5. Pemerintah konsisten mendukung pembangunan infrastruktur 6. Masyarakat lokal terbuka dan menerima wisatawan 7. Tidak ada bencana alam besar
Keluaran	1.Konsolidasi Budaya 2.Konsolidasi Infrastruktur 3.Konsolidasi Perilaku	1.Persentase atraksi wisata yang berbasis kearifan lokal 2.Panjang jalan dan transportasi yang	BPS, Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas	

	Ringkasan Desain	Indikator Verifikasi Objektif	Sumber Verifikasi	Asumsi dan Risiko
	4.Konsolidasi Ekonomi	terkoneksi antar destinasi dalam kondisi baik 3.Indeks kepuasan wisatawan 4.Persentase PAD yang bersumber dari sektor pariwisata	Pariwisata, BPPRD, BPKAD dan Survey Mandiri	3. Komersialisasi budaya yang berlebihan sehingga kehilangan otentisitas 4. Konflik Internal komunitas adat atau sengketa hak budaya
Aktivitas	1.Penyusunan <i>Calender of Event</i> 2.Peningkatan Kapasitas SDM baik ASN maupun kelompok masyarakat 3.Dukungan belanja OPD terhadap konsep pembangunan agro edu wisata	1.Jumlah Event yang dilaksanakan dalam 1 Tahun 2.Jumlah Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata 3.Persentase Jumlah Belanja OPD mendukung Agro edu wisata terhadap APBD	BPS, Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, BPPRD, BPKAD dan Survet Mandiri	5. Infrastruktur rusak karena bencana atau tidak terpelihara 6. Masyarakat lokal hanya jadi penonton, tidak ikut dalam ekonomi pariwisata

Pengembangan agroeduwisata, yang menggabungkan unsur pertanian, pendidikan, dan pariwisata, bisa mendapatkan banyak manfaat dari penerapan prinsip *resilience*, *empowerment*, dan *sustainability*. Berikut penjelasannya dalam konteks agroeduwisata:

1. *Resilience* (Ketahanan) dalam Agroeduwisata

Resilience dalam agroeduwisata merujuk pada kemampuan destinasi wisata dan masyarakat lokal untuk menghadapi dan bangkit kembali setelah menghadapi tantangan, baik itu krisis ekonomi, perubahan iklim, atau pandemi seperti COVID-19 yang berdampak pada sektor pariwisata. Pengembangan agroeduwisata yang *resilient* bisa melibatkan:

- Diversifikasi produk dan layanan: Misalnya, agroeduwisata bisa menawarkan berbagai jenis pengalaman, dari belajar bertani, mencicipi produk lokal, hingga workshop atau kegiatan lain yang tidak tergantung hanya pada satu jenis produk. Hal ini memberikan fleksibilitas saat salah satu sektor atau kegiatan mengalami penurunan.
- Pemulihan dari bencana alam: Mengingat banyak agroeduwisata yang bergantung pada pertanian, seperti kebun buah atau tanaman, mereka harus mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan bencana alam (misalnya kekeringan atau banjir). Oleh karena itu,

ketahanan dalam mengelola sumber daya alam dan pertanian sangat penting untuk memastikan kelangsungan destinasi agroeduwisata.

- Pendekatan berbasis masyarakat: Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan agroeduwisata akan membantu meningkatkan ketahanan mereka terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi. Ini juga memperkuat jaringan sosial dan komunitas.

2. *Empowerment* (Pemberdayaan) dalam Agroeduwisata

Empowerment atau pemberdayaan dalam konteks agroeduwisata sangat penting karena model ini melibatkan banyak *stakeholder*, terutama masyarakat lokal. Pemberdayaan bisa tercipta dengan cara:

- Pelatihan dan peningkatan keterampilan: Agar masyarakat lokal dapat mengelola agroeduwisata dengan baik, mereka perlu diberi pelatihan terkait berbagai aspek, seperti manajemen wisata, keterampilan berbicara di depan umum, pengetahuan tentang pertanian organik, atau pemasaran produk lokal. Pelatihan ini memberi mereka kemampuan untuk mengelola bisnis secara mandiri.
- Keterlibatan dalam pengambilan keputusan: Masyarakat lokal harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan agroeduwisata. Misalnya, mereka bisa dilibatkan dalam merancang program wisata, pemilihan produk yang akan ditawarkan, atau kebijakan harga. Dengan demikian, mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan destinasi.
- Memberdayakan perempuan dan kelompok marginal: Dalam banyak kasus, perempuan atau kelompok yang terpinggirkan di desa bisa diberdayakan melalui agroeduwisata. Misalnya, perempuan bisa menjadi pengelola homestay atau pelatih untuk kegiatan edukasi pertanian. Pemberdayaan ini tidak hanya memberikan mereka penghidupan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kesetaraan gender dalam komunitas.

3. *Sustainability* (Keberlanjutan) dalam Agroeduwisata

Sustainability menjadi salah satu aspek terpenting dalam pengembangan agroeduwisata, karena jika tidak dikelola dengan bijaksana, bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Keberlanjutan bisa diwujudkan dalam beberapa cara:

- Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana: Dalam agroeduwisata, penggunaan sumber daya alam seperti tanah, air, dan energi harus dilakukan secara efisien. Teknik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik, *agroforestry*, atau penggunaan energi terbarukan (misalnya solar panel) bisa diterapkan. Hal ini memastikan bahwa kegiatan agroeduwisata tidak merusak ekosistem dan tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
- Pendidikan dan kesadaran lingkungan: Agroeduwisata menawarkan kesempatan yang baik untuk mendidik pengunjung tentang pentingnya keberlanjutan, baik itu dalam hal konsumsi yang bertanggung jawab atau pelestarian lingkungan. Pengunjung bisa diajak untuk memahami cara-cara pertanian yang ramah lingkungan dan pentingnya menjaga keberagaman hayati.
- Ekonomi lokal yang berkelanjutan: Agar agroeduwisata bisa berkelanjutan, perlu ada model ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pihak pengelola, tetapi juga masyarakat lokal. Ini bisa meliputi pembelian produk lokal oleh pengunjung, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pemberian kesempatan bagi para petani untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.

Penerapan Ketiga Prinsip dalam Agroeduwisata, antara lain:

1. **Proyek Wisata Desa Organik:** Sebuah desa yang mengembangkan agroeduwisata dengan menekankan pertanian organik sebagai daya tarik utama. Masyarakat desa diberi pelatihan tentang cara bertani yang ramah lingkungan dan cara menjual produk mereka langsung kepada wisatawan. Selain itu, mereka juga dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan desa wisata ini, dari mulai kegiatan edukasi hingga penginapan berbasis komunitas.

Ini menciptakan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam sektor wisata ini.

2. Kebun Edukasi yang Ramah Lingkungan: Sebuah kebun yang mengintegrasikan metode pertanian berkelanjutan dengan kegiatan edukasi bagi pengunjung. Di sini, pengunjung belajar tentang cara bercocok tanam dengan metode yang ramah lingkungan, seperti *agroforestry*, dan cara mengelola kebun dengan sistem sirkular. Program ini memberikan pelatihan kepada petani lokal dan mengedukasi pengunjung tentang pentingnya menjaga keberagaman hayati dan meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan pertanian.

Ketiga prinsip ini—*resilience*, *empowerment*, dan *sustainability*—dapat diterapkan secara harmonis dalam pengembangan agroeduwisata untuk menciptakan destinasi yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu agar agroeduwisata dapat bertahan dalam jangka panjang, memberdayakan masyarakat lokal, serta melestarikan alam yang menjadi daya tarik utama.

3.2.3.6 Kawasan Pertanian Anak Nusantara

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat Prioritas Nasional nomor 2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Sasaran dalam RPJMN antara lain meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus) dengan arah kebijakannya swasembada pangan. Terdapat 8 Program hasil terbaik cepat (*quick wins*) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang mana terdapat 1 program khusus pangan yang dapat diterapkan di Kabupaten yaitu Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan Nasional.

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai program Pertanian Modern diberi nama Kawasan Pertanian Anak Nusantara dimana kondisi existing dan rencana penataan kawasan sebagai berikut :

1. Luas Lahan Baku Sawah di Lampung Selatan berdasarkan Kepmen ATR/BPN Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 Tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Kabupaten Lampung Selatan seluas 38.654,74 Ha yang tersebar di 17 kecamatan.
2. Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro terdapat lahan sawah seluas 1.335 Ha dalam satu hamparan yang merupakan bagian dari proyek Rawa Sragi yang dibangun pada Tahun 1985. Kondisi existing sebagai berikut :
 - a. Merupakan lahan sawah tadah hujan
 - b. Rata-rata Indek Pertanaman 1,8
 - c. Musim kemarau, rentan kekeringan dan musim hujan rentan banjir disebabkan *Catchment area*/daerah tangkapan air menjadi pemukiman dan kebun, pendangkalan dan penyempinan saluran primer/sekunder/tersier serta banyak pintu air yang rusak.
 - d. Sumber air dari air tanah menggunakan pompa air *submersible*
 - e. Jaringan listrik dan daya listrik untuk operasional pompa air *submersible* belum memadai
3. Rencana penataan Kawasan :
 - a. Kawasan dinamai dengan Kawasan Pertanian Anak Nusantara dan merupakan *pilot project* kawasan pertanian yang mengusung konsep Agroeduwisata, yang pengelolaan lahan menerapkan modernisasi pertanian/ *smart farming*.
 - b. Penataan kawasan tersebut, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
 - c. Tahapan kegiatan :
 - Penataan lahan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan estetika
 - Pembangunan dan fasilitasi prasarana dan sarana pertanian seperti:

1. jalan usaha tani sesuai dengan sifat dan karakteristik lahan
 2. Tata kelola air
 3. Penerapan mekanisasi pertanian (*Combine Harvester*, Traktor Roda 4, Pompa Air, *Drone Sprayer* dan lainnya)
 4. Jaringan listrik dan penambahan daya listrik
- Penataan dan pengelolaan jaringan irigasi (normalisasi saluran, peninggian tanggul, pembuatan pintu-pintu air, Pembangunan jaringan irigasi (long storage dan lainnya)
 - Penguatan kelembagaan masyarakat (Poktan, Gapoktan, KWT, koperasi dan lainnya)

Program prioritas Pertanian Anak Nusantara di Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu terobosan besar dalam upaya mendorong transformasi sektor pertanian daerah. Program ini lahir dari kesadaran bahwa pertanian tidak hanya sekadar aktivitas produksi pangan, melainkan pilar utama ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan baru yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Langkah konkret yang kini digulirkan adalah pengembangan kawasan pertanian modern seluas 1.019 hektare di Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro. Kawasan ini dirancang sebagai pusat penerapan konsep smart farming yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem irigasi presisi, mekanisasi, serta pola tanam berkelanjutan untuk menghasilkan produktivitas tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai sebuah *pilot project*, kawasan pertanian modern di Trimomukti tidak hanya berfungsi sebagai lahan produksi, melainkan juga sebagai pusat pembelajaran, riset, dan inovasi pertanian. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, para petani akan diperkenalkan dengan teknologi sensor tanah, penggunaan drone untuk pemetaan lahan, aplikasi digital untuk memantau pertumbuhan tanaman, hingga sistem pasar berbasis daring yang membuka akses lebih luas bagi hasil pertanian. Dengan cara ini, petani tidak hanya menghasilkan komoditas dengan kualitas lebih baik, tetapi juga memperoleh

pemahaman baru mengenai pengelolaan usaha tani yang profesional. Lampung Selatan pun berpeluang menjadi rujukan daerah lain dalam penerapan pertanian berbasis teknologi cerdas di Indonesia.

Inisiasi program ini dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun) Kabupaten Lampung Selatan yang bekerja sama erat dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dukungan penuh pemerintah pusat menunjukkan bahwa pengembangan kawasan Trimomukti dipandang strategis dalam kerangka pembangunan pertanian nasional. Kolaborasi lintas level pemerintahan ini memungkinkan tersedianya dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta jaringan pemasaran yang lebih kuat. Dengan adanya sinergi tersebut, para petani di Lampung Selatan tidak lagi bekerja sendiri, melainkan menjadi bagian dari gerakan besar pertanian cerdas yang menjanjikan masa depan lebih sejahtera.

Melalui Pertanian Anak Nusantara, wajah pertanian Lampung Selatan diarahkan untuk lebih modern, berdaya saing, dan mampu memberikan nilai tambah tinggi bagi masyarakat. Program ini bukan hanya menjawab tantangan rendahnya produktivitas dan keterbatasan akses pasar, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk tertarik kembali pada dunia pertanian. Dengan memadukan teknologi, inovasi, dan kolaborasi, kawasan pertanian cerdas di Trimomukti diharapkan menjadi titik awal lahirnya model pembangunan pertanian baru yang lebih maju dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Lampung Selatan sebagai salah satu lumbung pangan penting di Indonesia.

Tabel III.15 Kerangka Kerja Logis Pertanian Anak Nusantara

	Ringkasan Desain	Indikator Verifikasi Objektif	Sumber Verifikasi	Asumsi dan Risiko
Tujuan	- Mewujudkan transformasi sektor pertanian Lampung Selatan menuju sistem yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan - Meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada pangan nasional	- Produktivitas padi dan komoditas utama meningkat $\geq 20\%$ dalam 5 tahun. - Indeks Pertanaman (IP) naik dari 1,8 menjadi $\geq 2,5$ - Luas lahan sawah terjaga sesuai SK ATR/BPN (38.654,74 Ha)	- Laporan Dinas TPH-Bun Lampung Selatan - Data BPS sektor pertanian - Laporan monitoring Kementerian Pertanian.	Asumsi - Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dn daerah - Infrastruktur penunjang dapat dibangun sesuai rencana dan jadwal Risiko

	Ringkasan Desain	Indikator Verifikasi Objektif	Sumber Verifikasi	Asumsi dan Risiko
	3. Menghadirkan model pertanian berbasis teknologi cerdas (<i>smart farming</i>) sebagai percontohan di tingkat provinsi maupun nasional			1. Rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian 2. Krisis iklim dan bencana alam
Sasaran	1. Petani di Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro, sebagai pionir penerapan pertanian modern 2. Masyarakat Lampung Selatan yang akan merasakan dampak peningkatan produksi pangan, distribusi, dan akses pasa 3. Generasi muda yang diarahkan untuk tertarik kembali ke sektor pertanian melalui penerapan teknologi dan inovasi	1. Jumlah petani penerima manfaat langsung minimal 2.000 orang. 2. Persentase masyarakat desa sekitar yang terlibat dalam rantai nilai pertanian $\geq 70\%$ 3. Jumlah generasi muda (usia <35 tahun) yang ikut serta minimal 20% dari total petani.	1. Data keanggotaan Poktan, Gapoktan, KWT, dan koperasi 2. Laporan Dinas Pertanian dan BPS 3. Survei partisipasi petani muda.	
Keluaran	1. Terbentuknya kawasan pertanian modern seluas 1.019 hektare dengan tata kelola yang baik 2. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian, seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan jaringan listrik 3. Meningkatnya produktivitas lahan melalui mekanisasi pertanian modern (<i>combine harvester, traktor, drone sprayer</i>). 4. Terbentuknya kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, KWT, koperasi) yang lebih kuat dan profesional. 5. Tersedianya sistem monitoring berbasis teknologi digital untuk pemetaan lahan, pertumbuhan tanaman, dan pemasaran produk	1. Luas lahan tertata sesuai rencana (1.019 Ha). 2. Panjang jalan usaha tani terbangun minimal 20 km 3. Persentase penggunaan alat modern oleh petani $\geq 70\%$. 4. Aplikasi digital pertanian beroperasi dan digunakan minimal oleh 60% petani.	1. Laporan proyek pembangunan dan infrastruktur pertanian 2. Berita acara serah terima fasilitas 3. Data pemakaian alat/mesin pertanian modern 4. Laporan pengelolaan aplikasi digital.	
Aktivitas	1. Penataan lahan pertanian yang mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan estetika 2. Pembangunan jalan usaha tani sesuai karakteristik lahan 3. Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi: normalisasi	1. Jumlah km jalan usaha tani yang dibangun 2. Jumlah saluran irigasi yang dinormalisasi (km) 3. Jumlah dan kapasitas pompa air beroperasi. 4. Jumlah alat/mesin pertanian modern yang digunakan.	1. Laporan pembangunan fisik pertanian 2. Laporan dinas terkait (Pertanian, PUPR, PLN) 3. Daftar inventaris alat/mesin pertanian	

	Ringkasan Desain	Indikator Verifikasi Objektif	Sumber Verifikasi	Asumsi dan Risiko
	saluran, peninggian tanggul, pembuatan pintu air, dan <i>long storage</i> 4. Penyediaan dan penambahan daya listrik untuk mendukung operasional pompa air <i>submersible</i> 5. Penerapan mekanisasi pertanian modern dengan alat dan mesin pertanian canggih 6. Penerapan teknologi digital untuk monitoring lahan, pemupukan, pengendalian hama, dan pemasaran hasil 7. Penguatan kelembagaan petani melalui pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi lintas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah	5. Jumlah pelatihan kelembagaan dan peserta.	4. Laporan kegiatan pelatihan kelembagaan	

3.3 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan lainnya

3.3.1 Keselarasan dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045

Visi Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan tidak bisa dipisahkan dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045. Sebab, Visi dan Misi RPJMD merupakan Visi dan Misi antara untuk mencapai Visi dan Misi RPJPD. Visi jangka panjang Kabupaten Lampung Selatan adalah “*Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan*”. Diwujudkan dengan Visi Jangka Menengah Kabupaten Lampung Selatan” *Mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”.

Misi 1 jangka panjang “*Transformasi Sosial*” dan misi 5 jangka pangjang “Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologis” diwujudkan melalui misi 1 jangka menengah “*Mewujudkan Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah pancasila*”

Misi 2 jangka panjang “*Transformasi Ekonomi*” Misi 6 jangka pangjang “Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan” dan misi 7 “Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan” diwujudkan dengan misi 5 jangka menengah

“Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berkeadilan dan berkelanjutan”.

Misi 3 jangka panjang “Transformasi Tata Kelola”, diwujudkan dengan misi 3 jangka menengah “mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance*”

Misi 4 jangka Panjang “Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan Stabilitas ekonomi makro daerah”, diwujudkan dengan Misi 2 Jangka menengah “Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai”.

Misi 8 jangka Panjang “Kecinambungan pembangunan” diwujudkan melalui misi jangka menengah 6 “mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju” dan Misi 7 “mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan daerah dan nasional”.

Tabel III.16 Keselarasan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029

MISI RPJPD	MISI RPJMD
Transformasi Sosial	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah pancasila
Transformasi Ekonomi	Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berkeadilan dan berkelanjutan
	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju
	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan daerah dan nasional
Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memajukan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan

Sumber: Data diolah, 2025

3.3.2 Keselarasan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029

Untuk menciptakan keselarasan pembangunan antara Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung, maka perlu adanya telaahan kesesuaian antara visi misi Provinsi dengan visi misi

Kabupaten/Kota. Dalam konteks pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Selatan, diketahui terdapat irisan persamaan antara substansi visi misi Kabupaten Lampung Selatan dengan substansi visi misi Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel III.17 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung, dan RPJMD Lampung Selatan

Misi RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029
Misi 1 “pertumbuhan ekonomi yang inklusif”	Misi 5 “Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berkeadilan dan berkelanjutan” Misi 6 “mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju” dan Misi 7 “mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan daerah dan nasional”
Misi 2 “sumber daya manusia yang unggul dan produktif”	Misi 4 “Memajukan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan”
Misi 3 “kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan”	Misi 1 “Mewujudkan Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah Pancasila” Misi 2 “mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai” dan Misi 3 “mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance”

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2025

Tabel III.18 Keselarasan Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung dan Lampung Selatan

Arah Kebijakan	Strategi	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Meningkatkan aksesibilitas, kualitas infrastruktur dasar, dan pelayanan publik secara adil, merata dan berkelanjutan di Seluruh Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	• Inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi • Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW • Penguatan Konektivitas jalan tematik prioritas pengembangan Kawasan;	Kecamatan Kotabaru	Penyusunan master plan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
		Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Katibung	Penyusunan Masterplan Kawasan Industri
		Kecamatan Kalianda, Kecamatan Bakauheni,	Penyusunan Masterplan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan

Arah Kebijakan	Strategi	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	• Meningkatkan kualitas jalan kabupaten prioritas pendukung pariwisata • Percepatan penyelesaian RTRW • Pembiayaan alternatif diluar APBD untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan; • Memetakan potensi pariwisata daerah (<i>existing</i> dan baru) Mengembangkan konsep pariwisata terpadu (agroeduwisata)	dan Kecamatan Rajabasa	
Mengoptimalkan potensi pantai dan pegunungan Lampung Selatan secara berkelanjutan	• Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan • Membentuk Pertanian Anak Nusantara • Mengembangkan Koperasi dan UMKM • Mengembangnkan konsep Agro Edu Wisata Terpadu • Memperkuat Peran Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan	17 Kecamatan	Mendorong Pembangunan Infrastruktur sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, dan industri makanan & minuman
Meningkatkan peran strategis dan pengaruh Kabupaten Lampung Selatan dalam kemitraan pembangunan lintas daerah, Nasional dan Internasional secara aktif, inovatif, dan berkelanjutan	• Mengembangkan Kapasitas dan <i>branding</i> daerah • Meningkatkan peran serta daerah dalam <i>Event</i> Nasional • Meningkatkan daya saing daerah melalui pengadaan <i>event</i> lokal dengan standar nasional dan internasional	17 Kecamatan	Penyusunan <i>Grand Design</i> Kawasan Pemerintahan dan Perkotaan Penyusunan Masterlan Pengembangan Wisata Kewilayahan berdasarkan konsep <i>diamond triangle</i> Penentuan <i>Calender of event</i> yang memiliki nilai bagi masyarakat
Pemenuhan Pelayanan Dasar	• Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	Kecamatan Kalianda, Kecamatan Natar, Kecamatan Kota Baru	Pengembangan SPAM
Menekan Pencemaran Lingkungan	• Optimalisasi Pengelolaan Limbah	Kecamatan Sidomulyo	Pembangunan TPST
Meningkatkan Kapasitas Produksi Energi	• Pemenuhan Kebutuhan Energi	Kecamatan Rajabasa	Menyusun Masterplan Pengembangan PLTP

Tabel III.19 Dukungan Terhadap Tujuh Program Unggulan
Provinsi Lampung

Program Unggulan Provinsi Lampung	Dukungan Program Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah Program
Makan Bergizi Gratis	Penyediaan dukungan Sarana dan Prasarana Makan Bergizi Gratis	6 Program
Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas Bumdes dan Koperasi	Penguatan regulasi yang melindungi hajat pariwisata agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat	11 Program
Lampung menjadi Lumbung Pangan Nasional	1. pengembangan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, 2. peningkatan dan optimalisasi industri kelautan yang dapat dikembangkan secara sinergi optimal dan berkelanjutan	8 Program
Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	Kompensasi Perizinan industri Energi terbarukan	6 Program
Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal tersedia dipasar Lokal	pengembangan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri	6 Program
Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan	1. penguatan akses dan mutu pendidikan, tenaga pendidik yang bersertifikasi serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan tinggi sesuai pasar tenaga kerja, 2. memberikan beasiswa bagi masyarakat tidak mampu serta siswa-siswa berprestasi 3. penguatan IPM dan IPG yang berorientasi kepada IMTAK dan IPTEK, 4. mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang guna kesejahteraan masyarakat	5 Program
Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan kemantapan Jalan di Desa	penguatan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan	3 Program

3.3.3 Keselarasan dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029

Tabel III.20 Keselarasan Visi dan Misi RPJMN dan RPJMD
Lampung Selatan

Misi RPJMN	Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2029
Misi 1 “Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM; Misi 2 “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”; Misi 7 “Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi; dan Misi 8 “Sinergi Pemerintah Daerah”	Misi 1 “Mewujudkan Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah Pancasila” Misi 2 “mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai” dan Misi 3 “mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance”
Misi 2 “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”; Misi 5 “Pembangunan Berkelanjutan”; Misi 6 “Penguatan Sistem Pertahanan Keamanan”; Misi 3 “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”	Misi 5 “Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berkeadilan dan berkelanjutan” Misi 6 “mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju” dan Misi 7 “mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan daerah dan nasional”
Misi 3 “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”; Misi 4 “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”	Misi 4 “Memajukan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan”

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2025

Tabel III.21 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD dengan
Program Strategis Nasional

Program Prioritas Nasional	Strategi RPJMD Lampung Selatan	Arah Kebijakan RPJMD Lampung Selatan
Program Makan Bergizi Gratis	Fasilitasi dan dukungan terhadap aktivitas produktif UMKM, Koperasi dan BUMD	Mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang sehat dan cerdas melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan
	Meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukungProgram Makan Bergizi Gratis	
	Pencegahan dan Percepatan penurunan stunting secara tepat sasaran dan tepat waktu	
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas infrastruktur dasar, dan pelayanan publik secara

Program Prioritas Nasional	Strategi RPJMD Lampung Selatan	Arah Kebijakan RPJMD Lampung Selatan
Madrasah yang Berkualitas	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan pesantren	adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan
	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan pesantren	
	Meningkatkan kompetensi santri dalam penguatan peran di masyarakat	
Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Pemenuhan kebutuhan kualitas pendidikan yang baik	Mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang sehat dan cerdas melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan
	Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK)	
	Menyelenggarakan sertifikasi keahlian pada Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah vokasi	
	Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	
Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang sehat dan cerdas melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan
	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C	
	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	
	Menyediakan pusat layanan kesehatan yang berstandar layanan minimal	
Program Penuntasan TBC	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	Mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang sehat dan cerdas melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan
	Melakukan kampanye pencegahan penyakit menular dan penanganan penyakit tidak menular	
	Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat	

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan

Program-program untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang pemerintah daerah sebagaimana pada Tabel dibawah terdiri dari program urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditampilkan berdasarkan urusan dan fungsi penunjang serta program yang bersifat rutin untuk memenuhi kebutuhan kinerja aparatur dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel IV.1 Daftar Program Perangkat Daerah

NO	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN
3	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
4	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
5	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN; RSUD BOB BAZAR
6	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN; RSUD BOB BAZAR
7	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
8	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
9	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
15	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
20	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
21	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
22	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
23	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
24	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
25	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
26	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
27	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
28	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
29	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
30	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
31	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
32	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	DINAS SOSIAL
33	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
34	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
35	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
36	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL
37	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
38	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
39	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
40	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
41	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
42	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
43	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
44	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
46	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
47	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
48	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
49	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
50	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN
51	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
52	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
53	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
54	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
55	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
56	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
57	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
58	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
59	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
60	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
61	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
62	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
63	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
64	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
65	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
66	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
67	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
68	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
69	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
70	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
71	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
72	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
73	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN
74	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	DINAS PERHUBUNGAN
75	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
76	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
77	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
78	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
79	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
80	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
81	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
82	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
83	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
84	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
85	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
86	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
87	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
88	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
89	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
90	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
91	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
92	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
93	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
94	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
95	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
96	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
97	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
98	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
99	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
100	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
101	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
102	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
103	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
104	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
105	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN
106	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN
107	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN
108	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN
109	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN; DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
110	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN; DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
111	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
112	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
113	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN; DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
114	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
115	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
116	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
117	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
118	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
119	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
120	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
121	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
122	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
123	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
124	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
125	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
126	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
127	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
128	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
129	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
130	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
131	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
132	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
133	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
134	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT

NO	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
135	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
136	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17 KECAMATAN
137	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17 KECAMATAN
138	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17 KECAMATAN
139	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17 KECAMATAN
140	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
141	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
142	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
143	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
144	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
145	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SELURUH PERANGKAT DAERAH

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2025

4.1.2 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional

Tabel IV.2 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).		
	01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	01.02 PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	01.03 PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	01.04 PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	01.05 PP: Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.		
	02.01 PP: Pembangunan Postur Pertahanan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	02.02 PP: Pembangunan dan Industri Pertahanan	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya - Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	02.03 PP: Komponen Cadangan dan Pendukung	-	-
	02.04 PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	02.05 PP: Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	02.06 PP: Keamanan Laut dan Hidro Oseanografi	-	-
	02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	17 Kecamatan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	-	-
	02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	-	-
	02.10 PP: Swasembada Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	02.11 PP: Swasembada Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	02.12 PP: Swasembada Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	02.13 PP: Ekonomi Syariah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	02.14 PP: Ekonomi Digital	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	02.15 PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular	-	-
	02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.17 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	-	-

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	02.20 PP: Pekerjaan Hijau / <i>Green Jobs</i>	-	-
	02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	-	-
	02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.		
	03.01 PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimedia	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Digital dan Transisi Energi Listrik		
	03.03 PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	-	-
	03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,		

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.		
	04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
	04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
	04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan <i>Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic</i> (STEAM)	--	-
	04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	04.08 PP: Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Diklat
	04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	04.12 PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	-	-
	04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	04.19 PP: Peningkatan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	04.20 PP: Peningkatan Kesenjangan dan Kepenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	-	-
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.		
	05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis		

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor		
	05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	05.03 PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Penerbangan	Dinas Perhubungan
	05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	05.06 PP: Optimalisasi Investasi Strategis Negera	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan.		
	06.01 PP: Sistem Pendapatan Sosial Ekonomi Terintegrasi	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovasi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	-	-
	06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	-	-
	06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	06.07 PP: Peningkatan Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan.		
	07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	07.02 PP: Reformasi Hukum	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	07.03 PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	Program Penataan Organisasi	Bagian Organisasi
	07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General	Program Fasilitasi dan Bantuan Hukum	Bagian Hukum
	07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
	07.06 PP: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Diklat

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunanann	Program Penataan	
	07.09 PP: Penaataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
	07.10 PP: Pemerintah Digital	Program Penataan Organisasi	Bagian Organisasi
	07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	-	-
	07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	07.15 PP: Pengendalian Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	07.16 PP: Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.		
	08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Menwujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Lingkungan Hidup
	08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2025

4.1.3 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel IV.3 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
	Kawasan Pemajuan Kebudayaan			
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga		Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan		2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				
			Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
			Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta Prambanan	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Gili Tramena		Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba		Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta Prambanan		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Gili Tramena		Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba		Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo		Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	
	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Investasi Pelayanan Kesehatan Primer		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Pencegahan dan Penurunan Stunting		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Penuntasan TBC		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Penurunan Kematian Ibu dan Anak		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Penuntasan TBC		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Investasi Pelayanan Kesehatan Primer		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Pencegahan dan Penurunan Stunting		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Penurunan Kematian Ibu dan Anak		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Investasi Pelayanan Kesehatan Primer		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Pencegahan dan Penurunan Stunting		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Penurunan Kematian Ibu dan Anak		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Investasi Pelayanan Kesehatan Primer		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Pencegahan dan Penurunan Stunting		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
	Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Pangan Hewani		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
	(KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan			Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Pangan Hewani		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
	Pengembangan Pangan Hewani		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Pangan Hewani		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Dinas Perumahan dan Permukiman
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Satuan Polisi Pamong Praja
			Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)		Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Dinas Perikanan
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Dinas Perikanan
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Dinas Perikanan
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,	Dinas Perikanan

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)		Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Dinas Perikanan
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Dinas Lingkungan Hidup

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Dinas Pendidikan
	Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, In Service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini		Sekolah Baru yang Terbangun	Dinas Pendidikan
	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Dinas Pendidikan
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan
			Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan
			Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Dinas Perhubungan
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.1.4 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Tematik Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel IV.4 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Tematik Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

No.	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Trantibum dan Sosial)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Permukiman
		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Permukiman
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial

No.	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
2	Pengendalian Inflasi	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
3	Penurunan Stunting	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
		2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas PPKB
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas PPKB
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas PPKB
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
4	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KE-MASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas TPHP
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas TPHP
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas PPPA
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas TPHP; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas TPHP; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Ketahanan Pangan	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Dinas Ketahanan Pangan

No.	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas TPHP; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas TPHP; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas TPHP
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan

4.1.5 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 (lima) tahun, baik untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel IV.5 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					620.485.299.400		640.307.497.350		667.711.276.800		689.267.529.150		711.764.675.050		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					419.953.392.623		433.374.255.700		451.923.707.364		466.512.296.087		481.755.217.300		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pendidikan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	100	100	100	419.953.392.623	100	433.374.255.700	100	451.923.707.364	100	466.512.296.087	100	481.755.217.300	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					200.378.090.577		206.779.425.450		215.629.138.750		222.590.465.150		229.855.641.550		Misi 4
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	52,88	53	54	200.378.090.577	55	206.779.425.450	56	215.629.138.750	57	222.590.465.150	58	229.855.641.550	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	95,52	95,58	95,6		95,7		95,8		95,9		96		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	81,19	79,6	79,7		79,8		79,9		80		80,5		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	30,23	35,62	36		36,5		37		37,5		38		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					77.111.800		77.111.800		79.425.154		82.602.160		77.111.800		Misi 1
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	95	97	100	77.111.800	100	77.111.800	100	79.425.154	100	82.602.160	100	77.111.800	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					76.704.400		76.704.400		79.005.532		82.165.753		76.704.400		Misi 4
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0,67	0,68	0,69	76.704.400	0,7	76.704.400	0,71	79.005.532	0,72	82.165.753	0,73	76.704.400	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	20	25	26		27		28		29		30		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					405.645.499.424		418.564.544.150		436.422.554.100		450.471.235.900		465.132.855.700		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					270.280.257.278		278.914.706.350		290.851.654.000		300.241.448.500		310.041.091.450		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	100	100	100	162.415.149.278	100	167.603.709.300	100	174.776.786.450	100	180.419.244.000	100	186.307.985.150	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	100	100	100	107.865.108.000	100	111.310.997.050	100	116.074.867.550	100	119.822.204.500	100	123.733.106.300	1.02.0.00.0.00.02.0000 - UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					131.847.851.396		136.059.899.900		141.882.970.050		146.463.490.400		151.243.942.650		Misi 4
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	20,36	20,36	20,1	113.875.405.346	19,9	117.513.301.050	19,7	122.542.616.800	19,5	126.498.757.200	19,3	130.627.576.400	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	10,4	10	9,6		9,4		9,2		9		8,8		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1	1	0,95		0,9		0,85		0,8		0,75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Kematian Ibu yang ditolong Persalinannya (%)	0,4	0,4	0,4	17.972.446.050	0,4	18.546.598.850	0,4	19.340.353.250	0,4	19.964.733.200	0,39	20.616.366.250	1.02.0.00.0.00.02.0000 - UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.587.827.200		1.638.552.300		1.708.678.750		1.763.841.350		1.821.411.650		Misi 4
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	95	95	95,8	1.537.859.600	96,6	1.586.988.450	97,4	1.654.908.100	98,2	1.708.334.800	99	1.764.093.450	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	97,2	97,2	100	49.967.600	100	51.563.850	100	53.770.650	100	55.506.550	100	57.318.200	1.02.0.00.0.00.02.0000 - UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					494.621.100		510.422.400		532.267.350		549.450.950		567.384.550		Misi 4
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	96,3	96,3	97	494.621.100	98	510.422.400	98	532.267.350	99	549.450.950	99	567.384.550	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.434.942.450		1.440.963.200		1.446.983.950		1.453.004.700		1.459.025.400		Misi 4
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	40	40	50	1.333.156.050	60	1.375.745.400	70	1.434.624.300	80	1.480.939.400	90	1.529.276.050	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					342.659.859.744		353.606.567.800		368.740.165.850		380.644.496.700		393.068.431.250		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.999.631.555		22.702.437.950		23.674.053.300		24.438.341.500		25.235.989.600		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	100	100	100	21.999.631.555	100	22.702.437.950	100	23.674.053.300	100	24.438.341.500	100	25.235.989.600	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					17.475.618.830		18.033.899.850		18.805.711.850		19.412.831.550		20.046.450.950		Misi 5
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	53,34	56,67	60	17.475.618.830	63	18.033.899.850	65	18.805.711.850	67,33	19.412.831.550	69,46	20.046.450.950	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Pemukiman Rawan Banjir (%)	24	24	28		32		36		40		44		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					18.731.059.000		19.329.446.650		20.156.705.250		20.807.440.100		21.486.578.450		Misi 5
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak dan Aman (%)	84,47	84,47	86,19	18.731.059.000	87,05	19.329.446.650	87,91	20.156.705.250	88,77	20.807.440.100	89,63	21.486.578.450	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.559.032.150		1.608.837.400		1.677.692.150		1.731.854.400		1.788.380.750		Misi 5
Meningkatnya Layanan Persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	76,42	76,42	79,28	1.559.032.150	80,71	1.608.837.400	82,14	1.677.692.150	83,57	1.731.854.400	85	1.788.380.750	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					9.928.618.500		10.245.800.900		10.684.299.050		11.029.228.700		11.389.213.950		Misi 5
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	2,06	2,06	8,06	9.928.618.500	11,06	10.245.800.900	14,06	10.684.299.050	17,06	11.029.228.700	20,06	11.389.213.950	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					6.293.646.879		6.494.705.450		6.772.664.800		6.991.312.100		7.219.502.950		Misi 5

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	9	9	11	6.293.646.879	12	6.494.705.450	13	6.772.664.800	14	6.991.312.100	15	7.219.502.950	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					44.506.956.595		45.928.788.350		47.894.441.400		49.440.655.600		51.054.359.400		Misi 5
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	4	4	8,8	44.506.956.595	11,2	45.928.788.350	13,6	47.894.441.400	16	49.440.655.600	18,4	51.054.359.400	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					430.000.000		443.736.900		462.727.850		477.666.450		493.257.100		Misi 5
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	2	2	3,2	430.000.000	3,8	443.736.900	4,4	462.727.850	5	477.666.450	5,6	493.257.100	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					216.109.381.735		223.013.272.850		232.557.759.800		240.065.606.300		247.901.157.450		Misi 5
Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	55,72	55,72	69,73	216.109.381.735	71,99	223.013.272.850	74,21	232.557.759.800	77,35	240.065.606.300	80	247.901.157.450	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					2.743.154.600		2.830.788.150		2.951.939.750		3.047.239.550		3.146.699.000		Misi 5
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	49,4	49,4	61,7	2.743.154.600	67,83	2.830.788.150	80,16	2.951.939.750	80,16	3.047.239.550	86,31	3.146.699.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.882.759.900		2.974.853.350		3.102.170.650		3.202.320.450		3.306.841.650		Misi 5
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran dan Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (%)	50	50	50	2.882.759.900	50	2.974.853.350	50	3.102.170.650	50	3.202.320.450	50	3.306.841.650	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					23.475.341.500		24.225.291.300		25.262.081.400		26.077.637.050		26.928.790.300		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.110.341.500		5.273.597.900		5.499.296.500		5.676.834.600		5.862.121.950		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	100	100	100	5.110.341.500	100	5.273.597.900	100	5.499.296.500	100	5.676.834.600	100	5.862.121.950	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					860.000.000		887.473.800		925.455.750		955.332.950		986.514.250		Misi 5
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	860.000.000	100	887.473.800	100	925.455.750	100	955.332.950	100	986.514.250	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.255.000.000		2.327.038.850		2.426.631.050		2.504.971.900		2.586.732.150		Misi 5
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	2	2	2	2.255.000.000	4	2.327.038.850	6	2.426.631.050	8	2.504.971.900	10	2.586.732.150	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman	
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					9.500.000.000		9.803.489.650		10.223.057.850		10.553.096.900		10.897.541.600		Misi 5
Meningkatnya perumahan dan permukiman yang layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Tertangani (Unit Rumah)	5,003	5,003	350	9.500.000.000	400	9.803.489.650	400	10.223.057.850	450	10.553.096.900	450	10.897.541.600	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					5.750.000.000		5.933.691.100		6.187.640.250		6.387.400.700		6.595.880.350		Misi 5
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	100	100	100	5.750.000.000	100	5.933.691.100	100	6.187.640.250	100	6.387.400.700	100	6.595.880.350	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					36.483.003.400		37.648.499.600		39.259.774.050		40.527.228.300		41.850.004.750		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.462.043.700		30.403.246.400		31.704.439.700		32.727.979.150		33.796.194.400		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	71	71	72	16.905.911.300	73	17.445.992.300	75	18.192.643.100	77	18.779.970.600	80	19.392.933.950	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	82,4	7.237.685.100	84,07	7.468.902.200	87,42	7.788.555.100	90,04	8.039.999.150	90,04	8.302.418.350	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	100	100	100	5.318.447.300	100	5.488.351.900	100	5.723.241.500	100	5.908.009.400	100	6.100.842.100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.206.943.200		2.277.446.800		2.374.916.600		2.451.587.900		2.531.605.750		Misi 2
	meningkatkan kualitas layanan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kabupaten lampung selatan	100	100	100	2.206.943.200	100	2.277.446.800	100	2.374.916.600	100	2.451.587.900	100	2.531.605.750	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
	Peningkatan Capaian Warga Negara yang Menerima	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Pelayanan Dasar Wajib Urusan Trantibum (%)														
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.475.382.500		2.554.461.750		2.663.787.200		2.749.784.350		2.839.535.100		Misi 6
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	95	95	100	2.475.382.500	100	2.554.461.750	100	2.663.787.200	100	2.749.784.350	100	2.839.535.100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.338.634.000		2.413.344.650		2.516.630.550		2.597.876.900		2.682.669.500		Misi 6
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	75	95	100	2.338.634.000	100	2.413.344.650	100	2.516.630.550	100	2.597.876.900	100	2.682.669.500	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					7.039.569.600		7.264.457.500		7.575.360.400		7.819.921.650		8.075.157.550		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.074.879.600		3.173.110.550		3.308.912.800		3.415.737.050		3.527.224.000		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Sosial	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	3.074.879.600	80	3.173.110.550	80	3.308.912.800	80	3.415.737.050	80	3.527.224.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					490.000.000		505.653.650		527.294.500		544.317.550		562.083.600		Misi 5
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	58	58	70	490.000.000	75	505.653.650	80	527.294.500	85	544.317.550	90	562.083.600	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	20	20	30		35		40		45		50		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					25.000.000		25.798.650		26.902.750		27.771.250		28.677.650		Misi 5
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (Orang)	0	0	0	25.000.000	0	25.798.650	0	26.902.750	0	27.771.250	0	28.677.650	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.940.916.500		2.002.921.550		2.088.642.250		2.156.071.500		2.226.443.950		Misi 5

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	5,24	5,24	15	1.940.916.500	20	2.002.921.550	25	2.088.642.250	30	2.156.071.500	35	2.226.443.950	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	10,63	10,63	30		40		50		60		65		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	9,17	9,17	30		40		50		60		65		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	5	5	15		20		25		30		35		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	24,01	24,01	35		40		45		50		55		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					731.308.600		754.671.150		786.969.400		812.375.750		838.891.050		Misi 5
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	5	5	15	731.308.600	20	754.671.150	25	786.969.400	30	812.375.750	35	838.891.050	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	1,39	1,39	2,5		3		3,5		4		4,5		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	5	5	10		13		15		18		20		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	43,48	43,48	55		60		65		70		75		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					619.586.000		639.379.450		666.743.500		688.268.500		710.733.000		Misi 6
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1,39	1,39	2,5	619.586.000	3	639.379.450	3,5	666.743.500	4	688.268.500	4,5	710.733.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	20	20	30		35		40		45		50		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)														
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					157.878.900		162.922.500		169.895.200		175.380.050		181.104.300		Misi 1
Meningkatnya tata Kelola taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	100	100	100	157.878.900	100	162.922.500	100	169.895.200	100	175.380.050	100	181.104.300	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.876.359.200		6.064.086.900		6.323.616.600		6.527.766.850		6.740.827.850		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.358.792.450		3.500.699.750		3.698.885.050		3.853.664.300		4.015.427.750		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	76,18	80,5	80,5	3.358.792.450	80,5	3.500.699.750	80,5	3.698.885.050	80,5	3.853.664.300	80,5	4.015.427.750	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					45.000.000		46.437.550		48.424.950		49.988.250		51.619.800		Misi 5
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Dokumen Rencana Tenaga Kerja (Dokumen)	0	0	1	45.000.000	1	46.437.550	1	48.424.950	1	49.988.250	1	51.619.800	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					926.324.200		953.960.100		992.166.150		1.022.219.650		1.053.584.900		Misi 5
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	51,3	51,3	52	926.324.200	52	953.960.100	52	992.166.150	52	1.022.219.650	52	1.053.584.900	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					299.183.600		310.698.100		326.616.650		339.138.450		352.206.800		Misi 5
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	87,71	88,11	88,51	299.183.600	88,91	310.698.100	89,31	326.616.650	89,71	339.138.450	90,11	352.206.800	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.247.058.950		1.252.291.400		1.257.523.800		1.262.756.200		1.267.988.600		Misi 5
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	99.561	99.561	99.561	1.247.058.950	99.561	1.252.291.400	99.561	1.257.523.800	99.561	1.262.756.200	99.561	1.267.988.600	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.773.699.300		4.926.201.000		5.137.031.550		5.302.874.200		5.475.955.650		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					3.281.762.100		3.386.602.150		3.531.541.400		3.645.552.950		3.764.540.900		Misi 3

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	100	100	100	3.281.762.100	100	3.386.602.150	100	3.531.541.400	100	3.645.552.950	100	3.764.540.900	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					372.347.300		384.242.400		400.687.100		413.622.750		427.123.050		Misi 4
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	64,76	65	65,5	372.347.300	66	384.242.400	66,5	400.687.100	66,5	413.622.750	100	427.123.050	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	67,34	67,34	67,34		68		69		70		71		2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					242.200.000		249.937.350		260.634.100		269.048.350		277.829.850		Misi 4
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	242.200.000	100	249.937.350	100	260.634.100	100	269.048.350	100	277.829.850	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					204.729.200		211.269.500		220.311.350		227.423.800		234.846.700		Misi 4
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	63,64	64,65	65,65	204.729.200	65,66	211.269.500	66,66	220.311.350	66,67	227.423.800	67,67	234.846.700	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					107.920.000		111.367.600		116.133.850		119.883.050		123.795.900		Misi 4
Meningkatnya Pamanfaatan data gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	107.920.000	100	111.367.600	100	116.133.850	100	119.883.050	100	123.795.900	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					178.913.700		184.629.300		192.531.000		198.746.600		205.233.500		Misi 4
Terjaminnya pemenuhan hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	61,76	62,5	64,5	178.913.700	66,5	184.629.300	68,5	192.531.000	70,5	198.746.600	72,5	205.233.500	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					385.827.000		398.152.700		415.192.750		428.596.700		442.585.750		Misi 4
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	77,81	79	80	385.827.000	82	398.152.700	84	415.192.750	86	428.596.700	88	442.585.750	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kekerasan Eksploitasi, Penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak														Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2	2	2		2		2		2		2		2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.891.826.600		5.048.102.150		5.264.149.900		5.434.096.550		5.611.461.000		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.533.066.500		3.637.639.150		3.783.226.800		3.908.163.000		4.018.895.600		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pangan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	100	100	100	3.533.066.500	100	3.637.639.150	100	3.783.226.800	100	3.908.163.000	100	4.018.895.600	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					70.000.000		72.100.000		88.045.000		90.686.350		93.406.000		Misi 5
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	82,6	82,6	94	70.000.000	95	72.100.000	98	88.045.000	100	90.686.350	100	93.406.000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					789.730.900		823.932.000		862.964.050		889.481.200		926.557.400		Misi 5
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). ((%))	92,8	89,3	95,2	789.730.900	96,4	823.932.000	97,6	862.964.050	98,8	889.481.200	100	926.557.400	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					295.039.200		304.246.000		313.423.500		322.826.200		332.974.300		Misi 5
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0,38	5	5	295.039.200	5	304.246.000	5	313.423.500	5	322.826.200	5	332.974.300	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					203.990.000		210.185.000		216.490.550		222.939.800		239.627.700		Misi 5
Meningkatnya Pengawasan mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	97,8	97,8	90	203.990.000	94,8	210.185.000	96,57	216.490.550	98,28	222.939.800	100	239.627.700	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					215.000.000		221.868.400		231.363.850		238.833.100		246.628.350		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					55.000.000		56.757.000		59.186.050		61.096.800		63.090.950		Misi 3

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian Kasus Sengketa Pertanahan yang difasilitasi dan dilakukan melalui mediasi (%)	100	100	100	55.000.000	100	56.757.000	100	59.186.050	100	61.096.800	100	63.090.950	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Misi 3
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian pembebasan lahan dan penerima santunan terhadap hasil ganti kerugian tanah untuk pembangunan	100	100	96	0	96	10.000.000	96	10.000.000	96	10.000.000	96	10.000.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					40.000.000		41.277.850		43.044.450		44.434.050		45.884.300		Misi 3
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase proses pentapan subjek dan objek redistribusi tanah yang telah diinventarisasi dan diidentifikasi (%)	100	100	100	40.000.000	100	41.277.850	100	43.044.450	100	44.434.050	100	45.884.300	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman	
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Misi 3
Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	0	0	96	0	96	10.000.000	96	10.000.000	96	10.000.000	96	10.000.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					120.000.000		103.833.550		109.133.350		113.302.250		117.653.100		Misi 3
Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	3	3	3	120.000.000	3	103.833.550	3	109.133.350	3	113.302.250	3	117.653.100	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					13.918.510.050		14.363.154.500		14.977.866.400		15.461.408.450		15.966.056.300		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.987.123.350		11.087.123.350		11.087.123.350		11.337.123.350		11.767.211.038		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	100	100	100	10.987.123.350	100	11.087.123.350	100	11.087.123.350	100	11.337.123.350	100	11.767.211.038	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					388.855.300		380.000.000		760.000.000		855.467.745		580.000.000		Misi 6
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Banyaknya dokumen kajian LH yang dibuat	3	3	3	388.855.300	3	380.000.000	3	760.000.000	3	855.467.745	3	580.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN					931.469.400		901.469.400		965.000.000		965.000.000		965.000.000		Misi 6

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	67,04	68,9	69,1	931.469.400	69,3	901.469.400	69,5	965.000.000	69,7	965.000.000	69,9	965.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	91,71	92,11	92,51		92,91		93,31		93,71		94,11		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					166.384.100		179.012.650		190.000.000		190.000.000		209.000.000		Misi 6
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	20	20	20	166.384.100	20	179.012.650	20	190.000.000	20	190.000.000	20	209.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		Misi 6
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					125.286.600		125.286.600		130.000.000		143.000.000		157.300.000		Misi 6
Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	61	61	63	125.286.600	65	125.286.600	68	130.000.000	70	143.000.000	72	157.300.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					189.126.800		205.000.000		210.500.000		216.550.000		238.205.000		Misi 6
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Pendamping/Pengawas Lingkungan Hidup Yang ditingkatkan Kompetensinya	100	100	100	189.126.800	100	205.000.000	100	210.500.000	100	216.550.000	100	238.205.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000		100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		Misi 6

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					990.264.500		1.345.262.500		1.485.243.050		1.593.267.355		1.876.240.262		Misi 6
Meningkatnya tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	30	31	32	990.264.500	33	1.345.262.500	34	1.485.243.050	35	1.593.267.355	36	1.876.240.262	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.324.735.600		7.558.733.550		7.882.230.950		8.136.699.150		8.402.274.400		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.567.589.600		6.777.399.650		7.067.457.700		7.295.622.000		7.533.745.300		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	100	100	100	6.567.589.600	100	6.777.399.650	100	7.067.457.700	100	7.295.622.000	100	7.533.745.300	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					378.912.000		391.016.800		407.751.450		420.915.200		434.653.500		Misi 3
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik (%)	99,99	99,99	99,99	378.912.000	99,99	391.016.800	99,99	407.751.450	99,99	420.915.200	100	434.653.500	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	50,78	60	65		70		75		80		86,66		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	8,4	30	40		50		60		70		85		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	43,96	50	55		60		65		70		75		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					112.348.000		115.937.100		120.898.950		124.802.000		128.875.400		Misi 3
Menigkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	99,84	99,88	99,9	112.348.000	99,93	115.937.100	99,95	120.898.950	99,98	124.802.000	100	128.875.400	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Kepemilikan akta kelahiran (%)	99,37	99,5	99,6		99,7		99,8		99,9		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Kepemilikan Akta Kematian (Akta) (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Kepemilikan Akta Perceraian (Akta) (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Kepemilikan Akta Perkawinan (Akta) (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI					235.886.000		243.421.650		253.839.550		262.034.450		270.587.000		Misi 3

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	54,29	63,63	68,41	235.886.000	77,03	243.421.650	88,52	253.839.550	94,26	262.034.450	100	270.587.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					30.000.000		30.958.350		32.283.300		33.325.500		34.413.200		Misi 3
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	30.000.000	100	30.958.350	100	32.283.300	100	33.325.500	100	34.413.200	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.222.002.500		6.420.772.200		6.695.567.300		6.911.725.450		7.137.318.550		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.499.819.800		3.611.626.000		3.766.195.800		3.887.782.850		4.014.677.000		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	3.499.819.800	80	3.611.626.000	80	3.766.195.800	80	3.887.782.850	80	4.014.677.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					347.484.000		358.584.800		373.931.450		386.003.350		398.602.150		Misi 5
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	88,51	88,51	100	347.484.000	100	358.584.800	100	373.931.450	100	386.003.350	100	398.602.150	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					21.810.000		22.506.700		23.469.900		24.227.550		25.018.300		Misi 5
Meningkatnya Fasilitas Kerja sama antar desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	21.810.000	100	22.506.700	100	23.469.900	100	24.227.550	100	25.018.300	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.108.562.700		1.143.977.150		1.192.936.900		1.231.449.400		1.271.642.900		Misi 5
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	1.108.562.700	100	1.143.977.150	100	1.192.936.900	100	1.231.449.400	100	1.271.642.900	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.244.326.000		1.284.077.550		1.339.033.250		1.382.262.300		1.427.378.200		Misi 5
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100	100	1.244.326.000	100	1.284.077.550	100	1.339.033.250	100	1.382.262.300	100	1.427.378.200	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					16.804.150.000		17.340.980.050		18.083.136.500		18.666.928.600		19.276.202.250		
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.624.900.000		4.772.648.350		4.976.907.400		5.137.580.800		5.305.267.350	Misi 3	
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	100	100	100	4.624.900.000	100	4.772.648.350	100	4.976.907.400	100	5.137.580.800	100	5.305.267.350	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					196.777.700		203.064.000		211.754.700		218.590.900		225.725.500		Misi 4
Terkendalinya Pertambahan jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2,28	2,26	2,23	196.777.700	2,21	203.064.000	2,19	211.754.700	2,16	218.590.900	2,14	225.725.500	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	19.1-19.1	18.3-18.3	17.6-17.6		16.9-16.9		16.3-16.3		15.6-15.6		15.0-15.0		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.860.793.300		5.016.077.550		5.230.754.800		5.399.623.400		5.575.862.800		Misi 4
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	64,4	64,6	65,4	4.860.793.300	65,9	5.016.077.550	66,4	5.230.754.800	66,9	5.399.623.400	67,4	5.575.862.800	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,6	11,4	11,2		11		10,8		10,6		10,4		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					7.121.679.000		7.349.190.150		7.663.719.600		7.911.133.500		8.169.346.600		Misi 4
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	77,5	82,25	85	7.121.679.000	88,75	7.349.190.150	92,5	7.663.719.600	96,25	7.911.133.500	100	8.169.346.600	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					30.796.255.030		31.780.080.800		33.140.199.600		34.210.090.850		35.326.681.050		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.464.301.730		7.702.758.400		8.032.419.800		8.291.736.750		8.562.372.450	Misi 3	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	81,77	81,77	> 88,31	7.464.301.730	> 88,31	7.702.758.400	> 88,31	8.032.419.800	> 88,31	8.291.736.750	> 88,31	8.562.372.450	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					23.278.353.300		23.987.322.400		24.397.779.800		24.835.477.500		26.139.308.600		Misi 5
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	80	80	115,25	23.278.353.300	115,25	23.987.322.400	131,25	24.397.779.800	131,25	24.835.477.500	146,85	26.139.308.600	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	45,68	47,36	48,67		49,16		50,43		51,7		53,29		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					53.600.000		60.000.000		460.000.000		820.000.000		555.000.000		Misi 5
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	1	1	1	53.600.000	1	60.000.000	1	460.000.000	2	820.000.000	2	555.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					0		30.000.000		250.000.000		262.876.600		70.000.000		Misi 5
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	16,67	16,67	16,67	0	33,33	30.000.000	33,33	250.000.000	50	262.876.600	50	70.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					14.597.472.000		15.063.806.887		15.667.142.203		16.171.609.324		16.696.625.125		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.099.325.200		5.262.229.650		5.487.441.700		5.664.597.100		5.849.485.050		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	85	85	85	5.099.325.200	85	5.262.229.650	85	5.487.441.700	85	5.664.597.100	85	5.849.485.050	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					5.804.429.350		5.989.859.250		6.246.212.300		6.447.863.700		6.658.316.850		Misi 3
Meningkatnya jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	7,14	7	7	5.804.429.350	6	5.989.859.250	6	6.246.212.300	6	6.447.863.700	6	6.658.316.850	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.693.717.450		3.811.717.987		3.933.488.203		4.059.148.524		4.188.823.225		Misi 3
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,08	3,2	3,4	3.642.687.050	3,6	3.759.057.350	3,8	3.919.936.850	4	4.046.487.250	4,3	4.178.561.350	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.511.353.050		4.655.473.850		4.854.717.950		5.011.446.450		5.175.015.950		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					3.022.868.443		3.119.437.800		3.252.943.000		3.357.960.300		3.467.561.450		Misi 3

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	80	80	85	3.022.868.443	85	3.119.437.800	90	3.252.943.000	95	3.357.960.300	100	3.467.561.450	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					134.984.207		139.296.450		145.258.000		149.947.450		154.841.600		Misi 6
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	23,58	24,75	19,48	134.984.207	20,45	139.296.450	21,48	145.258.000	22,55	149.947.450	23,68	154.841.600	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					119.214.200		123.022.650		128.287.750		132.429.350		136.751.700		Misi 6
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	60,7	63,73	66,92	119.214.200	70,26	123.022.650	73,77	128.287.750	77,46	132.429.350	81,34	136.751.700	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					196.900.000		203.190.200		211.886.300		218.726.750		225.865.800		Misi 6
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	31,3	33	34,65	196.900.000	36,38	203.190.200	38,2	211.886.300	40,11	218.726.750	42,11	225.865.800	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					137.205.500		141.588.700		147.648.350		152.414.950		157.389.650		Misi 6
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	10,68	11,21	11,77	137.205.500	12,36	141.588.700	13	147.648.350	13,65	152.414.950	14,33	157.389.650	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					270.000.000		278.625.450		290.550.000		299.930.050		309.719.500		Misi 6
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	32,65	34,28	36	270.000.000	37,8	278.625.450	39,69	290.550.000	41,67	299.930.050	43,75	309.719.500	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					630.180.700		650.312.600		678.144.550		700.037.600		722.886.250		Misi 6
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	6,74	6,74	7,43	630.180.700	7,8	650.312.600	8,19	678.144.550	8,6	700.037.600	9,03	722.886.250	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					9.178.784.200		9.472.012.050		9.877.393.550		10.196.273.200		10.529.071.350		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.441.627.850		7.679.360.150		8.008.020.150		8.266.549.400		8.536.363.000		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	100	100	100	7.441.627.850	100	7.679.360.150	100	8.008.020.150	100	8.266.549.400	100	8.536.363.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					188.883.800		194.917.900		203.259.950		209.821.950		216.670.350		Misi 7
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	1,8	1,9	2	188.883.800	2,3	194.917.900	2,5	203.259.950	3	209.821.950	3,5	216.670.350	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					290.138.850		299.407.700		312.221.700		322.301.400		332.821.050		Misi 7
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	36,4	40	43	290.138.850	45	299.407.700	48	312.221.700	50	322.301.400	55	332.821.050	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					586.582.000		605.321.100		631.227.500		651.605.900		672.873.800		Misi 3
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	91,3	92	93	586.582.000	95	605.321.100	97	631.227.500	98	651.605.900	100	672.873.800	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					601.982.300		621.213.350		647.799.900		668.713.300		690.539.550		Misi 3
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	6,94	7,2	7,5	601.982.300	8	621.213.350	8,5	647.799.900	9	668.713.300	10	690.539.550	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					69.569.400		71.791.850		74.864.350		77.281.250		79.803.600		Misi 3
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	69.569.400	100	71.791.850	100	74.864.350	100	77.281.250	100	79.803.600	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.050.451.900		6.243.741.200		6.510.959.700		6.721.158.100		6.940.531.300		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.295.690.900		3.301.070.200		3.343.288.700		3.358.487.100		3.416.487.100		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	81	3.295.690.900	82	3.301.070.200	83	3.343.288.700	84	3.358.487.100	85	3.416.487.100	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN					324.161.000		337.071.000		387.071.000		412.071.000		442.071.000		Misi 4

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,09	0,09	0,09	324.161.000	0,1	337.071.000	0,11	387.071.000	0,13	412.071.000	0,14	442.071.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.305.600.000		2.455.600.000		2.605.600.000		2.765.600.000		2.881.973.200		Misi 4
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (%)	30,35	30,4	30,5	2.305.600.000	30,65	2.455.600.000	30,75	2.605.600.000	30,85	2.765.600.000	31	2.881.973.200	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					125.000.000		150.000.000		175.000.000		185.000.000		200.000.000		Misi 4
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	42,67	42,91	43,16	125.000.000	43,4	150.000.000	43,65	175.000.000	43,89	185.000.000	44,14	200.000.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					316.543.700		326.656.050		340.636.200		351.633.200		363.110.200		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					316.543.700		326.656.050		340.636.200		351.633.200		363.110.200		Misi 3
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,53	2,8	3	316.543.700	3,2	326.656.050	3,4	340.636.200	3,6	351.633.200	3,8	363.110.200	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					254.176.800		262.296.800		273.522.500		282.352.800		291.568.550		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					254.176.800		262.296.800		273.522.500		282.352.800		291.568.550		Misi 3
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	12	12	12	254.176.800	12	262.296.800	12	273.522.500	12	282.352.800	12	291.568.550	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.805.359.200		1.863.033.550		1.942.767.300		2.005.487.050		2.070.944.450		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.061.289.200		1.095.193.400		1.142.065.300		1.178.935.450		1.217.414.950		Misi 1
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	50	50	50	1.061.289.200	50	1.095.193.400	50	1.142.065.300	50	1.178.935.450	50	1.217.414.950	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					525.000.000		541.771.750		564.958.400		583.197.350		602.232.400		Misi 1
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	100	100	100	525.000.000	100	541.771.750	100	564.958.400	100	583.197.350	100	602.232.400	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					126.870.000		130.923.000		136.526.200		140.933.750		145.533.700		Misi 1
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	100	100	100	126.870.000	100	130.923.000	100	136.526.200	100	140.933.750	100	145.533.700	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					92.200.000		95.145.400		99.217.400		102.420.500		105.763.400		Misi 1
Meningkatnya Warisan budaya yang Dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	100	100	100	92.200.000	100	95.145.400	100	99.217.400	100	102.420.500	100	105.763.400	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2	2	2		2		2		2		2		3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					6.079.311.100		6.229.910.800		6.426.060.650		6.581.083.750		6.697.103.250		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.062.761.100		5.133.360.800		5.211.060.650		5.336.083.750		5.362.103.250		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	81	5.062.761.100	82	5.133.360.800	83	5.211.060.650	84	5.336.083.750	85	5.362.103.250	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.016.550.000		1.096.550.000		1.195.000.000		1.245.000.000		1.335.000.000		Misi 4
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	49	50	52	1.016.550.000	54	1.096.550.000	56	1.195.000.000	58	1.245.000.000	61	1.335.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					0		0		20.000.000		0		0		Misi 4
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	100	100	0	0	0	0	100	20.000.000	0	0	0	0	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					513.000.000		573.000.000		668.000.000		742.000.000		865.000.000		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					343.000.000		393.000.000		438.000.000		482.000.000		565.000.000		Misi 3
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	89	90	93	343.000.000	96	393.000.000	98	438.000.000	100	482.000.000	100	565.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					170.000.000		180.000.000		200.000.000		260.000.000		300.000.000		Misi 3
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	100	100	100	170.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	100	260.000.000	100	300.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					0		0		30.000.000		0		0		Misi 3
Terlaksanya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip	Persentase SOP Penggunaan Arsip yang diterapkan (%)	100	100	0	0	0	0	100	30.000.000	0	0	0	0	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					8.045.230.200		8.302.245.200		8.657.563.300		8.937.062.150		9.228.760.650		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.769.113.700		4.921.469.100		5.132.097.350		5.297.780.900		5.470.696.250		Misi 3
Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	77	77	80	4.769.113.700	80	4.921.469.100	80	5.132.097.350	80	5.297.780.900	80	5.470.696.250	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.291.834.200		1.333.103.450		1.390.157.400		1.435.036.950		1.481.875.400		Misi 6
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	32.708,21	34.009,02	34.689,2	1.291.834.200	35.309,25	1.333.103.450	35.929,35	1.390.157.400	36.589,43	1.435.036.950	37.269,18	1.481.875.400	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.430.432.100		1.476.129.050		1.539.304.150		1.588.998.700		1.640.862.350		Misi 6
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	33.990,21	34.002,27	34.682,31	1.430.432.100	35.282,28	1.476.129.050	35.882,22	1.539.304.150	36.502,21	1.588.998.700	37.102,45	1.640.862.350	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					183.601.500		189.466.850		197.575.600		203.954.050		210.610.900		Misi 6
Meningkatnya pelaku usaha yang diawasi dan terstandarisasi baik	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi dan terstandarisasi baik	62	62	65	183.601.500	65	189.466.850	65	197.575.600	65	203.954.050	65	210.610.900	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					370.248.700		382.076.750		398.428.800		411.291.550		424.715.750		Misi 6
Meningkatnya konsumsi Ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	39,15	39,24	39,42	370.248.700	39,68	382.076.750	39,93	398.428.800	40,22	411.291.550	40,57	424.715.750	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.366.331.000		5.537.765.250		5.774.769.600		5.961.200.950		6.155.769.700		
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.201.553.350		4.335.777.350		4.521.339.250		4.667.305.200		4.819.642.300		Misi 3
Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	88	90	90	4.201.553.350	90	4.335.777.350	90	4.521.339.250	90	4.667.305.200	90	4.819.642.300	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					441.385.100		455.485.700		474.979.500		490.313.600		506.317.000		Misi 6

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	100	100	100	441.385.100	100	455.485.700	100	474.979.500	100	490.313.600	100	506.317.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					473.030.550		488.142.100		509.033.500		525.467.000		542.617.800		Misi 6
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	15	15	100	473.030.550	100	488.142.100	100	509.033.500	100	525.467.000	100	542.617.800	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					250.362.000		258.360.100		269.417.350		278.115.150		287.192.600		Misi 6
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	100	100	100	250.362.000	100	258.360.100	100	269.417.350	100	278.115.150	100	287.192.600	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					38.298.230.808		39.521.716.600		41.213.160.550		42.543.677.400		43.932.269.000		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.833.149.616		23.226.733.850		23.696.084.350		24.204.918.600		24.681.074.700		Misi 3
Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	15.616.046.016	80	15.779.070.650	80	15.929.677.250	80	16.187.782.450	80	16.402.265.600	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Peternakan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	7.217.103.600	80	7.447.663.200	80	7.766.407.100	80	8.017.136.150	80	8.278.809.100	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.632.236.100		3.960.097.550		4.081.867.700		4.321.706.100		4.498.835.350		Misi 6
Meningkatnya distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1.100.861,00	1.122.878,00	1.145.336,00	1.780.769.300	1.168.243,00	2.049.483.300	1.191.607,00	2.089.483.300	1.215.439,00	2.265.000.000	1.239.748,00	2.375.000.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Kuintal)	7.580.977,00	7.732.491,00	7.887.033,00		8.044.665,00		8.205.448,00		8.369.445,00		8.536.720		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton)	29.909,00	29.909,00	30.029,00		30.089,00		30.149,00		30.209,00		30.270,00		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
Meningkatnya distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	12	12	12	1.851.466.800	12	1.910.614.250	12	1.992.384.400	12	2.056.706.100	12	2.123.835.350	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					9.145.318.500		9.600.826.050		10.613.532.650		11.036.266.350		11.717.554.650		Misi 6

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	34.604,00	34.604,00	34.604,00	7.647.319.800	34.604,00	8.054.971.900	34.604,00	9.001.519.300	34.604,00	9.372.211.100	34.604,00	9.999.186.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
Meningkatnya distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia (%)	100	100	100	1.497.998.700	100	1.545.854.150	100	1.612.013.350	100	1.664.055.250	100	1.718.368.650	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					485.955.400		501.479.850		522.942.100		539.824.650		557.444.050		Misi 6
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100	100	485.955.400	100	501.479.850	100	522.942.100	100	539.824.650	100	557.444.050	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					787.393.400		800.000.000		835.000.000		860.000.000		885.000.000		Misi 6
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	Persentase Penanganan bencana Pertanian (%)	70	70	75	787.393.400	80	800.000.000	85	835.000.000	90	860.000.000	90	885.000.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
	Persentase Penanganan dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	65	65	70		75		80		85		90		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					343.917.200		346.917.500		351.065.350		354.328.100		357.733.250		Misi 6
Rekomendasi izin usaha pertanian	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang Diterbitkan (%)	100	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
Rekomendasi izin usaha peternakan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan yang Diterbitkan (%)	100	100	100	93.917.200	100	96.917.500	100	101.065.350	100	104.328.100	100	107.733.250	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.070.260.592		1.085.661.800		1.112.668.400		1.226.633.600		1.234.627.000		Misi 6
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	100	100	100	1.070.260.592	100	1.085.661.800	100	1.112.668.400	100	1.226.633.600	100	1.234.627.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
	Persentase Kelembagaan Koperasi tani yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	3	3	4		5		6		7		8		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					148.054.800		152.784.600		159.323.450		164.467.000		169.835.050		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					148.054.800		152.784.600		159.323.450		164.467.000		169.835.050		Misi 6
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (Rumah Tangga)	8	9	10	148.054.800	12	152.784.600	14	159.323.450	16	164.467.000	20	169.835.050	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					8.702.145.256		8.980.146.300		9.364.477.100		9.666.797.800		9.982.314.300		
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.366.374.856		6.569.756.850		6.850.928.250		7.072.102.150		7.302.929.950		Misi 3
Tata Kelola Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	6.366.374.856	80	6.569.756.850	80	6.850.928.250	80	7.072.102.150	80	7.302.929.950	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					718.346.500		741.294.950		773.020.750		797.976.750		824.022.050		Misi 5
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi barang yang efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	100	100	100	718.346.500	100	741.294.950	100	773.020.750	100	797.976.750	100	824.022.050	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					306.999.800		316.807.300		330.365.950		341.031.400		352.162.350		Misi 5
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	100	100	100	306.999.800	100	316.807.300	100	330.365.950	100	341.031.400	100	352.162.350	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					302.000.300		311.648.050		324.985.900		335.477.650		346.427.350		Misi 7
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	74	40	73	302.000.300	75	311.648.050	75	324.985.900	77	335.477.650	78	346.427.350	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					1.008.423.800		1.040.639.150		1.085.176.250		1.120.209.850		1.156.772.600		Misi 7
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	5	5	5	1.008.423.800	6	1.040.639.150	7	1.085.176.250	8	1.120.209.850	9	1.156.772.600	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.468.413.600		1.476.101.050		1.484.460.500		1.492.301.600		1.500.226.100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.413.413.600		1.419.344.050		1.425.274.450		1.431.204.850		1.437.135.250		Misi 6
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	2	2	2	1.321.116.600	2	1.363.321.350	2	1.421.668.550	2	1.467.565.400	2	1.515.465.550	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					30.000.000		30.958.350		32.283.300		33.325.500		34.413.200		Misi 6
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	5	5	5	30.000.000	5	30.958.350	5	32.283.300	5	33.325.500	5	34.413.200	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					25.000.000		25.798.650		26.902.750		27.771.250		28.677.650		Misi 6
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	60	60	60	25.000.000	70	25.798.650	80	26.902.750	90	27.771.250	100	28.677.650	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					172.451.700		177.960.850		185.577.150		191.568.200		197.820.800		
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					122.451.700		126.363.550		131.771.600		136.025.650		140.465.400		Misi 5
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigrasi yang diberangkatkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian (%)	100	100	100	122.451.700	100	126.363.550	100	131.771.600	100	136.025.650	100	140.465.400	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					50.000.000		51.597.300		53.805.550		55.542.550		57.355.400		Misi 5
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	50.000.000	100	51.597.300	100	53.805.550	100	55.542.550	100	57.355.400	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					76.405.016.150		78.845.872.200		82.220.305.350		84.874.688.600		87.644.931.150		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					58.961.348.350		60.844.944.150		63.448.976.500		65.497.350.100		67.635.131.700		Misi 3
Tata Kelola Pemerintah Bidang Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	58.961.348.350	82	60.844.944.150	84	63.448.976.500	86	65.497.350.100	88	67.635.131.700	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					14.770.042.800		15.241.890.700		15.894.210.700		16.407.336.100		16.942.858.550		Misi 2
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	14.770.042.800	100	15.241.890.700	100	15.894.210.700	100	16.407.336.100	100	16.942.858.550	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.673.625.000		2.759.037.350		2.877.118.150		2.970.002.400		3.066.940.900		Misi 3

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	2.673.625.000	100	2.759.037.350	100	2.877.118.150	100	2.970.002.400	100	3.066.940.900	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					77.649.781.900		80.130.403.600		83.559.812.000		86.257.439.600		89.072.814.000		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					39.901.753.900		40.743.823.600		41.970.362.500		42.992.537.800		45.310.037.000		Misi 3
Tata Kelola Pemerintah Daerah Bagian Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	85	39.901.753.900	85	40.743.823.600	85	41.970.362.500	90	42.992.537.800	90	45.310.037.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					37.748.028.000		39.386.580.050		41.589.449.500		43.264.901.800		43.762.777.050		Misi 3
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	80	80	80	935.875.700	85	1.210.529.350	90	1.261.055.500	100	1.314.108.300	100	1.396.847.550	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100	36.812.152.300	100	38.176.050.700	100	40.328.394.000	100	41.950.793.500	100	42.365.929.500	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
5.01 - PERENCANAAN					12.699.526.600		13.105.235.550		13.666.117.550		14.107.318.050		14.567.776.500		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.440.290.800		9.741.872.950		10.158.804.050		10.486.768.750		10.829.048.550		Misi 3
Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	9.440.290.800	80	9.741.872.950	80	10.158.804.050	80	10.486.768.750	80	10.829.048.550	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.280.569.100		1.321.484.900		1.378.047.850		1.422.542.900		1.468.980.400		Misi 3
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	90	91	92	1.280.569.100	93	1.321.484.900	94	1.378.047.850	95	1.422.542.900	96	1.468.980.400	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	90	91	92		93		94		95		96		5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.978.666.700		2.041.877.700		2.129.265.650		2.198.006.400		2.269.747.550		Misi 3
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD (%)	100	100	100	1.978.666.700	100	2.041.877.700	100	2.129.265.650	100	2.198.006.400	100	2.269.747.550	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.02 - KEUANGAN					523.830.845.200		540.565.292.650		563.700.320.850		581.898.705.050		600.891.417.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					78.576.928.661		81.087.169.250		84.557.525.100		87.287.362.650		90.136.352.950		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	82	50.681.610.161	84	52.300.699.100	86	54.539.056.150	88	56.299.783.700	90	58.137.364.000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pendapatan dan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	27.895.318.500	80	28.786.470.150	80	30.018.468.950	80	30.987.578.950	80	31.998.988.950	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					438.579.172.439		452.590.146.100		471.960.027.950		487.196.687.650		503.098.401.500		Misi 3
Meningkatnya Tata kelola Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	97	97	97	438.579.172.439	97	452.590.146.100	97	471.960.027.950	97	487.196.687.650	97	503.098.401.500	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					511.731.800		528.079.700		550.680.350		568.458.400		587.012.400		Misi 3
Meningkatnya Tata Kelola Aset dan Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	20	20	20	511.731.800	20	528.079.700	20	550.680.350	20	568.458.400	20	587.012.400	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					6.163.012.300		6.359.897.600		6.632.087.450		6.846.196.350		7.069.650.750		Misi 3
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	5	10	2,5	6.163.012.300	4	6.359.897.600	4	6.632.087.450	3,5	6.846.196.350	5	7.069.650.750	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
5.03 - KEPEGAWAIAN					10.597.926.500		10.936.490.800		11.404.548.950		11.772.731.000		12.156.983.550		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.896.880.300		7.066.606.900		7.124.664.850		7.199.607.800		7.282.687.800		Misi 3
Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang Kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	81,69	82	83	6.896.880.300	84	7.066.606.900	85	7.124.664.850	86	7.199.607.800	87	7.282.687.800	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Diklat	
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.701.046.200		3.869.883.900		4.279.884.100		4.573.123.200		4.874.295.750		Misi 3
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Indeks Pelayanan Kepegawaian (Indeks)	78	78	78	3.701.046.200	80	3.869.883.900	82	4.279.884.100	84	4.573.123.200	86	4.874.295.750	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Diklat	
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					4.983.713.600		5.142.924.600		5.363.030.600		5.536.169.500		5.716.865.600		
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.434.148.600		3.614.575.050		3.614.575.050		3.614.575.050		3.614.575.050		Misi 3
Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	83	85	87	3.434.148.600	89	3.614.575.050	90	3.614.575.050	92	3.614.575.050	95	3.614.575.050	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					527.408.800		677.066.800		677.066.800		677.066.800		677.066.800		Misi 3

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Produk Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan (%)	75	75	80	527.408.800	85	677.066.800	90	677.066.800	95	677.066.800	100	677.066.800	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.022.156.200		851.282.750		1.071.388.750		1.244.527.650		1.425.223.750		Misi 3
Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Riset dan Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	75	75	80	1.022.156.200	85	851.282.750	90	1.071.388.750	95	1.244.527.650	100	1.425.223.750	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah	
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					23.359.118.200		24.105.355.100		25.137.012.250		25.948.530.300		26.795.469.700		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.090.386.100		21.764.145.500		22.695.603.950		23.428.304.100		24.192.985.350		Misi 3
Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang Inspektorat	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	83,84	83,84	84	21.090.386.100	84,25	21.764.145.500	84,5	22.695.603.950	84,75	23.428.304.100	85	24.192.985.350	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.522.795.200		1.571.442.800		1.638.697.150		1.691.600.500		1.746.813.000		Misi 3
Menurunnya terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	84,34	85,84	87,34	1.522.795.200	88,84	1.571.442.800	90,34	1.638.697.150	91,84	1.691.600.500	93,34	1.746.813.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					745.936.900		769.766.800		802.711.150		828.625.700		855.671.350		Misi 3
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	745.936.900	Terintegrasi (Integrated)	769.766.800	Terintegrasi (Integrated)	802.711.150	Terintegrasi (Integrated)	828.625.700	Terintegrasi (Integrated)	855.671.350	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
7.01 - KECAMATAN					44.419.601.000		45.838.640.100		47.800.432.850		49.343.609.950		50.954.143.950		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.444.402.845		36.166.836.532		37.200.337.322		37.666.901.305		38.459.220.463		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.997.752.200	82	2.017.570.350	84	2.046.570.640	86	2.046.570.640	88	2.071.912.801	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Way Panji	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.629.057.733	82	1.654.790.400	84	1.711.431.500	86	1.745.467.733	88	1.796.316.550	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Way Sulan	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.865.598.750	82	1.925.197.650	84	2.007.591.950	86	2.072.404.600	88	2.140.046.200	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Tanjung Sari	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.654.747.650	82	1.694.429.600	84	1.716.540.050	86	1.731.220.100	88	1.776.159.750	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Bakauheni	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.767.794.100	82	1.815.408.520	84	1.881.798.370	86	1.870.953.170	88	1.904.686.300	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Merbau Mataram	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.768.847.800	82	1.783.786.600	84	1.895.391.100	86	1.952.347.800	88	2.026.349.800	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Candipuro	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.543.985.112	82	1.562.185.112	84	1.623.385.112	86	1.654.485.112	88	1.700.046.212	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Rajabasa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.486.794.800	82	1.531.333.950	84	1.547.545.750	86	1.560.745.100	88	1.582.198.400	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Sragi	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.541.106.850	82	1.558.626.150	84	1.606.312.700	86	1.629.165.450	88	1.679.392.550	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Ketapang	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	2.507.458.500	82	2.559.759.250	84	2.597.045.950	86	2.622.046.200	88	2.673.637.200	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Jati Agung	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.388.908.500	82	1.402.060.000	84	1.423.516.000	86	1.457.931.800	88	1.476.614.400	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Palas	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.675.896.150	82	1.690.693.450	84	1.775.758.150	86	1.826.031.200	88	1.866.327.950	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Penengahan	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.919.932.350	82	1.933.055.300	84	2.002.244.300	86	2.038.211.850	88	2.073.647.350	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Katibung	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	2.212.414.350	82	2.206.598.550	84	2.330.414.350	86	2.387.365.600	88	2.459.784.750	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sidomulyo	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	6.090.697.800	82	6.339.929.050	84	6.392.204.950	86	6.393.643.650	88	6.440.199.300	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kalianda	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	1.924.217.800	82	1.971.590.450	84	2.034.905.150	86	2.075.500.000	88	2.128.535.050	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Tanjung Bintang	
Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80	80	80	2.469.192.400	82	2.519.822.150	84	2.607.681.300	86	2.602.811.300	88	2.663.365.900	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Natar	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					181.476.600		212.512.550		270.103.900		315.276.600		344.825.000		Misi 3
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	8.999.900	100	8.999.900	100	15.000.000	100	21.000.000	100	21.000.000	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Way Panji	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	12.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	16.000.000	100	18.000.000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Way Sulan	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	12.000.000	100	12.383.350	100	12.913.300	100	13.330.150	100	13.765.200	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Tanjung Sari	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	20.000.000	100	20.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Bakauheni	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	7.999.700	100	7.999.700	100	12.000.000	100	13.200.000	100	15.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Merbau Mataram	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	12.000.000	100	13.434.200	100	15.000.000	100	16.000.000	100	16.483.400	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Candipuro	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	12.000.000	100	25.000.000	100	28.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Rajabasa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	100	100	4.280.600	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Sragi	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	12.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Ketapang	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	12.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Jati Agung	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Palas	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	12.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Penengahan	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	12.000.000	100	15.000.000	100	18.000.000	100	21.000.000	100	23.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Katibung	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	100	100	11.016.600	100	12.016.600	100	13.516.600	100	13.516.600	100	15.016.600	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sidomulyo	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	4.832.000	100	4.832.000	100	5.327.200	100	5.753.000	100	6.213.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kalianda	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	0	100	9.501.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	24.000.000	100	27.000.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Tanjung Bintang	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat (%)	0	100	100	9.846.800	100	9.846.800	100	16.346.800	100	27.476.850	100	30.346.800	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Natar	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.038.988.855		5.209.017.838		5.913.487.788		6.420.219.795		6.928.017.137		Misi 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	198.027.700	100	232.074.500	100	274.948.700	100	362.992.590	100	388.676.849	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Way Panji	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	148.817.667	100	164.817.500	100	186.817.500	100	188.127.867	100	218.817.500	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Way Sulan	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	181.485.950	100	187.283.750	100	195.299.050	100	201.604.000	100	208.184.150	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Tanjung Sari	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	252.181.450	100	262.000.000	100	311.000.000	100	321.000.000	100	345.000.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Bakauheni	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	251.596.400	100	251.596.600	100	280.000.000	100	285.000.000	100	320.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Merbau Mataram	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	196.604.500	100	200.909.700	100	213.604.500	100	231.691.350	100	227.030.600	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Candipuro	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	166.442.188	100	175.285.338	100	201.858.838	100	216.229.588	100	222.084.188	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Rajabasa	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	212.616.700	100	212.892.700	100	271.958.300	100	280.000.000	100	330.000.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Sragi	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	196.612.650	100	205.000.000	100	220.000.000	100	235.000.000	100	240.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Ketapang	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	218.730.700	100	248.315.200	100	310.457.050	100	336.279.900	100	365.000.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Jati Agung	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	102.844.300	100	130.534.900	100	155.097.600	100	141.535.050	100	159.860.500	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Palas	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	153.052.900	100	171.000.000	100	183.000.000	100	186.000.000	100	225.000.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Penengahan	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	184.321.100	100	184.321.100	100	193.321.100	100	202.321.100	100	211.321.100	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Katibung	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	181.945.250	100	181.945.250	100	181.945.250	100	187.624.550	100	189.945.250	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sidomulyo	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	1.880.581.900	100	1.863.776.500	100	2.122.000.100	100	2.349.923.700	100	2.550.126.200	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kalianda	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	235.165.900	100	245.417.000	100	266.500.000	100	283.919.300	100	296.000.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Tanjung Bintang	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	277.961.600	100	291.847.800	100	345.679.800	100	410.970.800	100	430.970.800	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Natar	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.942.041.050		3.104.545.480		3.312.686.280		3.580.436.730		3.828.493.600		Misi 2
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	132.914.800	100	155.612.200	100	168.612.200	100	168.612.200	100	182.912.200	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Way Panji	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	130.981.100	100	135.981.100	100	143.981.100	100	147.981.100	100	160.981.100	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Way Sulan	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	149.100.000	100	153.863.150	100	160.448.150	100	165.628.000	100	171.033.950	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Tanjung Sari	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	122.000.000	100	141.172.000	100	145.000.000	100	159.000.000	100	157.000.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Bakauheni	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	181.279.400	100	181.280.130	100	191.280.130	100	231.280.130	100	255.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Merbau Mataram	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	127.438.800	100	129.438.800	100	129.438.800	100	127.438.800	100	131.438.800	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Candipuro	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	198.186.200	100	205.186.200	100	215.186.200	100	215.186.200	100	215.186.200	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Rajabasa	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	157.154.500	100	157.314.500	100	164.017.500	100	195.000.000	100	210.000.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Sragi	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	122.431.000	100	137.970.000	100	161.000.000	100	182.000.000	100	182.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Ketapang	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	194.340.000	100	199.476.000	100	209.476.000	100	234.476.000	100	254.476.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Jati Agung	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	103.952.500	100	110.400.000	100	130.364.900	100	165.700.000	100	187.341.550	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Palas	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	127.724.850	100	136.000.000	100	141.000.000	100	141.000.000	100	141.000.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Penengahan	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	235.104.000	100	282.104.000	100	317.759.550	100	335.247.400	100	360.078.400	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Katibung	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	155.835.300	100	160.119.000	100	162.363.800	100	164.126.500	100	185.119.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sidomulyo	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	456.892.100	100	465.444.000	100	505.072.800	100	552.076.000	100	596.242.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kalianda	
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	162.416.300	100	165.500.000	100	180.000.000	100	195.000.000	100	208.000.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Tanjung Bintang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	184.290.200	100	187.684.400	100	187.685.150	100	200.684.400	100	230.684.400	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Natar	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					812.691.650		1.145.727.700		1.103.817.560		1.360.775.520		1.393.587.750		Misi 2
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	52.223.900	100	68.523.900	100	66.023.900	100	94.223.900	100	69.223.900	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Way Sulan	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	58.904.200	100	58.904.200	100	73.875.460	100	63.091.570	100	84.659.350	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Way Panji	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	22.000.000	100	22.702.800	100	23.674.400	100	24.438.650	100	25.236.300	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Tanjung Sari	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	100.700.000	100	100.700.000	100	105.700.000	100	136.700.000	100	142.700.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Bakauheni	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	32.342.600	100	56.319.200	100	46.500.000	100	89.000.000	100	76.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Merbau Mataram	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	65.449.000	100	112.105.000	100	82.093.000	100	83.449.000	100	88.315.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Candipuro	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	21.500.100	100	36.500.100	100	21.500.100	100	36.500.100	100	50.500.100	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Rajabasa	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	44.155.100	100	59.318.200	100	61.472.200	100	75.430.100	100	58.047.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Sragi	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	23.390.300	100	42.500.000	100	37.500.000	100	44.500.000	100	58.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Ketapang	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	27.182.400	100	31.712.800	100	48.000.000	100	70.000.000	100	72.000.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Jati Agung	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	18.406.500	100	22.969.200	100	28.670.300	100	28.870.300	100	29.070.300	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Palas	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	25.319.000	100	45.000.000	100	31.000.000	100	47.000.000	100	40.000.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Penengahan	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	27.931.650	100	40.818.000	100	29.054.800	100	46.258.000	100	61.258.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Katibung	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	60.341.100	100	144.621.900	100	132.842.200	100	159.524.100	100	157.342.200	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sidomulyo	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	172.275.800	100	206.204.600	100	235.633.800	100	257.798.000	100	278.418.200	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kalianda	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	43.830.000	100	53.500.000	100	54.500.000	100	60.000.000	100	65.000.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Tanjung Bintang	
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	16.740.000	100	43.327.800	100	25.777.400	100	43.991.800	100	37.817.400	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Natar	
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					9.858.293.300		10.173.228.950		10.608.621.050		10.951.107.450		11.308.542.800		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.670.827.900		3.788.097.200		3.950.219.550		4.077.747.600		4.210.842.050		Misi 3
Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesbangpol	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	87	88	89	3.670.827.900	90	3.788.097.200	91	3.950.219.550	92	4.077.747.600	93	4.210.842.050	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					810.604.050		836.499.800		872.300.150		900.461.300		929.851.600		Misi 1
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan (%)	100	100	100	810.604.050	100	836.499.800	100	872.300.150	100	900.461.300	100	929.851.600	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.890.959.700		1.951.368.800		2.034.883.150		2.100.576.850		2.169.138.000		Misi 2
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase partisipasi partai politik dalam pemilukada dan Persentase pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik (%)	100	100	100	1.890.959.700	100	1.951.368.800	100	2.034.883.150	100	2.100.576.850	100	2.169.138.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					620.399.000		640.218.400		667.618.350		689.171.600		711.665.600		Misi 2
Meningkatnya Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ORMAS dan LSM dan OKP yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi (%)	100	100	100	620.399.000	100	640.218.400	100	667.618.350	100	689.171.600	100	711.665.600	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					596.553.200		615.610.850		641.957.650		662.682.450		684.311.850		Misi 1
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama (%)	100	100	100	596.553.200	100	615.610.850	100	641.957.650	100	662.682.450	100	684.311.850	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN					2.268.949.450		2.341.433.900		2.441.642.200		2.520.467.650		2.602.733.700		Misi 2

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	MISI
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaporan perkembangan politik (%)	100	100	100	2.268.949.450	100	2.341.433.900	100	2.441.642.200	100	2.520.467.650	100	2.602.733.700	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 (Periode I)

Dalam menjaga konsistensi dengan perencanaan jangka panjang daerah, maka disajikan target pencapaian sasaran visi jangka panjang daerah pada periode I (Tahun 2025-2029) sebagai berikut:

Tabel IV.6 Penetapan Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2030

Sasaran Visi	Periode I					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Pendapatan Perkapita dalam Kategori Tinggi						
a. PDRB per kapita (Rupiah)	55,17	59,25	63,63	68,34	73,39	78,82
b. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,89	5,17	5,47	5,78	6,12	6,47
c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	23,86	24,09	24,31	24,54	25,50	26,00
d. Indeks Ekonomi Biru (Indeks)	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah						
a. Persentase Penduduk Miskin (%)	12,01	11,47	10,96	10,47	10,01	9,56
b. Rasio Gini (Indeks)	0,251	0,250	0,249	0,248	0,246	0,242
c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,20	8,59	8,98	9,38	9,77	10,16
Daya Saing Daerah						
Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,56	3,58	3,60	3,62	3,64	3,66
Kontribusi PDRB Kabupaten Lampung Selatan terhadap Provinsi	12,47	12,60	12,72	12,85	12,98	13,11
Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat						
Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	72,55	72,95	73,36	73,76	74,17	74,58
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,55	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca						
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	9,52	10,09	10,70	11,34	12,02	12,74
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,68	66,93	67,18	67,44	67,69	67,94

Sumber : Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045

4.2.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam bab ini disajikan tabel penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, digunakan indikator kinerja daerah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel IV.7 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74,07	74,40	74,74	75,07	75,41	75,75
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	56,16	56,78	57,40	58,03	58,67	59,32
3.	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	79,36	79,86	80,36	80,86	81,37	81,88
4.	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Nilai Survei Penilaian Integritas	Angka	74,50	75,50	76,50	77,50	78,50	79,50
6.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,63	2,70	2,77	2,84	2,92	2,99
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,28	73,42	73,57	73,72	73,86	74,01
8.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,59	74,78	74,97	75,15	75,34	75,53
9.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,81	7,83	7,85	7,87	7,89	7,91
10.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	64,38	65,02	65,67	66,33	66,99	67,66
11.	Prevalensi Stunting	%	10	9,6	9,4	9,2	9	8,8
12.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,17	5,47	5,78	6,12	6,47
13.	Tingkat Kemiskinan	%	12,02	11,30	10,62	9,99	9,39	8,82
14.	Inflasi	%	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2,5-3,5
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,19	4,06	3,94	3,82	3,50	3,40
16.	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi	%	12,47	12,60	12,72	12,85	12,98	13,11
17.	Persentase Desa Mandiri	%	8,20	8,59	8,98	9,38	9,77	10,16
18.	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	59,19	59,66	60,14	60,62	61,11	61,60
19.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio	23,86	24,09	24,31	24,54	25,5	26
20.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,86
21.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada Level Kabupaten	%	11,81	12,07	12,34	12,61	12,88	13,17
22.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66,68	66,93	67,18	67,44	67,69	67,94
23.	Indeks Risiko Bencana	Angka	185,95	184,46	182,99	181,52	180,07	177,20
24.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,26	3,30	3,35	3,40	3,46	3,51
25.	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	Rasio	6,98	6,80	6,63	6,47	6,31	6,15

4.2.3 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Tabel IV.8 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(Xi)
I.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
A.	Posisi dan Peran Strategis Daerah									
B.	Potensi Sumber Daya Alam									
C.	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup									
D.	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan									
1.	Konsumsi Listrik Perkapita	kWh/Kapita	92,904	104,05	116,54	130,52	146,19	163,73	183,38	
2.	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	*	18,72	20,59	22,65	24,92	27,41	30,15	
3.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,46	86,56	87,89	89,21	90,54	91,86	93,18	
4.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	9,91	9,28	8,65	8,02	7,39	6,76	6,13	
E.	Lingkungan Hidup Berkualitas									
1.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	1,02	1,12	1,29	1,49	1,71	1,97	2,26	
2.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	10,03	10,84	11,70	12,64	13,65	14,74	15,92	
3.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	50	52,50	55,13	57,88	60,78	63,81	67,00	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	69,69	66,68	66,93	67,18	67,44	67,69	67,94	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
F.	Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim									
1.	Indeks Risiko Bencana	Angka	163,89	160,61	157,40	154,25	151,16	148,14	145,18	
2.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	98	107,8	118,58	130,44	143,48	157,83		
3.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	*	9,52	10,09	10,70	11,34	12,02	12,74	
G.	Demografi									
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,27	1,27	1,28	1,29	1,30	1,31	1,32	
2.	Rasio Penduduk	%	104,58	104,53	104,48	104,42	104,37	104,32	104,27	
3.	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	535	556,50	584,33	613,54	644,22	676,43	710,25	
II.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
A.	Kesejahteraan Ekonomi									
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,62	4,89	5,17	5,47	5,78	6,12	6,47	
2.	Tingkat Kemiskinan	%	12,57	12,01	11,47	10,96	10,47	10,01	9,56	
3.	PDRB Per Kapita	Rp Juta	51,37	55,17	59,25	63,63	68,34	73,39	78,82	
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,84	4,65	4,56	4,41	4,32	4,11	4,00	
5.	Indeks GINI	Angka	0,255	0,251	0,250	0,249	0,248	0,246	0,242	
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,15	72,55	72,95	73,36	73,76	74,17	74,58	
B.	Kesehatan Untuk Semua									
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,46	74,59	74,78	74,97	75,15	75,34	75,53	
2.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	42,5	47,0	51,5	56,0	60,5	65,0	69,5	
3.	Prevalensi Stunting	%	10,7	10,0	9,6	9,4	9,2	9,0	8,8	
C.	Pendidikan Berkualitas yang Merata									
1.	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	7,78	8,16	8,57	8,99	9,44	9,92	10,41	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,65	12,83	12,93	13,03	13,13	13,23	13,33	
3.	Angka Literasi/Numerasi	%	55,13	55,68	56,23	56,80	57,36	57,94	58,52	
4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	53	55,65	58,43	61,35	64,42	67,64	71,03	
5.	Indeks Literasi Digital	Angka	45	47,25	49,61	52,09	54,70	57,43	60,30	
D.	Perlindungan Sosial yang Adaptif									
1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	*	82,40	82,48	82,56	82,65	82,73	82,81	
E.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju									
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	*	74,07	74,40	74,74	75,07	75,41	75,75	
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	*	56,16	56,78	57,40	58,03	58,67	59,32	
3.	Indeks Zakat Nasional	Angka	*	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	
F.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inkulsif									
1.	Indeks Perlindungan Anak	Angka	65,82 *							
2.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	63,74	64,38	65,02	65,67	66,33	66,99	67,66	
3.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,394	0,354	0,314	0,274	0,234	0,194	0,154	
4.	Indeks Pembangunan Gender	Angka	90,80	90,99	91,18	91,36	91,55	91,74	91,93	
5.	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	0,4	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,54	
III.	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
A.	Daya Saing SDM									
1.	Angka Ketergantungan	%	*	48,46	48,44	48,41	48,39	48,36	48,34	
B.	Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi									
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,34	68,01	68,69	69,38	70,07	70,78	71,48	
2.	Rasio Kewirausahaan	%	1,31	2,62	2,71	2,80	2,89	2,98	3,08	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	62,37	62,68	63,00	63,31	63,63	63,95	64,26	
4.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	23,5	23,59	23,69	23,78	23,88	23,97	24,07	
5.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,49	1,50	1,50	1,51	1,51	1,52	1,53	
6.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,72	1,82	1,87	1,93	1,99	2,30	2,35	
C.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru									
1.	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	*	59,19	59,66	60,14	60,62	61,11	61,60	
2.	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	*	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	
3.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	*	36,00	36,43	36,87	37,31	37,80	38,37	
D.	Transformasi Digital									
1.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	*	5,80	5,83	5,86	5,89	5,92	5,95	
E.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global									
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	32,58	33,08	33,58	34,08	34,58	35,08	35,58	
2.	Ekspor Barang dan Jasa	%	2,54	3,69	4,39	4,83	5,31	5,85	6,43	
F.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi									
1.	Presentase Desa Mandiri	%	7,81	8,20	8,59	8,98	9,38	9,77	10,16	
2.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	78,23	79,17	80,12	81,08	82,05	83,04	84,03	
3.	Indeks Infrastruktur	Angka	88,93	88,95	88,97	88,99	90,01	90,03	90,05	
G.	Stabilitas Ekonomi Makro									
1.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,32	0,34	0,35	0,37	0,39	0,40	0,42	
2.	Tingkat Inflasi	%	3,52	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2,5-3,5	
3.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	3,65	3,71	3,74	3,76	3,79	3,82	3,83	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
IV.	ASPEK PELAYANAN UMUM									
A.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif									
1.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,08	3,10	3,12	3,14	3,16	3,18	3,20	
2.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,89	3,91	3,93	3,95	3,97	3,99	4,00	
3.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	46,65	47,95	49,48	51,07	52,70	54,39	56,13	
4.	Nilai Survei Penilaian Integritas	Angka	73,91	74,50	75,50	76,50	77,50	78,50	79,50	
B.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial									
1.	Presentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	80,18	80,36	80,54	80,72	80,90	81,08	81,26	
3.	Presentase Capaian Aksi HAM	%	80,75	81,16	81,56	84,82	88,22	91,75	95,42	
4.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	4,5	4,73	4,96	5,21	5,47	5,74	6,03	
5.	Indeks Rasa Aman	Angka		73,00	73,50	74,00	74,05	75,00	75,50	
C.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan									
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,54	3,56	3,58	3,60	3,62	3,64	3,66	

Tabel IV.9 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2025-2030

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Target				
	2026	2027	2028	2029	2030
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Pendidikan					
1. Skor Literasi / Numerasi	56,23	56,8	57,36	57,94	58,52
2. Harapan Lama Sekolah	14,23	14,94	15,69	16,48	17,3
3. Rata Rata Lama Sekolah	8,57	8,99	9,44	9,92	10,41
Kesehatan					
1. Umur Harapan Hidup	74,78	74,97	75,15	75,34	75,53
2. Indeks Keluarga Sehat	47,0	51,5	56,0	60,5	65,0
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	70	80	90	100	100
Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	80,12	81,08	82,05	83,04	84,03
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	4,96	5,21	5,47	5,74	6,03
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100
Sosial					
1. Indeks Kesejahteraan Sosial	50	60	70	80	90
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Tenaga Kerja					
1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	60	70	80	90	100

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Target				
	2026	2027	2028	2029	2030
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67
2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,36	0,34	0,31	0,28	0,25
3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,38	73,52	75,73	76,76	77,14
Pangan					
1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	87,89	89,21	90,54	91,86	93,18
Pertanahan					
1. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	40	50	60	70	80
Lingkungan Hidup					
1. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	40	50	60	70	80
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	80	90	100	100	100
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1. Indeks Desa	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,02	65,67	66,33	66,99	67,66
Perhubungan					
1. Rasio Konektivitas	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35
Komunikasi dan Informatika					
1. Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1. Kontribusi UMKM terhadap PDRB	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Target				
	2026	2027	2028	2029	2030
Penanaman Modal					
1. Persentase Peningkatan Investasi	10%	10%	10%	10%	10%
Kepemudaan dan Olahraga					
1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0,44	0,46	0,49	0,51	0,54
2. Indeks Partisipasi Olahraga	0,64	0,66	0,69	0,71	0,74
3. Persentase Pemuda Aktif dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan	19,76	19,86	19,96	20,06	20,16
4. Wirausaha Muda	21,43	21,53	21,63	21,73	21,83
Statistik					
1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1	1,5	2	2,5	3
Persandian					
1. Indeks SPBE (Terkait Keamanan)	1	1,5	2	2,5	3
Kebudayaan					
1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,16	56,78	57,4	58,03	58,67
Perspustakaan					
1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	58,43	61,35	64,42	67,64	71,03
Kearsipan					
1. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Kelautan dan Perikanan					
1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	110,54	110,81	111,09	111,37	111,65
2. Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	98,06	98,50	98,94	99,49	100,04

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Target				
	2026	2027	2028	2029	2030
Pariwisata					
1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8
Pertanian					
1. Nilai Tukar Petani (NTP)	125,00	125,50	126,00	126,50	127,00
Kehutanan					
1. Persentase Tutupan Lahan	40	38	36	34	32
Energi dan Sumber Daya Mineral					
1. Porsi EBT dalam Baruan Energi	36,43	36,87	37,31	37,8	38,37
2. Rasio Elektrifikasi	100	100	100	100	100
Perdagangan					
1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	2	3	4	5	6
Perindustrian					
1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	23,86	24,09	24,31	24,54	25,502
Transmigrasi					
1. Pendapatan PerKapita di Wilayah Transmigrasi	Rp30.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp75.000,00	Rp3.750,00	Rp187,50
UNSUR PENDUKUNG					
Sekretariat Daerah					
1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	AA	AA
Sekretariat DPRD					
1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	70	80	90	100	100
UNSUR PENUNJANG					
Perencanaan					

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Target				
	2026	2027	2028	2029	2030
1. Indeks Perencanaan dan Pembangunan Daerah	70	75	80	85	100
Keuangan					
1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kepegawaian					
1. Indeks Profesionalitas ASN	70	80	90	100	100
Pendidikan dan Pelatihan					
1. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	70	80	90	100	100
Penelitian dan Pengembangan					
1. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	70	80	90	100	100
UNSUR PENGAWASAN					
Pengawasan					
1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
Kesatuan Bangsa dan Politik					
1. Indeks Demokrasi Indonesia	79,86	80,36	80,86	81,37	81,88
2. Indeks Harmoni Indonesia	80	90	100	100	100

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Adapun KUA/PPAS berpedoman pada RKPD sebagai landasan penyusunan RAPBD setiap tahun anggaran. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;

- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah;
- e. Bupati Lampung Selatan selaku kepala daerah menginstruksikan jajarannya untuk mempublikasikan dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, mengingat dokumen RPJMD merupakan dokumen yang masuk sebagai kategori informasi publik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14. Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Pasal 371 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan menteri.

Demikian, penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan menjadi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 dan diharapkan dapat mewujudkan **“Mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

5.3 Manajemen Risiko

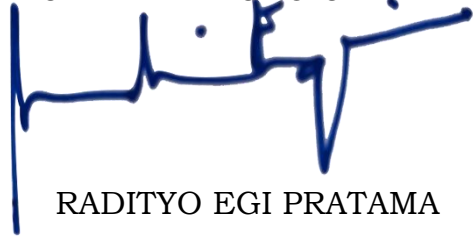
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional bahwa penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh entitas MRPN pengelola keuangan negara. MRPN diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- 4. Meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional;
- 5. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara; dan
- 6. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Dalam upaya menjamin perwujudan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 serta mendukung pencapaian prioritas

Provinsi Lampung dan Nasional maka perlu adanya kerangka regulasi dan kebijakan daerah yang mengacu pada MRPN. Berkenaan dengan hal tersebut, maka manajemen risiko pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 akan ditindaklanjuti melalui penerapan manajemen risiko pada setiap tahapan perencanaan pembangunan tahunan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA